



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) TAHUN 2019**



PEMERINTAH KOTA PALOPO

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 22 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALOPO TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 346 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008, tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 25);
26. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Palopo ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;

2. Walikota adalah Walikota Palopo;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Perubahan dokumen Perencanaan Daerah Kota Palopo Tahun 2019;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disingkat APBD Kota Palopo adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan PERDA.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Kota Palopo pada Tahun Anggaran 2019;
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan Visi, Misi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018-2023.

Pasal 3

Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2019 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Palopo.

Pasal 4

Uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang dalam Naskah Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal, 17 Juli 2019

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 17 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,


JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2019 NOMOR 22

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
	1.3.1. RKP dan Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2019.....	I-5
	1.3.2. RPJMD Kota Palopo Tahun 2018– 2023 dengan Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2019	I-5
	1.3.3. Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2019, Renja Perangkat Daerah dan KUA/PPAS.....	I-5
	1.3.4. Tahapan Penyusunan Perubahan RKPD	I-6
	1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
	1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-7
BAB II	EVALUASI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	II-9
	2.1. Evaluasi Tujuan dan Sasaran Daerah sampai dengan Tahun 2018 .	II-9
	2.2. Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	II-51
	2.2.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal	II-77
	2.2.1.1. Bidang Urusan Pendidikan	II-77
	2.2.1.2. Bidang Urusan Kesehatan	II-90
	2.2.1.3. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-95
	2.2.2. Capaian Kinerja SDG's/TPB	II-98
	2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-119
	2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-124
	2.4.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-124
	2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-134
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-150
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-150
	3.1.1. Pertumbuhan dan Komposisi Ekonomi	III-150
	3.1.2. Inflasi	III-154
	3.1.3. Gini Ratio	III-155

	3.1.4. Ketenagakerjaan	III-156
	3.1.5. Kemiskinan	III-156
	3.1.6. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah	III-156
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-159
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-180
	4.1. Tujuan dan Sasaran	IV-186
	4.2. Isu Strategis Pembangunan Tahun 2019.....	IV-225
	4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019	IV-225
	4.3.1. Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2019	IV-225
	4.3.1.1. Prioritas I Tahun 2019.....	IV-226
	4.3.1.2. Prioritas II Tahun 2019.....	IV-227
	4.3.1.3. Prioritas III Tahun 2019.....	IV-227
	4.3.1.4. Prioritas IV Tahun 2019.....	IV-227
	4.3.1.5. Prioritas V Tahun 2019.....	IV-228
	4.3.1.6. Prioritas VI Tahun 2019.....	IV-228
	4.4. Pokok – Pokok Pikiran DPRD	IV-252
	4.5. Inovasi Layanan Publik 2019	IV-253
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-257
	5.1. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2019.....	V-257
BABA VI	P E N U T U P	VI-412

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ...	II-11
2. Tabel 2.2.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja daerah	II-12
3. Tabel 2.3.	Meningkatkan pelayanan kependudukan, inovasi aparaturnya serta kepatuhan pada standar pelayanan public	II-15
4. Tabel 2.4.	Meningkatkan rasio anggaran APBD yang Lebih Pro Rakyat	II-18
5. Tabel 2.5.	Meningkatkan Kecukupan Pangan yang Berkelanjutan	II-20
6. Tabel 2.6.	Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan	II-22
7. Tabel 2.7.	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	II-23
8. Tabel 2.8.	Meningkatkan Akses dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pendidikan	II-24
9. Tabel 2.9.	Meningkatkan kualitas Tenaga Kependidikan	II-25
10. Tabel 2.10.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pendidikan	II-26
11. Tabel 2.11.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	II-28
12. Tabel 2.12.	Meningkatkan Akses dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesehatan	II-31
13. Tabel 2.13.	Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Kesehatan	II-33
14. Tabel 2.14.	Meningkatkan kualitas pusat ekonomi dan usaha produktif masyarakat	II-34
15. Tabel 2.15.	Meningkatkan industri rumah tangga produk pangan dan non pangan yang berdaya saing	II-35
16. Tabel 2.16.	Meningkatkan Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD	II-36
17. Tabel 2.17.	Meningkatkan Dukungan Infrastruktur Daerah	II-37
18. Tabel 2.18.	Meningkatkan Nilai Investasi	II-38
19. Tabel 2.19.	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja yang Sesuai dengan Lapangan Pekerjaan	II-38
20. Tabel 2.20.	Menurunnya Luas Wilayah yang Terdampak Banjir	II-39
21. Tabel 2.21.	Meningkatnya Kualitas Sanitasi dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	II-41

22. Tabel 2.22.	Meningkatnya Ikatan Sosial Pemerintah dan Masyarakat ...	II-44
23. Tabel 2.23.	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	II-46
24. Tabel 2.24.	Berkembangnya Budaya Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal	II-47
25. Tabel 2.25.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah 2018	II-48
26. Tabel 2.26.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Palopo s.d. 2018	II-52
27. Tabel 2.27.	Capaian SPM Pendidikan Kota Palopo Tahun 2016-2018 ..	II-77
28. Tabel 2.28.	Capaian SPM Kesehatan Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-90
29. Tabel 2.29.	Capaian SPM Perumahan & Pemukiman Kota Palopo Tahun 2016-2018	II-95
30. Tabel 2.30.	Capaian Indikator Kinerja SDGs/TPB Kota Palopo Tahun 2016-2017	II-98
31. Tabel 2.31.	Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II 2019	II-121
32. Tabel 2.32.	Permasalahan Daerah yang Berhubungan Prioritas Pembangunan Daerah	II-125
33. Tabel 3.1.	Pertumbuhsn Ekonomi Kota Palopo Tahun 2014-2-17	III-151
34. Tabel 3.2.	Perbandingan PDRB Harga Berlaku dan Konstan Kota Palopo Tahun 2014-2017	III-151
35. Tabel 3.3.	PDRB Harga Berlaku Kota Palopo Tahun 2014 – 2017	III-152
36. Tabel 3.4.	Pertumbuhan Menurut Sektor Kota Palopo Tahun 2014-2017	III-153
37. Tabel 3.5.	Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2014-2017	III-155
38. Tabel 3.6.	Gini Rasio Kota palopo Tahun 2014-2018	III-156
39. Tabel 3.7.	Proyeksi Makro Ekonomi Nasional, Propinsi Sulsel dan Kota Palopo Tahun 2019	III-158
40. Tabel 3.8.	Uraian Proyeksi Perubahan Pendapatan Kota Palopo Tahun 2019	III-160
41. Tabel 3.9.	Perubahan Proyeksi Belanja Kota Palopo Tahun Anggaran 2019	III-171
42. Tabel 3.10.	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2019	III-177
43. Tabel 4.1.	Sinkronisasi Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, dan RKPD Kota Palopo Tahun 2019	IV-182
44. Tabel 4.2.	Matriks Keterkaitan Sasaran Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Palopo Tahun 2019	IV-183

45. Tabel 4.3.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023	IV-187
46. Tabel 4.4.	Perubahan Indikator Kinerja Utama Perubahan RKPD 2019	IV-191
47. Tabel 4.5.	Perubahan/Penyesuaian Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perubahan RKPD 2019	IV-193
48. Tabel 4.6.	Sinkronisasi dan Keterkaitan Prioritas Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kota Palopo Tahun 2019	IV-225
49. Tabel 4.7.	Dukungan Program/Kegiatan Pemerintah Kota Palopo Terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Tahun 2019	IV-229
50. Tabel 4.8.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dengan Dukungan Program Pembangunan RKPD Tahun 2019.....	IV-247
51. Tabel 5.1.	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Palopo Tahun 2019	V-258

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 1.1. Tahapan Tata Cara Penyusunan RKPD	I-6
2.	Gambar 2.1. Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo Tahun 2017, dimana Kota Palopo mendapatkan predikat WTP	II-11
3.	Gambar 2.2. Coaching Clinic SAKIP Kota Palopo sebagai upaya dan komitmen Pemerintah untuk terus meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	II-13
4.	Gambar 2.3. Pemerintah Kota Palopo menerima penghargaan dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas Tercapainya Universal Health Coverage (UHC), Yang diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo	II-32
5.	Gambar 2.4. Salah satu wisata alam latuppa di Kota Palopo	II-37
6.	Gambar 2.5. Tong sampah pada pusat niaga masyarakat di Kota Palopo	II-43
7.	Gambar 2.6. Pelayanan Angkutan Sampah di Kota Palopo	II-44
8.	Gambar 2.7. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Dalam Rapat Penanganan Konflik Mancani 2014	II-46

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah dan nasional. Perencanaan Pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip an, responentif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun APBD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mengacu pada RKP (Rencana Kerja Pemerintah), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan melalui serangkaian tahapan dan tatacara yang antara lain meliputi:

- (a) Penyusunan rancangan awal Perubahan RKPD,
- (b) Penyusunan rancangan Perubahan RKPD,

- (c) Perumusan rancangan akhir Perubahan, serta
- (d) Penetapan Perubahan RKPD.

Dalam upaya pencapaian sasaran Pembangunan Daerah penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019 Kota Palopo, mengacu pada tema yaitu:

“Pemerataan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas dan Berkelanjutan”

Dengan ditetapkan tema pembangunan Kota Palopo tersebut maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2019 harus realistis dan obyektif dengan mempertimbangkan potensi isu permasalahan hasil kajian dan evaluasi, capaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya serta tingkat kepentingan berdasarkan usulan Musrenbang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008, tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
22. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;
23. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kota Palopo 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2023 ;

26. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.3.1. RKP dan Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2019

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan menyelaraskan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.

Penyusunan RKPD 2019 Kota Palopo memperhatikan isu strategis dalam RKP Nasional dan sesuai dengan perkembangan kondisi daerah sehingga terjadi keselarasan antara pembangunan pusat dan daerah. Pembangunan Daerah sendiri sejatinya merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten/Kota harus mengacu kepada RKP.

1.3.2. RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 Dengan Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2019

Penyusunan Perubahan RKPD 2019 Kota Palopo didasarkan pada RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 dan RPJMN 2015 - 2019 serta RKP 2019. Penyusunan Perubahan RKPD 2019 merupakan bagian dari RPJMD periode kedua, dimana konsistensi antara semua dokumen perencanaan harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD 2019.

1.3.3. Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2019, Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS

Perubahan Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja-PD lingkup Pemerintah Kota Palopo mengacu pada Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2019.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 selanjutnya, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.3.4. Tahapan Penyusunan Perubahan RKPD

Tahapan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini merupakan hasil kinerja Tim melalui proses yang sistematis yaitu : Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, dan Perumusan Rancangan Akhir RKPD serta Penetapan RKPD :



Gambar 1.1 Tahapan Tata Cara Penyusunan RKPD

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2019 sebagai upaya mewujudkan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan di Kota Palopo.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2019 ini adalah :

1. Menyediakan pedoman dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019;
2. Menjaga sinergi perencanaan pembangunan tahunan antar Pusat, dan Daerah serta menjabarkan sasaran dalam RPJMD ke dalam rencana yang lebih operasional;
3. Menjaga keselarasan antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka panjang daerah Kota Palopo dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menyediakan tolak ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
 - 1.3.1. RKP dan RKPD Kota Palopo Tahun 2019
 - 1.3.2. RPJMD Kota Palopo tahun 2018-2023 dengan Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2019
 - 1.3.3. Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2019, Perubahan Renja OPD Kota Palopo dan KUA-PPAS
 - 1.3.4. Tahapan Penyusunan Perubahan RKPD
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

BAB II EVALUASI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Tujuan dan Sasaran Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Isu Strategis Pembangunan Tahun 2019

4.3. Prioritas Pembangunan Daerah

4.4. Pokok – Pokok Pikiran DPRD

4.5. Inovasi Layanan Publik Daerah 2019

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Tujuan dan Sasaran Daerah Sampai dengan Tahun 2018

Tahun 2018 adalah pelaksanaan RPJMD Pemerintah Kota Palopo tahun ke lima, dalam upaya pencapaian tujuan secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran yang menunjukkan keberhasilan guna mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2013 - 2018.

Kinerja yang diukur dalam LAKIP ini didasarkan atas dokumen Revisi RPJMD tahun 2013-2018, Revisi Renstra dan Penetapan Kinerja Daerah Kota Palopo tahun 2018. Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Palopo berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari persentase capaian hasil kinerja sasaran, yaitu dengan tingkat capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar **87,50%** yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur serta teruji kelayakannya.

Dengan mempedomani Indikator Kinerja Utama sebagai yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Palopo tentang Indikator Kinerja Utama, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut :

- Misi I terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 5 indikator kinerja utama :
Capaian kinerjanya, sebanyak 3 indikator sasaran atau 60% kategori Sangat Tinggi (melampaui target), 2 indikator sasaran atau 40% kategori Sangat Rendah (tidak mencapai target).
- Misi II terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja :
Capaian kinerjanya, sebanyak 2 indikator sasaran atau 100% kategori Sangat Tinggi (melampaui target).
- Misi III terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja :

Capaian kinerjanya, sebanyak 1 indikator sasaran atau 33,33% kategori Sangat Tinggi (melampaui target), 2 indikator sasaran atau 66,67% kategori tinggi (mencapai target).

- Misi IV terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 12 indikator kinerja :
Capaian kinerjanya, sebanyak 12 indikator sasaran atau 100% kategori Sangat Tinggi (melampaui target).
- Misi V terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 6 indikator kinerja :
Capaian kinerjanya, sebanyak 5 indikator sasaran atau 83,33% kategori Sangat Tinggi (melampaui target), dan 1 indikator sasaran atau 16,67% kategori tinggi (mencapai target).
- Misi VI terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 7 indikator kinerja :
Capaian kinerjanya, sebanyak 4 indikator sasaran atau 57,14% kategori Sangat Tinggi (melampaui target), 3 indikator sasaran atau 42,86% kategori Sangat Rendah (tidak mencapai target).
- Misi VII terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja :
Capaian kinerjanya, sebanyak 2 indikator sasaran atau 50% kategori Sangat Tinggi (melampaui target), 1 indikator sasaran atau 25% kategori tinggi (mencapai target) dan 1 indikator sasaran atau 25% kategori Sangat Rendah (tidak mencapai target).
- Misi VIII terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 6 indikator kinerja :
Capaian kinerjanya, sebanyak 5 indikator sasaran atau 83,33% kategori Sangat Tinggi (melampaui target), 1 indikator sasaran atau 16,67% kategori Sangat Rendah (tidak mencapai target).
- Misi IX terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 3 indikator kinerja :
Capaian kinerjanya, sebanyak 3 indikator sasaran atau 100% kategori Sangat Tinggi (melampaui target).

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 24 sasaran yang mencakup 48 indikator sasaran, diketahui bahwa 37 indikator sasaran atau 77,08% Sangat Tinggi, 5 indikator sasaran atau 10,42% Tinggi, 0 indikator sasaran atau 0,00% Cukup, 0 indikator sasaran atau 0,00% Kurang, dan 6 indikator sasaran atau 12,50% kinerjanya belum bisa diukur karena nilainya belum dirilis atau Sangat Rendah. Rata-rata

realisasi capaian kinerja mencapai **87,50%** atau bermakna Tinggi. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2018 “**TINGGI**”.

Sesuai **Penetapan Kinerja Tahun 2018**, berikut adalah capaian realisasi kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018 :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis 1 :

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel (T1)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah (S1)	Opini Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian	Belum Dirilis	0
RATA RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN				0,00%



Gambar 2.1. Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo Tahun 2017, dimana Kota Palopo mendapatkan predikat WTP.

Capaian kinerja sasaran strategis 1 belum diketahui, sebab saat Laporan ini disusun, Badan Pemeriksa Keuangan sedang melakukan audit laporan keuangan Pemerintah Kota Palopo. Tetapi tahun 2017, predikat laporan keuangan Pemerintah Kota Palopo berada pada predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Palopo dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Jika pada tahun 2013, predikat laporan keuangan pemerintah Kota Palopo berada pada posisi **disclaimer**, sejak tahun 2015, predikat Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kota Palopo berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian alias WTP. Pun demikian dengan tahun 2016 dan tahun 2017, BPK kembali memberikan predikat WTP atas Laporan Pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Palopo.

Meski target pengelolaan keuangan tersebut berhasil dicapai pemerintah Kota Palopo, untuk tetap mempertahankan prestasi ini, Pemerintah Kota Palopo akan tetap berupayameningkatkan dan mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan melaksanakan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

- Melatih dan memperbanyak pelatihan pengelolaan keuangan dan aset bagi aparatur yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset di tingkat OPD
- Meningkatkan pendampingan dan kualitas asistensi penyusunan laporan keuangan dan laporan pengelolaan aset pada semua OPD.

Pemerintah Kota Palopo berharap mampu terus ikut berkontribusi dalam mencapai salah satu indikator sasaran nasional (Indikator Sasaran RPJMN) yakni 65% Pemerintah Kota berhasil meraih Opini WTP atas Laporan Keuangan pada tahun 2019 nanti.

Tabel 2.2. Sasaran Strategis 2 :

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel (T1)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja daerah (S2)	Hasil Evaluasi LAKIP	B	CC	75
RATA RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN				75,00%



Gambar 2.2 Coaching Clinic SAKIP Kota Palopo sebagai upaya dan komitmen Pemerintah untuk terus meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2018, belum terpenuhi, sebab Kota Palopo masih mendapatkan predikat CC dengan nilai sebesar 50.03. Meski demikian nilai predikat SAKIP Pemerintah Kota Palopo terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 nilai SAKIP Kota Palopo berada pada angka 33.19, Tahun 2016 meningkat menjadi 40.06 dan Tahun 2017 kembali meningkat menjadi 50. Meskipun kondisi ini belum memenuhi target sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Palopo.

Peningkatan ini memang belum significant. Beberapa persoalan yang melatar belakangi kondisi ini adalah :

- Konsistensi antara dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kota Palopo (RPJMD) dengan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah (Renstra) masih cukup lemah.
- Ketepatan rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah cukup banyak yang tidak konsisten dan bersinergi dengan rumusan tujuan sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Palopo.
- Penetapan dan perencanaan kinerja antara perangkat daerah belum berbasis hasil atau outcome.
- Kompetensi dan persoalan kualitas sumber daya manusia khususnya pada unit kerja perencanaan baik pada level kota maupun perangkat daerah yang belum memadai.
- Lahirnya beberapa Organisasi perangkat daerah baru di pemerintahan Kota Palopo yang menyebabkan sejumlah OPD baru tersebut masih kesulitan merumuskan perencanaan kinerja OPDnya yang konsisten dan sinergi dengan RPJMD Kota Palopo.

Meski demikian, untuk meningkatkan kualitas SAKIP Kota Palopo pada tahun anggaran 2018, Pemerintah Kota tetap berupaya melaksanakan beberapa hal untuk mewujudkan target tersebut, sekaligus menindaklanjuti Rekomendasi yang disampaikan Kemenpan RB, adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki kualitas perencanaan kinerja melalui :

- Pemerintah Kota Palopo telah melaksanakan perubahan dokumen RPJMD 2013-2018 yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2018. Dimana di dalamnya dilakukan upaya untuk meringkas dan menyederhanakan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Palopo Tahun 2013-2018.
- Pemerintah Kota Palopo juga telah menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Peraturan Walikota Palopo.
- Melaksanakan reviu LAKIP Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh APIP Kota Palopo.
- Meminta sejumlah OPD untuk menyesuaikan Renstranya dengan perubahan RPJMD Kota Palopo.
- Perangkat daerah Kota Palopo telah menyusun dan membuat perjanjian kinerja mulai dari esalon II, sampai level esalon III dan IV secara berjenjang.
- Melakukan asistensi dan verifikasi anggaran sebagai upaya melakukan agar anggaran dalam APBD Kota Palopo dialokasikan dengan fokus pada pencapaian sasaran strategis pembangunan.

2. Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja melalui :

- Melakukan pemantauan atas realisasi perjanjian kinerja
- Melaksanakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pada setiap triwulan sepanjang tahun 2018, sebagai salah satu cara pengendalian kinerja perangkat daerah.

3. Memperbaiki kualitas pelaporan kinerja melalui :

- Berupaya menyusun laporan kinerja disusun sesuai dengan kriteria pelaporan kinerja yang baik
- Melengkapi dokumen LAKIP Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018 ini dengan hasil reviu oleh APIP Kota Palopo.

4. Memperbaiki sistem evaluasi kinerja internal melalui :

- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur perencanaan dengan mengikutsertakan beberapa aparatur dalam diklat perencanaan substantif maupun fungsional di bidang perencanaan serta meminta pendampingan tenaga ahli dari akademisi yang berkompetensi serta dari Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenaga Ahli dari

Universitas Hasanuddin dalam melaksanakan perubahan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pemerintah Kota Palopo.

Beberapa program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo pada Tahun 2018 untuk mencapai hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah,
2. Program perencanaan pembangunan daerah,
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,
4. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan capaian realisasi kinerja sebagai berikut :

Beberapa hal yang masih menjadi catatan dalam upaya peningkatan kualitas SAKIP Kota Palopo adalah :

- ❖ Terus berupaya meningkatkan kualitas SDM aparatur yang menangani fungsi perencanaan dengan mengikutsertakan dalam BinteK dan Diklat Perencanaan dan meningkatkan jumlah pejabat fungsional perencana sampai ke tingkat OPD.
- ❖ Meningkatkan supervisi dan pendampingan terhadap penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada tingkat OPD secara sinergis dan berkelanjutan.

Untuk indikator sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo berharap mampu memberikan kontribusi dalam mencapai salah satu indikator sasaran nasional (Indikator Sasaran RPJMN) yakni 50% Instansi Pemerintah memiliki Predikat Kinerja Baik (Skor B) pada akhir tahun 2019 nanti.

Tabel 2.3. Sasaran Strategis 3 :

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel (T1)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan pelayanan kependudukan, inovasi aparatur	Status/Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik	Hijau	Hijau	100%

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel (T1)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
serta kepatuhan pada standar pelayanan publik (S3)	Kategori Laporan LPPD	Baik	Baik	100%
	Persentase Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan	82	78.82	96.12%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN				98.71%

- **Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik**, kinerja Pemerintah Kota Palopo menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan yakni berhasil keluar dari zona merah menuju ke zona hijau dalam hal pelayanan publik. Sekaligus **memenuhi** target yang ada dalam RPJMD Kota Palopo. Sampai dengan LKJ ini disusun, Ombudsman RI belum merilis penilaian tentang tingkat kepatuhan bagi Kota Palopo tahun 2018.

Namun pada tahun 2017, Komisi Ombudsman Republik Indonesia pada 5 Desember 2017 memberikan penghargaan bagi Kota Palopo yakni “Ombudsman Award 2017” dengan **predikat kepatuhan tinggi**. Pemerintah Kota Palopo berhasil meraih nilai 81,80 yang berarti masuk dalam kategori hijau (tinggi).

- **Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintah** yang diukur dengan Indikator LPPD Tahun 2018 belum ada nilai. Namun untuk tahun 2017, Kategori Laporan LPPD Kota Palopo mendapat predikat **baik** (tinggi) atas kinerja capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- **Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan**, yang realisasi kinerjanya 2018 pada angka 106% atau sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang berada pada angka 116%, merupakan nilai akumulasi rata-rata atas :
- Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk :

Angka ini dihitung dengan rumus :

Jumlah Penduduk yang Berusia $17 \leq$ yang ber KTP dibagi Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia $17 \leq$ atau Telah Menikah.

Jumlah Penduduk yang Berusia $17 \leq$ yang ber KTP = 122.053

Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia $17 \leq$ atau Telah Menikah. = 130.843

Sehingga rasio penduduk ber KTP Kota Palopo sampai dengan tahun 2018 adalah 93.28% artinya rata-rata dari 100 penduduk Kota Palopo yang wajib KTP (baik karena umur atau karena sudah menikah) sebanyak 93-94 orang diantaranya telah memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2017, dimana rasio penduduk ber KTP hanya pada angka 78.41%.

- Rasio bayi berakte kelahiran :

Angka ini dihitung dengan rumus :

Jumlah Bayi yang Memiliki Akte Kelahiran dibagi Jumlah Bayi yang Lahir dikali 100%

Jumlah Bayi yang Lahir 2018 : 1569 Orang

Jumlah Bayi yang Memiliki Akte Kelahiran : 1.323 Orang

Sehingga persentase bayi lahir pada tahun 2018 dan telah memiliki akte kelahiran sebesar 84.32%.

Kondisi ini jauh membaik dibandingkan tahun 2017, dimana hanya 60.48% bayi yang memiliki akta kelahiran.

- Rasio pasangan berakte nikah :

Angka ini dihitung dengan rumus :

Jumlah Pasangan Nikah yang ber-akte nikah dibagi Jumlah Seluruh Pasangan Nikah Tahun n

Jumlah Seluruh Pasangan Nikah Tahun 2018 : 38.930 Pasang

Jumlah pasangan yang memiliki akta perkawanian = 17.274

Sehingga persentase pasangan berakte nikah pada tahun 2018 yang telah memiliki akte nikah sebesar 44%.

Kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun 2017 dimana hanya 38 dari 100 pasangan nikah yang memiliki akta nikah atau hanya berada pada angka 38%.

- Tingkat kepemilikan KTP ber NIK :

Angka ini dihitung dengan rumus :

Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan dibagi dengan jumlah penduduk yang wajib KTP

Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan = 122.053

Jumlah Penduduk Wajib KTP atau Berusia Lebih dari 17 Tahun, atau Sudah/Pernah Menikah = 130.843

Sehingga pada tahun 2018, tingkat kepemilikan KTP ber NIK di Kota Palopo sebesar 93.28%. Artinya rata-rata per 100 orang penduduk yang wajib KTP di Kota Palopo, pada tahun 2018, 93 orang diantaranya telah memiliki KTP yang ber NIK.

Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2017 dimana hanya 82.56% penduduk Kota Palopo yang memiliki KTP ber NIK.

Tabel 2.4. Sasaran Strategis 4 :

Tujuan 2 : Mewujudkan pembangunan yang lebih aspiratif dan partisipatif berorientasi kebutuhan masyarakat (T2)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan rasio anggaran APBD yang Lebih Pro Rakyat (S4)	Rasio Belanja Publik Terhadap Total APBD (%)	≥50	57.58	115%
	Rasio kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran (%)	98	93.55	95.50%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA				105.25%

Rasio Belanja Publik Terhadap Total APBD

Kinerja pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kota Palopo dari tahun ke tahun juga menunjukan kemajuan **yang cukup baik**. Selain predikat pengelolaan keuangan yang sudah Wajar Tanpa Pengecualian, Kota Palopo

juga berhasil mengalokasi belanja yang lebih besar ke belanja langsung dibandingkan belanja tidak langsung.

Pemerintah Kota Palopo berhasil menekan alokasi belanja tidak langsung yang lebih besar dibandingkan belanja langsung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Pada tahun 2018, alokasi belanja langsung dalam APBD 2018 Kota Palopo sebesar 57.58%, belanja tidak langsung hanya 42.42%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi anggaran pada tahun 2018 diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan atau untuk belanja public. Tahun 2017 pun demikian. Alokasi belanja langsung berada pada angka 58.92% sementara belanja tidak langsung hanya pada angka 41.08%. Alokasi belanja langsung yang lebih besar baru berhasil dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo sejak 2016. Ditahun 2013-2015, belanja tidak langsung dalam APBD Kota Palopo selalu lebih besar.

Ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Palopo serius untuk menata pengelolaan keuangan daerah sehingga lebih pro pada rakyat dalam mewujudkan keinginan pemerintah daerah yakni mewujudkan APBD yang lebih pro rakyat.

Rasio Belanja Publik Terhadap APBD

Tahun 2018 dihitung dengan cara :

Jumlah Belanja Langsung dibagi Total APBD dikali 100%

$= \frac{\text{Rp. 565.990.971.307}}{\text{Rp. 982.957.077.365}} \times 100\%$

Rp. 982.957.077.365

$= 57.58\%$

Jumlah Belanja Tidak Langsung dibagi Total APBD dikali 100%

$= \frac{\text{Rp. 416.966.106.058}}{\text{Rp. 982.957.077.365}} \times 100\%$

Rp. 982.957.077.365

$= 42.02 \%$

Persentase capaian Pemerintah Kota Palopo ini diakui masih berada di bawah target nasional yang menetapkan rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota angka maksimal 35% pada tahun 2019 mendatang. Olehnya pemerintah Kota Palopo optimis, dalam tiga tahun ke depan, Kota Palopo

mampu memenuhi target nasional tersebut dengan melihat trend pengelolaan APBD Kota Palopo yang terus mampu mengefisienkan belanja aparatur.

Rasio kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran dihitung dengan melihat :

Tingkat kesesuaian antara Program yang ada di Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Program yang ada di dalam dokumen Anggaran (APBD) Kota Palopo Tahun 2018.

Dalam dokumen RKPD Pemerintah Kota Palopo 2018 terdapat sebanyak 403 Program (termasuk program urusan wajib) yang dilaksanakan oleh 49 Perangkat Daerah Kota Palopo, kemudian dalam APBD Kota Palopo 2018 terdapat sebanyak 377 Program (termasuk program urusan wajib). Sehingga realisasi kinerja untuk indikator ini 93.55%. sehingga kesesuaian program antara RKPD dan APBD tahun 2018 sebesar 93.55%. Capaian kinerja tahun 2018 ini lebih baik dibandingkan tahun 2017, dimana tingkat konsistensi program RKPD terhadap APBD hanya pada angka 76.36%.

Tabel 2.5. Sasaran Strategis 5

Tujuan 3 :Mewujudkan kecukupan, dan keamanan pangan yang berkelanjutan (T3)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Kecukupan Pangan yang Berkelanjutan (S5)	Persentase Ketersediaan Bahan Pangan Utama (%)	90	178.17	197.97%
	Persentase Cadangan Pangan (%)	90	75.29	83.66%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA				140.82%

Ketersediaan Bahan Pangan Utama Kota Palopo :

Angka ini diperoleh menggunakan rumus :

Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) dibagi jumlah konsumsi riil dikali 100%

Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) : 32.664.000 Kg
Jumlah Konsumsi Riil : 18.332.550 Kg
Persentase ketersediaan : 178.17%

Kondisi ini didukung produksi padi Kota Palopo Tahun 2018 mencapai 32.664 Ton dari target yang ditetapkan sebesar 33.500 Ton. Untuk tingkat produktifitas padi, 6.39 Ton/Ha, berada diatas target 2018 yang berada pada angka 5.98 Ton/Ha.

Produksi padi tahun 2018 ini berada sedikit dibawah angka produksi 2017 yang berada pada angka 32.682 Ton, namun produktifitasnya lebih membaik dibandingkan tahun 2017 yang berada pada angka 6.32 Ton/Ha.

Kinerja Komoditas pangan lainnya yakni jagung, produksinya tahun 2018 mencapai 3.722 Ton atau hanya 59.08% dari target yang ditetapkan dengan produktifitas 6.97 Ton/Ha atau berada diatas target produktifitas yang berada pada angka 6.81 Ton/Ha.

Produksi jagung ini lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang berada pada angka 5.303 Ton, demikian pula dengan produktifitasnya yang lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang berada pada angka 7,04 Ton/Ha.

Untuk mengakselerasi Ketersediaan Pangan Utama di Kota Palopo Tahun 2018, dilaksanakan beberapa strategi yakni pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dan melaksanakan diversifikasi tanaman. Strategi lain adalah meningkatkan kualitas penyuluhan, menyediakan sarana dan prasarana pertanian dari hulu sampai hilir dan menerapkan teknologi pertanian tepat guna.

Cadangan Pangan Utama Kota Palopo 2018:

Angka ini diperoleh menggunakan rumus :

Jumlah cadangan pangan kabupaten/kota dibagi 100 Ton

Jumlah cadangan pangan Kota Palopo = 75.29 Ton

Koefisien (100 Ton) = 100 Ton

Persentase cadangan pangan 2018 = 75.29 %

Cadangan pangan utama Kota Palopo tahun 2018 lebih baik dibandingkan tahun 2017 yang berada pada angka 72%

Tabel 2.6. Sasaran Strategis 6

Tujuan 3 :Mewujudkan kecukupan, dan keamanan pangan yang berkelanjutan (T3)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan (S6)	Persentase Pangan Aman (%)	80	72.22	90.28%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN 6				90,28%

Persentase Pangan Aman:

Angka ini diperoleh menggunakan rumus :

Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah sampel pangan yang diambil di pedagang pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu

Jumlah sampel pangan yang aman = 13 Komoditas Pangan

Jumlah sampel pangan yang diambil = 18 Komoditas Pangan

Persentase keamanan pangan = 72.22 %

Capaian ini lebih rendah dibandingkan tahun 2017 dimana tingkat keamanan pangan di Kota Palopo pada angka 82%. Untuk mencapai sasaran ini Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo melaksanakan pemantauan dan pengawasan pangan segar di pasar tradisional, pasar modern, dan beberapa kelompok tani produsen di Kota Palopo.

Selain melakukan pengawasan juga dilaksanakan pengambilan sampel pangan segar (buah dan sayur) di beberapa tempat yang selanjutnya dilaksanakan uji sampel rapid test (tes residu pestisida, dan formalin). Didapati ada lima sampel yang positif mengandung residu pestisida namun nilai ambang batas dan jenis pestisida belum bisa ditentukan sebab masih membutuhkan pengujian laboratorium.

Untuk indikator sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo berharap mampu memberikan kontribusi dalam mencapai salah satu indikator sasaran nasional

(Indikator Sasaran RPJMN) yakni memberikan akses pangan bernutrisi pada masyarakat yang menetapkan target 100% pada 2019 mendatang.

Tabel 2.7. Sasaran Strategis 7 :

Tujuan 4 : Mewujudkan Palopo sebagai "hub/simpul" Pendidikan di Jazirah Sulawesi Selatan Bagian Utara (T4)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat (S7)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10.28	10.41	101.26%
	Persentase Angka Melek Huruf (%)	100	97.71	97.71%
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15.1	15	99.34%
	Persentase Siswa Yang Mampu Baca Tulis Al Quran (%)			
	SD	100	100	100.00%
	SMP	100	100	100.00%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				99.58%

Angka rata-rata lama sekolah di Kota Palopo tahun 2018 meningkat jika dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2018, rata-rata lama sekolah di Kota Palopo sebesar 10.41 Tahun, sementara di tahun 2017 hanya 10.30 Tahun. Realisasi kinerja indicator ini pada tahun 2018 juga berada diatas target, dengan realisasi kinerja sebesar 101.26%.

Angka melek huruf di Kota Palopo tahun 2018 berada pada posisi 97.71% atau dari 100 penduduk Kota Palopo, rata-rata sebanyak 97-98 orang tidak lagi buta huruf. Realisasi kinerja indicator ini masih berada dibawah target, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 97.71%. Kasus buta huruf di Kota Palopo umumnya dialami oleh kalangan lanjut usia, dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. Meski demikian Pemerintah Kota Palopo

tetap melaksanakan pembinaan Kelompok Belajar Masyarakat dan Perpustakaan Masyarakat dan Optimalisasi Pendidikan Bagi Masyarakat Difabel.

Harapan Lama Sekolah di Kota Palopo tahun 2018 berada pada angka 15 tahun, sedikit dibawah target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja pada tahun ini adalah 99.34%. dibandingkan dengan tahun 2017, capaian pada tahun 2018, berada pada posisi yang sama. Dimana rata rata harapan lama sekolah sebesar 15 Tahun.

Tabel 2.8. Sasaran Strategis ke 8

Tujuan 4 : Mewujudkan Palopo sebagai "hub/simpul" Pendidikan di Jazirah Sulawesi Selatan Bagian Utara (T4)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Akses dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pendidikan (S8)	Angka Partisipasi Sekolah (%)			
	SD	100	99.78	99.78%
	SMP	100	100	100.00%
	Persentase Cakupan Pendidikan Gratis (%)	100	100	100.00%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				99.95%

Angka Partisipasi Sekolah di Kota Palopo untuk tahun 2018 pada tingkat SD sebesar 99.78%, atau lebih baik dibandingkan tahun 2017 yang berada pada angka 99.23%. sementara partisipasi sekolah pada tingkat SMP tahun 2018 pada angka 100%, dimana capaian ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2017 dimana hanya berada pada angka 98.13%.

Cakupan Pendidikan Gratis di Kota Palopo pada tahun 2018 jumlah siswa yang menerima bantuan pendidikan gratis di Kota Palopo sebanyak 27.511 atau 100% jumlah siswa yang bersekolah pada tahun 2018. Jumlah ini

meningkat dibandingkan tahun 2017 dimana siswa yang diberikan layanan pendidikan gratis sebanyak 27.451 orang (100%).

Pada tahun 2018, jumlah siswa SD yang menerima program pendidikan gratis 17.339 orang dan SMP 10.172 orang. Jumlah sekolah SD yang menerima sebanyak 77 sekolah, SMP sebanyak 28.

Pemerintah Kota Palopo juga melaksanakan sejumlah strategi lain untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah yakni melaksanakan perbaikan, rehabilitasi, sarana dan prasarana lembaga pendidikan SD - SMP, menghapus seluruh iuran dan pungutan yang ada di sekolah.

Tabel 2.9. Sasaran Strategis ke 9

Tujuan 4 : Mewujudkan Palopo sebagai "hub/simpul" Pendidikan di Jazirah Sulawesi Selatan Bagian Utara (T4)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan kualitas Tenaga Kependidikan (S9)	Persentase Guru Bersertifikasi (%)	75	72.59	96.79%
	Persentase Tenaga Kependidikan yang Bersertifikasi (%)	50	71.05	142.10%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA				119.45%

Persentase Guru Bersertifikasi di Kota Palopo tahun 2018 sebesar 72.59%, angka ini lebih meningkat dibandingkan tahun 2017 dimana besaran guru bersertifikasi hanya pada posisi 70.42%. Pada tahun 2017, jumlah guru bersertifikasi di Kota Palopo sebanyak 1.162 guru sementara jumlah seluruh guru yang ada sebanyak 1.650 orang.

Tenaga kependidikan bersertifikasi di Kota Palopo sampai dengan tahun 2018 sebesar 71.05 atau sama dengan kondisi pada tahun 2017 dimana jumlah tenaga pendidikan bersertifikasi hanya 27 dari 38 orang tenaga kependidikan yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Palopo.

Faktor yang mempengaruhi peningkatan tenaga kependidikan bersertifikasi di Kota Palopo adalah sebagian besar tenaga kependidikan yang ada berupaya secara mandiri dan swadaya mengikuti sertifikasi kependidikan secara mandiri pada lembaga sertifikasi guru baik yang tersedia, tanpa campur tangan pemerintah Kota Palopo.

Tabel 2.10. Sasaran Strategis ke 10 :

Tujuan 4 : Mewujudkan Palopo sebagai "hub/simpul" Pendidikan di Jazirah Sulawesi Selatan Bagian Utara (T4)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pendidikan (S10)	Persentase Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal Bersertifikasi (%)	≥11	22.86	207.82%
	Persentase lembaga PAUD yang Terakreditasi (%)	≥50	59.23	118.46%
	Persentase SD yang Terakreditasi (%)	≥75	100	133.33%
	Persentase Sekolah SMP yang Terakreditasi (%)	≥75	95.45	127.27%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA				146.72%

Persentase Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal Bersertifikasi

Jumlah lembaga penyelenggaraan pendidikan non formal bersertifikasi di Kota Palopo sampai dengan tahun 2018 sebanyak 6 lembaga dari 26 lembaga penyelenggaraan yang ada atau 22.86%.

Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2017 dimana hanya ada dua lembaga penyelenggaraan yang bersertifikasi (7.69%). Capaian kinerja tahun 2018 untuk indikator ini jauh berada diatas target yang ditetapkan yakni hanya pada angka 11%, sehingga realisasi kinerja indikator ini terhadap target adalah 207.82%.

Persentase lembaga PAUD yang Terakreditasi

Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi di Kota Palopo sampai dengan tahun 2018 sebanyak 50 lembaga PAUD (59.23%), Kondisi ini meningkat pesat dibandingkan tahun 2017 dimana hanya ada 37 lembaga PAUD yang terakreditasi. Ini menunjukkan bahwa kualitas lembaga penyelenggaraan PAUD di Kota Palopo semakin kompetitif dan bersaing dalam mutu pendidikan. Pada tahun 2017 hanya ada 43.52% lembaga PAUD yang terakreditasi dari 85 lembaga PAUD yang ada.

Persentase SD yang Terakreditasi

Sejak tahun 2017 sampai dengan 2018, seluruh lembaga pendidikan tingkat Sekolah Dasar di Kota Palopo telah terakreditasi. Jumlah SD di Kota Palopo sampai dengan tahun 2018 sebanyak 82 lembaga.

Dibandingkan dengan target nasional, capaian pemerintah Kota Palopo telah melampaui target nasional, yang menargetkan 84,20% SD/ sederajat berkreditasi pada tahun 2019

Persentase Sekolah SMP yang Terakreditasi

Jumlah lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Palopo yang telah terakreditasi juga meningkat. Pada tahun 2018 sebanyak 29 sekolah, dan tahun 2017 hanya sebanyak 28 sekolah, dari sebanyak 30 lembaga sekolah menengah pertama yang ada. Sehingga masih ada satu sekolah SMP di Kota Palopo yang belum terakreditasi.

Capaian kinerja ini berada diatas target nasional, dimana untuk tingkat SMP, ditargetkan 81% SMP/ sederajat telah berkreditasi pada tahun 2019

Realisasi kinerja yang berada diatas target ini berkat intensifnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Palopo melalui

Dinas Pendidikan Kota Palopo atas lembaga pendidikan dan pelatihan non formal yang ada.

Demikian halnya dengan PAUD, pembinaan dan pendampingan serta upaya peningkatan standar kualitas dan mutu pelayanan PAUD terus diintensifkan dalam mencapai dan merealisasikan target sasaran daerah dalam tahun-tahun mendatang. Meningkatkan sarana dan prasarana termasuk peningkatan kualitas tenaga pendidik PAUD secara massif sampai pada kelurahan yang berada di luar wilayah kota.

Sasaran Strategis ke 11 :

Tujuan 5 : Mewujudkan Palopo sebagai "hub/simpul" Kesehatan di Jazirah Sulawesi Selatan Bagian Utara (T5)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (S11)	Persentase Capaian Standar Pelayanan Kesehatan (%)	100	88.33	88.33%
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70.28	70.31	100.07%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA				94.20%

Capaian Standar Pelayanan Kesehatan

Rata-rata kinerja Capaian standar pelayanan minimal kesehatan Kota Palopo tahun 2018 berada angka 88.33%, kinerja ini lebih baik dibandingkan tahun 2017 dimana kinerja capaian pelayanan minimal bidang kesehatan Kota Palopo berada pada angka 85%. Capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan Kota Palopo adalah sebagai berikut :

Capaian standar pelayanan kesehatan Kota Palopo sesuai data Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta tahun 2018 sebesar 99.58. Target sasaran ibu hamil sebanyak 3072 dan yang berhasil dilayani sebanyak

3.059 orang. Realisasi ini lebih baik dibandingkan 2017, yang realisasinya hanya 99%.

2. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar difasilitas kesehatan sebanyak 101.65%, (target sasaran ibu bersalin sebanyak 2973 dan yang dilayani sebanyak 3.022 orang). Realisasi kinerja ini lebih baik dibandingkan tahun 2017 yang berada pada angka 91%.
3. Jumlah bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar tahun 2018 sebesar 106.96% (target sasaran sebesar 2845 orang dan yang dilayani 3.043 orang). Realisasi kinerja 2018 lebih baik dibandingkan tahun 2017 yang berada pada angka 98%.
4. Jumlah balita 0-59 bulan yang ada diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama tahun 2018 sebesar 76.09% (target sasaran 14.259 orang dan yang dilayani 10.850 orang). Realisasi 2018 lebih baik dibandingkan 2017 yang berada pada angka 72%.
5. Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar tahun 2018 sebesar 98.16 (target sasaran 14.976 orang dan yang dilayani 14.701 orang.) Realisasi kinerja tahun 2018 lebih rendah dibandingkan 2017 yang berada pada angka 100%.
6. Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun tahun 2018 sebesar 123.75% (target sasaran 42.590 orang dan yang dilayani 52.707 orang). Realisasi kinerja tahun ini lebih baik dibandingkan tahun 2017 yang berada pada angka 100%.
7. Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun tahun 2018 sebesar 176.81% (target sasaran 14.241 orang dan dilayani 25.180 orang). Realisasi kinerja 2018 lebih baik dibandingkan 2017 yang berada pada angka 100%.
8. Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun tahun 2018 sebesar 100%

(target sasaran 3.948 orang dan dilayani 3948 orang). Realisasi kinerja tahun 2018 sama dengan tahun lalu.

9. Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2018 sebesar 100% (target sasaran 2777 orang dan yang dilayani 2.777 orang). Realisasi kinerja 2018 sama dengan 2017.
10. Jumlah ODGJ berat (Psikoti) di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun tahun 2018 sebesar 100% (target sasaran 2027 orang dan yang dilayani 2027 orang). Realisasi kinerja 2018 dan 2017 sama.
11. Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun tahun 2018 sebesar 68.73% (target sasaran 1.512 orang dan yang dilayani 1.046). Realisasi kinerja 2018 lebih rendah dibandingkan 2017 yang realisasi kinerjanya mencapai 100%.
12. Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun tahun 2018 sebesar 100% (target sasaran 2858 orang dan yang terlayani 2858 orang). Kinerja tahun 2018 sama dengan kinerja tahun 2017.

Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup di Kota Palopo pada tahun 2018 berada pada posisi 70.31 Tahun, lebih meningkat dibandingkan tahun 2017 dimana angka harapan hidup berada posisi 70.30 Tahun.

Sejak tahun 2013, angka harapan hidup di Kota Palopo terus meningkat, Jika tahun 2013 berada pada angka 70.10 Tahun, tahun 2014 menjadi 70.12 Tahun, 2015 pada 70.20 Tahun, 2016 pada angka 70.25 Tahun. Meski demikian, angka harapan hidup Kota Palopo masih berada dibawah angka harapan hidup Sulawesi Selatan yang berada pada posisi 72.25 Tahun.

Meningkatnya angka harapan hidup ini seiring dengan semakin berkurangnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Pada tahun 2018, angka kematian bayi di Kota Palopo berada pada posisi 2 kasus kematian per 1000 kelahiran bayi, sementara angka kematian ibu pada posisi 3 kasus kematian per 100.000 ibu melahirkan.

Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat sebagai dampak semakin membaiknya kualitas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Kota Palopo.

Tabel 2.12. Sasaran Strategis ke 12

Tujuan 5 : Mewujudkan Palopo sebagai "hub/simpul" Kesehatan di Jazirah Sulawesi Selatan Bagian Utara (T5)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Akses dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesehatan (S12)	Persentase Masyarakat yang Memiliki/Mengakses Jaminan Kesehatan (%)	100	96.00	96.00%
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100.00%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA				98.00%

Persentase Masyarakat yang Memiliki/Mengakses Jaminan Kesehatan (%)

Sampai dengan tahun 2018, cakupan masyarakat Kota Palopo yang menjadi peserta jaminan kesehatan sebesar 96.00% atau masih ada 4% yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2017, dimana hanya sekitar 88.87% masyarakat yang menjadi peserta jaminan kesehatan.

Tahun 2018, Pemerintah Kota Palopo melalui Program Peningkatan Kemitraan Kesehatan Gratis tahun 2018 mengalokasikan dana sebesar Rp. 22.483.328.000 (dua puluh dua milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk membiayai kepesertaan penduduk Kota Palopo sebanyak 81.873 orang. Alokasi ini untuk membiayai asuransi kesehatan untuk kelas III.

Alokasi tahun 2018 ini meningkat dibandingkan tahun 2017, dimana Pemerintah Kota Palopo mengalokasikan anggaran hanya sebesar Rp.18.246.291.000,- (Delapan belas milyar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) pada tahun 2017. Dimana

pemerintah Kota Palopo menanggung biaya kepesertaan dalam jaminan kesehatan nasional untuk kelas III.

Kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun 2017 dimana jumlah masyarakat Kota Palopo yang menjadi peserta atau mengakses jaminan kesehatan adalah sebanyak 182.254 jiwa dari jumlah penduduk Kota Palopo sebanyak 205.078 jiwa, sehingga 88,87% telah menjadi peserta jaminan kesehatan.

Atas keberhasilan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Kota Palopomenerima penghargaan dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas Tercapainya Universal Health Coverage (UHC). Capaian kinerja pemerintah Kota Palopo tahun 2018 untuk indikator sasaran ini berada di atas target nasional yang menetapkan angka 95% pada tahun 2019.



Gambar 2.3. Pemerintah Kota Palopo menerima penghargaan dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas Tercapainya Universal Health Coverage (UHC), Yang diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Palopo mencapai 100%, artinya seluruh pasien miskin yang dirujuk oleh Puskesmas atau FKTP, dengan Jumlah pasien masyarakat miskin yang dilayani tahun 2018 sebanyak 11.345 jiwa.

Kemudian untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, Pemerintah Kota Palopo telah menyediakan layanan khusus ambulance yang bebas biaya/gratis bagi masyarakat Kota Palopo, baik layanan dalam maupun luar Kota, yang operasionalnya dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Jemput Antar.

Tabel 2.13. Sasaran Strategis ke 13

Tujuan 5 : Mewujudkan Palopo sebagai "hub/simpul" Kesehatan di Jazirah Sulawesi Selatan Bagian Utara (T5)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Kesehatan (S13)	Jumlah Faskes Rujukan (Rumah Sakit) Pemerintah Berkategori B	1	1	100.00%
	Persentase Faskes Tingkat Pertama (Puskesmas) yang Terakreditasi (%)	≥50	100	200.00%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA				150,00%

Jumlah Faskes Rujukan (Rumah Sakit) Pemerintah Berkategori B

Pemerintah Kota Palopo telah berhasil mewujudkan sebuah RS Umum Daerah yang bertipe B, sejak tahun 2017. RSUDaerahini menjadi pusat rujukan kesehatan se Luwu Raya. Di jazirah luwu raya yang mencakup empat kabupaten, baru Kota Palopo yang memiliki RSUD tipe B sehingga menjadi RSUD rujukan pasien dari empat kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Palopo. Kondisi ini semakin menguatkan peran Kota Palopo menjadi Kota **simpul kesehatan** di luwu raya.

Persentase Faskes Tingkat Pertama (Puskesmas) yang Terakreditasi

Pada tahun 2018, seluruh Puskesmas di Kota Palopo (100%) seluruhnya telah berakreditasi. Artinya saat ini Kota Palopo memiliki 12 Puskesmas yang seluruhnya telah bersertifikasi. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya 2017, dimana hanya 10 Puskesmas (83.3%) yang telah berakreditasi. Ini merupakan wujud upaya pembinaan, fasilitasi dan perbaikan pengelolaan baik SDM dan SDA di tingkat Puskesmas di Kota Palopo yang semakin baik dan semakin kompetitif dalam layanan kesehatannya.

Melalui upaya ini, Pemerintah Kota Palopo berharap ikut memberikan kontribusi atas salah satu indikator sasaran nasional RPJMN yakni Jumlah

kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas terakreditasi yang menetapkan angka 5600 Puskesmas terkreditasi.

Tabel 2.14. Sasaran Strategis ke 14

Tujuan 6 : Mewujudkan Palopo sebagai "hub/simpul" Ekonomi/Perniagaan di Jazirah Sulawesi Selatan Bagian Utara (T6)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan kualitas pusat ekonomi dan usaha produktif masyarakat (S14)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	≥6	7.52	133%
	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHK (%)	25	23.66	94.64%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA				113.9%

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo pada tahun 2018 mencapai 7.52% Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2017, pertumbuhan ekonomi berada berada pada posisi 7.19%. Kondisi ini menempatkan pertumbuhan ekonomi Kota Palopo diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5.07%. Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo dalam tiga tahun terakhir selalu berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan rata rata pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan.

Struktur perekonomian di Kota Palopo relatif stabil sejak 2013-2017, dimana sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih menjadi sektor unggulan (Lead sektor) yang mampu memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Palopo.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo adalah inflasi yang pada tahun 2018 berada posisi 4.19%, ini berada diatas tingkat inflasi tahun 2017 yang berada pada angka 3.94%.

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHK di Kota Palopo tahun 2018 berada pada angka 23.66%. Sektor Perdagangan Besar dan Ecrean menjadi barometer utama mengukur perkenomian Kota Palopo

sebab sejak tiga tahun terakhir lapangan usaha ini selalu mendominasi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo.

Pada tahun 2017, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHK Kota Palopo pada angka 25.05%. Di tahun 2016 kontribusinya sebesar 24.33%, 2015 sebesar 23.40%, 2014 sebesar 22.20% dan 2013 sebesar 20.98. Kontribusi sektor ini sangat memegang peranan besar dalam mengakselerasi aktifitas ekonomi di Kota Palopo.

Tabel 2.15. Sasaran Strategis ke 15 :

Tujuan 6 : Mewujudkan Palopo sebagai "hub/simpul" Ekonomi/Perniagaan di Jazirah Sulawesi Selatan Bagian Utara (T6)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan industri rumah tangga produk pangan dan non pangan yang berdaya saing (S15)	PDRB Per Kapita	36,982,630	40,320,000	109.02%
	Persentase Penduduk yang Bekerja	95	88.4	93.05%
	Persentase Penduduk Miskin	8	7.94	99.25%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA				100.44%

PDRB Per Kapita atau pendapatan per kapita masyarakat di Kota Palopo untuk tahun 2018 berada pada angka 40,32 juta/per kapita/tahun. Setahun lalu, PDRB per Kapita masyarakat Kota Palopo berada pada angka 37,1 juta/kapita/tahun. Angka ini diatas ekpektasi atau target tahun 2017 yang berada pada angka 35.15 juta/kapita/tahun.

Persentase Penduduk yang Bekerja di Kota Palopo tahun 2018 berada pada angka 88.4% atau berada diatas target 2018, sehingga realisasi kinerja indicator sasaran ini sebesar 93.05%. Jika dibandingkan 2017, persentase penduduk yang bekerja tahun 2018 di Kota Palopo lebih rendah sebab setahun lalu berada pada angka 89.14%.

Persentase Penduduk Miskin Kota Palopo Tahun 2018 berada pada angka 7.94% atau berada diatas target penduduk miskin Kota Palopo 2018 yang ditargetkan minimum berada pada angka 8%. Sehingga realisasi kinerja indicator ini sebesar 99.25%. jika dibandingkan tahun 2017, persentase penduduk miskin Kota Palopo tahun 2018 ini lebih baik, sebab di tahun lalu angkanya masih berada pada posisi 8.78%.

Tabel 2.16. Sasaran Strategis ke 16 :

Tujuan 6 : Mewujudkan Palopo sebagai "hub/simpul" Ekonomi/Perniagaan di Jazirah Sulawesi Selatan Bagian Utara (T6)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD (S16)	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah Dari Sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran dsb)	25	43.87	175.48%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA				175.48%

Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah Dari Sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran dsb)di Kota Palopo tahun 2018 sebesar 43.87% berada diatas target 2018 yang menargetkan peningkatan hanya pada angka 25%. Sehingga realisasi kinerja indicator sasaran ini sebesar 175.48%. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu, capaian 2018 ini jauh lebih baik, sebab di tahun 2017, peningkatan pajak dan retribusi daerah dari sektor pariwisata hanya berada pada angka 17.02%.



Gambar 2.4. salah satu wisata alam latuppa di Kota Palopo

Tabel 2.17. Sasaran Strategis ke 17 :

Tujuan 6 : Mewujudkan Palopo sebagai "hub/simpul" Ekonomi/Perniagaan di Jazirah Sulawesi Selatan Bagian Utara (T6)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Dukungan Infrastruktur Daerah (S17)	Persentase Jalan Daerah Berkondisi Baik (%)	≥ 75	59.57	79.43%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA				79.43%

Persentase Jalan Daerah Berkondisi Baik (%) di Kota Palopo tahun 2018 berada pada angka 59.57% atau masih berada dibawah target yang ditetapkan sebesar 75%, sehingga realisasi kinerja indicator ini hanya 79.43%. Jika dibandingkan tahun lalu, persentase jalan daerah berkondisi baik ini menurun, sebab di tahun 2017, persentase jalan berkondisi baik di Kota Palopo sebanyak 60.71%.

Pada tahun 2018, panjang jalan daerah yang berkondisi baik adalah 264.14 Km (59.57%), kondisi sedang 49.64 Km (11.20%), rusak ringan 95.27 Km (21.49%) dan rusak berat sepanjang 34.33 Km (7.74%) dengan total panjang seluruh jalan 443.38 Km.

Tabel 2.18. Sasaran Strategis ke 18 :

Tujuan 7 : Mewujudkan Lapangan dan Kesempatan Kerja Baru (T7)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Nilai Investasi (S18)	Perkembangan Nilai investasi (Rp/x 000)	184834265	470,517,849	254.60%
	Persentase Pertumbuhan Investasi/Tahun (%)	≥50	46.69	93.38%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA				173.99%

Nilai investasi di Kota Palopo tahun 2018 berada pada angka 470,51 milyar, jauh diatas target daerah yang berada pada angka 184.83 Milyar sehingga realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 254.60%. Nilai investasi tahun 2018 ini juga jauh diatas nilai investasi tahun 2017 yang hanya berada pada angka 395,17 Milyar.

Pertumbuhan Investasi/Tahun (%) di Kota Palopo tahun 2018 berada pada angka 46.69% berada diatas target daerah sehingga realisasi kinerja indikator ini sebesar 93.38%. Pertumbuhan investasi tahun 2018 kondisinya lebih sedikit lebih rendah dibandingkan setahun lalu dimana 2017 berada pada angka 47.27%.

Tabel 2.19. Sasaran Strategis ke 19 :

Tujuan 7 : Mewujudkan Lapangan dan Kesempatan Kerja Baru (T7)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja yang Sesuai	Tingkat Pengangguran (%)	≤5	11.6	43,10%
	Persentase	65	58.31	89.71%

Tujuan 7 : Mewujudkan Lapangan dan Kesempatan Kerja Baru (T7)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
dengan Lapangan Pekerjaan (S19)	Partisipasi Angkatan Kerja (%)			
RATA RATA CAPAIAN KINERJA				66.41%

Tingkat Pengangguran di Kota Palopo pada tahun 2018 jauh dibawah target Pemerintah Kota Palopo yang menargetkan sebesar maksimal 5% pada tahun 2018. Realisasi kinerjanya pun hanya 43% dari target daerah. Tingkat pengangguran tahun 2018 ini meningkat dibandingkan tahun 2017, yang berada pada angka 10.96%.

Persentase Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Palopo tahun 2018 pada angka 58.31% atau hanya memenuhi 89.71% dari target kinerja tahun ini sebesar 65%. Jika dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya, partisipasi angkatan kerja tahun 2018 ini lebih juga sedikit lebih rendah sebab tahun lalu angkanya berada pada 59.56%.

Tabel 2.20. Sasaran Strategis ke 20:

Tujuan 8 : Terwujudnya Palopo sebagai daerah bebas banjir (T8)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Menurunnya Luas Wilayah yang Terdampak Banjir (S20)	Persentase Luas Wilayah yang Terkena Banjir (%)	≤5	10%	50%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA				50,00%

Luas Wilayah yang Terkena Banjir (%) pada tahun 2018 di Kota Palopo berada pada angka 10%, atau setara 25.29 Ha, kondisi ini berada dibawah target daerah sebesar maksimal 5%. Sehingga realisasi kinerjanya hanya 50%.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2017 masih lebih baik dibandingkan tahun 2018, dimana persentase wilayah Kota Palopo yang terendam banjir hanya pada angka 7.4%.

Banjir di Kota Palopo, menurut skala dipilah menjadi dua yakni banjir dalam skala bencana dan genangan dalam skala banjir. Angka 25.29 Ha tersebut merupakan banjir dalam skala bencana maupun genangan dalam skala banjir.

Dari luas 25.29 Ha areal terdampak banjir tersebut, 8.58 Ha merupakan genangan yang berada dalam skala banjir. Kondisi ini terjadi di Kecamatan Wara seluas 1.73 Ha, Kecamatan Wara Timur 3.49 Ha, Wara Utara seluas 3.16 Ha dan Wara Barat seluas 0.20 Ha. Ketinggian genangan dalam skala banjir ini berkisar antara 0.22 – 0.64 meter dengan surasi 2-3 jam.

Kemudian banjir dalam skala bencana 2018 terjadi di Kecamatan Telluwanua, seperti di Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Salubattang, Kelurahan Maroangan, dan daerah Marobo. Di tahun 2018, masih terjadi banjir sebanyak 1 kali yang dampaknya merendam sejumlah rumah penduduk, kantor pemerintah.

Namun dari perspektif jumlah musibah/bencana banjir, tahun 2018 masih lebih baik, sebab di tahun 2017, terjadi dua kali bencana banjir. Lokasi yang terdampak adalah Kelurahan Pentojangan, Salubattang, Maroanging, Mancani, termasuk beberapa kelurahan yang terdapat di sekitar pusat Kota adalah Balandai, Bara, Amassangang, Dangerakko, dan Kelurahan Lagaligo yang mengalami genangan air namun dalam skala banjir.

Beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya banjir di Kota Palopo adalah Kondisi DAS dalam keadaan kritis yang berakibat resapan air hujan ke dalam sistim akuifer semakin berkurang dan erosi lahan semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan pula sedimentasi di alur dan muara sungai yang juga tinggi. Dan kapasitas sistem pengendali banjir yang ada seperti dimensi palung sungai, tampungan air, sistem drainase dan lainnya kurang memadai.

Upaya penanganan banjir oleh Pemerintah Kota Palopo, selain dilakukan dengan membangun sarana prasarana penanggulangan banjir juga dilakukan pada aspek lingkungan hidup. Tercatat bahwa tingkat kerusakan hutan sebagai salah satu penyumbang kontribusi banjir di Kota Palopo.

Massivenya kerusakan hutan ini ditenggari sebagai salah satu penyebab banjir di sejumlah spot pemukiman Kota Palopo. Olehnya itu untuk tetap mempertahankan lestarnya hutan disekitar wilayah Palopo dan Kabupaten Tetangga, Pemerintah Kota Palopo telah melakukan kerjasama pengawasan hutan dengan 4 Kabupaten tetangga

Penanganan banjir di Kota Palopo dilakukan dengan dua pendekatan yakni penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan banjir serta penyelamatan dan perbaikan lingkungan hidup atau hutan. Kemudian untuk menangani genangan skala banjir dilaksanakan normalisasi drainase skala kawasan yang melintasi 2 sampai dengan 3 Kelurahan melalui Program Penataan Kumuh Perkotaan NUSP dan Cipta Karya Kementerian PUPR untuk menata Drainase Skala Kawasan sepanjang, seiring dengan penataan drainase pemerintah Kota Palopo juga gencar melakukan kegiatan sosialisasi dan promosi hidup sehat dan bersih dalam rangka perubahan pola pikir masyarakat.

Tabel 2.21. Sasaran Strategis ke 21 :

Tujuan 8 : Terwujudnya Palopo sebagai daerah bebas banjir (T8)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Sanitasi dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (S 21)	Persentase Luas Kawasan Pemukiman Kumuh (%)	≤1	0.45	222.22%
	Persentase Ruang Terbuka Hijau (%)	18	18.4	102.20%
	Persentase Penanganan Sampah (%)	90	89.55	99.50%
	Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Bersih (%)	85	87.53	102.98%

Tujuan 8 : Terwujudnya Palopo sebagai daerah bebas banjir (T8)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Persentase Rumah Tangga bersanitasi (%)	89	92.44	103.87%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA				126.34%

Persentase Luas Kawasan Pemukiman Kumuh (%) di Kota Palopo tahun 2018, masih seluas 0.45 % dari total luas kawasan pemukiman atau setara dengan 20.85 Ha. Kondisi ini berada sedikit diatas target pemerintah yang menginginkan angka maksimal berada pada 1%. Sehingga realisasi kinerja tahun 2018 hanya sebesar 83.33%. Jika dibandingkan setahun lalu, luas kawasan kumuh di Kota Palopo berkurang dari 32.08 Ha pada tahun 2017 menjadi 20.85 Ha di tahun 2018. Sehingga total kawasan kumuh yang berhasil ditangani dan dituntaskan tahun 2018 seluas 11.23 Ha.

Luas Kawasan Kumuh 2018 : 20.85 Ha

Luas Kawasan Pemukiman : 4.622 Ha

Persentase Luas Kawasan Pemukiman Kumuh : 0.45%

Sampai dengan tahun 2018 kawasan kumuh di Kota Palopo masih terdapat di lima kelurahan, yakni kelurahan Suruntanga seluas 1.38 Ha, Sabbangparu seluas 1.55 Ha, Pontap 11.3 Ha, Ponjalae seluas 4.52 Ha, Penggoli 2.1 Ha. Kelurahan yang berhasil ditangani kawasan kumuhnya di tahun 2018 adalah Kelurahan Salutelluee, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Batupasi dan Kelurahan Dangerakko.

Persentase luas kawasan kumuh pun menurun dari 0.76% tahun 2017 menjadi 0.43% di tahun 2018. Sehingga sejak periode 2013-2018, luas kawasan kumuh di Kota Palopo jauh berkurang, sebab di 2013 luas kawasan kumuh sebesar 89.33 Ha.

Persentase Ruang Terbuka Hijau (%) di Kota Palopo tahun 2018 pada angka 18.4%, berada diatas target pemerintah kota yang hanya pada angka 18%, sehingga realisasi kinerja indicator ini sebesar 102.2%. Jika dibandingkan

tahun lalu, luas ruang terbuka hijau di Kota Palopo lebih tinggi dimana pada tahun 2017 tingkat pemenuhan ruang terbuka hijau baru pada angka 16.07%.

Beberapa program yang berkontribusi pencapaian ini adalah Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), dan Program Perencanaan Tata Ruang.

Persentase Penanganan Sampah (%) di Kota Palopo Tahun 2018 berada pada angka 89.55%, berada sedikit dibawah target daerah yang berada pada angka 90%, sehingga realisasi kinerja indicator ini hanya 99.5%. Jika dibandingkan 2017, penanganan sampah di tahun 2018 lebih baik sebab di tahun lalu hanya 78.56% sampah yang tertangani.



Gambar 2.5. Tong sampah pada pusat niaga masyarakat di Kota Palopo

Pada tahun 2018, jumlah sampah yang tertangani mencapai 30.601 Ton dari total jumlah timbunan sampah sebanyak 34.171 Ton. Kemudian cakupan area pelayanan sampah juga lebih baik, jika 2017 hanya 64%, tahun 2018 meningkat menjadi 67%. Luas area pelayanan sampah di 2018 166.27 km² sementara di 2017 hanya pada angka 159.01 Km².

Persentase sampah yang berkurang melalui proses 3 R di 2018 juga lebih tinggi. Jika 2017 berada pada angka 1.334 Ton atau setara 3.56% dari total timbunan sampah yang ditangani, 2018 meningkat menjadi 1.376 Ton atau setara 4.02%.

Penanganan timbunan sampah di Kota Palopo tahun 2018 juga lebih baik. Jika 2017 pada angka 33.040 Ton atau 88.28%, tahun 2018 menjadi 30.409 Ton atau setara 88.90%.



Gambar 2.6. Pelayanan Angkutan Sampah di Kota Palopo

Beberapa program yang berkontribusi pencapaian ini adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo.

Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Bersih (%) di Kota Palopo tahun 2018 sebesar 87.53% berada diatas target daerah yang berada pada angka 85%. Sehingga realisasi kinerja tahun ini sebesar 102.98%. Kondisi ini menurun dibandingkan tahun 2017 berada pada angka 88.63% masyarakat yang mengakses air bersih.

Persentase Rumah Tangga bersanitasi (%) di Kota Palopo tahun 2018 sebesar 92,44% berada di atas target daerah yang berada pada angka 89,00%. Sehingga realisasi kinerja tahun ini sebesar 92,44%. Kondisi ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 dimana hanya pada angka 88,63%.

Tabel 2.22. Sasaran Strategis ke 22 :

Tujuan 9 : Mewujudkan Toleransi dan Hubungan Harmonis Antar Budaya dan Masyarakat (T9)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Ikatan Sosial Pemerintah dan Masyarakat (S 22)	Jumlah Konflik Sosial (Kasus)	0	0	100%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA				100,00%

Jumlah Konflik Sosial (Kasus) di Kota Palopo Tahun 2018, patut



disyukuri bahwa sama sekali tidak ada. Kondisi ini sesuai dengan yang diharapkan pemerintah kota Palopo dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan serta wilayah. Sehingga realisasi kinerja indicator ini tercapai 100%. Ini

menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah kota sejak beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan hasil.

Sesuai pemetaan daerah potensi konflik, di Kota Palopo terdapat satu kelurahan yang kerap terjadi konflik pemuda yang jika tidak ditangani secara serius berpotensi menjadi konflik sosial, yakni di kelurahan Mancani. Biasanya persoalan dipicu oleh gesekan di kalangan pemuda.

Pada tahun 2015 dan 2016, di Kota Palopo terjadi masing masing 1 kali kasus konflik yang melibatkan dua kelompok masyarakat. Namun pada tahun 2017 dan 2018, tak satupun konflik sosial yang terjadi.

Ini merupakan hasil kerja keras dan kerjasama Pemerintah Kota Palopo dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Termasuk merespon secara sigap dan cepat gesekan gesekan kecil di masyarakat yang biasanya menjadi pemicu konflik sosial.

Di tahun 2016 misalnya, terjadi satu kali konflik di Kota Palopo yang melibatkan masyarakat di lingkungan “Uri” dan lingkungan “Batu”. Peristiwa yang terjadi 21 Oktober 2016 tersebut melibatkan puluhan pemuda dan masyarakat. Pada tahun 2015 juga pecah konflik antar masyarakat di lokasi yang sama sebanyak 1 kasus. Namun pada tahun 2017 dan 2018, berkat kerja keras semua pihak, tak satupun konflik sosial yang terjadi di Kota Palopo.

Pemerintah Kota Palopo menyelesaikan kasus konflik di masyarakat ini. Berbagai cara dan strategi ditempuh. Salah satunya dengan pendekatan para tokoh adat dan tokoh pemuda yang ada untuk turun langsung memfasilitasi dan mendamaikan kelompok masyarakat yang bertikai. Dalam sejumlah pertemuan, dan acara adat untuk merekatkan persaudaraan di tengah kelompok yang bertikai.



Gambar 2.7. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Dalam Rapat Penanganan Konflik Mancani 2014

Strategi lain yang dilaksanakan pemerintah Kota Palopo mencegah merebaknya konflik sosial di masyarakat adalah menumbuhkembangkan sikap kepedulian dan empati sosial dari pemerintah terhadap masyarakat.

Olehnya pemerintah Kota Palopo sejak tahun 2013, sampai saat ini membebaskan seluruh biaya pemakaman bagi warga masyarakat Kota Palopo yang berduka.

Selain itu, pembinaan atas Forum Komunikasi Umat beragama juga dilaksanakan secara intensif. Strategi lainnya adalah melaksanakan sejumlah iven olahraga antara kelompok pemuda, sehingga terjalin kerjasama dan silaturahmi antara kelompok pemuda yang ada di Kota Palopo.

Tabel 2.23. Sasaran Strategis ke 23:

Tujuan 9 : Mewujudkan Toleransi dan Hubungan Harmonis Antar Budaya dan Masyarakat (T9)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (S23)	Persentase Penegakan Perda (%)	≥85	91.8	108%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA				108%

Persentase Penegakan Perda (%) di tahun 2018 sebesar 91.8% berada diatas target daerah yang ada pada angka 85%, sehingga realisasi kinerja indicator ini 108%. Namun penegakan perda di tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang berada pada angka 97.9%.

Pada tahun 2018, jumlah pelanggaran perda yang teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sebanyak 184 kasus pelanggaran. Namun yang berhasil diselesaikan hanya sebanyak 169 kasus pelanggaran. Di tahun 2017, pelanggaran perda sebanyak 190 kasus, dan yang diselesaikan sebanyak 186 kasus.

Strategi utama yang dilaksanakan untuk menekan angka pelanggaran perda oleh Pemerintah Kota Palopo adalah meningkatkan cakupan patroli aparat satpol PP, meningkatkan sosialisasi tentang penegakan perda baik secara formal maupun informal dalam forum atau diskusi yang dilaksanakan.

Untuk menekan kasus pelanggaran perda Pemerintah Kota Palopo juga melakukan beberapa strategi yakni meningkatkan partisipasi ketua RT/RW dan LPMK dalam menjaga kenyamanan dan keamanan lingkungannya termasuk meningkatkan motivasi kerja mereka dengan menaikkan insentif per bulan dari 400.000 per orang tahun 2017 menjadi 500.000 ribu per orang tahun 2018. Jumlah RT/RW dan LPMK se Kota Palopo sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 1.048 orang.

Selain itu untuk meningkatkan pembinaan akhlak di tengah-tengah masyarakat, para pelaku keagamaan seperti imam mesjid, guru mengaji, guru sekolah minggu, pinandita dan guru pesraman juga diberikan tunjangan per bulan. Jumlah pelaku keagamaan atau tokoh masyarakat yang menerima insentif ini sebanyak 1.236 orang.

Tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan partisipasi dan peran serta elemen masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dan memberikan peran masing-masing menjaga kenyamanan dan keamanan lingkungan masing-masing. Termasuk mencegah pelanggaran peraturan daerah yang ada.

Tabel 2.24. Sasaran Strategis ke 24 :

Tujuan 9 : Mewujudkan Toleransi dan Hubungan Harmonis Antar Budaya dan Masyarakat (T9)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Berkembangnya Budaya	Jumlah Iven Budaya (Kali)	3	3	100%

Tujuan 9 : Mewujudkan Toleransi dan Hubungan Harmonis Antar Budaya dan Masyarakat (T9)				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal (S24)				
RATA RATA CAPAIAN KINERJA				100,00%

Jumlah Iven Budaya (Kali) di tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 3 Kali sama dengan jumlah iven budaya yang dilaksnaakan setahun lalu. Namun juga diselenggarakan festival kesenian daerah sebanyak 15 iven. Kondisi yang tak jauh berbeda dengan tahun 2017 dimana dilaksanakan festival budaya sebanyak 3 kali dengan 14 iven festival kesenian daerah.

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah 2018

Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.25. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah 2018

Uraian	Target Anggaran Tahun 2018	Tahun 2018	
		Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Pendapatan	1.001.107.733.585,00	964.835.870.580,73	96,38
Pendapatan Asli Daerah	156.111.703.360,00	139.278.661.859,07	89,22
Pendapatan Pajak Daerah	29.466.250.000,00	31.501.617.696,00	106,91
Hasil Retribusi	8.416.186.000,00	8.022.878.576,00	95,33

Uraian	Target Anggaran Tahun 2018	Tahun 2018	
		Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (%)
Daerah			
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.135.170.176,00	6.635.170.716,00	92,99
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	111.094.097.184,00	93.118.994.871,07	83,82
DANA PERIMBANGAN	755.717.209.775,00	750.015.603.259,00	99,25
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	20.749.762.775,00	18.456.126.894,00	88,95
Dana Alokasi Umum	516.167.587.000,00	516.167.587.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	218.799.860.000,00	215.391.889.365,00	98,44
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	89.278.820.450,00	75.541.605.462,66	84,61
Pendapatan Hibah	19.783.200.000,00	19.445.810.000,00	98,29
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	48.389.559.250,00	38.020.507.941,00	78,57
Dana	10.250.000.000,00	10.250.000.000,00	100,00

Uraian	Target Anggaran Tahun 2018	Tahun 2018	
		Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (%)
Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.856.061.200,00	7.639.440.139,00	70,37
Pendapatan Lain-lain	0,00	185.847.382,66	0,00
BELANJA	1.020.380.935.465,00	982.957.077.365,89	96,33
BELANJA TIDAK LANGSUNG	426.365.870.522,00	416.966.106.058,61	97,80
Belanja Pegawai	384.027.993.289,00	376.082.990.010,00	97,93
Belanja Bunga	2.695.744.550,00	2.346.991.490,61	87,06
Belanja Hibah	34.371.701.683,00	34.024.494.883,00	98,99
Belanja Bantuan Sosial	4.030.000.000,00	3.671.200.000,00	91,10
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan partai politik	840.431.000,00	840.429.675,00	100,00
Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	0,00	0,00
BELANJA LANGSUNG	594.015.064.943,00	565.990.971.307,28	95,28

Uraian	Target Anggaran Tahun 2018	Tahun 2018	
		Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (%)
Belanja Pegawai	57.485.559.258,00	54.081.160.933,10	94,08
Belanja Barang dan Jasa	283.195.706.372,00	273.116.299.707,18	96,44
Belanja Modal	253.333.799.313,00	238.793.510.667,00	94,26
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	22.836.223.880,00	22.836.223.879,74	100,00

Sumber data BPKAD kota Palopo Tahun 2018

2.2. Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.26.
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Palopo s.d. 2018

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1	Pertumbuhan PDRB (%/Tahun)	8.02	7.05	6.45	6.98	7.19	7.52
2	Laju inflasi (%/Tahun)	5.25	8.95	3.38	2.47	3.94	4.19
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	26	28.79	31.68	34.18	36.83	40.32
4	Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	11,590	11,713	12,005	12,156	12,319	12,662
5	Indeks Gini (Angka)	-	-	0.43	0.37	0.34	-
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	90.43	91.2	91.42	91.26	91.22	92.06
7	Persentase Penduduk Miskin (%)	9.57	8.8	8.58	8.74	8.78	7.94
8	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Palopo (Rp/Kapita/Bulan)	224,562	228,881	246,727	261,056	274,319	292,602
9	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	15,500	14,590	14,510	15,020	15,440	14,270
10	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari (%)	9.57	8.8	8.58	8.74	8.78	7.94
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.42	1.18	1.76	1.17	1.75	1.14
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.3	0.26	0.52	0.28	0.6	0.26
	Indeks Kesehatan	77.08	77.11	77.23	77.31	77.38	77.68
	Indeks Pendidikan	73.4	74.89	75.87	75.95	76.24	76.87
	Indeks Pengeluaran	74.64	74.97	75.72	76.1	76.51	77.35
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Angka)	75.02	75.65	76.27	76.45	76.71	77.30
12	Angka melek huruf (%)	-	99.2	98.22	96.07	98.02	-
13	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	9.95	9.96	10.25	10.26	10.33	10.51
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14.49	15.01	15.02	15.03	15.05	15.06
14	Angka usia harapan hidup (Tahun)	70.1	70.12	70.2	70.25	70.3	70.49

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
15	Persentase balita gizi buruk (%/Tahun)	0.04	0.04	0.07	0.02	0.02	0.07
16	Prevalensi balita gizi kurang (%/Tahun)	4.68	2.04	1.45	2.14	2.37	
17	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100	100	100	100	100	
18	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	60.57	58.83	51.42	54.81	56.33	
	<i>Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki</i>	<i>79.3</i>	<i>75.47</i>	<i>66.29</i>	<i>69.51</i>	<i>73.99</i>	
	<i>Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan</i>	<i>43.42</i>	<i>43.29</i>	<i>37.97</i>	<i>41.31</i>	<i>40.41</i>	
19	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	64.47	61.72	54.27	58.09	59.56	88.40
	<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki</i>	<i>83.66</i>	<i>79.16</i>	<i>69.43</i>	<i>73.03</i>	<i>77.61</i>	<i>88.02</i>
	<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan</i>	<i>46.6</i>	<i>45.42</i>	<i>40.36</i>	<i>44.15</i>	<i>43.03</i>	<i>88.89</i>
20	Tingkat pengangguran terbuka (%)	9.03	8.15	12.07	14.43	10.96	11.6
21	Rasio penduduk yang bekerja (%)	90.95	91.85	87.93	85.57	89.04	
22	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	62.17	62.27	72.07	76.66	70.56	
23	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%)	55.09	54.04	45.21	46.9	50.15	
24	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)	-	-		-	25.51	
	<i>Laki – Laki</i>	-	-		-	18.05	
	<i>Perempuan</i>	-	-		-	7.46	
25	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	40.28	40.28	40.28	30.34	40.07	
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	79.9	
27	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	8.55	11.59	10.8	13.35	17.91	
28	Opini BPK	Disclaimer	WDP	WTP	WTP	WTP	
29	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	76.9	82.5	88.7	90	91.6	
30	Penguatan cadangan pangan (%)	51.3	53.38	61.2	66.3	72	
31	Penanganan daerah rawan pangan (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
32	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	18.67	19.68	18.96	17.73	17.6	
33	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	-	-	-	-	-	
34	Produksi sektor pertanian (Ton/Tahun)						

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
	Padi	28,367	18,895	28,631	30,167	32,444	
	Jagung	5,575	5,855	4,737	6,303	5,086	
	Ubi Kayu	223.85	281	177	70.4	70	
	Ubi Jalar	112.88	101	13	18.94	4.55	
	Sagu	85.2	70.61	51.33	33.04	15.59	
	Daging (Ruminansia dan Unggas) Ton	1480.54	1688.25	2491.46	3318.87	3276.3	
	Daging (Ruminansia) Ton	237.62	278.45	306.06	232.94	247.48	
	Daging Sapi (Ton)	172.58	189.53	284	232.24	247.16	
	Daging Kerbau (Ton)	65.04	88.92	22.06	0.7	0.32	
	Daging Kambing (Ton)	-	-	-	-	-	
	Daging Unggas (Ton)	1242.92	1409.8	2185.4	3085.93	3028.822	
	Daging Ayam Kampung (Ton)	127.87	129.51	133.81	143.72	145.012	
	Daging Ayam Pedaging (Ton)	1,107.89	1,271.71	2,043.39	2,934.04	2,875.36	
	Daging Itik/Bebek/Entog (Ton)	7.16	8.58	8.2	8.17	8.45	
	Telur (Ayam Kampung/Ras/Itik/Entog) (Ton)	350.13	626.9	666.85	2063.9	1778.18	
	Telur Ayam Buras/Kampung (Ton)	293.37	541.13	563.08	1999.48	1590.19	
	Telur Ayam Ras Petelur (Ton)	4.62	9.69	14.54	-	45	
	Itik/Angsa/Entog (Ton)	52.14	76.08	89.23	64.42	142.99	
35	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
36	Produksi sektor perkebunan (Ton/Tahun)						
	Kelapa Dalam	62.75	67.18	55.82	49.67	31.92	
	Kopi	75.3	69.53	67.46	66.12	66.27	
	Kopi Robusta	73.61	69.13	66.85	66.07	66.26	
	Kopi Arabika	1.69	0.4	0.61	0.05	0.01	
	Cengkeh'	139.26	69.6	81.77	110.36	127.99	
	Kakao	2814	1,763	1,526.00	1,526	286	
37	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
38	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0.01	0.01	0.01	0.05	n/a	
39	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	0.18	0.18	0.19	0.19	0.18	
40	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,18	1.19	1.18	1.21	-	
41	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
42	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	20.99	21.16	21.91	22.9	23.62	
43	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	3.05	3.02	2.96	2.91	2.82	
44	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
45	Pertumbuhan Industri (%)	-	12.13	43.99	1.84	22.13	
46	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	67,655	76,558	84,077	89,774	96,318	
2	Nilai tukar petani	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	-	54.49	55.02	51.19	51.87	
4	Produktivitas total daerah (Ribu/Tenaga Kerja/Tahun)	63.44	69.84	81.89	87.5	86.69	
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	100	100	100	100	100	
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) (%)	73.02	72.24	72.75	73.26	76.74	
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	0.95	1.62	1.12	1.35	0	
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
9	Angka kriminalitas yang tertangani (per 100.000)	7	8	8	12	12	
10	Rasio ketergantungan	50.22	50.74	49.23	48.81	48.46	
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah							
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR						
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Layanan Urusan Wajib Dasar							
1	Pendidikan						

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	59,60	61,75	63,16	63,10	63,12	
2	Angka Partisipasi Kasar						
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	106,32	109,55	101,81	111,66	106,00	112.89
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	86,88	84,86	88,23	86,17	84,91	84.17
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	75,52	79,32	91,56	95,35	85,39	110.31
3	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)						
	Tidak/Belum Bersekolah (%)	10.57	19.06	17.03	7.85	7.02	
	Tamat SD/ sederajat (%)	21.63	21.36	19.23	30.47	14.18	
	Tamat SMP/ sederajat (%)	18.23	16.29	18.02	11.82	23.63	
	Tamat SMA (%)	30.66	25.42	26.12	31.75	36.68	
	Tamat SMK (%)	4.89	5.13	3.89	4.06	2.81	
	Tamat Perguruan Tinggi (%)	14.02	12.75	15.72	14.08	15.67	
	Diploma I/II (%)	0.37	0.38	0.33	0.29	0.37	
	Diploma III (%)	2.76	1.61	2.61	1.82	1.39	
	Diploma IV/S1-S3 (%)	10.89	10.76	12.78	11.97	13.91	
4	Angka Partisipasi Murni						
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	96,54	97,53	94,11	95,37	99,32	99.78
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	73,57	78,15	75,43	76,61	77,89	78.39
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	49,25	60,49	68,29	65,72	66,42	67.99
5	Angka partisipasi sekolah (%)						
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (Per 1000)	1000	1000	989.8	1000	992.3	997.8
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (Per 1000)	943.9	951.2	985.2	965.7	981.3	100
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C (Per 1000)	700,01	827,8	818,9	884,1	883,4	847.5
6	Angka Putus Sekolah:						
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0	0	0.4	0	0.68	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	5.14	4.13	1.45	3.43	1.87	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	29.43	16.74	15.87	9,10	10.28	

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
7	Angka Kelulusan:						
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	95.72	96.63	97.48	98.87	100	
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	97.34	98.74	99.05	99.62	99.3	
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	102.6	102.32	102.82	102.44	99.75	
8	Angka Melanjutkan (AM):						
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)						
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)						
9	Fasilitas Pendidikan:						
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	97.47	97.59	97.47	97.47	96.25	
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	100	100	100	100	100	
	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)	100	100	100	100	100	
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10,000)	32	40	37	33	32	
	SD/MI (per 10,000)	36	45	43	36	36	
	SMP/ MTs (per 10,000)	25	32	26	26	26	
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah (per 10,000)	34	28	27	28	27	
	SMA/MA/SMK	34	28	27	28	27	
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)	709	697	890	674	635	
	SD/MI (per 10,000)	672	610	937	633	607	
	SMP/ MTs (per 10,000)	773	874	800	751	688	
	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah atas /MA/SMK (per 1000)	130	110	231	89	88	
12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar (per 10.000)	0.69	0.58	0.81	0.59	0.57	
	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata pendidikan menengah (per 10.000)	2.73	2.39	4.77	1.77	1.8	
13	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
14	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki (%)	99.934	99.908	99.954	99.973	99.995	
15	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	97.14	99.2	98.22	96,61	97.45	97.71
16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	92.17	93.47	61.55	123.46	137.26	
2.	Kesehatan						
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	6	2	0	2	2	
2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 100)	94	98	100	100	98	
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1	3	1	4	2	
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	6	7	6	8	5	
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	73	115	146	145	68	
6	Rasio posyandu per satuan balita (Per 1000 balita)	11	9	10	9	9	
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	2	2	2	3	3	
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000)	3	3	3	4	4	
9	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	4	5	5	5	5	
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000)	4	5	5	5	5	
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	68,13	60,89	74,20	76,49	70,63	
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	100	93,14	96,31	93,99	95,79	
13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	95,83	97,92	95,83	97,92	95,83	
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (%)	96.25	85.61	83.85	85.9	87.4	
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	104,37	112,32	109,94	111,83	85,57	
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (Rasio)	2	0	2	2	0	

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	1,73	6,40	8,64	3,15	6,19	
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	93,53	101,98	83,47	108,56	138,07	
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (Rasio per 100.000 penduduk)	216	181	221	205	240	
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0	0	0	0	0	
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	93,53	46,53	37,60	104,73	79,93	
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	84,62	46,60	59,90	65,98	63,37	
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	
25	Penderita diare yang ditangani (per 100.000)	6	6	6	6	6	
26	Angka kejadian Malaria (per 100.000)	104	99	113	166	19	
27	Tingkat kematian akibat malaria (per 1000)	0	0	0	0	0	
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat (%)	100	100	100	100	100	
30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (per 100.000)	9	10	12	32	42	
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir (per 1000)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
34	Cakupan kunjungan bayi (%)	95,23	96,90	94,50	95,75	100,78	
35	Cakupan puskesmas (%)	122,22	122,22	133,33	133,33	133,33	
36	Cakupan pembantu puskesmas (%)	46	46	46	75	75	
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	92,72	93,28	92,25	90,69	92,80	
38	Cakupan pelayanan nifas (%)	100	90,42	91,81	93,17	91,22	

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	54,28	34,63	77,43	75,06	67,79	
40	Cakupan pelayanan anak balita (%)	48,78	41,31	42,97	56,36	62,51	
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100	100	100	100	100	
42	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	98,78	98,78	94,66	98,81	97,52	
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	n/a	-	-	-	-	
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100	
45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	100	100	0	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	Pekerjaan Umum:						
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	73.02	63.18	55.6	55.6	58.96	
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	22	24	30	29	28	
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
4	Persentase Jalan Kewenangan Kota yang Berkondisi Baik (> 40 KM/Jam) (%)	64.75	65.52	47.75	49.73	58.33	
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	0	0	0	0.2	1.28	
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	57.9	59.96	65.46	88.63	90.77	
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	38	39,00	40,50	42,70	46,10	
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	20.32	17.36	14.71	12.64	10.73	

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)	14.43	14.42	14.43	14.43	14.42	
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	1.99	2.64	2.94	3.39	3.4	
12	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	43.98	44.59	47.89	65.3	71.34	
13	Rasio Jaringan Irigasi (per 1000 Ha)	9.41	9.64	10.22	15.53	18.86	
14	Persentase penduduk berakses air minum (%)	83.89	84.11	85.32	86.01	93	
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	54.65	61.93	71.44	86	88.63	
16	Persentase areal kawasan kumuh (%)	2.12	2.05	1.95	1.89	0.76	
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	2.3	2.5	3.64	4.5	4.53	
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 10.000)	1.68	1.64	1.78	1.62	1.58	
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1000)	1.77	1.78	1.84	1.8	1.78	
3	Penataan Ruang:						
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	-	-	-	-	-	
2	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik (Ha)	2,759	2,759	2,759	2,761	3,978	
3	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	52.36	52.36	52.36	52.4	75.49	
4	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	-	34.4	-	-	-	
5	Ruang publik yang berubah peruntukannya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
6	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
7	Ketaatan terhadap RTRW	n/a	-	-	-	-	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
1	Rasio rumah layak huni	0.11	0.11	0.14	0.16	0.16	
2	Rasio permukiman layak huni (%)	86.38	89.08	91.93	94.24	94.28	
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	55.38	53.78	69.16	70.25	79.39	

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	81.06	82.14	84.78	85.04	92.1	
5	Persentase pemukiman yang tertata (%)	97.87	97.96	98.06	98.12	99.25	
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	0.38	0.37	0.36	0.35	0.13	
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	100	97.44	95.46	93.18	37.5	
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	9.92	9.12	8.36	7.76	7.41	
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	37.5	17.5	18.6	20	20.98	
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
1	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas)	200	688	200	200	200	
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	805	821.1	725.8	796.3	808.7	91.85
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	3.03	3.03	6.06	9.09	9.09	
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК)	95.24	100	88.16	67.67	94.87	
5	Persentase Penegakan PERDA	97.6	96.6	97.8	97.7	97.9	
6.	Sosial						
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	53.82	78.53	78.32	78.71	78.97	
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	54.36	78.6	78.39	78.85	79.11	
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	54.36	78.6	78.39	78.85	79.11	
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	0	0	0	0	0	
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	100	100	100	100	100	

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	100	100	
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100	
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100	0	100	0	
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	2.62	3.12	0	3.09	1.58	
Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
1	Tenaga Kerja						
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Per 1000)	2.8	2.8	5.5	6	8.3	
	Angka sengketa pengusaha-pekerja di Perusahaan ber TDP per tahun (Per 1000)	3.8	5.2	8.3	12.1	18.1	
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	75	100	88	80	71	
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	4.65	4.75	1.58	3.13	4.54	
4	Keselamatan dan perlindungan (%)	25	25	26	24	25	
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	29	28	36	37	37	
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0	0	0	0	0	
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	1.67	1.01	0.87	0.67	0.42	
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	0.48	0.48	0.53	0.48	-	
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	8.08	9.82	7.62	5.71	28.85	
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	9.14	0	5.56	5.92	11.2	
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	22.8	60	40	36.6	5.83	

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
12	Rasio lulusan S1/S2/S3	-	-	9.4	9	9.3	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	15.21	13.91	14.49	11.40	10.92	
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	20	20	20	20	20	
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	3.03	3.07	3.31	3.12	3.16	
4	Rasio KDRT (per 10.000)	6	4	5	6	3	
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	46.6	45.42	40.36	44.15	43.03	
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	7.09	22.07	
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.(%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	100	100	100	
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	n/a	n/a	-	19.29	21.38	
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD						

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
	APM Perempuan pada Tingkat SD	-	-	90.04	90.52	99.12	
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SD	-	-	97.48	100	99.33	
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP						
	APM Perempuan pada Tingkat SMP	-	-	81,02	75,52	80,28	
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMP	-	-	68,49	77,50	75,35	
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA						
	APM Perempuan pada Tingkat SMA	-	-	66,63	64,73	63,24	
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMA	-	-	70,11	66,80	69,65	
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	40.48	40.99	41.25	41.76	42.27	
	APM Perempuan yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	APM Laki-Laki yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
3	Pangan						
1	Ketersediaan pangan utama (%)	9.02	9.56	9.94	10.28	11	
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	3,027	2,131	2,203	2,199	2,082	
	Ketersediaan energi perkapita (Kkal/kapita/hari)	2970	2049.7	2203.4	2,130.10	2012.8	
	Ketersediaan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	57.32	81.6	-	68.9	69.1	
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	-	-	-	75	82	
4	Pertanahan						
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	0.75	0.92	1.61	1.31	1.52	2.17
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	0	0	0	0	0	25
3	Penyelesaian izin lokasi (%)	50	0	100	100	0	
5	Lingkungan Hidup						
Kabupaten/Kota							

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada	Ada	-	-	Ada	
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	31.76	39.13	32.54	38.95	37.2	
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota						
	<i>Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina (Orang)</i>	0	0	0	0	0	
	<i>Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum (Orang)</i>	0	0	0	0	0	
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0	0	0	0	0	
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0	
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0	
12	Penetapan hak MHA	0	0	0	0	0	
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (%)	0	0	0	0	0	
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana (%)	0	0	0	0	0	
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0	0	0	0	0	
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (Kali)	Tidak Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak Ada	

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
			Ada	Ada	Ada		
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.(%)	100	100	100	100	100	
18	Timbulan sampah yang ditangani (%)	78.64	83.08	86.12	87.02	88.28	
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	1.4	1.6	2.6	3.17	3.5	
20	Persentase cakupan area pelayanan (%)	51	55	59	61	64	
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	63.19	63.85	70.2	73.95	78.56	
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	69.57	68.86	72.41	75.65	77.81	
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (%)	0	0	0	0	0	
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.65	0.61	0.65	0.79	0.78	
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0.84	0.86	0.86	0.88	0.6	
3	Rasio pasangan berakte nikah	0.4	0.39	0.38	0.37	0.38	
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada	
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	64.69	61.38	66.21	78.89	82.56	
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	100	100	100	100	100	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	97.92	97.92	97.92	97.92	97.92	
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	1	1	1	
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	-	-	-	-	2.5	
4	Persentase LSM aktif (%)	0	5.4	10.81	5.4	0	

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
5	Persentase LPM Berprestasi (%)	-	-	-	-	4.17	
6	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	
7	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100	100	100	
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2.69	2.54	2.42	2.38	2.31	
2	Total Fertility Rate (TFR) (Angka)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	-	-	-	-	-	
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	0.00%	0.00%	0.00%	40	32.65	
6	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	-	-	-	-	-	
7	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	-	-	-	-	-	
8	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	-	-	-	-	
9	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	-	-	-	-	
10	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2	
11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	64.61	69.05	69.4	72.79	74.67	

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
12	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (1000 PUS)	15	14	21	10	10	
14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	31.11	30.71	30.27	23.59	22.48	
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	21.3	19.6	20.91	21.54	21.81	
16	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	66.83	61.33	60.28	47.83	45.14	
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	65.99	64.23	67.43	62.95	75.15	
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	53.67	47.34	51.06	53.02	58.56	
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	38.87	43.34	34.37	42.27	47.2	
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	0	0	0.11	0.11	0.11	
21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	2.56	5.11	2.44	7.33	9	
22	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100	100	100	100	100	
23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	-	30.35	25.77	17.75	20.63	
24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100	
25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%)	-	-	4.31	9.67	7.28	
26	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes (%)			499.3	55.1	66.4	
27	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai	100	100	100	100	100	

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
	dengan standarisasi pelayanan (%)						
28	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
29	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
30	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	0.14	0.71	0.71	1.04	1.93	
31	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	9.35	11.56	23.83	19.63	54.89	
32	Rata-rata usia kawin pertama wanita (Tahun)	-	-	-	-	-	
33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD (%)	-	-	37.62	65.19	83.83	
9	Perhubungan						
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	1,583,393	1,611,095	1,689,617	1,680,146	1,345,436	
2	Rasio ijin trayek (Per 100.000 Penduduk)	2	2	2	2	2	
3	Jumlah uji kir angkutan umum (Unit)	772	629	697	893	631	
4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis	2	2	2	2	2	
5	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	2.5	2.74	2.51	2.6	3.32	
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	17.17	20.54	19.61	13.55	22.19	
7	Persentase Pemasangan Rambu-rambu (%)	79.47	82.42	65.27	65.45	63.2	
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (per 1000)	16	16	20	19	18	
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang/Tahun)	1,582,803	1,609,038	1,688,848	1,680,024	1,344,991	
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (M3/Tahun)	585,781	578,052	602,106	605,771	601,356	
11	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	2,171,752	2,190,308	2,294,687	2,289,155	1,893,357	
10	Komunikasi dan Informatika						

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	0	0	0	0	3.33	
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0.75	0.8	0.83	0.86	0.86	
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	60.12	62.92	66.73	70.74	79.24	
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0.31	0.32	0.33	0.37	0.4	
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						
1	Persentase koperasi aktif (%)	72.59	72.16	71.02	71.32	71.08	
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	30.74	29.74	28.33	30.17	29.88	
3	Persentase BPR/LKM aktif (%)	-	-	-	-	-	
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	99.09	98.77	98.84	99.07	99.11	
12	Penanaman Modal						
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	117	107	95	122	147	129
2	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	164,223	141,276	96,603	268,332	382,322	220,859
4	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	11.91	14.5	22.5	10.56	7.42	n/a
5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	50	-16	-32	178	42.48	94.75
13	Kepemudaan dan Olah Raga						
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	67.9	67.9	67.9	69.3	69.3	
2	Persentase wirausaha muda (%)	1.3	1.56	1.56	1.75	1.75	
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	-	-	-	38.46	38.46	
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	-	-	63.64	68.18	68.18	
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	-	-	63.64	68.18	68.18	
6	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	3	7	10	36	7	
7	Jumlah prestasi olahraga (Cabang)	3	7	10	36	7	
14	Statistik						
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
15	Persandian						
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	-	55	55	75	71.42	
16	Kebudayaan						
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	6	10	12	15	
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	95.45	100	99.32	99.32	
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Buah)	1	3	1	1	0	
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	23	23	37	51	51	
17	Perpustakaan						
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	7.64	7.65	7.67	9.18	9.23	
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	71.74	36.25	35.14	34.41	46.81	
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (per 1000)	1.27	1.24	1.21	1.19	1.16	
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	857	880	902	1,106	1,137	
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	424	394	624	308	1,232	
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	100	100	100	100	100	
18	Kearsipan						
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	2.43	2.43	2.5	2.5	2.04	
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	4	6	7	6	7	
Layanan Urusan Pilihan							
1.	Pariwisata						
1	Kunjungan wisata (%)	119.34	108.69	122.31	100.97	99.48	
2	Lama kunjungan Wisata (Rata-rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun)	2	2	2	2	2	

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
3	PAD sektor pariwisata (%)	4.31	3.87	4.15	3.45	3.51	
2.	Pertanian						
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	18,67	19,68	18,96	17,73	17,60	
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
5	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)						
	Padi	28367	18895	28631	30167	32,444	
	Jagung	5575	5855	4737	6303	5,086	
	Ubi Kayu	223.85	281	177	70.4	70	
	Ubi Jalar	112.88	101	13	18.94	4.6	
	Sagu	85.2	70.61	51.33	33.04	15.59	
6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)						
	Padi	5.63	5.43	5.62	5.88	6.27	
	Jagung	5.07	5.04	6.64	6.79	6,75	
	Ubi Kayu	22.4	20.07	22.13	10.06	70	
	Ubi jalar	12.54	12.63	13	18.94	4.55	
	Sagu	0.35	0.46	0.46	0.29	0.05	
7	Cakupan bina kelompok petani	43.24	94.35	89.43	78.38	50.68	
3	Energi dan Sumber Daya Mineral						
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2	Rasio ketersediaan daya listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
4	Perdagangan						
1	Ekspor Bersih Perdagangan (Nilai/Juta)	-515.211	-692.625	-792.951	-834.666	-802.359	
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
5	Perindustrian						
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	-	-	87,65	13,25	0,00	
6	Transmigrasi						
1	Persentase transmigran swakarsa	0	0	0	0	0	
7	Perikanan						
1	Produksi perikanan (%)	100	86.12	99.6	97.74	103.7	
2	Konsumsi ikan (%)	72.4	80.2	122.06	99.6	100.13	
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	25.64	19.31	21.6	5.69	3.15	
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	75	75	69.11	75	75	
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
7	Nilai tukar nelayan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Penunjang Urusan							
1.	Perencanaan Pembangunan						
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	96.44	86.36	90.29	94.46	79.01	
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	82.72	99.47	87.85	81.98	94.79	
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2.	Kuangan						

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Disclaimer	WDP	WTP	WTP	WTP	
2	Persentase SILPA	0	0	0	0	0	
3	Persentase SiLPA terhadap APBD	1.83	7.87	12.52	5.15	2.25	
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)						
	Persentase program yang tidak terlaksana (%)	1,2	0,6	0,3	0,3	0,6	
	Persentase program yang tidak terlaksana (%)	1,31	1,1	3,7	0,7	1,06	
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	36.54	32.54	27.56	22.22	17.84	
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	15.39	16.4	17.69	18.64	24.48	
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)						
	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD (%)	46.31	46.74	54.86	62.59	64.15	
	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD (%)	53.69	53.26	45.14	37.41	35.85	
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	3.18	2.59	1.51	2.04	1.79	
9	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Hari/Jam Pelajaran)	39/384	97/867	97/867	103/893	103/893	
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	1,3	2,1	0,5	0,7	0,9	
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	23,8	26,0	30,3	30,3	29,3	
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	35	32	36	34	33	
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	947	919	938	900	949	
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Orang)	3012	2951	3021	2261	2217	

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
4.	Penelitian dan pengembangan						
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.(%)	100	90,9	90,9	100	100	
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.(%)	100	80	75	85	36,36	
	Penerapan SIDA:						
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.(%)	0	0	0	0	0	
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah(%)	-	26.08	34.78	26.08	52.1	
5.	Pengawasan						
1	Persentase tindak lanjut temuan	96,48	88,4	70,72	41,60	57,02	
2	Persentase pelanggaran pegawai	0,26	0,40	0,09	0,06	0,04	
3	Jumlah temuan BPK	22	18	15	9	19	
6.	Sekretariat Dewan						
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

2.2.1. Capaian Standar Pelayanan Minimal :

2.2.1.1. Bidang Urusan Pendidikan :

Berikut adalah Capaian SPM Urusan Pendidikan sesuai Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Kota Palopo Tahun 2016-2018 :

Tabel 2.27.
Capaian SPM Pendidikan
Kota Palopo Tahun 2016-2018

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
A.	PENDIDIKAN DASAR OLEH KABUPATEN/ KOTA				
1.	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil				
	PEMBILANG : Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/ MI dalam jarak kurang dari 3 km dan 6 km untuk SMP/MTs	SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
		SMP	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT :Jumlah kelompok permukiman permanen di kab/ kota	MTs	100.00	100.00	100.00
2.	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis				
	PEMBILANG : Jumlah SD/ MI yang semua rombel-nya tidak melebihi 32 orang	SD	90.24	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	90.24	100.00	100.00

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/ kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel	SD	100.00	93.90	93.90
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	100.00	93.90	93.90
	PEMBILANG: Jumlah SMP/ MTs yang semua rombel-nya tidak melebihi 36 orang	SMP	83.33	96.67	96.67
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ MTs di wilayah kabupaten/ kota	MTs	83.33	96.67	96.67
	PEMBILANG: Jumlah SMP/ MTs yang memenuhi kebutuhan ruang kelas meja/ kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel	SMP	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ MTs di wilayah kabupaten/ kota	MTs	100.00	100.00	100.00
3.	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik				
	PEMBILANG: Jumlah SMP/ MTs memiliki ruang lab. IPA yang dilengkapi meja kursi untuk 36 peserta didik	SMP	64.29	129.41	43.33
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ Mts di Kab./ kota	MTs	64.29	129.41	43.33
	PEMBILANG : Jumlah SMP/ MTs memiliki satu set alat praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen	SMP	70.59	123.53	40.00

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ Mts di Kab./ kota	Mts	70.59	123.53	40.00
4.	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru				
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs memiliki satu ruang guru dilengkapi meja dan kursi untuk setiap guru, kep-sek/ madrasah dan staf kependidikan lainnya; serta Jumlah SMP/ MTs yang memiliki ruang kepala sekolah/ madrasah yang terpisah dari ruang guru	SD	81.48	80.49	84.15
		MI	81.48	80.49	84.15
		SMP	72.41	80.00	80.00
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	MTs	72.41	80.00	80.00
5.	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan				
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	SD	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	100.00	100.00	100.00
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI yang memiliki 6 (enam) orang guru [atau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus)	SD	95.12	0.00	0.00
		MI	95.12	0.00	0.00
6.	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap				

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
	rumpun mata pelajaran;n				
	PEMBILANG: Jumlah SMP/ MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran [atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran]	SMP	70.00	70.00	70.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ Mts di wil. Kab./ kota	MTs	70.00	70.00	70.00
7.	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik				
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	SD	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	100.00	100.00	100.00
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	100.00	100.00	100.00
8.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%				
	PEMBILANG: Jumlah SMP/MTs memiliki guru kualifikasi S1 atau D-IV ≥ 70% [daerah khusus ≥ 40%]	SMP	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ Mts Di	MTs	100.00	100.00	100.00

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
	Kabupaten/ kota				
	PEMBILANG: Jumlah SMP/MTs memiliki guru kualifikasi S1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik $\geq 35\%$ [daerah khusus $\geq 20\%$]	SMP	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ Mts Di Kabupaten/ kota	MTs	100.00	100.00	100.00
9.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn				
	PEMBILANG: Jumlah SMP/MTs tersedia guru kualifikasi S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing2 satu orang untuk Matematika, IPA, Bhs. Indonesia, Bhs. Inggris, dan PKn	SMP	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ Mts Di Kabupaten/ kota	MTs	100.00	100.00	100.00
10.	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik				
	PEMBILANG: Jumlah Kepala SD/MI berkualifikasi S-1 atau D-IV dan bersertifikat pendidik	SD	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten/Kota	MI	100.00	100.00	100.00
11.	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik				
	PEMBILANG: Jumlah SMP/MTs memilki Kepala SMP/Mts	SMP	100.00	100.00	100.00

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
	kualifikasi S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik				
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ Mts Di Kabupaten/ kota	MTs	100.00	100.00	100.00
12.	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik				
	PEMBILANG: Jumlah pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat Pendidik	SD	15.85	15.85	15.85
	PENYEBUT: Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten/Kota	MI	15.85	15.85	15.85
13.	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif				
	100 = bila kab/ kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif, 50 = bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan, 0 = bila tidak memiliki rencana			100	100
14.	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan				
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs mendapat kunjungan pengawas satu kali tiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam untuk melakukan supervisi dan	SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
		SMP	96.67	96.67	96.67

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
	pembinaan				
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI atau SMP/ Mts Di Kab./ kota	MTs	96.67	96.67	96.67
B. PENDIDIKAN DASAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN					
15.	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik				
	PEMBILANG: Jumlah set buku teks mata pelajaran (B. Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn) yang ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah	SD	96.63	97.03	97.03
	PENYEBUT: Jumlah peserta didik	MI	96.63	97.03	97.03
	PEMBILANG: Jumlah SD/MI yang memenuhi IP-15.1 di atas	SD	59.76	62.20	62.20
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	59.76	62.20	62.20
16.	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik				
	PEMBILANG: Jumlah set buku teks mapel yang ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan sekolah	SMP	94.52	94.52	94.52
	PENYEBUT: Jumlah peserta didik	MTs	94.52	94.52	94.52
	PEMBILANG: Jumlah SMP/ MTs yang memenuhi IP-16.1 di atas	SMP	86.67	86.67	86.67
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	MTs	86.67	86.67	86.67

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
17.	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA				
	PEMBILANG: Jumlah SD/MI yang memiliki set peraga dan bahan IPA secara lengkap	SD	97.56	97.56	97.56
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	97.56	97.56	97.56
18.	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi				
	PEMBILANG: Jumlah SD/MI yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi	SD	87.80	87.80	87.80
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	87.80	87.80	87.80
	PEMBILANG: Jumlah SMP/ MTs yang memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi	SMP	80.00	80.00	80.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	MTs	80.00	80.00	80.00
19.	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan				
	PEMBILANG: Jumlah guru tetap yang rata-rata jam kerja per minggu = 37.5 jam		100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah seluruh guru tetap di satuan pendidikan				
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI atau	SD	100.00	100.00	100.00

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
	SMP/ MTs yang memenuhi IP 19.1 di atas.	MI	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	SMP	100.00	100.00	100.00
		MTs	100.00	100.00	100.00
20.	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : a) Kelas I-II = 18 jam per minggu; b) Kelas III = 24 jam per minggu; c) Kelas IV-VI = 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII-IX = 27 jam per minggu				
20	PEMBILANG: Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar				
	PENYEBUT: Jumlah seluruh rombongan belajar di satuan pendidikan		99.60	99.60	99.60
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan pembelajaran kelas seperti di atas	SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	SMP	100.00	100.00	100.00
		MTs	100.00	100.00	100.00
21.	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku				
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SD	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	MI	100.00	100.00	100.00
		SMP	100.00	100.00	100.00
		MTs	100.00	100.00	100.00
22.	Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)				

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
	yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampuhnya				
	PEMBILANG: Jumlah guru yang menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya		100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan				
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs yang telah memenuhi IP 22.1	SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	SMP	100.00	100.00	100.00
		MTs	100.00	100.00	100.00
23.	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik				
	PEMBILANG: Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik		100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan				
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs yang telah memenuhi IP 23.1	SD	57.32	58.54	58.54
		MI	57.32	58.54	58.54
	PENYEBUT: Jumlah Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	SMP	58.62	62.07	62.07
		MTs	58.62	62.07	62.07
24.	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester				

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	SMP	100.00	100.00	100.00
		MTs	100.00	100.00	100.00
25.	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik				
	PEMBILANG: Jumlah guru menyampaikan lap. hasil evaluasi mapel dan hasil penilaian peserta didik kepada KepSek pada akhir semester		100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah seluruh guru di satuan pendidikan				
	PEMBILANG: Jumlah SD atau MI yang telah memenuhi IP 25.1	SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	SMP	100.00	100.00	100.00
		MTs	100.00	100.00	100.00
26.	Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas(UKK) serta Ujian Akhir(US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/ kota atau Kantor Kemenag Kab/ kota pada setiap akhir semester				
	PEMBILANG: Jumlah satuan pendidikan menyampaikan lap.		100.00	100.00	100.00

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
	hasil UAS dan UKK serta US/UN kepada orang tua peserta didik				
	PENYEBUT: Jumlah satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota				
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs yang menyampaikan rekap hasil tes tengah tahunan kepada Dis Dik kab./kota/Kantor Agama kab./kota pada akhir semester	SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	SMP	100.00	100.00	100.00
		MTs	100.00	100.00	100.00
27.	Manajemen Sekolah: Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)				
	PEMBILANG: Jumlah satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan		100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota				
	PEMBILANG: Jumlah satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunan		100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota				
	PEMBILANG: Jumlah satuan pendidikan yang memiliki Komite Sekolah yang berfungsi baik		100.00	100.00	100.00

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
	PENYEBUT: Jumlah satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota				

2.2.1.2. Bidang Urusan Kesehatan :

Berikut adalah Capaian SPM Urusan Kesehatan Kota Palopo Tahun 2013-2017 :

Tabel 2.28.
Capaian SPM Kesehatan
Kota Palopo Tahun 2013-2017

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal			Capaian Kinerja				
					2013	2014	2015	2016	2017
		Indikator		Target Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)
I	Pelayanan Kesehatan Dasar	1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.	95	92.72	93.28	92.25	90.69	92.8
		2	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.	80	68.13	60.89	74.2	76.49	70.63
		3	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	90	100	93.14	96.31	93.99	95.79

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal			Capaian Kinerja				
					2013	2014	2015	2016	2017
		Indikator		Target Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)
		4	Cakupan pelayanan Ibu Nifas	90	100	90.42	91.81	93.17	91.22
		5	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80	54.28	34.63	77.43	75.06	67.79
		6	Cakupan kunjungan bayi.	90	95.23	96.9	94.5	95.75	100.78
		7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	100	95.83	97.92	95.83	97.92	95.83
		8	Cakupan pelayanan anak balita.	90	48.78	41.31	42.97	56.36	62.51
		9	Cakupan pemberian makanan pendamping	100	100	100	100	100	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal			Capaian Kinerja				
					2013	2014	2015	2016	2017
		Indikator		Target Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)
			ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.						
		10	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100
		11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100	98.78	98.78	94.66	98.81	97.52
		12	Cakupan peserta KB Aktif	70	64.61	69.05	69.4	72.79	74.67
		13	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit						
		A.	<i>Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000</i>	≥ 2	2	0	2	2	0

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal			Capaian Kinerja				
					2013	2014	2015	2016	2017
		Indikator		Target Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)
			<i>penduduk < 15 tahun</i>						
		B.	<i>Penemuan Penderita Pneumonia Balita</i>	100	1,73	6,40	8,64	3,15	6,19
		C.	<i>Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif</i>	100	93,53	101,98	83,47	108,56	138,07
		D.	<i>Penderita DBD yang Ditangani</i>	100	100	100	100	100	100
		E.	<i>Penemuan Penderita Diare</i>	100	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
		14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100
II	Pelayanan Kesehatan Rujukan	15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat	100	100	100	100	100	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Capaian Kinerja				
				2013	2014	2015	2016	2017
		Indikator	Target Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)
			miskin.					
		16	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	100	100	100	100	100
III	Penyelidikan	17	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100	100	100	100	100
IV	Promosi	18	Cakupan Desa Siaga Aktif	80	100	100	100	100

2.2.1.3. Bidang Urusan Perumahan dan Pemukiman :

Berikut adalah Capaian SPM Urusan Perumahan & Pemukiman Kota Palopo Tahun 2013-2017 :

Tabel 2.29.

**Capaian SPM Perumahan & Pemukiman
Kota Palopo Tahun 2016-2018**

No	Jenis Pelayanan Dasar skala Kab/Kota	Standar Pelayanan Minimal		Batas Wakt u Penc apaia n	Capaian Kinerja					Satuan Kerja/Lembag a Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Targe t		201 3	201 4	2015	201 6	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1.Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	2009 - 2025	55,3 8	53,7 8	69,1 6	76,4 2	79,39	Dinas perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan	Sesuai tata ruang dan perizinan

No	Jenis Pelayanan Dasar skala Kab/Kota	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Capaian Kinerja					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Target		2013	2014	2015	2016	2017		
		2.Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	2009 - 2025	81,06	82,14	84,78	85,04	92,10	Dinas perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan	Tercapainya fasilitasi keterjangkauan menghuni rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan	3.Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung	100%	2009 - 2025	37,50	17,50	18,60	20,00	20,98	Dinas perumahan atau Dinas yang	Sesuai tata ruang dan perizinan

No	Jenis Pelayanan Dasar skala Kab/Kota	Standar Pelayanan Minimal		Batas Wakt u Penc apaia n	Capaian Kinerja					Satuan Kerja/Lembag a Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Targe t		201 3	201 4	2015	201 6	2017		
	utilitas umum (PSU)	dengan PSU								menangani bidang perumahan	

2.2.2. Capaian Kinerja SDG's/TPB

Tabel. 2.30.

**Tabel Capaian Indikator Kinerja SDGs/TPB Kota Palopo
Tahun 2016-2017**

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8.74	8.78
2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	95.16	103.95
3	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	37	37
4	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	3.09	1.58
5	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	3104	3769
6	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	93.99	100.41
7	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	108.6	106.81
8	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-	72.79	74.67

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
	49 tahun yang berstatus kawin.		
9	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	N/A	93.43
10	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	91.24	99.58
11	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	11.36%	7.10%
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	95.37	99.23
13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	76.61	77.89
14	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	N/A	93.57
15	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	15005	N/A
16	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Meninggal 0; Hilang 0; Mengungsi 121,4	Mengungsi 45,22
17	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	0	0
18	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	100	100

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
19	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	100	100
20	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	0	0
21	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	N/A	N/A
22	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	N/A	N/A
23	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0	0
24	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	44.32%	58.07%
25	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pend 22,22; Kes 18,64	Pend. 17,84 ; Kes. 24,48
26	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	10	8.4
27	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	2.14	2.37

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
28	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Sedang 19,37; Berat 27,97	Sedang 14,42; Berat 30,6
29	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	90	91.02
30	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	28.8	26.21
31	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	N/A	N/A
32	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1.6	1.71
33	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	0.15	0.18
34	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	N/A	N/A
35	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	PPH 90, KI 50,82	PPH 92,5
36	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	135,16 jt	168,4 jt
37	Angka Kematian Ibu (AKI).	4 Jiwa	2 jiwa (67,59)
38	Proporsi perempuan pernah kawin	94.29	94.29

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
	umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.		
39	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	93.99	100.41
40	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	4.36	2.03
41	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	7.62	5.41
42	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	2.18	2.03
43	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	97.92	95.83
44	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0.08	0.04%
45	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	204.72	250.41
46	Kejadian Malaria per 1000 orang.	1.7	0.2
47	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	0	0
48	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	0	0
49	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	0	0
50	Jumlah provinsi dengan eliminasi	0	0

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
	Kusta.		
51	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	0	0
52	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.	N/A	N/A
53	Prevalensi tekanan darah tinggi.	41.88	11.05
54	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	34.41	37.8
55	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	N/A	N/A
56	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	N/A	N/A
57	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	N/A	N/A
58	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	N/A	N/A
59	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	66.42	70.89
60	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	72.79	74.67
61	Angka penggunaan metode	21.54	21.81

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
	kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.		
62	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	N/A	N/A
63	Total Fertility Rate (TFR).	N/A	N/A
64	Unmet need pelayanan kesehatan.	23.59	22.48
65	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	90.75	101.61
66	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	95.16	103.95
67	Proporsi kematian akibat keracunan.	0	0
68	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	N/A	25.04
69	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100	100
70	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	100	100
71	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	N/A	97.45
72	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	79.48	94.7
73	Persentase SMP/MTs berakreditasi	65.51	81.8

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
	minimal B.		
74	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	111.66	105.91
75	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	86.17	84.91
76	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	15.03	
77	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	N/A	16.54
78	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	5.71	28.85
79	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	N/A	N/A
80	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	96.41	98.02
81	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	99.83	99,41 & 97,45
82	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan	N/A	N/A

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
	materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		
83	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	N/A	SD (50,61); SMP (54,79); SMA (57,69), SMK (52,46)
84	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	N/A	2
85	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	6	3
86	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	N/A	N/A
87	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0.02	0.09
88	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	7.09	22.07

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
89	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	0.96	1.00
90	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	N/A	N/A
91	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	N/A	12.9
92	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	20%	20%
93	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	11.76	11.76%
94	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	N/A	N/A
95	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	23.59	22.48
96	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	66.42	70.89
97	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	70.74	79.24

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
98	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	86	93.43
99	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	320m3/detik	550l/detik
100	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	86	93.43
101	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	N/A	N/A
102	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	86.58	99.58
103	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	9	9
104	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	N/A	9
105	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	0	180 skala lingkungan
106	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	0	0

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
107	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	1	1
108	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	0	0
109	Kualitas air danau.	N/A	N/A
110	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Menenuhi Standar	Menenuhi Standar
111	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	0	0
112	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	0	0
113	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	0	0
114	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	2	2
115	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	0	0
116	Bauran energi terbarukan.	N/A	N/A
117	Intensitas energi primer.	N/A	N/A
118	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	6.9	7.1
119	PDB per kapita.	34,2 juta	37,0 juta

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
120	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	76.66	70.56
121	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	N/A	N/A
122	Persentase tenaga kerja formal.	47.72	N/A
123	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	N/A	N/A
124	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	16.85	19.65
125	Upah rata-rata per jam pekerja.	14,062	15,200
126	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	14.43	10.96
127	Tingkat setengah pengangguran.	26.01	23.18
128	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	N/A	N/A
129	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	1.16	8.45
130	Jumlah wisatawan mancanegara.	207	622
131	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	95,711	98,895
132	Jumlah devisa sektor pariwisata.	3.45	3.51
133	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	30.75	32.07

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
134	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	N/A	20
135	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	<3km	<3km
136	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	9.26	9,26(2016)
137	Panjang pembangunan jalan tol.	0	0
138	Panjang jalur kereta api.	0	0
139	Jumlah dermaga penyeberangan.	0	0
140	Jumlah pelabuhan strategis.	1	1
141	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	2.96	2.91
142	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	5.1	3.57
143	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	3.3	6.18
144	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	N/A	N/A
145	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	N/A	N/A
146	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	0.0038	0.0036
147	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	0.08	0.09
148	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	70.74	79.24
149	Proporsi individu yang menggunakan internet	0.08	0.09

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
150	Koefisien Gini.	0.37	0.34
151	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8.74	8.78
152	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	N/A	N/A
153	Indeks Kebebasan Sipil.	N/A	N/A
154	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	0	0
155	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	37	37
156	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	0.16	0.16
157	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	N/A	N/A
158	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	N/A	N/A
159	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	N/A	N/A
160	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	0	0

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
161	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	0	0
162	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	0	0
163	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	43	43
164	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	0	0
165	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	1	1
166	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Mengungsi 121,4	Meninggal 0; Hilang 0; Mengungsi 45,22
167	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	N/A	N/A
168	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	0	0
169	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	0	0
170	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	N/A	1,173,000,000
171	Persentase sampah perkotaan yang	84.47	91.66

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
	tertangani.		
172	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	0	0
173	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	0	1
174	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	0	0
175	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	0	0
176	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	410 kg	410 kg
177	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	1.5	1.6
178	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	0	0
179	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	0	0
180	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	0	0
181	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan	0	0

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
	daerah.		
182	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Mengungsi 121,4	Meninggal 0; Hilang 0; Mengungsi 45,22
183	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	58.39	58.39
184	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	0	0
185	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	0	0
186	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	0	0
187	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	N/A	N/A
188	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0	0
189	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	N/A	1.29
190	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	N/A	N/A
191	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau	0	0

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
	agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.		
192	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	7.09	22.07
193	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	0	0
194	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	N/A	N/A
195	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	N/A	N/A
196	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	WTP
197	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	CC	C
198	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	N/A	N/A
199	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/	60.42	62.44

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
	Kabupaten/Kota).		
200	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Hijau	Hijau
201	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	5	5
202	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	7	7
203	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	N/A	83.63
204	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	N/A	87.98
205	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	N/A	93.57
206	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	0	0

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
207	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	0	0
208	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	2.23	2.78
209	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0.33	0.42
210	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	13.35	14.55
211	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	N/A	N/A
212	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	N/A	N/A
213	Proporsi individu yang menggunakan internet.	0.08	0.09
214	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0	0
215	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0	0
216	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas	100	98.05

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
	dengan kualitas data statistik.		
217	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	95.83	88.9
218	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	0	5
219	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	N/A	N/A
220	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	0	0
221	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	5587	6399
222	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	99.31	99

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Tabel 2.31.

**Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Sampai dengan Triwulan II 2019**

No	KOTA PALOPO	RATA- RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN II TA. 2019		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN II TA. 2019		KET
		KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN	
1	2	3		4		5
1	Dinas Pendidikan	32.07	5.49	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2	Dinas Kesehatan	28.84	23.37	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3	Badan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah	19.00	21.90	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4	Dinas Pekerjaan Umum (PU)	24.49	4.02	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5	Kantor Pemadam Kebakaran	29.46	43.63	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
6	Dinas Persandian dan Statistik	50.04	49.04	Rendah	Sangat Rendah	
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	53.95	39.94	Rendah	Sangat Rendah	
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.50	50.66	Sangat Rendah	Rendah	
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)	37.78	36.82	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
10	Dinas Perumahan dan Permukiman	27.35	10.04	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	14.88	22.54	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
12	Dinas Ketenaga Kerjaan	41.88	18.36	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
13	Dinas Sosial	43.41	45.31	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
14	Badan Penelitian dan Pengembangan	34.06	34.32	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
15	Dinas Koperasi dan UMKM	33.90	33.83	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	33.31	32.20	Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	KOTA PALOPO	RATA- RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN II TA. 2019		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN II TA. 2019		KET
		KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN	
17	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	40.65	42.00	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	36.56	25.47	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
19	Dinas Perhubungan	31.58	42.04	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
20	Satuan Polisi Pamong Praja	44.76	47.01	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
21	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	56.35	44.12	Rendah	Sangat Rendah	
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52.22	45.96	Rendah	Sangat Rendah	
23	Sekretariat Daerah (SEKDA)	42.42	40.46	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
24	Sekretariat DPRD	38.78	37.43	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
25	Inspektorat	64.12	30.67	Rendah	Sangat Rendah	
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	38.20	41.97	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
27	Badan Pendapatan Daerah	17.64	35.21	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
28	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	25.28	22.20	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
29	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan	49.61	39.79	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
30	Dinas Kearsipan	29.99	35.70	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
31	Dinas Pertanahan	61.06	8.24	Rendah	Sangat Tinggi	
32	Dinas Perpustakaan	46.26	18.62	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
33	Dinas Pertanian, dan Peternakan, Perkebunan	76.70	32.51	Sedang	Sangat Rendah	
34	Dinas Perindustrian	74.16	36.85	Sedang	Sangat Rendah	
35	Dinas Pariwisata	58.08	10.97	Rendah	Sangat Rendah	
36	Dinas Kebudayaan	46.88	33.21	Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	KOTA PALOPO	RATA- RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN II TA. 2019		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN II TA. 2019		KET
		KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN	
37	Dinas Transmigrasi	47.91	25.71	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
38	Dinas Perdagangan	56.16	51.47	Rendah	Rendah	
39	Dinas Pengendalian Penduduk & KB	40.85	18.11	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
40	Dinas Perikanan	52.38	18.95	Rendah	Sangat Rendah	
41	Kecamatan Sendana	31.89	12.77	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
42	Kecamatan Bara	61.49	18.71	Rendah	Sangat Rendah	
43	Kecamatan Mungkajang	74.96	15.17	Sedang	Sangat Rendah	
44	Kecamatan Telluwanua	50.21	10.46	Rendah	Sangat Rendah	
45	Kecamatan Wara Timur	19.86	13.08	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
46	Kecamatan Wara Barat	42.02	10.06	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
47	Kecamatan Wara Selatan	57.85	15.17	Rendah	Sangat Rendah	
48	Kecamatan Wara Utara	49.05	12.14	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
49	Kecamatan Wara	22.05	5.82	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Jumlah Total		41.83	27.95	Sangat Rendah	Sangat Rendah	

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.4.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa dating dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Berikut adalah rumusan permasalahan pembangunan daerah Kota Palopo Tahun 2019 yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah :

Tabel 2.32.
Permasalahan Daerah yang Berhubungan
Prioritas Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah			
No	Masalah		Akar Masalah
1	Tingkat Pengangguran adalah yang Tertinggi di Sulsel	1	Pengembangan Jiwa Kewirausahaan dan Usaha Ekonomi Kerakyatan Belum Optimal
		2	Skala Investasi yang Masuk Belum Signifikant Mampu Menyediakan Lapangan Kerja Baru
		3	Tingginya Pertumbuhan Angkatan Kerja Belum Berbanding Lurus dengan Ketersediaan Lapangan Kerja
		4	Cakupan Pembinaan dan Pelatihan Kompetensi Teknis Tenaga Kerja Oleh Pemerintah Belum Memadai
		5	Tingginya Arus Urbanisasi Pencari Kerja ke Kota Palopo yang salah satu pemicunya adalah kerjasama antara pemerintah daerah yang berdekatan belum optimal
		6	Kualitas dan Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (Vokasional) belum memadai dan Kurang <i>Match Link</i> dengan Lapangan Kerja yang Tersedia
		7	Penegakan atas kewajiban pemberi kerja untuk memberikan perlindungan, jaminan sosial ketenagkerjaan belum optimal
		8	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Fasilitasi Pencari dan Pemberi Kerja Belum Optimal
2	Tingkat Kemiskinan Masih Diatas Target Minimal Nasional	9	Peran dan sinergi SKPD dalam upaya Melembagakan, Membina dan Memperkuat Kelembagaan dan SDM Masyarakat Miskin dan Rentan Belum Optimal

Permasalahan Pembangunan Daerah			
No	Masalah		Akar Masalah
		10	Fokus Penanganan Kemiskinan Kota Palopo lebih banyak menysasar sasaran skala rumah tangga, kurang menyentuh skala komunitas, pengembangan usaha mikro, peningkatan kompetensi (human capital) berbasis gender, dan perluasan dan pengembangan jenis dan jumlah program <i>pro poor</i> dari setiap SKPD
		11	Penanganan kemiskinan berbasis komunitas yang dilakukan pun masih belum berbasis potensi wilayah domisili dan sektor penghidupan masyarakat miskin sehari-hari
		12	Penanganan kemiskinan Kota Palopo belum inklusif dan berbasis pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat miskin bisa ikut serta berpartisipasi didalamnya (sebagai pelaku) sekaligus sebagai penerima manfaat program program pembangunan
		13	Cakupan dan upaya peningkatan dan perbaikan akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan dan upaya mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin, masih perlu dioptimalkan.
		14	Upaya penanganan kemiskinan Antar Lembaga Non Government - NGO (sektor private dan Lembaga Keagamaan) masih sektoral dan belum terkoordinir
		15	Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal

Permasalahan Pembangunan Daerah			
No	Masalah		Akar Masalah
3	Ancaman Ketimpangan Antar Wilayah Makin Melebar	16	Trend Penurunan Kontribusi Sektor Primer Terutama Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo setiap tahunnya, memicu urbanisasi angkatan kerja produktif masuk ke Kota Palopo
		17	Pengembangan Agro Wisata dan Agro Bisnis pada sentra sentra produktif yang lebih berorientasi pada komunitas belum berkembang dengan baik yang menyebabkan terbatasnya akses golongan masyarakat bawah dalam kegiatan ekonomi produktif
		18	Industri Pengolahan yang berbasis Peningkatan Nilai Tambah Produk belum berkembang dengan baik di wilayah produktif dan potensial
		19	Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar seperti Jalan, Air Bersih dan Sanitasi dan Infrastruktur Telekomunikasi, Transportasi dan Komunikasi di luar Kota, belum sebaik di sekitar wilayah pusat kota
		20	Pengembangan wilayah, kawasan strategis cepat tumbuh, serta penataan pusat pusat industri berskala rumah tangga, perdagangan dan jasa yang berbasis kluster dan komoditas, yang bersinergi dengan sektor perhubungan, transportasi dan komunikasi, belum banyak diimplementasikan
		21	Upaya pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan baru lainnya seperti rencana pengembangan kawasan transmigrasi berjalan lambat
4	Pendapatan Per Kapita dan Daya Beli Jauh dibawah Rata-Rata Sulsel dan Nasional	22	Pengembangan Usaha Kecil Menengah termasuk koperasi, Lembaga Keuangan Mikro dan Industri Kreatif Masyarakat yang berbasis sumber daya lokal belum banyak didukung oleh insentif pemerintah dan fasilitasi

Permasalahan Pembangunan Daerah			
No	Masalah		Akar Masalah
			pendanaan akibat kelembagaan usaha yang lemah
		23	Pengembangan inovasi dan daya saing produk pada lapangan usaha sektor jasa, industri makanan dan minuman, perdagangan, dan pertanian, belum optimal
		24	Upaya Pengendalian Inflasi Daerah Lebih banyak bersifat situasional dan belum fokus pada upaya intervensi pada penyebab utama inflasi daerah secara bersinergi dan berkesinambungan
		25	Pengembangan Industri Pengolahan yang padat modal dan teknologi terutama pada sejumlah komoditas penyebab inflasi oleh pemerintah, belum memadai
		26	Minimnya jumlah dan nilai proyek padat karya pada perangkat daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo
		27	Advokasi, Edukasi dan Penyusunan Regulasi Daerah tentang Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Pada Proyek Investasi Padat Karya Pemerintah, masih minim
		28	Cakupan Pengawasan dan Penegakan atas kewajiban pemberi kerja untuk memberikan upah layak, belum optimal
		29	Angka Pertumbuhan Penduduk dan Upaya Pengendaliannya sebagai salah satu faktor yang memberikan pengaruh cukup besar, di beberapa wilayah kinerjanya belum optimal.
5	Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Trend Peningkatan Belanja Daerah Masih Sangat Kecil	30	Terbatasnya kemampuan pendanaan pemerintah untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendukung di wilayah potensial sumber PAD

Permasalahan Pembangunan Daerah			
No	Masalah		Akar Masalah
		31	Model pengelolaan PAD yang partisipatif dengan melibatkan sumber daya lokal yang sudah melembaga dengan baik atau dengan sektor private (dunia usaha) , belum optimal pelaksanaanya
		32	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penarikan Retribusi Daerah belum maksimal
		33	Ketersediaan dan dukungan regulasi daerah yang belum optimal atas pengembangan potensi pengelolaan PAD
		34	Upaya Intensifikasi dan Diversifikasi Sumber PAD termasuk dukungan SKPD Pengelola PAD, cukup banyak yang diperhadapkan pada tingkat kesadaran masyarakat dalam berkontribusi dalam meningkatkan PAD
		35	Upaya pengawasan dan penatakelolaan retribusi daerah atau sumber PAD lainnya masih belum optimal
		36	Pengembangan daya tarik sektor kepariwisataan dan pengelolaan seni dan budaya daerah, belum optimal meningkatkan pendapatan daerah
6	Kualitas dan Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kesenjangan Sosial Belum Merata pada semua Wilayah	37	Keberadaan dan pemerataan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan dasar antar wilayah belum merata, dan pada beberapa wilayah aksesibilitasnya belum nyaman untuk dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat terutama bagi lansia, difabel dan kalangan anak
		38	Kompetensi dan persoalan distribusi tenaga pelayanan dasar pemerintah yang berkompetensi belum merata di seluruh wilayah, dimana selama ini masih lebih banyak terpusat pada wilayah di sekitar kota.

Permasalahan Pembangunan Daerah			
No	Masalah		Akar Masalah
		39	Pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kemampuannya menjangkau dan menikmati pelayanan dasar belum optimal, sehingga masih ada kelompok masyarakat yang sangat terbatas kemampuannya mengakses pelayanan dasar pemerintah
		40	Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai dan menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan dasar, sehingga masih ada target Standar Pelayanan Minimal yang belum tercapai, termasuk insentif daerah bagi penyediaan perumahan terjangkau, penuntasan kawasan kumuh, akses sanitasi dan air bersih (air minum) masyarakat
		41	Kerjasama daerah dan pelibatan sektor swasta dalam penanganan pelayanan dasar dan masalah sosial belum banyak dikembangkan
7	Tantangan Pengelolaan Lingkungan dan Tekanan Terhadap Ruang Terbuka Hijau Terus Meningkat	42	Meningkatnya potensi jumlah dan Jenis Sampah Kota Palopo dan Limbah Masyarakat yang makin beragam, belum berbanding lurus dengan penyiapan sarana dan prasarana yang memadai
		43	Kualitas dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai pusat Aktivitas Publik Masyarakat yang Nyaman Bagi Semua Kalangan Termasuk Anak, Lansia dan Kaum Difabel, sekaligus mencirikan identitas Kota Palopo, Belum Optimal
		44	Pengembangan ruang terbuka hijau daerah kerap kali diperhadapkan oleh persoalan lahan masyarakat, status kepemilikan ganda, dan konflik internal pemilik lahan

Permasalahan Pembangunan Daerah			
No	Masalah		Akar Masalah
8	Potensi Peningkatan Kasus Kriminalitas Daerah	45	Jumlah dan kompetensi aparaturnya terkait fungsi ketertiban dan kenyamanan daerah belum berbanding dengan pertumbuhan penduduk
		46	Peran dan partisipasi masyarakat, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan daerah masih perlu diakselerasi
		47	Tingginya urbanisasi dan kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah dan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk belum optimal
		48	Penanganan masalah kesejahteraan sosial, pelestarian nilai budaya dan nilai kearifan lokal yang diarahkan pada upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan daerah belum bersinergi
9	Potensi Daerah Rawan Bencana Semakin Luas	49	Tumbuhnya pemukiman baru dan lahan budidaya masyarakat yang dilaksanakan di kawasan rawan longsor, kebakaran, banjir, dan abrasi
		50	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana pada daerah rawan dan potensial masih minim
		51	Ketaatan pada tata ruang dan upaya penataan kawasan pemukiman yang belum baik, semakin memicu peningkatan potensi bencana kebakaran
		52	Pembukaan pusat ekonomi masyarakat pada wilayah pesisir kurang tertata dengan baik
		53	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mitigasi Bencana Belum Maksimal
10	Daerah Produktif Terancam Pembangunan Sektor Lain	54	Regulasi Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Belum Ada yang berimplikasi pada konsep Ketahanan dan Penyediaan Pangan

Permasalahan Pembangunan Daerah			
No	Masalah		Akar Masalah
			Daerah
		55	Produktifitas Lahan Lebih Rendah dibandingkan nilai jual akibat infrastruktur yang belum memadai dan Pengelolaannya Belum Berkelanjutan
		56	Partisipasi dan Penguatan Upaya Penanganan Ancaman Pencemaran, Ketersediaan dan Sustainability Pasokan Sumber Air Bersih oleh Masyarakat, Pemerintah dan Sektor Private belum berkelanjutan dan bersinergi
11	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Belum Kompetitif	57	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Masih Minim
		58	Inovasi Daerah dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Dalam Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik yang Aksesibel dan Nyaman Bagi Semua Kalangan (Gender, Ramah Ana, Lansia, dan Kaum Difabel) Belum Mengemuka
		59	Pola pola kerjasama pemerintah dengan sektor private dalam hal pembiayaan pembangunan belum berkembang jauh
		60	Kualitas dan kompetensi dan motivasi aparatur serta tata kelola layanan organisasi pemerintah yang berstandar dan terukur masih lemah
		61	Penegakan dan Komitmen Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada semua SKPD belum merata
		62	Masih ada Tata Laksana Pelayanan Publik Belum Berstandar dan Belum Memiliki SOP

Permasalahan Pembangunan Daerah			
No	Masalah		Akar Masalah
		63	Kualitas SAKIP Pemerintahan Daerah masih sangat kurang
		64	Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai salah satu instrumen peningkatan pertumbuhan ekonomi belum berperan banyak
		65	Pertumbuhan Belanja dan Pendapatan Asli Daerah belum berbanding lurus
		66	Penganggaran Spending Moneter Belum tercapai
		67	Sinergi antara pemerintah daerah masih sangat minim

2.4.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

(1) Urusan Pendidikan

1. Penyebaran lembaga dan prasarana pendidikan pada semua jenjang masih banyak terfokus di Kecamatan di dekat wilayah perkotaan.
2. Pertumbuhan jumlah anak usia sekolah pada tingkat pendidikan dasar belum berbanding lurus dengan penyediaan sarana dan prasarana gedung sekolah.
3. Rasio guru dan murid menunjukan trend negatif dan tidak berimbang, termasuk rasio antara jumlah lulusan pendidikan dasar dengan ketersediaan dan daya tampung gedung sekolah pada jenjang pendidikan di atasnya.
4. Pendidikan non formal dan pendidikan luar biasa belum berkembang dengan baik dan berstandarisasi.
5. Penerapan standar nasional dan standar pelayanan minimal pendidikan masih terbatas pada sekolah di dalam kota sementara di luar kota masih berkutat pada persoalan akses terhadap pendidikan.

6. Penyebaran tenaga pendidik belum merata dan lebih banyak terkonsentrasi pada sekolah-sekolah di kota, termasuk penyebaran tenaga pendidikan yang bersertifikasi.
7. Pembinaan terhadap kelompok belajar masyarakat belum optimal dalam mendorong pendidikan kesetaraan
8. Penguatan dan pemberian peran yang lebih besar kepada Dewan Pendidikan belum konsisten.
9. Masih adakasuspembebanan biaya tambahan pendidikan seperti iuran komite dan iuran lainnya yang menghambat partisipasi masyarakat dalam akses pendidikan.

(2) Urusan Kesehatan

1. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan belum mencakupi seluruh unsur pelayanan yang dipersyaratkan.
2. Partisipasi masyarakat miskin terhadap Jaminan Kesehatan Nasional masih belum memadai, akibat keterbatasan ekonomi.
3. Ketersediaan jumlah angkutan medis (ambulance) dan jangkauan pelayanan masih terbatas.
4. Jumlah dan ketersediaan ruang rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (Rumah Sakit) belum memadai.
5. Rasio jumlah balita dan posyandu dari waktu ke waktu terus menunjukkan trend yang tidak berimbang. Demikian halnya dengan rasio ideal pelayanan dokter umum, dokter spesialis terhadap jumlah pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (RS).
6. Penyebaran dan distribusi keberadaan puskesmas terakreditasi, ketersediaan ruang rawat inap, ketersediaan obat dan peralatan esensial, termasuk perbaikan sarana dan prasarana faskes tingkat pertama lebih banyak terpusat di sekitar kota. Demikian halnya dengan pelayanan kesehatan dan keselamatan anak dan balita termasuk ibu hamil dan melahirkan serta bagi lansia.
7. Koordinasi dengan perangkat daerah lain belum optimal terkait pembukaan dan peningkatan kualitas jalan dari beberapa

pemukiman masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan.

8. Upaya mengembangkan obat asli dengan memanfaatkan potensi lokal belum memadai.
9. Upaya penanggulangan penyakit menular dan penciptaan lingkungan yang sehat, perbaikan gizi, dan promosi kesehatan lainnya belum optimal.
10. Standar dan cara pelayanan tenaga kesehatan masih sering dikeluhkan pasien, terutama dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan status RSUD Sawerigading menjadi RS Rujukan di Luwu Raya.
11. Penyediaan dan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana di RSUD diperhadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

(3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai belum memadai.
2. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir belum optimal.
3. Pembangunan prasarana pengaman pantai belum memadai.
4. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan di kawasan pesisir dan daerah luar kota belum memadai dan belum merata.
5. Koordinasi dengan sejumlah stake holder terkait yang membutuhkan penanganan akses jalan dan jembatan, belum terjalin dengan baik seperti akses jalan jembatan ke fasilitas kesehatan, pendidikan, sentra produksi/budidaya.
6. Koordinasi perencanaan dan pemanfaatan serta pengelolaan tata ruang dan perencanaan infrastruktur jaringan belum memadai.
7. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau belum maksimal.

8. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan serta perlindungan ruang terbuka hijau masih minim.
9. Eksistensi lahan budidaya secara khusus lahan pertanian di Kota Palopo terus tertekan oleh pengembangan sektor lain seperti perumahan dari waktu ke waktu.
10. Jaringan irigasi kabupaten sebagian mengalami kerusakan sehingga kurang efektif dalam layanan air.

(4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Pengembangan perumahan dan lingkungan sehat perumahan belum optimal dalam menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan perumahan, termasuk masih adanya rumah layak huni.
2. Pemberdayaan komunitas perumahan belum memadai dalam penataan pemukiman termasuk penataan lingkungan pemukiman kumuh.
3. Pengelolaan areal pemakaman belum optimal
4. Belum tercukupinya dukungan prasarana dan sarana umum (PSU) dalam menghadirkan lingkungan perumahan/pemukiman yang sehat dan aman.

(5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal kurang bersinergi antar stakeholder
2. Fasilitas, sarana-prasarana serta kapasitas SDM Satpol PP dalam penegakan Perda secara menyeluruh belum memadai.
3. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban, termasuk pelibatannya dalam pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) dan menjaga keamanan, belum memadai.
4. Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dalam masyarakat termasuk pada lingkungan perumahan belum memadai.

5. Kecukupan sarana dan prasarana serta peralatan penanganan kebakaran belum memadai dalam memenuhi tingkat waktu tanggap (response time rate) yang baik pada wilayah manajemen kebakaran (WMK).
6. Kapasitas dalam penyediaan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum berkembang seiring dengan tuntutan/kebutuhan.
7. Kapasitas dan kerjasama stakeholder daerah dalam pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat, serta deteksi dini dan pencegahan konflik sosial, masih rendah.

(6) Urusan Sosial

1. Data mutakhir untuk keseluruhan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS dalam berbagai kelompok/golongan belum tersedia dengan cukup sebagai dasar dalam penanganan PMKS.
2. Ketersediaan sumberdaya manusia, finansial dan sarana-prasarana dalam penanganan, pemberian bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS masih terbatas.
3. Kemampuan panti sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) dalam penyediaan sarana pelayanan sosial dan prasarana kesejahteraan sosial masih terbatas.
4. Kemampuan SDM dan sarana-prasarana dalam rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, anak terlantar di luar panti, lanjut usia terlantar di luar panti, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, masih terbatas.
5. Kemampuan SDM dan sarana-prasarana dalam evakuasi, bantuan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana masih terbatas.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

(1) Urusan Tenaga Kerja

1. Data yang lengkap tentang pekerja dan pencari kerja untuk kepentingan penyaluran pencari kerja, keselamatan dan perlindungan pekerja, serta kepesertaan dalam program Jamsostek belum tersedia secara termutakhirkan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kesempatan kerja (bursa kerja) belum memadai dalam kondisi peluang kesempatan kerja dan lapangan berusaha tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja.
3. Cakupan besaran pencari kerja dan tenaga kerja dalam pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat, dan pelatihan kewirausahaan belum memadai.
4. Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan belum memadai.

(2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Kompetensi dan peluang perempuan untuk bersaing pada pekerjaan di lembaga pemerintah, DPRD dan lembaga swasta belum memadai.
2. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak secara fisik dan psikologis menunjukan trend yang terus meningkat.
3. Kapasitas unit pelayanan terpadu dalam penanganan pengaduan, rehabilitasi sosial, layanan kesehatan dan layanan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan masih terbatas.
4. Kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum efektif dalam pengintegrasian pada kebijakan dan penganggaran.
5. Kapasitas dalam layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan belum memadai.
6. Akses dan kemampuan perempuan dalam partisipasi pendidikan

dasar, menengah dan perguruan tinggi serta pendidikan kesetaraan melek huruf masih tertinggal.

(3) Urusan Pangan

1. Koordinasi dan penanganan daerah rawan dengan stake holder lain yang terkait belum efektif
2. Pemantauan dan analisis akses pangan, harga pangan, cadangan pangan dan pengembangan model distribusi, pemasaran hasil, dan sistem informasi pangan yang efisien belum memadai
3. Diversifikasi pemanfaatan pangan masyarakat belum optimal dalam mendukung pemenuhan pangan berimbang sesuai pola pangan harapan.
4. Sinergi dan koordinasi dengan stake holder terkait dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan belum optimal

(4) Urusan Pertanahan

1. Pengembangan sistem informasi dan pendaftaran tanah belum memadai dalam mendukung sertifikasi tanah.
2. Penataan penguasaan, pemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah belum optimal dalam mencegah dan menyelesaikan kasus tanah negara maupun tanah masyarakat.
3. Pengembangan komunikasi dan informasi secara bersinergi dengan perangkat daerah lain belum optimal termasuk dalam penyelesaian izin lokasi.

(5) Urusan Lingkungan Hidup

1. Beberapa spot lokasi di Kota Palopo masih sering dilanda banjir dan di beberapa titik lainnya digenangi air saat musim penghujan tiba serta kebakaran hutan dalam skala kecil pada musim kemarau.
2. Luas lahan kritis dan tingkat kerusakan hutan terus bertambah seiring dengan semakin menurunnya daya tampung lingkungan,

kapasitas dan kualitas air baku, akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

3. Pengintegrasian RPPLH dan KLHS kedalam dokumen perencanaan daerah belum terukur dan dilengkapi data mutakhir.
4. Pemantauan, pengukuran dan pengendalian kualitas tutupan lahan, air dan udara belum terkordinasikan secara rutin dan efektif.
5. Identifikasi, verifikasi, penetapan dan pendampingan masyarakat hukum adat serta kearifan dan pengetahuan lokal terkait pengelolaan lingkungan hidup belum terprioritaskan.
6. Luas area penanganan sampah serta pengurangan sampah melalui mekanisme reduce, reuse dan recicle (3R) masih terbatas.
7. Dampak pemanasan global semakin meningkat dalam kondisi penanganan efek gas rumah kaca belum optimal.

(6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Ketidaktersediaan bahan dan fasilitas menghambat pelayanan Penerbitan KTP secara tepat waktu dan memuaskan.
2. Komitmen pelaporan kelahiran dan pengurusan akte kelahiran oleh masyarakat belum maksimal.
3. Kordinasi antar stakeholder dalam penerbitan akte nikah belum optimal.
4. Pelaporan dan pencatatan penduduk datang, pergi dan meninggal belum optimal.

(7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Kebutuhan sarana/prasarana dan fasilitas perkantoran desa yang baik belum terpenuhi secara merata termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi.
2. Kinerja LPM dalam pemberdayaan masyarakat belum efektif dan merata.
3. Kinerja PKK dalam pembinaan masyarakat belum efektif dan merata.

4. Kapasitas SDM dan perlengkapan pada posyandu berkembang secara tidak berimbang dengan kebutuhan pelayanan masyarakat khususnya ibu hamil dan bayi.
5. Keswadayaan masyarakat dalam mendorong dan memelihara keberlanjutan pemberdayaan masyarakat belum optimal
6. Kapasitas SDM pemerintahan desa dalam menjalankan kewenangan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa belum mencukupi.

(8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Ketersediaan dan Pemanfaatan Rencana Induk Pengendalian Penduduk dan kebijakan kependudukan lainnya dalam pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk belum efektif.
2. Pelayanan kontrasepsi belum menjangkau secara menyeluruh pada pasangan usia subur dalam menekan kelahiran anak.
3. Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri serta kesadaran kesehatan reproduksi belum memadai.
4. Bina keluarga balita, keluarga remaja dan keluarga lansia belum didukung oleh tenaga pendamping yang memadai.
5. Model operasional BKB-Posyandu-PADU belum terkoordinasi.

(9) Urusan Perhubungan

1. Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan belum optimal dalam merespons pertambahan kebutuhan angkutan umum, pelayanan terminal dan penataan izin trayek.
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ kurang optimal
3. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas belum memadai
4. Pengawasan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum belum memadai

5. Pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan belum tergali dengan baik.
6. Uji KIR sesuai standar belum mencakupi semua angkutan umum.
7. Pemenuhan rambu-rambu lalu lintas belum mencakupi sesuai kebutuhan.

(10) Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan belum berkembang secara fungsional.
2. Layanan telekomunikasi belum menjangkau semua wilayah.
3. Data tentang kepemilikan masyarakat atas hand-phone/telepon, akses internet dan komputer pribadi belum terpenuhi secara lengkap.
4. SDM bidang teknologi komunikasi dan informasi pada OPD belum terpenuhi.

(11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Iklim usaha kecil dan menengah belum kondusif dan memadai.
2. Kemampuan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM belum memadai
3. Sistem pendukung usaha bagi UMKM belum optimal belum berkembang.
4. Kompetensi dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi bagi keaktifan koperasi rendah.
5. Kapasitas SDM, teknologi dan permodalan dalam pengelolaan UKM, lembaga keuangan mikro (LKM) dan BPR terbatas.
6. Daya saing produk usaha mikro dan kecil masih rendah.

(12) Urusan Penanaman Modal

1. Iklim investasi dan realisasi investasi belum didukung oleh kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pengembangan sistem informasi, penyederhanaan prosedur, kajian isentif investasi secara memadai.

2. Ketersediaan data potensi ekonomi daerah yang siap ditawarkan kepada investor nasional dan asing belum lengkap.
3. Upaya promosi dan kerjasama investasipada level domestik dan luar negeri masih minim.
4. Penyiapan potensi sumberdaya dan sarana-prasarana daerah pendukung investasi masih terbatas.
5. Pengembangan data dan informasi statistik daerah terkait investasi belum tersinergikan antar OPD.

(13) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1. Sarana/prasarana serta kordinasi antar elemen pemuda dalam mendorong keaktifan organisasi dan peran serta pemuda belum memadai.
2. Jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda belum memadai.
3. Sarana/prasarana serta fasilitas olah raga serta pelatih cabang olah raga dalam mendorong atlet/cabang olah raga berprestasi masih terbatas.
4. Kebijakan dan manajemen serta pemasyarakatan olahraga belum memadai

(14) Urusan Statistik

1. Belum tersedianya data lengkap berdasarkan indikator kinerja kunci masing-masing perangkat daerah.
2. Terlambatnya ketersediaan data umum kondisi daerah yang termuat dalam “Kabupaten dalam Angka”, dan “PDRB” sehingga kurang mutakhir dijadikan dasar dalam perencanaan tahunan.
3. Upaya pengembangan data/informasi/statistik daerah belum terkoodinasi dan masih sektoral, dimana data statitik daerah masih bervariasi pada tingkat PD, bahkan terkadang multi interpretasi.
4. Pemanfaatan informasi dan teknologi digital berbasis web dalam pengelolaan data statitik daerah belum signifikan.

(15) Urusan Persandian

1. Kelembagaan dan arah pengembangan dan pengelolaan SDM persandian daerah belum terstruktur secara massive dan terkoordinasi dengan baik.
2. Penggunaan sandi belum termanifestasikan dalam komunikasi perangkat daerah

(16) Urusan Kebudayaan

1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya belum berlangsung secara berkala
2. Benda, situs dan kawasan cagar budaya belum dikelola secara sistematis dalam kerangka pelestarian.
3. Ketersedian data karya budaya untuk kepentingan inventarisasi dan revitalisasi belum akurat dan komprehensif.

(17) Urusan Perpustakaan

1. Budaya baca dan pembinaan perpustakaan di sejumlah lembaga pendidikan belum memadai dan belum merata.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan minat baca masyarakat masih sangat kurang.
3. Kualitas SDM (pustakawan, tenaga teknis, dan penilai) dalam pengelolaan perpustakaan daerah masih rendah.
4. Cakupan materi dan jumlah unit pada koleksi buku perpustakaan daerah masih terbatas.

(18) Urusan Kearsipan

1. Cakupan dan kualitas penerapan pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah belum menyeluruh.
2. Jumlah dan kualitas SDM pengelola kearsipan belum cukup untuk mendukung perbaikan sistem kearsipan, penyelamatan dokumen daerah dan pemeliharaan sarana prasana kearsipan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi digital dalam pengelolaan kearsipan belum memadai.

C. Urusan Pilihan

(1) Urusan Pariwisata

1. Destinasi wisata yang ada belum tertata mengikuti perkembangan kontemporer kepariwisataan dan masih ada potensi destinasi wisata yang belum dikembangkan.
2. Pemasaran dan jaringan kemitraan kepariwisataan belum efektif mendukung peningkatan jumlah pengunjung wisata.
3. Pengembangan komunikasi dan informasi dalam promosi kepariwisataan masih minim.
4. Penerimaan dan kontribusi sektor kepariwisataan terhadap PAD dan PDRB belum optimal.
5. Pengintegrasian ekonomi kreatif sebagai salah satu fokus komoditas penunjang kepariwisataan masih terkendala dengan belum tersedianya lokasi yang memadai.
6. Pendayagunaan keindahan alam dan lingkungan hidup sebagai salah satu potensi wisata belum optimal.

(2) Urusan Pertanian

1. Penerapan teknologi dan ketersediaan sarana prasarana pendukung pertanian, peternakan dan perkebunan masih terbatas.
2. Eksistensi lahan pertanian produktif terus terancam akibat pengembangan pembangunan sektor lain.
3. Pengolahan produksi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan belum optimal
4. Jaringan dan kemitraan usaha baik produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perkebunan belum memadai
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan sektor pertanian secara luas masih minim
6. Kualifikasi kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam mendukung peningkatan produktivitas usahatani masih rendah.

(3) Urusan Perdagangan

1. Simpul distribusi dan sentra ekonomi masyarakat lainnya masih jauh dari kondisi nyaman

2. Kelembagaan dan kemitraan perdagangan belum optimal
3. Pengawasan mutu dan peredaran barang yang beredar belum memadai dan terkoordinasi baik dengan PD lainnya.
4. Perlindungan atas konsumen belum optimal
5. Pembinaan terhadap personal dan kelembagaan pedagang kaki lima dan asongan belum optimal.
6. Data tentang pedagang/usaha informal belum tersedia dengan cukup sebagai dasar dalam pembinaan.

(4) Urusan Perindustrian

1. Data potensi dan karakteristik usaha kelompok pengrajin belum tersedia dengan cukup.
2. Kluster industri kecil dan menengah dalam suatu kawasan industri belum berkembang dengan optimal.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan sinergi antar pihak dalam pengembangan industri belum memadai.

(5) Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Kapasitas peralatan dan teknologi penangkapan ikan belum berkembang mengikuti tuntutan baru dalam modernisasi perikanan.
2. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan masih minim.
3. Kelompok nelayan belum berkembang optimal sebagai wahana peningkatan produksi dan edukasi bagi penangkapan yang ramah lingkungan
4. Kesejahteraan nelayan lapisan bawah masih rendah dan memiliki kesenjangan yang tinggi dengan nelayan lapis atas.

D. Penunjang Urusan

(1) Perencanaan

1. Kualitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah masih sangat terbatas
2. Ketersediaan data sesuai indikator kinerja kunci berbagai urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah masih terbatas.

3. Perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam penyelenggaraan urusan oleh perangkat daerah belum akurat dan tepat waktu.
4. Pembahasan prioritas Renja/RKPD dalam proses musrenbang RKPD belum substantif berbasis fakta.
5. Penjabaran konsistensi RPJMD ke dalam RKPD dan RKPD kedalam APBD belum akurat.
6. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam membangun konsistensi RTRW belum akurat dan menyeluruh.

(2) Keuangan

1. SDM berkualitas pada OPD dalam analisis dan pelaporan keuangan masih terbatas.
2. Porsi SILPA dalam penyelenggaraan keuangan daerah masih signifikan.
3. Program/kegiatan yang tidak berjalan karena keterbatasan realisasi anggaran masih ada.
4. Pendapatan Asli Daerah masih sangat minim dan masih sangat tergantung pada Dana Alokasi Umum.

(4) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Kebutuhan dana untuk pendidikan dan pelatihan formal, structural dan fungsional bagi ASN tidak mencukupi sesuai tingkat kebutuhan ASN.
2. Penyelenggaraan tugas jabatan fungsional pada beberapa PD belum optimal dalam peningkatan capaian kinerja.

(4) Penelitian dan Pengembangan

1. SDM dan sarana/prasarana kelitbangan daerah belum memadai dalam mendukung kegiatan kelitbangan
2. Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terbatas.
3. Iklim pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan urusan pada

perangkat daerah belum berjalan dengan baik.

(5) Pengawasan

1. Temuan pelanggaran administrative dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pada perangkat daerah masih ada.
2. Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK belum maksimal.

(6) Sekretariat Dewan

1. Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD belum akurat.
2. Program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan fungsi anggaran belum sepenuhnya terintegrasi dalam RPJMD dan RKPD.

(7) Sekretariat Daerah

1. Perumusan kebijakan dan kordinasi administrasi belum sepenuhnya efektif mendukung penyelenggaraan urusan.
2. Penyelenggaraan kegiatan antara secretariat daerah dengan perangkat daerah sering tumpang tindih.

(8) Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

1. Penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan belum sepenuhnya efektif.
2. Fungsi kordinasi dalam pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan PD di kecamatan, penerapan dan penegakan Perda belum sepenuhnya efektif.
3. Fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan di desa dan kelurahan belum sepenuhnya efektif.
4. Fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan umum belum sepenuhnya efektif di kelurahan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.1.1. Pertumbuhan dan Komposisi Ekonomi

Pertumbuhan riil ekonomi Kota Palopo dalam 5 tahun terakhir mengalami perlambatan. Pada tahun 2014 berada pada angka 7,05%, tahun 2015 pada angka 6,45% dan tahun 2016 pada angka 6,98% dan 2017 sebesar 7,19 (angka sangat sementara Badan Pusat Statistik Kota Palopo Tahun 2018).

Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh menurunnya kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dari tahun ke tahun di Kota Palopo, padahal selama ini, sektor tersebut memberikan kontribusi yang paling besar terhadap struktur perekonomian Kota Palopo. Penyebab lainnya adalah pertumbuhan

sektor primer Kota Palopo tahun 2015 dan 2016, juga jauh menurun dibandingkan tahun 2014, hal yang sama juga terjadi pada sektor skunder sepanjang tahun 2015 dan 2016.

Tabel pertumbuhan ekonomi Kota Palopo sejak 2014-2017 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo
Tahun 2014-2017

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Pertumbuhan Ekonomi Palopo (%)	7,05	6,45	6,98	7,19

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2017

Kemudian dalam rentang waktu 2014-2017, Produk Domestik Regional Bruto Kota Palopo terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2017, indikasi perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Palopo mencapai 6.550.688,70, meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar Rp.5.906.480,40. Selengkapnya peningkatan produk domestik regional bruto Kota Palopo 2014-2017 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan PDRB Harga Berlaku dan Konstan
Kota Palopo Tahun 2014 – 2017

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
2014	4.743.856,90	3.877.030,40
2015	4.748.586,50	4.140.236,60
2016	5.906.480,40	4.428.497,00
2017	6.550.688,70	4.746.935,70

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2017

Sektor pendukung utama perekonomian di Kota Palopo pada tahun 2017 yaitu: sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi dan pertanian, kehutanan dan perikanan.

Tabel 3.3
PDRB Harga Berlaku
Kota Palopo Tahun 2014 – 2017

Lapangan Usaha	Tahun (Hb %)			
	2014	2015	2016	2017
PRIMER				
Pertanian, Kehutanan & Perkebunan	19,68	18,96	17,73	16,76
Pertambangan & Penggalian	0,18	0,19	0,19	0,19
SEKUNDER				
Industri Pengolahan	3,02	2,96	2,91	2,87
Listrik & Gas	0,10	0,08	0,08	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah & Limbah dan Daur	0,20	0,18	0,17	0,17
TERSIER				
Bangunan/Konstruksi	15,94	15,45	15,76	15,70
Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil & Sepeda Motor)	21,16	21,92	22,89	23,62
Transportasi & Pergudangan	5,22	6,24	6,29	6,56
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,19	1,25	1,31	1,37
Informasi & Komunikasi	4,10	4,11	4,18	4,20
Jasa Keuangan & Asuransi	8,16	8,22	8,66	8,70
Real Estate	5,24	5,28	5,33	5,36
Jasa Perusahaan	0,09	0,14	0,18	0,21
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan	7,76	8,05	8,06	8,09

Lapangan Usaha	Tahun (Hb %)			
	2014	2015	2016	2017
Jasa Pendidikan	4,50	4,54	4,57	4,59
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,22	2,24	2,29	2,34
Jasa Lainnya	1,24	1,29	1,34	1,39
PDRB KOTA PALOPO	100	100	100	100

Sumber Data : BPS Kota Palopo, Palopo Dalam Angka Tahun 2017

Sektor yang tumbuh cukup pesat pada tahun 2017 adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil & Sepeda Motor) (23,2 %), Pertanian, Kehutanan & Perkebunan (17,60 %), dan sektor konstruksi/bangunan (15,98 %). Selengkapnya pertumbuhan menurut sektor disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pertumbuhan Menurut Sektor
Kota Palopo Tahun 2014-2017

Lapangan Usaha	Tahun (Hk %)			
	2014	2015	2016	2017
PRIMER				
Pertanian, Kehutanan & Perkebunan	19,36	19,36	19,37	19,38
Pertambangan & Penggalian	0,15	0,17	0,19	0,22
SEKUNDER				
Industri Pengolahan	2,82	2,84	2,86	2,89
Listrik & Gas	0,12	0,11	0,15	0,16
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah & Limbah dan Daur	0,32	0,32	0,34	0,36
TERSIER				
Bangunan/Konstruksi	14,92	14,94	15,77	15,79

Lapangan Usaha	Tahun (Hk %)			
	2014	2015	2016	2017
Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil & Sepeda Motor)	22,20	23,40	24,33	24,34
Transportasi & Pergudangan	5,40	5,44	5,50	5,52
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,15	1,16	1,25	1,27
Informasi & Komunikasi	5,19	5,25	5,79	5,81
Jasa Keuangan & Asuransi	7,82	7,89	8,48	8,51
Real Estate	4,71	4,74	4,77	4,79
Jasa Perusahaan	0,09	0,11	0,13	0,15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan	7,27	7,30	7,29	7,29
Jasa Pendidikan	4,78	4,81	4,84	4,87
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,42	2,51	2,57	2,62
Jasa Lainnya	1,29	1,31	1,34	1,35
PDRB KOTA PALOPO	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Palopo, Palopo Dalam Angka Tahun 2018

3.1.2 Inflasi

Indikator makro lainnya yang menunjukkan kemajuan perekonomian di suatu wilayah adalah kemampuan pemerintah untuk mengendalikan laju Inflasi setiap tahunnya secara kontinyu. Dalam tiga tahun terakhir, dalam aspek ini Pemerintah Kota Palopo ternyata cukup mampu menekan serta mengendalikan laju inflasi. Jika pada tahun 2014 tingkat inflasi Kota Palopo sebesar 8,95 persen, tahun 2017 (*) mampu ditempatkan pada angka 3,94 persen. Laju inflasi Kota Palopo tahun 2014 sampai tahun 2017, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2014-2017

Uraian	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Inflasi (Persen)	8,95	3,38	2,47	3,94

Capaian tingkat inflasi Kota Palopo tahun 2017 ini masih diatas target capaian inflasi nasional yang menargetkan pada angka 3,50 persen. Dan target Provinsi Sul-sel yang menargetkan inflasi sebesar 3,45%.

3.1.3. Gini Ratio

Peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan setiap daerah. Tetapi pengalaman pembangunan diberbagai negara menunjukan bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia perlu memperhatikan dua aspek yakni pemerataan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan.

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai rasio Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna yang dijelaskan sebagai berikut :

- ❖ Ketimpangan rendah bila gini ratio $\leq 0,3$
- ❖ Ketimpangan sedang bila gini ratio antara $0,3 \leq G \leq 0,5$

- ❖ Ketimpangan tinggi bila gini ratio $\geq 0,5$

❖ **Tabel 3.6**

Gini Rasio Kota Palopo Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Gini Rasio	-	0.43	0.37	0.34	0.33

3.1.4. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Palopo pada tahun 2017 mencapai 10.96 % kondisi ini merupakan besaran pengangguran terbuka yang terendah di Kota Palopo dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2016, pengangguran terbuka mencapai 14.43% dan di tahun 2015 pada angka 12.07%.

3.1.5. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kota Palopo pada tahun 2017 pada angka 8.78%, dibandingkan tahun 2016 yang berada di 8.74, kondisi tahun 2017 sedikit meningkat. Meski demikian, jika dilihat sepanjang lima tahun terakhir 2013-2017, persentase penduduk miskin Kota Palopo menunjukkan trend penurunan dari 9.57% tahun 2013 menjadi 8.78% di tahun 2017.

3.1.6. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

Beberapa tantangan berkaitan dengan kondisi perekonomian Kota Palopo seperti yang digambarkan di atas adalah sebagai berikut :

- Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor strategis jasa, perdagangan dan industri rumah tangga masyarakat.
- Memantapkan pertumbuhan dan skala investasi yang lebih mampu membuka dan menyerap lapangan kerja lebih banyak

dalam menangani masalah pengangguran dengan memantapkan ketertiban daerah dan kenyamanan kemudahan pelayanan investasi daerah, termasuk tata kelola pemerintahan yang lebih melayani

- c) Melakukan upaya sinergi untuk pengendalian inflasi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk kerjasama dengan stake holder non government lain yang terlibat.
- d) Pemberdayaan dan penanganan masyarakat miskin melalui program pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan SDM masyarakat miskin atau rentan.
- e) Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur daerah yang lebih merata dan berkualitas terutama pada aspek konektivitas dan aksesibilitas wilayah.

Olehnya, fokus utama kebijakan ekonomi makro Kota Palopo tahun 2019 adalah peningkatan produksi dan produktifitas ekonomi daerah dengan tujuan utama mengurangi angka kemiskinan dan menekan angka, pengangguran, meningkatkan pendapatan per kapita serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Meski terdapat sejumlah tantangan, terdapat juga prospek dari berbagai kebijakan Pemerintah diarahkan untuk memperbaiki pembangunan ekonomi dan keuangan Kota Palopo sehingga sampai akhir tahun 2019 ini diharapkan dapat lebih meningkat.

Peningkatan tersebut diharapkan berasal dari lima besar sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi bagi perekonomian Kota Palopo sebagai berikut :

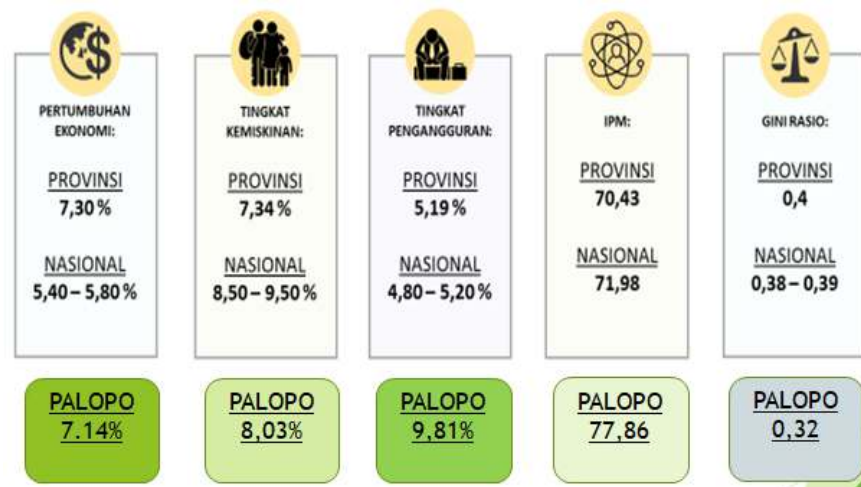
- a) Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) dimana pada tahun 2017 mampu memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kota Palopo yakni 23,46%.

- b) Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dimana pada tahun 2017 mampu memberikan kontribusi sebesar 16,76 %.
- c) Bangunan dan Konstruksi :dimana pada tahun 2017 mampu memberikan kontribusi sebesar 15,70% bagi perekonomian Kota Palopo.
- d) Jasa Keuangan dan Asuransi :dimana pada tahun 2017 mampu memberikan kontribusi sebesar 8,70% bagi perekonomian Kota Palopo.
- e) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib mengikat dimana pada tahun 2017 mampu memberikan kontribusi sebesar 8,09 % bagi perekonomian Kota Palopo.

Sasaran dan Arah Kebijakan Perkenomian Daerah

Beberapa proyeksi indikator Makro Ekonomi Kota Palopo Tahun 2019 disandingkan dengan Nasional dan Propinsi Sulsel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7.
Proyeksi Makro Ekonomi Nasional, Propinsi Sulsel
dan Kota Palopo Tahun 2019



3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

PENDAPATAN DAERAH

Perubahan kebijakan pendapatan Daerah Kota Palopo tahun 2019 dengan mempertimbangkan :

1. Perkiraan target pendapatan daerah dari PAD pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2019 yang diproyeksikan meningkat setelah memperhatikan realisasi terakhir dan ketetapan mengenai pendapatan Daerah sehingga memerlukan penyesuaian. Komponen Pendapatan Asli Daerah ini terutama berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Target ini diharapkan dapat dicapai melalui intensifikasi dan ekstensifikasi objek PAD dengan tetap mengedepankan penciptaan iklim investasi dengan langkah-langkah konkrit sebagai berikut :
 - a) Penyesuaian struktur pendapatan, pemantauan dan pengawasan serta pengendalian penerimaan daerah secara berkala;
 - b) Peningkatan efisiensi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan memberikan prioritas dukungan alokasi anggaran kepada SKPD pengelola pendapatan daerah disamping tetap memberikan perhatian terhadap kinerja program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh SKPD lainnya;
 - c) Mendorong program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah.
 - d) Adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat harus diikuti dengan perubahan alokasi belanja sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat khususnya mengenai perubahan dana Perimbangan.
 - e) Adanya Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Berikut ini adalah gambaran mengenai perubahan pendapatan daerah Kota Palopo tahun Anggaran 2019 ::

Tabel 3.8
Uraian Proyeksi Perubahan Pendapatan Kota Palopo Tahun 2019

Uraian	Pokok 2019	Perubahan 2019	Bertambah/Berkurang	
			Rupiah	Persentase
PENDAPATAN	1,008,646,058,790	1,016,266,612,898	7,620,554,108	0.76%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	167,052,191,690	171,832,371,831	4,780,180,141	2.86%
Pendapatan Pajak Daerah	31,675,000,000	34,725,000,000	3,050,000,000	9.63%
Hasil Retribusi Daerah	13,759,544,000	20,325,422,024	6,565,878,024	47.72%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,000,000,000	7,496,932,396	496,932,396	7.10%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	114,617,647,690	109,285,017,411	(5,332,630,279)	-4.65%
DANA PERIMBANGAN	751,370,486,000	750,062,657,052	(1,307,828,948)	-0.17%
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	18,737,193,000	18,754,808,000	17,615,000	0.09%
Dana Alokasi Umum	546,193,286,000	546,193,286,000	0	0.00%
Dana Alokasi Khusus	186,440,007,000	185,114,563,052	(1,325,443,948)	-0.71%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90,223,381,100	94,371,584,015	4,148,202,915	4.60%
Pendapatan Hibah	19,783,200,000	19,783,200,000	0	0.00%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	48,475,555,100	53,438,856,815	4,963,301,715	10.24%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	13,007,644,000	13,007,644,000	0	0.00%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8,956,982,000	8,141,883,200	(815,098,800)	-9.10%
BELANJA	1,011,204,683,790	1,018,468,087,046	7,263,403,256	0.72%

Uraian	Pokok 2019	Perubahan 2019	Bertambah/Berkurang	
			Rupiah	Persentase
BELANJA TIDAK LANGSUNG	431,710,263,996	425,392,860,744	(6,317,403,252)	-1.46%
Belanja Pegawai	414,465,256,996	406,116,541,744	(8,348,715,252)	-2.01%
Belanja Bunga	3,357,876,000	2,196,367,000	(1,161,509,000)	-34.59%
Belanja Hibah	10,546,700,000	11,987,300,000	1,440,600,000	13.66%
Belanja Bantuan Sosial	500,000,000	3,247,500,000	2,747,500,000	549.50%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	840,431,000	845,152,000	4,721,000	0.56%
Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000	1,000,000,000	(1,000,000,000)	-50.00%
BELANJA LANGSUNG	579,494,419,794	593,075,226,302	13,580,806,508	2.34%
Belanja Pegawai	55,927,290,150	55,889,566,150	(37,724,000)	-0.07%
Belanja Barang dan Jasa	302,956,035,180	315,235,275,928	12,279,240,748	4.05%
Belanja Modal	220,611,094,464	221,950,384,224	1,339,289,760	0.61%
SURPLUS / (DEFISIT)	(2,558,625,000)	(2,201,474,148)	357,150,852	-13.96%
PEMBIAYAAN DAERAH			0	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	5,500,000,000	5,142,849,148	(357,150,852)	-6.49%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5,500,000,000	5,142,849,148	(357,150,852)	-6.49%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,941,375,000	2,941,375,000	0	0.00%
Pembayaran Pokok Utang	2,941,375,000	2,941,375,000	0	0.00%
PEMBIAYAAN NETTO	2,558,625,000	2,201,474,148	(357,150,852)	-13.96%

Uraian	Pokok 2019	Perubahan 2019	Bertambah/Berkurang	
			Rupiah	Persentase
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	

Sumber data : BPKAD (Laporan Keuangan Kota Palopo 2017-2018 dan) LRA TA 2019

Pada tahun 2018, realisasi Pendapatan Daerah Kota Palopo sebesar Rp.964.783.951.705,73 atau 96,37% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.001.107.733.585,00. Adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah.

Realisasi PAD yang dapat dicapai selama Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.139.282.846.484,07 atau 89,22% dari yang ditargetkan Rp.156.111.703.360,00. Realisasi ini terdiri dari :

- 1) Realisasi pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp.31.505.802.321,00 atau 106.92 %. Secara keseluruhan capaian yang didapat pada tahun 2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan.
- 2) Realisasi pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah, sebesar Rp.8.022.878.576,00 atau 95,33%. Realisasi retribusi yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan diakibatkan oleh adanya beberapa sumber penerimaan yang mengalami kendala dalam pelaksanaan pemungutannya.
- 3) Realisasi pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, mencapai Rp.6.635.170.716,00 atau 92.99% yang bersumber dari pendapatan atas penyertaan modal ke Bank Sulselbar.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah, terealisasi sebesar Rp.93.118.994.871,07 atau sebesar 83.82% dari target. Adapun rician sumber dana tersebut diperoleh dari hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, Kelebihan realisasi Jasa Giro pemegang kas, Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan, pengembalian tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan dari pihak ketiga, Pendapatan BLUD dan Pendapatan JKN.

b. Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.747.082.593.924,00 atau 98,86% dari target sebesar Rp.755.717.209.775,00 Realisasi ini bersumber dari:

- 1) Realisasi penerimaan yang bersumber dari Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak mencapai Rp.15.523.117.559,00 atau terealisasi 74.81% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.20.749.762.775,00. Rendahnya nilai realisasi DBH yang diterima oleh Pemerintah Kota Palopo sangat tergantung dari realisasi penerimaan Pajak/Non Pajak Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2018, realisasi DBH pajak sekitar 72,81% sedangkan realisasi DBH Bukan Pajak hanya sekitar 80,09%.
- 2) Realisasi penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp.516.167.587.000,00 atau terealisasi 100% dari target yang ditetapkan.
- 3) Realisasi penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai Rp.215.391.889.365,00 atau terealisasi 98.44% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.218.799.860.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp.78.418.511.297,66 atau 87,84% dari target sebesar Rp.89.278.820.450,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Realisasi penerimaan yang bersumber dari dana Hibah Pemerintah sebesar Rp.19.445.810.000,00 atau terealisasi 98,29% dari target yang ditetapkan yang diperuntukkan membiaya Operasional Sekolah (Dana BOS).
- 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terealisasi sebesar Rp.40.953.517.276,00 atau 84,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.48.389.559.250,00.
- 3) Realisasi penerimaan dari dana Insentif Daerah mencapai Rp.10.250.000.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp. 10.250.000.000,00
- 4) Realisasi penerimaan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi mencapai Rp.7.639.440.139,00 atau 70,73% dari target sebesar Rp.10.856.061.200,00.

- 5) Realisasi Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp.129.743.882,66. Realisasi nilai tersebut disebabkan karena adanya pengembalian Belanja Hibah dari KNPI tahun Anggaran 2017, Pengembalian atas Jasa Giro, Pengembalian atas temuan Pemeriksa dalam pengelolaan Dana BOS dan pengembalian pembayaran Pajak PPH.

Permasalahan Pengelolaan Pendapatan

Berdasarkan realisasi pendapatan Tahun 2018, Porsi Pendapatan Dana Perimbangan sebesar 77,44% terhadap total Pendapatan. Hal ini menunjukkan Kinerja Pendapatan sangat dipengaruhi oleh realisasi Dana Perimbangan. Dengan Perubahan peraturan teknis yang mengatur proses pencairan Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus cukup menghambat dalam upaya merealisasikan seluruh dana Perimbangan, hal ini terlihat dari realisasi DAK sebesar 98,44% sedangkan DBH Pajak/Non Pajak hanya sebesar 74,81%. Selain itu, Adanya Perubahan peraturan Pengelolaan Pendapatan seperti Penganggaran Pendapatan Dana BOS berdampak pada penyesuaian dan/atau perubahan kembali terhadap kebijakan dan regulasi penunjang sehingga pengelolaan pendapatan di Kota Palopo memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2018 realisasi pendapatan daerah Kota Palopo tidak mencapai seratus persen atau hanya sebesar 96,37%, Realisasi tersebut disebabkan karena beberapa pendapatan dari dana perimbangan dan retribusi daerah yang tidak dapat terealisasi sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan upaya agar target Pendapatan daerah dapat terealisasi bahkan diharapkan dapat melampaui target dimasa yang akan datang. Pada dasarnya realisasi Pendapatan Daerah Kota Palopo dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, namun pada dua tahun terakhir cenderung stagnan dan sedikit menurun untuk beberapa jenis pendapatan. Ada beberapa kebijakan yang cukup mempengaruhi elastisitas realisasi Pendapatan :

1. Kebijakan BJS yang lambat membayar klaim dari RSUD Sawerigading, kebijakan ini cenderung memberatkan Pemerintah Daerah khususnya

RSUD Sawerigading dalam pengelolaan Dana JKN. Hal ini berdampak terhadap rendahnya realisasi Pendapatan JKN pada BLUD RSUD yang hanya sebesar 87,86%.

2. Perubahan kebijakan penganggaran Dana BOS yang awalnya dianggarkan pada Lain-Lain PAD di pindahkan ke Lain-lain Pendapatan.
3. Pendapatan yang bersumber dari Kerjasama dengan Pihak Ketiga khususnya pengelolaan City Market, dimana pada tahun ini Pengelola City Market tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajibannya sesuai kontrak yang telah disepakati.
4. Aset yang belum dapat dimanfaatkan karena dalam proses sengketa di peradilan.

Selain itu, masih terdapat beberapa jenis Objek Pendapatan Daerah yang perlu dikelola secara intensif sehingga memberikan pendapatan yang lebih optimal, hal ini menandakan bahwa masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan. Untuk itu, perlu dilakukan upaya optimalisasi pencapaian target Pendapatan Daerah, khususnya dari sektor retribusi daerah yang tidak mencapai target di tahun 2018.

Langkah Penanganan

Dalam upaya untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Daerah, maka ada beberapa kebijakan yang akan diterapkan. Dari sisi Perpajakan Daerah, kebijakan tersebut antara lain: (a) melakukan penataan kebijakan perpajakan daerah; (b) melakukan penyuluhan peningkatan pelayanan dan sosialisasi perpajakan; (c) melakukan pembinaan internal aparatur dalam pelaksanaan perpajakan daerah; (d) melakukan penegakan hukum; serta (e) mensinergikan unsur-unsur terkait dalam penggalan potensi perpajakan untuk memberikan dukungan data/informasi kepada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah.

Di bidang Retribusi Daerah dan PAD lain-lain yang sah, kebijakan yang dilakukan adalah melalui : (1) peninjauan atas jenis dan tarif penerimaan Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu; (2) peningkatan pengawasan dan penggalan potensi penerimaan Retribusi Jasa Umum; (3) Pembinaan, Sosialisasi dan Penyebarluasan terkait Ketentuan

tentang Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendapatan Daerah kepada Masyarakat; (4) peningkatan kinerja dan perbaikan administrasi dan pelayanan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah serta penyelesaian Aset yang bersengketa; dan (5) Peningkatan Koordinasi dalam pengelolaan Pendapatan yang melibatkan Pihak Ketiga seperti BPJS dan lain-lain.

Sementara itu, untuk mencapai target Pendapatan di Bidang Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dalam tahun 2018, Pemerintah Kota Palopo melaksanakan kebijakan dan upaya optimalisasi antara lain melalui: (a) Sinkronisasi data kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian terkait guna pencapaian penerimaan Dana perimbangan dan dana Penyesuaian; (b) Koordinasi dan konsultasi intensif kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan terkait Penerimaan Bagi Hasil Pajak Propinsi, dan bantuan keuangan; (c) perbaikan administrasi dan sistim pelaporan pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 2019

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperhatikan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, arah kebijakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Rasionalisasi dalam penetapan target pendapatan daerah berdasarkan potensi dan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya;
2. Peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Domestik Regional Bruto. Untuk

- mencapai hal tersebut **Pertama** dilakukan Intensifikasi meliputi peningkatan pelayanan pajak, pembinaan sumber daya manusia dan administrasi, peningkatan warga binaan, Sosialisasi perpajakan, dan koordinasi lintas pemda/sektor/SKPD. **Kedua** dilakukan Ekstensifikasi dengan pemberlakuan Perda, Pengembangan jenis dan obyek pajak; dan
3. Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan dan aset daerah.
- Dengan arah kebijakan Pendapatan diatas diharapkan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Daerah Kota Palopo sehingga dapat mendukung program-program prioritas pemerintah daerah dalam mensejahterahkan masyarakat Kota Palopo.

Memperhatikan kebijakan pemerintah pusat serta trend pertumbuhan pendapatan daerah maka pendapatan daerah pada Tahun 2019 **diproyeksikan akan naik menjadi Rp. 1,016,266,612,898,-**. Proyeksi Pendapatan Daerah pada Tahun 2019 memperhatikan:

1. Realisasi pendapatan Tahun 2017 dan Target Pendapatan tahun 2018.
2. Trend pertumbuhan PAD rata-rata di estimasikan sebesar 10% untuk tahun 2019.
3. Dana perimbangan diestimasikan tetap.
4. Begitupun dengan Lain-Lain Pendapatan yang sah di estimasikan tetap kecuali DBH pajak provinsi yang memiliki trend meningkat setiap tahunnya, sehingga DBBH pajak provinsi diestimasikan naik sebesar 10,85%.

Pendapatan daerah Kota Palopo sangat dipengaruhi oleh Dana Perimbangan yang memiliki persentase rata-rata sekitar 76.67% untuk lima tahun terakhir dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah memiliki persentase rata-rata sekitar 11.94% sedangkan PAD berkontribusi sebesar 11.52% dari keseluruhan Pendapatan Daerah Kota Palopo.

Oleh sebab itu ketergantungan Pemerintah Kota Palopo terhadap Dana Perimbangan masih sangat besar seperti daerah lainnya. Fluktuasi Pendapatan dari dana perimbangan akan sangat mempengaruhi keuangan pemerintah kota palopo namun keadaan tersebut berada di luar kendali

pemerintah daerah karena alokasi dana perimbangan ditentukan oleh pemerintah pusat dan Provinsi berdasarkan formula yang telah ditetapkan.

Dalam mengoptimalkan PAD Kota Palopo masih banyak Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini, mulai dari lemahnya sanksi pelanggaran terhadap wajib pajak dan retribusi, pendapatan dari bagi hasil belum optimal, pemberdayaan aset daerah belum optimal, sistem Waskat dan Wasdal masih lemah, Perusda/BUMD belum maksimal sebagai penghasil PAD, serta masih kurangnya partisipasi Swasta/BUMN dalam pembangunan daerah.

Untuk pencapaian target dan solusi permasalahan diatas, maka Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang dilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat;
- b. Upaya penyederhanaan sistem dan prosedur pengelolaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana melalui upaya mencari potensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan mengutamakan peningkatan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat; dan
- d. Peningkatan koordinasi antar SKPD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

BELANJA DAERAH

Berikut ini adalah gambaran perubahan belanja daerah Kota Palopo pada tahun anggaran 2019 :

Berikut ini gambaran realisasi dan proyeksi Belanja Daerah Kota Palopo dari Tahun 2017 sampai dengan 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Perubahan Proyeksi Belanja Kota Palopo Tahun Anggaran 2019

Uraian	Pokok 2019	Perubahan 2019	Bertambah/Berkurang	
			Rupiah	Persentase
BELANJA	1,011,204,683,790	1,018,468,087,046	7,263,403,256	0.72%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	431,710,263,996	425,392,860,744	(6,317,403,252)	-1.46%
Belanja Pegawai	414,465,256,996	406,116,541,744	(8,348,715,252)	-2.01%
Belanja Bunga	3,357,876,000	2,196,367,000	(1,161,509,000)	-34.59%
Belanja Hibah	10,546,700,000	11,987,300,000	1,440,600,000	13.66%
Belanja Bantuan Sosial	500,000,000	3,247,500,000	2,747,500,000	549.50%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	840,431,000	845,152,000	4,721,000	0.56%
Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000	1,000,000,000	(1,000,000,000)	-50.00%
BELANJA LANGSUNG	579,494,419,794	593,075,226,302	13,580,806,508	2.34%
Belanja Pegawai	55,927,290,150	55,889,566,150	(37,724,000)	-0.07%
Belanja Barang dan Jasa	302,956,035,180	315,235,275,928	12,279,240,748	4.05%
Belanja Modal	220,611,094,464	221,950,384,224	1,339,289,760	0.61%
SURPLUS / (DEFISIT)	(2,558,625,000)	(2,201,474,148)	357,150,852	-13.96%

Sumber data : BPKAD (Laporan Keuangan Kota Palopo 2017-2018) LRA TA 2019

Disisi lain, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 ini, susunan belanja daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan rincian realisasi sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung yang direncanakan sebesar Rp.416.933.656.058,61 dapat direalisasikan sebesar Rp. 426.365.870.522,00 atau 97,79 % dengan rincian sebagai berikut :

- 1) **Belanja Pegawai** yang direncanakan sebesar Rp.384.027.993.289,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.376.082.990.010,00 atau 97,93%.
- 2) **Belanja Bunga** yang dianggarkan sebesar Rp.2.695.744.550,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.2.346.991.490,61 atau 87,06%, realisasi ini untuk pembayaran bunga pinjaman pemerintah Kota Palopo pada Bank Dunia melalui penerusan pinjaman SLA nomor 1215 tanggal 17 April tahun 2008.
- 3) **Belanja Hibah** yang direncanakan sebesar Rp.34.371.701.683,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.33.992.044.883,00 atau 98,90%. Capaian realisasi ini digunakan untuk pelaksanaan hibah kepada beberapa kegiatan organisasi kemasyarakatan, dalam rangka penunjang pelaksanaan pembangunan dan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.
- 4) **Belanja Bantuan Sosial** yang direncanakan sebesar Rp.4.030.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.3.671.200.000,00 atau 91,10%.Capaian realisasi ini digunakan untuk pelaksanaan bantuan sosial kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu, Selain itu alokasi Bantuan Sosial sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang digunakan untuk pelaksanaan program bantuan bedah rumah.
- 5) **Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik** yang direncanakan sebesar Rp.840.431.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.840.429.675,00 atau 99,99%. Bantuan Keuangan ini diberikan kepada sebelas partai yang memiliki perwakilan di DPRD Kota Palopo.

- 6) **Belanja Tidak Terduga** yang dialokasikan sebesar Rp.400.000.000,00 dan tidak ada realisasi.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung yang direncanakan sebesar Rp.594.015.064.943,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.565.988.971.307,28 atau 95,28% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Belanja Pegawai** yang direncanakan sebesar Rp.57.485.559.258,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.54.081.160.933,10 atau 95,28%. Belanja Pegawai pada belanja langsung di peruntukan untuk honorarium pelaksana kegiatan lintas Organisasi Perangkat Daerah, Lembur, Pengelola Keuangan dan Pengelola Pengadaan barang dan Jasa.
- 2) **Belanja Barang dan Jasa** yang direncanakan sebesar Rp.283.195.706.372,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.273.116.299.707,18 atau 96,44%.
- 3) **Belanja Modal** yang direncanakan sebesar Rp.253.333.799.313,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.238.791.510.667,00 atau 94,26%.

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2018, Jumlah Unit Kerja (OPD) yang mengelola Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2018 terdapat 49 (empat puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah dengan total realisasi Rp.982.922.627.365,89 atau 96,33% dari rencana belanja sebesar Rp.1.020.380.935.465,00.

Permasalahan Pengelolaan Belanja Daerah 2018

Dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, permasalahan yang dihadapi secara umum meliputi :

- a) Pelaksanaan beberapa program dan kegiatan tertentu cenderung bertumpuk diakhir tahun sehingga mempengaruhi proses pembayaran dan laporan kegiatan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan proses Pelaksanaan kegiatan telah selesai namun proses administrasi pembayaran menjadi lambat sehingga pembayaran kegiatan tersebut menyebrang tahun anggaran.

- b) Kemampuan Aparatur dalam mengabsorpsi dan mengadopsi berbagai regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang baru tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan APBD relatif masih terbatas.

Langkah Penanganan

Dari identifikasi permasalahan yang timbul, maka alternatif solusi terhadap kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah taktis dan strategis sebagai berikut :

- 1) Mempersiapkan SDM yang handal sebagai Tenaga Pengelola Keuangan Daerah Kota Palopo, utamanya Tenaga Teknis dan Operasional Pengelola melalui Diklat dan Pendidikan Teknis Keuangan lainnya.
- 2) Segera melakukan perubahan dan peninjauan terhadap dokumen-dokumen perencanaan dan dokumen-dokumen perangkat aturan sebagai acuan kebijakan digunakan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo.
- 3) Memperbaiki dan menyempurnakan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Arah Perubahan Undang – Undang Paket Keuangan Negara serta Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4) Memantapkan Koordinasi, kerjasama dan pengendalian dalam Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari Penyusunan Naskah APBD, Pembahasan APBD, Penetapan APBD serta Penatausahaan APBD antar Unit Kerja Pengelola APBD dengan Tim Penyusun APBD serta Tim Anggaran Pemerintah Kota Palopo dengan Tim Anggaran DPRD Kota Palopo.
- 5) Tetap mempedomani Strategi Pembangunan Kota Palopo dan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Pelaksanaan kegiatan yang terjadwal sesuai anggaran kas yang telah dibuat, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk diakhir tahun anggaran.

Arah Kebijakan Belanja Daerah 2019

Belanja Tidak Langsung

Alokasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019 diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Belanja pegawai yang pengalokasian dananya untuk gaji pegawai dengan asumsi bahwa sudah tidak ada lagi kenaikan gaji pegawai dan diganti dengan gaji ke-14. Akres Gaji sebesar 2,5 persen untuk mengantisipasi kenaikan gaji pegawai yang disebabkan KGB, kenaikan tunjangan maupun yang disebabkan karena adanya promosi jabatan, pemberian insentif pegawai termasuk gaji ke 13 yang diberikan setiap tahunnya, luran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan PNS, Upah pungut/insentif, Sertifikasi Guru, tambahan penghasilan guru non sertifikasi serta tambahan penghasilan lainnya bagi PNSD, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Belanja hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat, sepanjang berpartisipasi dan mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kota Palopo;
3. Belanja subsidi untuk bantuan biaya produksi/jasa kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
4. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat/yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau membantu masyarakat yang mengalami Krisis Sosial;
5. Bantuan keuangan dianggarkan untuk pemberian bantuan kepada partai politik sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
6. Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bantuan sosial serta kebutuhan mendesak lainnya.

Belanja Langsung

Belanja Langsung disusun dengan memperhitungkan sasaran yang ingin dicapai dalam rangka penyelenggaraan otonomi, disusun baik menurut klasifikasi belanja berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan daerah dan klasifikasi menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Oleh karena itu Belanja Langsung diarahkan untuk:

1. Penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi SPM dan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) serta urusan pilihan yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
2. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dan pencapaian visi dan misi daerah; dan
3. Mendanai kebutuhan infrastruktur fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, lingkungan hidup, pertanian dan kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir, maka diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2019 Belanja Daerah menjadi Rp. 1,011,204,683,790.

PEMBIAYAAN DAERAH

Berikut adalah gambaran proyeksi pembiayaan daerah pada perubahan APBD 2019 Kota Palopo :

Tabel 3.10.

Proyeksi Perubahan Pembiayaan Pemerintah Kota Palopo Tahun ANggaran 2019

Uraian	Pokok 2019	Perubahan 2019	Bertambah/Berkurang	
			Rupiah	Persentase
PEMBIAYAAN DAERAH			0	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	5,500,000,000	5,142,849,148	(357,150,852)	-6.49%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5,500,000,000	5,142,849,148	(357,150,852)	-6.49%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,941,375,000	2,941,375,000	0	0.00%
Pembayaran Pokok Utang	2,941,375,000	2,941,375,000	0	0.00%
PEMBIAYAAN NETTO	2,558,625,000	2,201,474,148	(357,150,852)	-13.96%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 2019

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Sedangkan Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Jika APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;
2. Jika APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; atau
3. Jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka dilakukan dengan dana pinjaman.

Selama ini sebagian besar penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah, Trend Pembiayaan dan kebutuhan pembangunan daerah, maka kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2019 adalah:

1. Menciptakan pembiayaan daerah yang aman dan tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran daerah dengan memanfaatkan SILPA dan rencana pinjaman daerah;

2. Menjadikan penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan;
3. Menjadikan penyertaan modal (investasi) daerah sebagai upaya untuk meningkatkan PAD.

Dari analisis diatas maka jumlah penerimaan pembiayaan Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 5,142,849,148. Sedangkan untuk Pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp. 2,941,375,000.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan memperhatikan agenda prioritas dan tujuan pembangunan dalam RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023, maka tema pembangunan daerah Tahun 2019 adalah “ **Pembangunan Daerah Yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan** ” dengan 3 (tiga) kata kunci utama tema, yaitu :

a. Pembangunan Daerah Yang Merata

Pembangunan yang merata adalah pembangunan daerah dimana semua lapisan masyarakat dapat merasakan dampaknya secara adil dan proporsional. Untuk dapat mewujudkan pembangunan yang merata, dibutuhkan partisipasi dari semua pihak dimana masyarakat lebih dominan berperan baik dalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dan penganggaran.

b. Berkualitas

Prinsip pembangunan berkualitas adalah inklusivitas, berbasis luas, bersifat lintas kelompok sosial, lintas wilayah, dan lintas waktu. Prinsip lain yang harus dijaga adalah aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, apalagi menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Selain itu juga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar golongan dan antar wilayah, serta melaksanakan pembangunan tanpa menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

c. Berkelanjutan

Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menjaga memperbaiki lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi tanpa menghabiskan modal alam. Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada

itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan : pembangunan ekonomi, pembangunan social dan perlindungan lingkungan, ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2019 adalah tahap awal (RPJMD 2018-2023) Kota Palopo dimana pada tahun 2019 ini beberapa hal yang menjadi penekanan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Masyarakat
3. Mewujudkan Profesionalisme Aparatur dan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat
4. Meningkatkan Hubungan Kerjasama Daerah
5. Mendorong Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM serta Pembinaan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
6. Meningkatkan Pelayanan Kepariwisata dan Pelestarian Budaya Daerah
7. Meningkatkan Pengelolaan Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Penekanan didasarkan atas visi RPJMD Kota Palopo 2018-2023 yakni “Palopo Maju Inovatif Berkelanjutan” yang dicapai dengan melaksanakan 5 misi yakni :

1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan;
2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrstruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau;
3. Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan;
4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis;

5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata & ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.

Tabel 4.1
Sinkronisasi Tema RKP Nasional,
RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, dan RKPD
Kota Palopo Tahun 2019

Tema RKP Nasional	Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan	Tema RKPD Kota Palopo
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas	Memacu Pembangunan Daerah Berkualitas Untuk Mewujudkan Pemerataan	Pembangunan Daerah Yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan

Sumber : Diolah dari RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dan RPJMD Kota Palopo 2018-2023

Tabel 4.2.

Matriks Keterkaitan Sasaran Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Palopo Tahun 2019

No	Prioritas Nasional		Prioritas Sulsel		Prioritas Palopo	
	Indikator Sasaran	Target 2019	Indikator Sasaran	Target 2019	Indikator Sasaran	Target 2019
1	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar		Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar		Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	
	Persentase Penduduk Miskin	7-8%	Persentase Penduduk Miskin	8,78 %	Persentase Penduduk Miskin	8,03
	Indeks Pembangunan Manusia	76,3	Indeks Pembangunan Manusia	71,20	Indeks Pembangunan Manusia	77,86
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4-5%	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,20%	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,81%
	Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN	Minimal 95%	Presentase penduduk yang dicover jaminan kesehatan	100	Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	100
	Laju Pertumbuhan penduduk	1,19%	Laju Pertumbuhan penduduk	1,15%	Laju Pertumbuhan penduduk	2,22%
	Rata-rata Lama Sekolah	8,8 Tahun	Rata-rata Lama Sekolah	8,61 Tahun	Rata-rata Lama Sekolah	10,56 Tahun
	Angka Melek Huruf	96,1%	Angka Melek Huruf	100%	Angka Melek Huruf	98,32 %
	Angka Harapan Hidup	71,06 Tahun	Angka Harapan Hidup	70,10 Tahun	Angka Harapan Hidup	70,35 Tahun
	Akses Sanitasi Layak	100%	Akses Sanitasi Layak	93%	Akses Sanitasi Layak	91%
	Akses Air Minum Layak	100%	Persentase rumah tangga berakses air bersih	85%	Persentase penduduk berakses air minum	100%
					Proporsi Rumah Tangga dengan akses	90%

No	Prioritas Nasional		Prioritas Sulsel		Prioritas Palopo	
	Indikator Sasaran	Target 2019	Indikator Sasaran	Target 2019	Indikator Sasaran	Target 2019
					berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan	
2	Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman		Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman		Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	
	Gini Rasio	0,36	Gini Rasio	0,40	Gini Rasio	0,32
	Persentase Mantap Kondisi Jalan	98%	Persentase Mantap Kondisi Jalan	68%	Persentase jalan kewenangan kota yang berkondisi baik	60 %
					Persentase Luas Pemukiman Kumuh	0,5%
					Persentase Luas Wilayah Terdampak Banjir	5%
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif		Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif		Peningkatan Perekonomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan, dan Industri Rumah Tangga Masyarakat	
	Pertumbuhan ekonomi		Pertumbuhan ekonomi	7,20-7,40%	Pertumbuhan ekonomi	7,14%
	PDRB per Kapita		PDRB per Kapita	57,5 Juta/Tahun	PDRB per Kapita	37,1 Juta/Tahun
	Inflasi		Inflasi	4,5 - 2,5%	Inflasi	3,5%
4	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air		Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air		Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	
	Produksi Pangan		Produksi Pangan		Produksi Pangan	
	Padi	82 Juta Ton	Padi	6,29 Juta Ton	Padi (Ton)	34,32 Ribu Ton
	Jagung	24,1 Juta Ton	Jagung	2,45 Juta Ton	Jagung (Ton)	5,56 Ribu Ton
	Daging	755,1 Ribu Ton	Daging	148,39 Ton	Daging (Ton)	3.30 Ton
	Ikan	18,8 Juta Ton	Ikan	5,59 Juta Ton	Ikan	-

No	Prioritas Nasional		Prioritas Sulsel		Prioritas Palopo	
	Indikator Sasaran	Target 2019	Indikator Sasaran	Target 2019	Indikator Sasaran	Target 2019
			Skor Pola Pangan Harapan	88,5	Skor Pola Pangan Harapan	91,63
5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu		Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu		Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah & Kesuksesan Pemilu	
	Tingkat Partisipasi Dalam Pemilu	77,5%	Tingkat Partisipasi Dalam Pemilu	-	Tingkat Partisipasi Dalam Pemilu	Meningkat
	Jumlah Konflik	Menurun	Jumlah Konflik	Tidak ada	Jumlah Konflik	Tidak Ada
	-		-		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	
	Integritas Pelayanan Publik	85	-		Integritas Pelayanan Publik (Predikat/Zona)	Hijau
	Opini WTP atas Laporan Keuangan	95%	Opini WTP atas Laporan Keuangan	WTP	Opini WTP atas Laporan Keuangan	WTP
	Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Skor B)	50%	-		Kategori Predikat Akuntabilitas Kinerjanya (SAKIP)	Baik (B)
	Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota	35%	-		Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota	38%

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Jumlah tujuan pembangunan Kota Palopo sebanyak 5 (lima) dan sasaran sebanyak 11 (sebelas)

Perumusan tujuan dan sasaran strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain menerjemahkan visi/misi, perumusan tujuan dan sasaran juga dimaksudkan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis daerah, dan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palopo 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (RPJMD)
Kota Palopo Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
Visi : Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023										
Misi 1 : Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan										
Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)		1	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	76.71	77.86	77.98	78.4	78.82	79.25	79.25
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	2	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	10.33	10.36	10.39	10.45	10.48	10.56	10.56
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	3	Angka Harapan Hidup	70.3	70.32	70.34	70.36	70.38	70.4	70.4
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	4	Persentase Penduduk Miskin (%)	8.78	8.1	7.64	7.15	6.63	6.08	6.08
Misi 2 : Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau										
Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)		5	Indeks Daya Saing Infrastruktur	n/a	80	81	82	83	84	84

Misi/Tujuan	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
			(Angka)							
	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	6	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	1.2	0	0	0	0	0	0
	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	7	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	3.32	3.53	3.73	3.94	4.14	4.35	4.35
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	8	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	20.47	18	15	10	7	2	2
		9	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	76.72	76.83	76.93	76.98	77.10	77.20	77.20
Misi 3 : Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan										
Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani (T.3)		10	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	62,44	64	66	68	70	72	72
	Meningkatnya Kualitas Kinerja	11	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan	40.33	70	75	80	85	85	85

Misi/Tujuan	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
	Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)		Daerah (Nilai)							
		12	Level SPIP Daerah (Point)	2.86	3	3	3	3	3	3
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	13	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	79.9	80.78	81.12	81.28	81.89	82.03	82.03
Misi 4 : Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis										
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)		14	Pertumbuhan PDRB (%)	7.19	7.14	7.16	7.18	7.2	7.22	7.22
	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10.96	9.81	9.51	9.03	8.55	8.07	8.07
	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)	16	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	37	37.1	37.3	37.5	37.6	37.8	37.8
Misi 5 : Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu										
Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T.5)		17	Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.21 (2016 : Pariwisata Saja)	2	2.2	2.4	2.5	2.6	2.6

Misi/Tujuan	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
			Terhadap PDRB (%)							
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	18	Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	0.13	0.15	0.17	0.19	0.22	0.24	0.24
		19	Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	2.77	2.80	2.82	2.84	2.86	2.88	2.88

**Tabel 4.4 Perubahan Indikator Kinerja Utama
Perubahan RKPD 2019**

Perubahan Indikator Kinerja Utama 2019				Target 2019	
No	RKPD Pokok	No	RKPD Perubahan	RKPD Pokok	RKPD Perubahan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	1	Pertumbuhan PDRB (%)	7,20	7.14
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	2	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,03	8.01
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,81	9.81
4	Indeks Gini Ratio (Angka/Nilai)			0,32	
5	Indeks Pembangunan Manusia (Angka/Nilai)	4	Indeks Pembangunan Manusia (Angka/Nilai)	77,23	77.86
6	Pendapatan Per Kapita Masyarakat (Juta/Tahun)	5	Pendapatan Per Kapita Masyarakat (Juta/Tahun)	38,12	37.1
7	Daya Beli (Juta/Tahun)			12.51	
8	Angka Harapan Hidup (Tahun)	6	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,35	70.32
9	Predikat Pengelolaan Keuangan (Predikat)			Wajar Tanpa Pengecualian	
10	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja/SAKIP (Nilai)	7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja/SAKIP (Nilai)	≥60	70
11	Predikat Pelayanan Publik (Zona)			Hijau	
		8	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)		10.36
		9	Indeks Daya Saing Infrastruktur (Angka)		80
		10	Persentase Areal Kawasan Kumuh		0

Perubahan Indikator Kinerja Utama 2019				Target 2019	
No	RKPD Pokok	No	RKPD Perubahan	RKPD Pokok	RKPD Perubahan
			(%)		
		11	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)		3.53
		12	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)		18
		13	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik		76.83
		14	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)		64
		15	Level SPIP Daerah (Point)		3
		16	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)		80.78
		17	Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB (%)		2
		18	Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)		0.15
		19	Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)		2.8
	Jumlah IKU : 11		Jumlah IKU : 19 (Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Palopo 2018-2023)		

Tabel 4.5
Perubahan/Penyesuaian Indikator dan Target Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Perubahan RKPD 2019

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Pertumbuhan PDRB	7,20	1	Pertumbuhan PDRB	7.14
2	Laju inflasi	2.67	2	Laju inflasi	3.4
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	38.12	3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	37.1
4	Indeks Gini	0.32	4	Indeks Gini	0.339
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	91.7	5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	91.9
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77.86	6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77.86
7	Angka melek huruf	98.32	7	Angka melek huruf	100
8	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	10.56	8	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	10.36
9	Angka usia harapan hidup (tahun)	70.54	9	Angka usia harapan hidup (tahun)	70.32
10	Persentase balita gizi buruk yang tertangani	100%	10	Persentase balita gizi buruk yang tertangani	100%
11	Cakupan Desa Siaga Aktif	100%	11	Cakupan Desa Siaga Aktif	100%
12	Tingkat partisipasi angkatan kerja	59.98	12	Tingkat partisipasi angkatan kerja	62.02
13	Tingkat pengangguran terbuka	9.81%	13	Tingkat pengangguran terbuka	9.81
14	Rasio penduduk yang bekerja	89.94	14	Rasio penduduk yang bekerja	90
15	Persentase PAD terhadap pendapatan	21	15	Persentase PAD terhadap pendapatan	19.26
16	Opini BPK	WTP	16	Opini BPK	WTP
17	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92.65	17	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91.6
18	Penguatan cadangan pangan	84	18	Penguatan cadangan pangan	82.35
			19	Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	12,684

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
			20	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Palopo (Rp/Kapita/Bulan)	259,548
			21	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	15,131
			22	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari (%)	8.1
			23	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.67
			24	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.53
			25	Indeks Kesehatan	77.46
			26	Indeks Pendidikan	76.95
			27	Indeks Pengeluaran	76.98
			28	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15.11
			29	Persentase balita gizi buruk (%/Tahun)	0
			30	Prevalensi balita gizi kurang (%/Tahun)	1.79
			31	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	58.51
				<i>Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki</i>	76.65
				<i>Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan</i>	41.92
				<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki</i>	80.64
				<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan</i>	44.82
			32	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	72.66
			33	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%)	52.62
			34	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)	25.6
				<i>Laki – Laki</i>	18.15

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
				<i>Perempuan</i>	7.45
			35	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	39.97
			36	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.78
			37	Penanganan daerah rawan pangan (%)	0
			38	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	
			39	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	3
			40	Produksi sektor pertanian (Ton/Tahun)	
				Padi	34,323
				Jagung	5,568
				Ubi Kayu	181
				Ubi Jalar	5.02
				Sagu	16
				Daging (Ruminansia dan Unggas) Ton	3308.98
				Daging (Ruminansia) Ton	249.98
				Daging Sapi (Ton)	249.66
				Daging Kerbau (Ton)	0.32
				Daging Kambing (Ton)	1
				Daging Unggas (Ton)	3059
				Daging Ayam Kampung (Ton)	155
				Daging Ayam Pedaging (Ton)	2904
				Daging Itik/Bebek/Entog (Ton)	8,54
				Telur (Ayam Kampung/Ras/Itik/Entog) (Ton)	1796

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
				Telur Ayam Buras/Kampung (Ton)	1606
				Telur Ayam Ras Petelur (Ton)	45.45
				Itik/Angsa/Entog (Ton)	144.43
			41	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	3
			42	Produksi sektor perkebunan (Ton/Tahun)	
				Kelapa Dalam	32.4
				Kopi	67
				Kopi Robusta	67
				Kopi Arabika	0.01
				Cengkeh'	130
				Kakao	350
			43	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	2
			44	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0.03
			45	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	0.19
			46	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1.22
			47	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	2
			48	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	24
			49	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	2.9
			50	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	n/a

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
			51	Pertumbuhan Industri (%)	5
			52	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	0
ASPEK DAYA SAING DAERAH					
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	198.986	1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	103,484
	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	0.72	2	Nilai tukar petani	n/a
	Angka kriminalitas yang tertangani	185	3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	51
	Rasio ketergantungan	48.18	4	Produktivitas total daerah (Ribu/Tenaga Kerja/Tahun)	92.5
			5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	100
			6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) (%)	77.67
			7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	1.59
			8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	n/a
			9	Angka kriminalitas yang tertangani (per 100.000)	17
			10	Rasio ketergantungan	48.02
ASPEK PELAYANAN UMUM					
Layanan Urusan Wajib Dasar					
1	Pendidikan		1	Pendidikan	
1.4.	Angka Partisipasi Murni				
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99.76	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	78.95	2	Angka Partisipasi Kasar	

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	69.95		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	100
1.5.	Angka partisipasi sekolah			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	100
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	99.18	3	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)	
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	99.23		Tidak/Belum Bersekolah (%)	5.9
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	91.45		Tamat SD/ sederajat (%)	13
1.7.	Angka Kelulusan:			Tamat SMP/ sederajat (%)	24
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100		Tamat SMA (%)	37
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100		Tamat SMK (%)	3
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99.23		Tamat Perguruan Tinggi (%)	17
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	62.18		Diploma I/II (%)	0.5
				Diploma III (%)	2.81
				Diploma IV/S1-S3 (%)	13.69
			4	Angka Partisipasi Murni	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	100
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	100
			5	Angka partisipasi sekolah (%)	
				Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (Per 1000)	1000
				Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (Per 1000)	1000

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
			6	Angka Putus Sekolah:	
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0
			7	Angka Kelulusan:	
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100
			8	Angka Melanjutkan (AM):	
				Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	100
				Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	100
			9	Fasilitas Pendidikan:	
				Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100
				Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	100
				Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)	100
			10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10,000)	33
				SD/MI (per 10,000)	36
				SMP/ MTS (per 10,000)	26
			11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)	654
				SD/MI (per 10,000)	623
				SMP/ MTS (per 10,000)	709

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
			12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar (per 10.000)	0.58
			13	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	100
			14	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki (%)	100
			15	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	100
			16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	100
2	Kesehatan		2	Kesehatan	
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	0	1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1
2	Angka kelangsungan hidup bayi	0.2	2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 100)	99
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.04	3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1
4	Rasio dokter per satuan penduduk	0.22	4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	4
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	75.48	5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	65
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	6	Rasio posyandu per satuan balita (Per 1000 balita)	9
7	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	95.95	7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	3
8	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000)	4
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	78.96	9	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	5

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000)	5
11	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	100	11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	70.8
12	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	1.38%	12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	95.9
13	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	96
14	Cakupan kunjungan bayi	100	14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100
15	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	97.45	15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (%)	82.98
			16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	86.8
			17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (Rasio)	0
			18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	7.7
			19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	100
			20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (Rasio per 100.000 penduduk)	230
			21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
			22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	80.1
			23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	63.8
			24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100
			25	Penderita diare yang ditangani (per 100.000)	6
			26	Angka kejadian Malaria (per 100.000)	17
			27	Tingkat kematian akibat malaria (per 1000)	0
			28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%)	n/a
			29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat (%)	100
			30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (per 100.000)	40
			31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir (per 1000)	n/a
			32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	2
			33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100
			34	Cakupan kunjungan bayi (%)	100
			35	Cakupan puskesmas (%)	133,33
			36	Cakupan pembantu puskesmas (%)	75

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
			37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	93
			38	Cakupan pelayanan nifas (%)	91.3
			39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	68.85
			40	Cakupan pelayanan anak balita (%)	65
			41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100
			42	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100
			43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100
			44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100
			45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3.1.	Pekerjaan Umum:				
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65.94	1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	60
	Persentase Pemukiman yang layak huni	95.98	2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	28
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	86,98	3	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	
	Persentase penduduk berakses air minum	89,12	4	Persentase Jalan Kewenangan Kota yang	60

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
				Berkondisi Baik (> 40 KM/Jam) (%)	
	Persentase areal kawasan kumuh	0.48	5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	1.3
			6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	-
			7	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	91
			8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	40
			9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	15
			10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)	15
			11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	4
			12	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	71.5
			13	Rasio Jaringan Irigasi (per 1000 Ha)	19.1
			14	Persentase penduduk berakses air minum (%)	100
			15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	90
			16	Persentase areal kawasan kumuh (%)	0
			17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	4.6
			18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 10.000)	1.6

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
			19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1000)	1.8
3.2.	Penataan Ruang:		3	Penataan Ruang:	
	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	16.85	1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	-
			2	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik (Ha)	1172.34
			3	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	76.83
			4	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	50
			5	Ruang publik yang berubah peruntukannya	n/a
			6	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	n/a
			7	Ketaatan terhadap RTRW	100
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
	Persentase pemukiman yang tertata	95.98	1	Rasio rumah layak huni	0.17
	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0.48	2	Rasio permukiman layak huni (%)	94.85
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0.48	3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	85.39
			4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	94.86
			5	Persentase pemukiman yang tertata (%)	100
			6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	1

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
			7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	25
			8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	6
			9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	25
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	1	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) (Orang/Kelurahan)	1
	Persentase Penegakan PERDA	85	2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100
			3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	11.11
			4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100
			5	Persentase Penegakan PERDA	100
6	Sosial		6	Sosial	
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	98.45	1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	48.8
			2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	48.6
			3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	58.2
			4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha	10

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
				bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	
			5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	100
			6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100
			7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100
			8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100
			9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	14.15
Layanan Urusan Wajib Non Dasar					
1	Tenaga Kerja		1	Tenaga Kerja	
1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	3.12	1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Per 1000)	7.47
				Angka sengketa pengusaha-pekerja di Perusahaan ber TDP per tahun (Per 1000)	13.8
			2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	80
			3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	5

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
			4	Keselamatan dan perlindungan (%)	26
			5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	40
			6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0
			7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	0.8
			8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	0.5
			9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	15
			10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	10
			11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	8
			12	Rasio lulusan S1/S2/S3	10.1
			2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	11
			2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	20
			3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	3.2
			4	Rasio KDRT (per 10.000)	3
			5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	
			6	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	44.82
			7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh	100

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
				petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	
			8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	20
			9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.(%)	10
			10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100
			11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	20
			12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	20
			13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	10
			14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	
				APM Perempuan pada Tingkat SD	100
				APM Laki-Laki Pada Tingkat SD	100
			15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	
				APM Perempuan pada Tingkat SMP	81.3

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
				APM Laki-Laki Pada Tingkat SMP	77
			16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	
				APM Perempuan pada Tingkat SMA	70
				APM Laki-Laki Pada Tingkat SMA	71
			17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	42.9
				APM Perempuan yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a
				APM Laki-Laki yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a
			18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	n/a
			19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	n/a
2	Pangan		3	Pangan	
1	Ketersediaan pangan utama (Ton)	21.25	1	Ketersediaan pangan utama (%)	11.2
			2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	2154
				Ketersediaan energi perkapita (Kkal/kapita/hari)	2100
				Ketersediaan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	54
			3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	87
			4	Pertanahan	
			1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	1.6
			2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	2

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
			3	Penyelesaian izin lokasi (%)	100
3	Lingkungan Hidup		5	Lingkungan Hidup	
Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		
	Timbulan sampah yang ditangani	88	1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak Ada
	Persentase cakupan area pelayanan	100	2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak Ada
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	88	3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P	
			4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Baik
			5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Sangat Baik
			6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	n/a
			7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	40
			8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	
				<i>Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina (Orang)</i>	1
				<i>Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum (Orang)</i>	1
			9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0
			10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	0

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
			11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0
			12	Penetapan hak MHA	0
			13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (%)	0
			14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana (%)	0
			15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0
			16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (Kali)	Belum Ada
			17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.(%)	100
			18	Timbulan sampah yang ditangani (%)	90.01
			19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	4.13
			20	Persentase cakupan area pelayanan (%)	67
			21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	83.46
			22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	77.91
			23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (%)	100
			24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	100
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	72.18	1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.8
	Rasio bayi berakte kelahiran	76.23	2	Rasio bayi berakte kelahiran	0.85
	Rasio pasangan berakte nikah	35.8	3	Rasio pasangan berakte nikah	0.75
			4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada
			5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah
			6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	85
			7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	100
			7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	100
			2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1
			3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	2.5
			4	Persentase LSM aktif (%)	5
			5	Persentase LPM Berprestasi (%)	5
			6	Persentase PKK aktif	100
			7	Persentase Posyandu aktif (%)	100
			8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	n/a
			9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	n/a
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2.19	1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2.3

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	2	Total Fertility Rate (TFR) (Angka)	n/a
			3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	0
			4	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	0
			5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	38
			6	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	0
			7	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0
			8	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	0
			9	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0
			10	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2
			11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	76.54

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
			12	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	n/a
			13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (1000 PUS)	9
			14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	20
			15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	23
			16	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	42.45
			17	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	78.79
			18	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	62.3
			19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	48.49
			20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	0.11
			21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	10
			22	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100
			23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha	23.87

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
				Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	
			24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100
			25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%)	8
			26	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes (%)	65
			27	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	100
			28	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)	n/a
			29	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)	n/a
			30	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	2.34
			31	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	69.33
			32	Rata-rata usia kawin pertama wanita (Tahun)	20
			33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga	83.9

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
				melalui APBD (%)	
9	Perhubungan		9	Perhubungan	
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1108	1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	1,404,925
			2	Rasio ijin trayek (Per 100.000 Penduduk)	2
			3	Jumlah uji kir angkutan umum (Unit)	666
			10	Komunikasi dan Informatika	
			1	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	3.45
			2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0.86
			3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	80
			4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0.1
			5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0.42
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah		11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	
	Persentase koperasi aktif	74.89	1	Persentase koperasi aktif (%)	71
			2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	30
			3	Persentase BPR/LKM aktif (%)	100
			4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	100
			12	Penanaman Modal	
			1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	149
			2	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	0
			3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	436,847

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
			4	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	9
			5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	20
			13	Kepemudaan dan Olah Raga	
			1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	70
			2	Persentase wirausaha muda (%)	1.8
			3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	39
			4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	68.2
			5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	68.2
			6	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	20
			7	Jumlah prestasi olahraga (Cabang)	7
			14	Statistik	
			1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada
			2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada
			3	Buku "PDRB"	Ada
			15	Persandian	
			1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	75
16.	Kebudayaan		16	Kebudayaan	

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	ada	1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	15
			2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100
			3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Buah)	3
			4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	50
			17	Perpustakaan	
			1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	9.3
			2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	47
			3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (per 1000)	1.2
			4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	1,194
			5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1,282
			6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	100
			18	Kearsipan	
			1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	3
			2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	8
Layanan Urusan Pilihan			Layanan Urusan Pilihan		
1	Pariwisata		1	Pariwisata	
	PAD sektor pariwisata	17.67	1	Kunjungan wisata (%)	100
			2	Lama kunjungan Wisata (Rata-rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun)	2

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
			3	PAD sektor pariwisata (%)	0.15
2	Pertanian		2	Pertanian	
	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	8.3	1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	17.5
	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	3.62	2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	n/a
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	10.34	3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a
	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	87	4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	n/a
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	6.02	5	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)	
	Cakupan bina kelompok petani	58.1		Padi	34,323.00
				Jagung	5,568.00
				Ubi Kayu	181
				Ubi Jalar	5.02
				Sagu	16
			6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)	
				Padi	6,41
				Jagung	7,15
				Ubi Kayu	27
				Ubi jalar	12
				Sagu	0.25
			7	Cakupan bina kelompok petani	51

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
			3	Energi dan Sumber Daya Mineral	
			1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	100
			2	Rasio ketersediaan daya listrik	100
			4	Perdagangan	
			1	Ekspor Bersih Perdagangan (Nilai/Juta)	-800,000
			2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	10
			5	Perindustrian	
			1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	15
			6	Transmigrasi	
			1	Persentase transmigran swakarsa	0
8	Kelautan dan Perikanan		7	Perikanan	
	Produksi perikanan	98.67	1	Produksi perikanan (%)	100
	Konsumsi ikan	88.34		Target Produksi Perikanan Daerah (Ton/Tahun)	18810
	Produksi perikanan kelompok nelayan	50.78	2	Konsumsi ikan (%)	100
				Target Konsumsi Perikanan Daerah (Kg/Tahun)	60
			3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	4.7
			4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	80
			5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	n/a
			6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	n/a
			7	Nilai tukar nelayan	n/a
Penunjang Urusan			Penunjang Urusan		
1	Perencanaan Pembangunan		1	Perencanaan Pembangunan	

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tersedia	1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Tersedia	2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Tersedia	3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tersedia	4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Konsisten	5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Konsisten	6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100
			7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100
2	Keuangan		2	Keuangan	
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
	Penetapan APBD	Tepat Waktu	2	Persentase SILPA	0
			3	Persentase SiLPA terhadap APBD	2
			4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)	
				Persentase program yang tidak terlaksana (%)	0
				Persentase kegiatan yang tidak terlaksana (%)	0
			5	Persentase belanja pendidikan (20%)	20
			6	Persentase belanja kesehatan (10%)	10
			7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)	

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
				Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD (%)	51
				Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD (%)	49
			8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	1.85
			9	Penetapan APBD	Tepat Waktu
			3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
			1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Hari/Jam Pelajaran)	
			2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	1
			3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	30
			4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	33
			5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	949
			6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Orang)	2239
			4	Penelitian dan pengembangan	
			1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.(%)	10
			2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.(%)	38
				Penerapan SIDA:	
			3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.(%)	2

RKPD Pokok 2019			Perubahan RKPD 2019		
No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator	No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Kinerja Indikator
			4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah(%)	35
			5	Pengawasan	
			1	Persentase tindak lanjut temuan	100
			2	Persentase pelanggaran pegawai	0.03
			3	Jumlah temuan BPK	16
			6	Sekretariat Dewan	
			1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada
			2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada
			3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada

4.2. Isu Strategis Pembangunan Tahun 2019

Sesuai perkembangan dan kondisi Kota Palopo sampai dengan 2018, beberapa isu strategis yang akan menjadi focus penanganan Kota Palopo pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Penurunan tingkat kemiskinan Pengangguran dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar
2. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Sustainability dan Penataan Lingkungan yang Memperhatikan Aspek Budaya
3. Pemenuhan kebutuhan dan Pola Konsumsi Pangan Berkualitas
4. Peningkatan Nilai Tambah Pengembangan Sektor Jasa, Perdagangan dan Industri Rumah Tangga
5. Ketertiban dan Kenyamanan Daerah serta Partisipasi masyarakat Dalam Pemilu
6. Kinerja Pemerintahan yang Profesional dan Pelayanan Publik Berkualitas

4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

4.3.1. Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2019

Untuk menjaga konsistensi perencanaan antara pusat, provinsi dan daerah, perumusan prioritas pembangunan Kota Palopo Tahun 2019 memperhatikan prioritas nasional dalam RKP 2019 dan prioritas provinsi 2019 dalam RKPD Sulsel 2019, termasuk kondisi dan isu strategis yang dihadapi Kota Palopo sendiri saat ini.

Berikut adalah gambaran keterkaitan prioritas pembangunan antara pusat, provinsi dan Kota Palopo pada tahun 2019.

Tabel 4.6
Sinkronisasi dan Keterkaitan Prioritas Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kota Palopo Tahun 2019

Prioritas Nasional (5)	Prioritas Sul-Sel (5)	Prioritas Kota Palopo (6)
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu

Prioritas Nasional (5)	Prioritas Sul-Sel (5)	Prioritas Kota Palopo (6)
Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Dasar	dan Peningkatan Pelayanan Dasar
Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif	Peningkatan Perekonomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan, dan Industri Rumah Tangga Masyarakat
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah & Kesuksesan Pemilu
		Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi

Sumber : Diolah dari RKP dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

4.3.1.1. Prioritas I Tahun 2019 :

Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar, dilaksanakan dengan berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut :

- Peningkatan cakupan dan kualitas layanan pendidikan;
- Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan;
- Peningkatan kualitas tata kelola layanan dasar;
- Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin;

- e. Pembukaan dan Memfasilitasi Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha, Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Kerja (Life Skill) dan Meningkatkan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja;
- f. Peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui Pelatihan Kerja (Life Skill);
- g. Peningkatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial;
- h. Peningkatan Kelembagaan Masyarakat dan Peran Serta Dalam Pembangunan;
- i. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak.

4.3.1.2. Prioritas II Tahun 2019 :

Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable dilaksanakan dengan arah kebijakan antara lain dengan :

- a. Penanganan Banjir/Genangan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik;
- c. Peningkatan Aksesibilitas & Konektifitas Wilayah;
- d. Penataan Perumahan & Pemukiman;
- e. Peningkatan Akses dan Kualitas Sanitasi Masyarakat;
- f. Pengembangan Adat dan Kebudayaan yang Berkearifan Lokal.

4.3.1.3. Prioritas III Tahun 2019 :

Peningkatan Perekonomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan, dan Industri Rumah Tangga Masyarakat dilakukan dengan kebijakan antara lain :

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi;
- b. Penataan dan Pembukaan Pusat Ekonomi Masyarakat;
- c. Penguatan Industri Daerah Berbasis Pengolahan dan Rumah Tangga;
- d. Intensifikasi dan Diversifikasi Sumber dan Potensi Pendapatan Asli Daerah;
- e. Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Produktif.

4.3.1.4. Prioritas IV Tahun 2019 :

Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan dilakukan dengan kebijakan antara lain antara lain :

- a. Peningkatan Produksi & Produktifitas Pangan;
- b. Diversifikasi Pangan;
- c. Pengawasan Distribusi dan Keterjangkauan serta Akses Pangan Masyarakat;
- d. Peningkatan Tingkat Konsumsi dan Perbaikan Kualitas Pola Konsumsi Pangan Masyarakat;
- e. Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan.

4.3.1.5. Prioritas V Tahun 2019 :

Pemantapan Stabilitas Ketertiban dan kenyamanan Daerah & Kesuksesan Pemilu, dilakukan dengan kebijakan antara lain :

- a. Kerjasama dan Kemitraan Dalam Pencegahan Tindak Kriminal;
- b. Penegakan Peraturan Perda;
- c. Kerjasama Pemberantasan Keanakalan Remaja, Penyalahgunaan Obat Terlarang dan Pergaulan bebas;
- d. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu.

4.3.1.6. Prioritas VI Tahun 2019 :

Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi (Good Governance), dilakukan dengan kebijakan antara lain :

- a. Peningkatan Kualitas, Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah;
- b. Peningkatan Inovasi pelayanan Publik Berbasis IT dan Berorientasi Service Oriented;
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan & Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel 4.7
Dukungan Program/Kegiatan Pemerintah Kota Palopo
Terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Tahun 2019

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SUL-SEL		DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PALOPO			SKPD PENANGGUNG JAWAB
PRIORITAS NASIONAL 1	PRIORITAS SUL-SEL 1		PROGRAM		KEGIATAN	
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	Pembangunan gedung sekolah	Dinas Pendidikan
				2	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
		2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	3	Pembangunan gedung sekolah	Dinas Pendidikan
				4	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Dinas Pendidikan
				5	Pengadaan mebeluer sekolah	Dinas Pendidikan
				6	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SM	Dinas Pendidikan
				7	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Dinas Pendidikan
		3	Program Pendidikan Non Formal	8	Pemberian bantuan operasional	Dinas Pendidikan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SUL-SEL		DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PALOPO			SKPD PENANGGUNG JAWAB
					pendidikan non formal	
				9	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Dinas Pendidikan
		4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Dinas Pendidikan
				11	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan
				12	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	Dinas Pendidikan
				13	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan
		5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	14	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan (vokasional)	Dinas Pendidikan
				15	Pembinaan dewan pendidikan	Dinas Pendidikan
		6	Program Pendidikan Gratis	16	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN (64 Sekolah)	Dinas Pendidikan
				17	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN (14 Sekolah)	Dinas Pendidikan
		7	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	18	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Dinas Kesehatan
		8	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	19	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Dinas Kesehatan
				20	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Dinas Kesehatan
				21	Peningkatan pelayanan dan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SUL-SEL		DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PALOPO			SKPD PENANGGUNG JAWAB
					penanggulangan masalah kesehatan	
				22	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Dinas Kesehatan
				23	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Dinas Kesehatan
				24	Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan
		9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	25	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Dinas Kesehatan
		10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	26	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Dinas Kesehatan
				27	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Dinas Kesehatan
		11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	28	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Dinas Kesehatan
		12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	29	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Dinas Kesehatan
				30	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Dinas Kesehatan
				31	Peningkatan imunisasi	Dinas Kesehatan
				32	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Dinas Kesehatan
		13	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	33	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
				34	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SUL-SEL		DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PALOPO			SKPD PENANGGUNG JAWAB
		14	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	35	Pembangunan puskesmas	Dinas Kesehatan
				36	Pembangunan puskesmas pembantu	Dinas Kesehatan
				37	Pembangunan Posyandu	Dinas Kesehatan
				38	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan
				39	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	Dinas Kesehatan
		15	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	40	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
				41	Pelayanan Kesehatan Gratis	Dinas Kesehatan
		16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	42	Imunisasi bagi anak balita	Dinas Kesehatan
		17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	43	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Dinas Kesehatan
				44	Pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
		18	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	45	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	Dinas Kesehatan
		19	Program Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan	46	Pelayanan kesehatan BLUD RSUD	RSUD
		20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan	47	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Rujukan	RSUD
		21	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah	48	Pembangunan rumah sakit	RSUD

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SUL-SEL		DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PALOPO			SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata			
		22	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	49	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Dinas Sosial
				50	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Dinas Sosial
				51	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Dinas Sosial
				52	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Dinas Sosial
		23	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	53	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Dinas Sosial
				54	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Dinas Sosial
		24	Program pembinaan anak terlantar	55	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Dinas Sosial
				56	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	Dinas Sosial
		25	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	57	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Dinas Sosial
				58	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Dinas Sosial

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SUL-SEL		DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PALOPO			SKPD PENANGGUNG JAWAB
		26	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	59	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Dinas Sosial
		27	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	60	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Dinas Sosial
		28	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	61	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	Dinas Perumahan dan Pemukiman
		29	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	62	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Dinas Tenaga Kerja
		30	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	63	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
				64	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Dinas Tenaga Kerja
				65	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Dinas Tenaga Kerja
				66	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Dinas Tenaga Kerja
		31	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	67	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
				68	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
				69	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Dinas Tenaga Kerja
		32	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	70	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di	Bag. Pemberdayaan Masyarakat &

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SUL-SEL		DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PALOPO			SKPD PENANGGUNG JAWAB
					perdesaan	Kelurahan Setda
				71	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda
		33	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	72	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda
		34	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	73	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan
		35	Program Pengembangan Kemitraan	74	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
		36	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	75	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi & UMKM
				76	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi & UMKM
		37	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	77	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Koperasi & UMKM
				78	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Dinas Koperasi & UMKM
		38	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	79	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Dinas Pemuda & Olahraga
				80	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Dinas Pemuda & Olahraga
		39	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota	81	Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SUL-SEL		DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PALOPO			SKPD PENANGGUNG JAWAB
			menengah dan besar		perkotaan	
				82	Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				83	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				84	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		40	Program Lingkungan Sehat Perumahan	85	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Dinas Perumahan dan Pemukiman
		41	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	86	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				87	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		42	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	88	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan
				89	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan
		43	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	90	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Dinas PU dan Penataan Ruang
Pengurangan Kesenjangan antarwilayah	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui	44	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	91	Pembangunan jalan	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SUL-SEL		DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PALOPO			SKPD PENANGGUNG JAWAB
melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	penguatan konektivitas dan kemaritiman					
				92	Pembangunan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		45	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	93	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		46	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	94	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		47	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	95	Pengawasan pemanfaatan ruang	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		48	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	96	Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Bappeda
		49	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong	97	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		50	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	98	Pembangunan turap/talud/bronjong	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		51	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong	99	Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		52	Program Pengendalian Banjir	100	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
				101	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
				102	Pembangunan prasarana pengaman	Dinas Pekerjaan Umum

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SUL-SEL		DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PALOPO			SKPD PENANGGUNG JAWAB
					pantai	& Penataan Ruang
				103	Pembangunan tanggul pemecah ombak	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		53	Program Pengembangan Perumahan	104	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Dinas Perumahan & Permukiman
				105	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Dinas Perumahan & Permukiman
		54	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	106	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	Dinas Perumahan & Permukiman
		55	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	107	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan
				108	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan
				109	Penyediaan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan
		56	Program peningkatan sarana dan prasarana bidang penerangan jalan umum	110	Penyediaan Jasa Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan
				111	Pengadaan Listrik Penerangan jalan Umum	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan
				112	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan
		57	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	113	Penataan RTH	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan
				114	Pemeliharaan RTH	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SUL-SEL		DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PALOPO			SKPD PENANGGUNG JAWAB
				115	Pengawasan dan pengendalian RTH	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan
		58	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	116	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan
		59	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	117	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Dinas Kebudayaan
		60	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	118	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		61	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	119	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	Dinas Pertanahan
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif	62	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	120	Peningkatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban Usaha	Dinas Penanaman Modal & P2TSP
				121	Penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha tertentu dalam rangka penanaman modal	Dinas Penanaman Modal & P2TSP
		63	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	122	Fasilitasi Kemudahan Pelayanan Perizinan	Dinas Penanaman Modal & P2TSP
				123	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan	Dinas Penanaman Modal & P2TSP
		64	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	124	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Dinas Perdagangan
				125	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah	Dinas Perdagangan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SUL-SEL		DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PALOPO			SKPD PENANGGUNG JAWAB
		65	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	126	Pengembangan data base informasi potensi unggulan	Dinas Perdagangan
				127	Membangun jejaring dengan eksportir	Dinas Perdagangan
				128	Pengembangan kluster produk ekspor	Dinas Perdagangan
		66	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	129	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Dinas Perdagangan
		67	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	130	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Dinas Perdagangan
				131	Pengembangan pasar lelang daerah	Dinas Perdagangan
		68	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	132	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Dinas Perindustrian
				133	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Dinas Perindustrian
		69	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	134	Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial	Dinas Perindustrian
		70	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	135	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Dinas Perindustrian
				136	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Dinas Perindustrian
		71	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	137	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Dinas Koperasi & UMKM
		72	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	138	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Dinas Koperasi & UMKM
		73	Program Pengembangan Sistem	139	Penyelenggaraan pembinaan industri	Dinas Koperasi &

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SUL-SEL		DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PALOPO			SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah	UMKM
		74	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	140	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda
		75	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	141	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
				142	Pengembangan Statistik Kepariwisata	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
		76	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	143	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
				144	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
		77	Program peningkatan produksi hasil peternakan	145	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan
				146	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan
				147	Pengembangan agribisnis peternakan	Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan
		78	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	148	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		79	Program Pengendalian/Pengawasan dan Pendataan Potensi Perekonomian	150	Pemetaan Potensi ekonomi untuk Mendorong Pengembangan Perekonomian	Setda
		80	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	151	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Dinas Perikanan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SUL-SEL		DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PALOPO			SKPD PENANGGUNG JAWAB
		81	Program peningkatan pelayanan angkutan	152	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Dinas Perhubungan
				153	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	Dinas Perhubungan
				154	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa nagkutan	Dinas Perhubungan
Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan	Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan	82	Program Pengawasan Obat dan Makanan	155	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Dinas Kesehatan
		83	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	156	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Dinas Kesehatan
				157	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	Dinas Kesehatan
		84	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	158	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Dinas Ketahanan Pangan
				159	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Dinas Ketahanan Pangan
				160	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Dinas Ketahanan Pangan
				161	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	Dinas Ketahanan Pangan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SUL-SEL		DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PALOPO			SKPD PENANGGUNG JAWAB
				162	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
				163	Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok	Dinas Ketahanan Pangan
				164	Pengembangan cadangan pangan daerah	Dinas Ketahanan Pangan
				165	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan
				166	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Dinas Ketahanan Pangan
		85	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	167	Penyusunan data base potensi produk pangan	Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan
				168	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan
				169	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan
				170	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan
				171	Pengembangan diversifikasi tanaman	Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan
				172	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan
				173	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan,	Dinas Pertanian, Peternakan &

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SUL-SEL		DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PALOPO			SKPD PENANGGUNG JAWAB
					produk pertanian	Perkebunan
		86	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	174	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan
		87	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	175	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan
				176	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan
		88	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	177	Pembibitan dan perawatan ternak	Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan
		89	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	178	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan
				179	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan
		90	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	180	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan
		91	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	181	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Dinas Perikanan
		92	Program pengembangan perikanan tangkap	182	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Dinas Perikanan
		93	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	183	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Dinas PU dan Penataan Ruang

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SUL-SEL		DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PALOPO			SKPD PENANGGUNG JAWAB
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Stabilitas ketentraman dan ketertiban mendukung pemilu	94	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	184	Pemantauan dan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Perkembangan Aspirasi dan Pendataan Kegiatan Warga Keturunan (Orang Asing)	Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat
				185	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat
				186	pengendalian keamanan lingkungan	Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat
		95	Program Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	187	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat
		96	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	188	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat
				189	Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme	Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat
		97	Program Pendidikan Politik Masyarakat	190	koordinasi forum-forum diskusi politik	Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat
				191	Penyusunan data base partai politik	Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat
		98	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	192	Pengamanan / Penjagaan Aset pemerintah	Satuan Polisi Pamong Praja
				193	Penindakan, dan Penyidikan Pelanggaran Perda	Satuan Polisi Pamong Praja

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SUL-SEL		DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA PALOPO			SKPD PENANGGUNG JAWAB
		99	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	194	Pengendalian Kamtramtibmas dan Tindak Kriminal	Satuan Polisi Pamong Praja
		100	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	195	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
		101	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	196	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Dinas Pemuda & Olahraga

Tabel 4.8
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Arah Kebijakan, Indikator Kinerja
Dukungan Program Pembangunan RKPD Tahun 2019

No	Tujuan	Arah Kebijakan RKPD 2019	Dukungan Program 2019	Indikator Kinerja Program
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun	Perlindungan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Penduduk Miskin
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Jumlah Penduduk Miskin
		Peningkatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Tertangani
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Jumlah Kematian Ibu dan Anak
			Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Jumlah Kematian Balita
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunnya Jumlah Kasus Gizi Buruk
		Peningkatan Tingkat Konsumsi dan Perbaikan Kualitas Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan Daerah
		Peningkatan Produksi & Produktifitas Pangan	Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian	Produksi dan Produktifitas Pangan Daerah
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase Masyarakat yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan pendidikan,	Program Pelaksanaan Pendidikan Gratis	Angka Partisipasi Kasar

No	Tujuan	Arah Kebijakan RKPD 2019	Dukungan Program 2019	Indikator Kinerja Program
	kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.			
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Sekolah
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Peningkatan Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Terhadap Anak
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	Peningkatan Akses dan Kualitas Sanitasi Masyarakat	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Masyarakat yang mengakses air bersih
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase Masyarakat yang Memiliki Akses Sanitasi Baik
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua	Peningkatan Pengawasan Penggunaan Sumber Daya Energi bersubsidi	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Cakupan Pengawasan Barang Bersubsidi
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Pembukaan dan Memfasilitasi Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha, Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Kerja (Life Skill) dan Meningkatkan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi & Indeks Gini Ratio
		Peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui Pelatihan Kerja (Life Skill),	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah/Angka Pengangguran
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Tingkat penangguran

No	Tujuan	Arah Kebijakan RKPD 2019	Dukungan Program 2019	Indikator Kinerja Program
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah
			Program Pengendalian / Pengawasan dan Pendataan Potensi Perekonomian	Tingkat Inflasi Daerah
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	Peningkatan Aksesibilitas & Konektifitas Wilayah	Program Pembangunan Jalan dan jembatan	Persentase Jalan berkondisi Baik
		Penguatan Industri Daerah Berbasis Pengolahan dan Rumah Tangga	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase UMKM yang Tumbuh
		Peningkatan Inovasi pelayanan Publik Berbasis IT dan Berorientasi Service Oriented		Predikat Pelayanan Publik
10	Mengurangi kesenjangan intra daerah	Penataan dan Pembukaan Pusat Ekonomi Masyarakat	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pendapatan Per Kapita Masyarakat (Juta/Tahun)
		Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Produktif	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase UMKM yang Tumbuh
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Luas Kawasan Pemukiman Kumuh
		Penataan Perumahan & Pemukiman	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Luas Kawasan Pemukiman Kumuh
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Diversifikasi Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Tingkat Ketahanan Pangan Daerah
		Pengawasan Distribusi dan Keterjangkauan serta Akses Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Tingkat Kerawanan Pangan Daerah

No	Tujuan	Arah Kebijakan RKPD 2019	Dukungan Program 2019	Indikator Kinerja Program
		Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Tingkat Keamanan Pangan Daerah
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.	Penanganan Banjir/Genangan	Program Pengendalian Banjir	Persentase Luas Wilayah Pemukiman yang Terdampak Banjir
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	Bukan kewenangan pemerintah kabupaten/kota	Bukan kewenangan pemerintah kabupaten/kota	Bukan kewenangan pemerintah kabupaten/kota
15	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti-kan kehilangan keanekaragaman hayati.	Penataan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Ruang Publik Terbuka Hijau
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Ketaatan Pada Penataan Ruang
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Peningkatan Kelembagaan Masyarakat dan Peran Serta Dalam Pembangunan	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Masyarakat Saat Musrenbang
		Pengembangan Adat dan Kebudayaan yang Berkearifan Lokal	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Iven Budaya yang Dilaksanakan
		Penegakan Peraturan Perda	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase Penegakan Perda
		Peningkatan Kualitas	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi

No	Tujuan	Arah Kebijakan RKPD 2019	Dukungan Program 2019	Indikator Kinerja Program
		Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu		Masyarakat Dalam Pemilu
		Peningkatan Kualitas, Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat SAKIP Daerah
			Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Predikat Pengelolaan Keuangan Daerah
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Intensifikasi dan Diversifikasi Sumber dan Potensi Pendapatan Asli Daerah	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan
		Kerjasama dan Kemitraan Dalam Pencegahan Tindak Kriminal	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Menurunnya Angka Kasus Kriminalitas
		Kerjasama Pemberantasan Keanakalan Remaja, Penyalahgunaan Obat Terlarang dan Pergaulan bebas	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Menurunnya Angka Kasus Kenakalan Remaja dan Narkoba
		Peningkatan Kualitas Pelayanan & Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Predikat Pelayanan Publik (Zona)

4.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Perubahan RKPD tahun 2019 merupakan momen strategis mengoordinasikan rencana pembangunan dalam menjawab isu di tengah masyarakat, oleh karena itu penyusunan RKPD Kota Palopo pada tahun 2019 harus lebih cermat, dan terintegratif, serta mampu menjawab permasalahan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, dan masyarakat secara tepat dan cepat

Ada beberapa isu-isu strategis yang harus diperhatikan terkait dengan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi kehidupan nasional yang dinamika perkembangannya cenderung semakin menguat pada tahun 2018 dan pada akhirnya menjadi urgen untuk diantisipasi pada tahun 2019.

Isu strategis yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Palopo yakni :

1. Peningkatan kualitas pendidikan, meliputi penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan kemudahan akses pendidikan.
2. Optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat, dengan mengedepankan peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.
3. Perluasan kesempatan kerja, dengan mengedepankan pada pengembangan dan peningkatan peluang Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk pedagang informal melalui kebijakan maupun penyediaan fasilitas dan modal kerja.
4. Pengurangan dan penanggulangan kemiskinan, melalui percepatan pemberdayaan ekonomi dan mikro, perbaikan pelaksanaan jaminan sosial dari sisi target dan realisasi dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi.

5. Penyediaan infrastruktur dan konektivitas yang baik, dengan menjamin ketersediaan infrastruktur secara massif dan menyebar dengan memperhatikan konektivitas antar wilayah yaitu akses jalan, pasar tradisional dan infrastruktur pendukung lainnya, pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya di daerah pinggiran guna mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan perekonomian produktif rakyat.
6. Peningkatan Pelayanan Publik, dengan mengedepankan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan good government.
7. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH, meliputi aspek peningkatan luasan serta penataan RTH yang diprioritaskan pada pembangunan taman kota, taman interaktif dan hutan kota serta peningkatan kualitas ruang terbuka hijau (RTH).
8. Ketertiban daerah pasca pelaksanaan pilkada serentak yang dilakukan di 171 daerah pada tahun 2018, khususnya pada Pilwakot Palopo yang diperkirakan mempengaruhi kondisi dan situasi pelaksanaan Pileg dan Pilpres pada tahun 2019.
9. Ketahanan pangan, meliputi memperkuat akses masyarakat untuk mengakses pangan, pemberdayaan petani maupun kelompok tani untuk memiliki akses dan kontrol yang lebih baik atas sumber-sumber pertanian, pengembangan pangan lokal untuk diversifikasi dan perbaikan sistem informasi harga, informasi pasar dan teknologi baru untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.

4.5. Inovasi Layanan Publik 2019

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public dan tata kelola pemerintahan Pemerintah Kota Palopo terus melakukan berbagai macam inovasi dan terobosan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public. Beberapa aspek yang menjadi fokus

dari inovasi ini adalah peningkatan efisiensi, kecepatan pelayanan dan transparansi proses layanan. Berikut adalah inovasi layanan public di Kota Palopo :

Payment Online Sistem PAD

Inovasi ini diimplementasikan dalam bentuk aplikasi sejak tahun 2018 dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo sebagai leading sektor pengembangan layanan tersebut. Beberapa aspek yang ingin diwujudkan Pemerintah Kota Palopo peningkatan transparansi atas penerimaan/penarikan retribusi pendapatan asli daerah, dan data penerimaan PAD lebih real time, lebih cepat bahkan lebih mudah.

Layanan paymen online sampai tahun 2019 ini telah melayani 43 unit restoran yang ada di Kota Palopo, dimana target bulan Juli 2019 sebanyak 50 Unit. Dan pada tahun 2019 ditargetkan mengcover sebanyak 200 unit restoran. Layanan ini akan terus dikembangkan sehingga juga mampu mengcover layanan pajak parkir dan pajak rumah makan yang ada di Kota Palopo. dalam implementasinya penyediaan layanan ini Pemerintah Kota Palopo melalui Badan Pendapatan Daerah menggande Bank Sulselbar.

Layanan Kesehatan “Go Ride” Khusus Bagi Lansia

Layanan “Go Ride” merupakan singkatan dari Gerakan Optimalisasi Geriatric Terpadu dan Efektif bagi pasien lanjut usia. Layanan ini merupakan terobosan Pemerintah Kota Palopo melalui RSUD Sawerigading Rampoang yang merupakan RSUD Rujukan Tipe B milik Pemerintah Kota Palopo. Layanan ini diharapkan menjadi salah satu dari berbagai cara meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan Go Ride, akan mempercepat waktu pemberian pelayanan bagi pasien lanjut usia dari para dokter yang ada di Kota Palopo. Sehingga waktu tunggu bagi para pasien khusus lanjut usia atas layanan dari para dokter akan semakin diperpendek dan memiliki kejelasan dan kepastian waktu pelayanan.

Dengan layanan ini, para lansia memperoleh kejelasan dan ketepatan waktu untuk mendapatkan layanan kesehatan dari para dokter yang menjadi tujuan pasien lansia, sehingga mereka tidak akan terlalu lama menunggu bahkan langsung memperoleh kepastian waktu untuk mendapatkan layanan kesehatan dari para dokter. Sebab para dokter akan langsung mendatangi pasien di poli kesehatan sebagaimana yang para pasien lansia minta. Layanan ini baru dilaksanakan di awal tahun 2019.

Layanan Kesehatan “Simfoni Ceria”

Persoalan lain dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kota Palopo adalah munculnya antrian pasien yang cukup panjang dalam mendaftar untuk mendapatkan layanan kesehatan. Olehnya Pemerintah Kota Palopo melalui RSUD Sawerigading kembali menciptakan layanan inovasi mengatasi masalah tersebut.

Nama layanannya adalah Simfoni Ceria atau yang dikenal dengan kepanjangan system pendaftaran online cepet ringkas dan akurat. Dengan layanan ini calon pasien bisa mendaftar tanpa ribet harus mengantri dalam barisan cukup panjang yang menyebabkan suasana ruang tunggu dapat dipertahankan kenyamanannya.

Melalui layanan ini, calon pasien cukup mendaftar melalui pesan singkat melalui Whats Upp meseger dan sudah mendapatkan kepastian waktu untuk mendapatkan pelayanan kesehatannya yang diinginkannya. Layanan ini mengurangi panjangnya antrian pasien di RSUD Sawerigading Palopo.

Layanan Kesehatan “Sipakainga”

Layanan kesehatan ini adalah sinonim dari Sistem Paket Pelayanan Pasien Paru Terintegrasi”. Layanan ini merupakan layanan khusus bagi pasien infectious, sehingga tidak berbaur dengan layanan kesehatan bagi pasien dengan penyakit lainnya. Layanan ini juga dikembangkan oleh Pemerintah Kota Palopo melalui RSUD Sawerigading sejak tahun

2019 dalam rangka mengembangkan kualitas layanan kesehatan bagi para pasien.

Layanan “Siantar” di Kelurahan Amassangan

Layanan Siantar merupakan sinonim dari “Siap Antar” oleh Pemerintah Kota Palopo di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara. Cakupan layanan ini pada tahun 2018 dan 2019 sebagai tahun awal inovasi, baru sebatas pada layanan administrasi kependudukan masyarakat yang ditangani dan menjadi kewenangan Pemerintah Kelurahan. Dan untuk jangka panjang semua layanan ditargetkan untuk dicakup dalam layanan inovatif ini. Pun demikian dengan layanan ini, masyarakat bisa mendapatkan layanan dokumen administrasi kependuduk dari 62 menit menjadi 8 menit.

Masyarakat dalam layanan ini, dapat memperoleh produk layanan yang dibutuhkan berupa dokumen kependudukan, tanpa perlu mendatangi kantor kelurahan Amassangan. Mereka hanya cukup berhubungan dengan pesan singkat, sehingga jika seluruh berkas pendukungnya lengkap dan qualified, produk administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kelurahan langsung diantar ke rumah mereka. Tentu layanan ini sangat memudahkan masyarakat, tanpa perlu mengantri dan tanpa ongkos termasuk transportasi ke kantor kelurahan untuk mengurus.

Membangun system layanan ini, pemerintah kelurahan Amassangan membangun sebuah system data base meskipun masih konvensional, tetapi mereka menyiapkan call center berbasis what supp application.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2019

Bab ini akan menguraikan program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Palopo untuk Tahun 2019 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program dan kegiatan prioritas merupakan instrumen kebijakan pembangunan utama yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan sekaligus pemenuhan target dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Prioritas yang tertuang di dalam RKPD ini **bersifat indikatif** dan **tentatif**, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2019.

Kemudian untuk memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain berisi program dan kegiatan prioritas, RKPD ini juga mengakomodir prakiraan maju program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2020.

Prioritas Program dalam RKPD tahun 2019 meliputi urusan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Rincian program prioritas, dihubungkan dengan prioritas nasional tahun 2019, serta OPD pelaksanaannya dapat disajikan sebagaimana sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Palopo Tahun 2019

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Dinas Pendidikan							198,653,004,796	194,788,256,316		
	Belanja Tidak Langsung						151,053,127,296	147,080,767,643		
	Belanja Langsung						47,599,877,500	47,707,488,673		
1.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Kota Palopo			1,057,910,500	1,066,410,500	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Palopo	Terlaksananya Jasa Administrasi surat Menyurat		153,975,500	153,975,500	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Palopo	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		122,040,000	125,540,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Kota Palopo	Terlaksananya penyediaan Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional		16,100,000	16,100,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.1.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kota Palopo	Terlaksananya Administrasi Keuangan		178,395,000	178,395,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Palopo	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor		37,000,000	37,000,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			Kota Palopo	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik		4,000,000	4,000,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Palopo	Terlaksananya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		10,200,000	10,200,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Kota Palopo	Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat dan Konsultasi Ke Luar Daerah		356,800,000	361,800,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Kota Palopo	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Umum		179,400,000	179,400,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Kota Palopo			160,400,000	136,300,000	Disdik	APBD Kota Palopo

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Informasi								
1.1.1.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kota Palopo	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor		10,000,000	9,000,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kota Palopo	Terlaksananya pengadaan peralatan Gedung Kantor		26,400,000	23,400,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.2.10	Pengadaan Mebeleur			Kota Palopo	Tersedianya pengadaan mebeluer		4,000,000	4,000,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kota Palopo	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		68,000,000	48,000,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.2.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Kota Palopo	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		15,000,000	19,500,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Palopo	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil operasional		15,000,000	13,000,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kota Palopo	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		4,000,000	5,400,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kota Palopo	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor		18,000,000	14,000,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Kota Palopo			11,000,000	48,469,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kota Palopo	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis		11,000,000	48,469,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Kota Palopo			10,200,000	10,200,000	Disdik	APBD Kota Palopo

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.1.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Palopo	Tersedianya dokumen RENJA Pendidikan		4,700,000	4,700,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.6.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kota Palopo	Terlaksananya penyusunan laporan kegiatan semesteran		2,600,000	2,600,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.6.4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Kota Palopo	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		2,900,000	2,900,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (\$1)	Kota Palopo			341,610,000	215,310,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.15.1	Pembangunan gedung sekolah			Kota Palopo	Terpenuhinya Pembangunan Gedung Sekolah		127,700,000	215,310,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.15.5 9	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini			Kota Palopo	Tercapainya peningkatan kualitas layanan pengelolaan BOP PAUD		213,910,000	25,190,420,673	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (\$1)	Kota Palopo			25,031,480,500	724,200,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.16.1	Pembangunan gedung sekolah			Kota Palopo	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah sesuai Standar		600,000,000	385,680,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa			Kota Palopo	Terwujudnya pengadaan buku buku dan alat tulis kantor		385,680,000	3,866,050,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.16.16	Pengadan pakaian seragam sekolah			Kota Palopo	Terwujudnya Pengadaan Pakaian Sekolah		3,866,050,000	19,878,406,373	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.16.6 3	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP			Kota Palopo	Terlaksananya Pelaporan Pertanggungjawaban BOS		19,843,195,200	210,588,300	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.16.7 0	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa			Kota Palopo	Terseleleksinya siswa SMP/MTS yang akan mewakili kota palopo ke tingkat provinsi		216,318,300	91,156,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.16.7 9	Pelaksanaan Pendidikan Gratis			Kota Palopo	Tercapainya pelaksanaan pelayanan pendidikan		95,800,000	34,340,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.16.8	Pelaksanaan Ujian Akhir			Kota	Lulusan SD dan SMP se		24,437,000	137,395,000	Disdik	APBD

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
0	Sekolah			Palopo	Kota Palopo					Kota Palopo
1.1.1.18	Program Pendidikan Non Formal	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Kota Palopo			114,831,500	59,400,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.18.4	Pengembangan pendidikan keaksaraan			Kota Palopo	Tercapainya program HAI		89,631,500	49,895,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.18.14	Pelaksanaan Penyediaan Operasional Pendidikan Non Formal			Kota Palopo	Terlaksananya program PNF yang terlaksana		25,200,000	28,100,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Kota Palopo			509,638,000	540,176,500	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.20.1	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik			Kota Palopo	Meningkatnya jumlah guru yang bersertifikasi		153,937,500	153,937,500	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.20.2	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan			Kota Palopo	Tersedianya peserta yang bersertifikasi dan belum bersertifikasi		75,255,000	44,620,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.20.3	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi			Kota Palopo	Meningkatnya Kompetensi Instruktur MGMP Jenjang SMP		18,985,000	18,985,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.20.8	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan			Kota Palopo	Tercapainya hasil pengelolaan dapodik		76,025,500	137,199,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.20.9	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan			Kota Palopo	Tercapainya kegiatan pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan		139,435,000	139,435,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.20.11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan			Kota Palopo	Tercapainya Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Penilaian Angka Kredit		46,000,000	46,000,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Kota Palopo			96,030,000	96,030,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.22.1	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan			Kota Palopo	Siswa Kelas IX Mengikuti dan Lulus dari Ujian Akhir Sekolah Tingkat		41,730,000	41,730,000	Disdik	APBD Kota Palopo

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					SMP/MTs					
1.1.1.22.5	Pembinaan Dewan Pendidikan			Kota Palopo	Terlaksananya pembinaan dewan pendidikan		54,300,000	54,300,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pendidikan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Kota Palopo			13,200,637,000	13,200,637,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.23.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana SD			Kota Palopo	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan		9,377,014,000	9,377,014,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.23.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana SMP			Kota Palopo	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan		2,970,903,000	2,970,903,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.23.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanggar Kegiatan Belajar / SKB			Kota Palopo	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan		852,720,000	852,720,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24	Program Pelaksanaan Pendidikan Gratis	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Kota Palopo			7,066,140,000	7,066,140,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.1	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 1 Lalebbata			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		111,900,000	111,900,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.2	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 2 Pincepute			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		33,300,000	33,300,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.3	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 3 Surutanga			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		123,300,000	123,300,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.4	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 4 Malimongan			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		68,300,000	68,300,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.5	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 5 Salamae			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		108,100,000	108,100,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.6	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 6 Bogar			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		66,000,000	66,000,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.7	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 7 Ponjalae			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		68,500,000	68,500,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.8	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 8 Salobulo			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		31,100,000	31,100,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.9	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 9 Mattekko			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		29,200,000	29,200,000	Disdik	APBD Kota Palopo

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.1.1.24.10	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 10 Tomarunding			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		21,600,000	21,600,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.11	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 11 Dangerakko			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		64,200,000	64,200,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.12	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 12 Langkanae			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		134,700,000	134,700,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.13	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 13 Tappong			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		56,400,000	56,400,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.14	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 14 Temmalullu			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		33,300,000	33,300,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.15	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 15 Salolo			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		28,400,000	28,400,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.16	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 16 Sampoddo			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		51,800,000	51,800,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.17	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 17 Benteng			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		73,100,000	73,100,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.18	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 18 Maroangin			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		85,600,000	85,600,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.19	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 19 Mappesau			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		12,000,000	12,000,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.20	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 20 Battang			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		20,300,000	20,300,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.21	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 21 Paredean			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		20,200,000	20,200,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.22	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 22 Murante			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		55,800,000	55,800,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.23	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 23 Batara			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		102,500,000	102,500,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.24	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 24 Temmalebba			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		80,800,000	80,800,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.25	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 25 Sabbamparu			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		52,000,000	52,000,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.26	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 26 Pattene			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai		98,800,000	98,800,000	Disdik	APBD Kota

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					SPM Pendidikan Dasar					Palopo
1.1.1.24.2 7	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 27 Lebang			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		35,300,000	35,300,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.2 8	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 28 Mancani			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		52,600,000	52,600,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.2 9	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 29 Songka			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		53,200,000	53,200,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.3 0	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 30 Mattirowalie			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		124,400,000	124,400,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.3 1	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 31 Salotellue			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		36,900,000	36,900,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.3 2	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 32 Lagaligo			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		134,800,000	134,800,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.3 3	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 33 Kalukulajuk			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		32,200,000	32,200,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.3 4	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 34 Bara			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		63,200,000	63,200,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.3 5	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 35 Lamandu			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		42,500,000	42,500,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.3 6	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 36 Latuppa			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		29,400,000	29,400,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.3 7	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 37 Mawa			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		37,900,000	37,900,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.3 8	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 38 Bora			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		38,000,000	38,000,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.3 9	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 39 Kambo			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		42,800,000	42,800,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.4 0	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 40 Lappo			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		11,400,000	11,400,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.4 1	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 41 Batuputih			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		51,400,000	51,400,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.4 2	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 42 Limpomajang			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		14,200,000	14,200,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.4	Pelaksanaan Pendidikan			Kota	Terlaksananya Proses		56,600,000	56,600,000	Disdik	APBD

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3	Gratis SDN 43 Takkalala			Palopo	PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar					Kota Palopo
1.1.1.24.4 4	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 44 Rampoang			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		47,200,000	47,200,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.4 5	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 45 Padang Alipan			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		42,700,000	42,700,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.4 6	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 46 Buntu Batu			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		50,200,000	50,200,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.4 7	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 47 Tompotikka			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		97,700,000	97,700,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.4 8	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 48 Patiware			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		105,900,000	105,900,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.4 9	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 49 Mappatongko			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		24,000,000	24,000,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.5 0	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 50 Bulu Datu			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		74,000,000	74,000,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.5 1	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 51 Sumarambu			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		34,400,000	34,400,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.5 2	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 52 Salutete			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		26,000,000	26,000,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.5 3	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 53 Sawerigading			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		76,900,000	76,900,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.5 4	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 54 Salupikung			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		54,900,000	54,900,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.5 5	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 55 Padang Lambe			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		22,800,000	22,800,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.5 6	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 56 Bula Tua			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		30,800,000	30,800,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.5 7	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 57 Pepabri			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		74,300,000	74,300,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.5 8	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 58 Tandung			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		28,500,000	28,500,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.5 9	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 59 Siguntu			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		17,500,000	17,500,000	Disdik	APBD Kota Palopo

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.1.1.24.6 0	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 60 Salubattang			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		37,600,000	37,600,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.6 1	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 61 Tondok Alla Jaya			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		39,600,000	39,600,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.6 2	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 62 Pamenta			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		28,500,000	28,500,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.6 3	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 63 Ponjalae Baru			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		93,800,000	93,800,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.6 4	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 64 To' Bulung			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		56,800,000	56,800,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.6 5	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SD Swasta			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		651,700,000	651,700,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.6 6	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 65 Pajalesang			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		35,400,000	35,400,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.7 1	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 1			Kota Palopo	Proses PBM berjalan sesuai SPM Sekolah Menengah Pertama		231,500,000	231,500,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.7 2	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 2			Kota Palopo	Proses PBM berjalan sesuai SPM Sekolah Menengah Pertama		208,500,000	208,500,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.7 3	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 3			Kota Palopo	Proses PBM berjalan sesuai SPM Sekolah Menengah Pertama		241,380,000	241,380,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.7 4	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 4			Kota Palopo	Proses PBM berjalan sesuai SPM Sekolah Menengah Pertama		227,750,000	227,750,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.7 5	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 5			Kota Palopo	Proses PBM berjalan sesuai SPM Sekolah Menengah Pertama		123,750,000	123,750,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.7 6	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 6			Kota Palopo	Proses PBM berjalan sesuai SPM Sekolah Menengah Pertama		187,000,000	187,000,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.7 7	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 7			Kota Palopo	Proses PBM berjalan sesuai SPM Sekolah Menengah Pertama		110,000,000	110,000,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.7 8	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 8			Kota Palopo	Proses PBM berjalan sesuai SPM Sekolah Menengah Pertama		209,750,000	209,750,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.7 9	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 9			Kota Palopo	Proses PBM berjalan sesuai SPM Sekolah Menengah Pertama		151,500,000	151,500,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.8 0	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 10			Kota Palopo	Proses PBM berjalan sesuai SPM Sekolah		68,000,000	68,000,000	Disdik	APBD Kota

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					Menengah Pertama					Palopo
1.1.1.24.8 1	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 11			Kota Palopo	Proses PBM berjalan sesuai SPM Sekolah Menengah Pertama		22,250,000	22,250,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.8 2	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 12			Kota Palopo	Proses PBM berjalan sesuai SPM Sekolah Menengah Pertama		66,150,000	66,150,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.8 3	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 13			Kota Palopo	Proses PBM berjalan sesuai SPM Sekolah Menengah Pertama		19,980,000	19,980,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.8 4	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 14			Kota Palopo	Proses PBM berjalan sesuai SPM Sekolah Menengah Pertama		90,000,000	90,000,000	Disdik	APBD Kota Palopo
1.1.1.24.8 5	Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMP Swasta			Kota Palopo	Terlaksananya Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar		869,430,000	869,430,000	Disdik	APBD Kota Palopo
Dinas Kesehatan							132,778,222,840	131,280,758,344		
	Belanja Tidak Langsung						41,891,835,450	40,588,834,794		
	Belanja Langsung						90,886,387,390	90,691,923,550		
1.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Kota Palopo			2,181,980,000	2,270,080,000		
1.2.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat			Kota Palopo	jumlah surat yang diterima		63,000,000	63,000,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			Kota Palopo	Tidak adanya Rekening Yang disegel		713,600,000	713,600,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Kota Palopo	tidak adanya STNK yang belum dibyarkan		78,100,000	78,100,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kota Palopo	Lancarnya Kegiatan pengelolaan administrasi keuangan		210,900,000	180,900,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kota Palopo	kantor terjaga kebersihannya		34,400,000	34,400,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kota Palopo	tidak adanya keluhan tentang alat listrik		2,000,000	2,000,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kota Palopo	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		5,280,000	5,280,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kota Palopo	Pelaksana kegiatan rapat koordinasi dan		295,900,000	345,900,000	Dinskes	APBD Kota

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					konsultasi keluar daerah memahami hasil pelaksanaan kegiatan tersebut					Palopo
1.2.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum			Kota Palopo	Penyediaan Jasa Administrasi Umum dilaksanakan dengan baik		778,800,000	846,900,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Kota Palopo			53,700,000	184,700,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Kota Palopo			-	15,000,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor			Kota Palopo			-	36,000,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kota Palopo	gedung kantor dalam keadaan terawat		5,000,000	35,000,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Kota Palopo	mobil jabatan dapat digunakan dengan baik		20,000,000	20,000,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kota Palopo	kendaraan dinas/ operasional dapat dimanfaatkan dengan baik		17,000,000	67,000,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Kota Palopo	Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran		3,600,000	3,600,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Kota Palopo	Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran		8,100,000	8,100,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Kota Palopo			64,500,000	64,500,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal			Kota Palopo	peningkatnya pengetahuan dan kapasitas SDA		20,000,000	20,000,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Kota Palopo	pengelola memahami tentang peraturan dan perundang - undangan		44,500,000	44,500,000	Dinskes	APBD Kota Palopo

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					dibidang kesehatan					
1.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	Kota Palopo			5,325,000	5,325,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kota Palopo	laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd		3,375,000	3,375,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Kota Palopo	laporan keuangan dapat disajikan dengan baik		975,000	975,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Kota Palopo	tersedia laporan akhir tahun		975,000	975,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (5.2)	Kota Palopo			55,450,000	55,450,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.15.2	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan			Kota Palopo	tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan yang diperbolehkan		55,450,000	55,450,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (5.2)	Kota Palopo			4,104,017,200	4,004,682,192	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat			Kota Palopo	Terlaksananya Program Jaminan Kesehatan		270,540,000	265,165,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.16.1 2	Peningkatan pelayanan dan penanggulungan masalah kesehatan			Kota Palopo	Pengaturan dan Penjemputan jemaah haji		66,350,000	66,350,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.16.1 3	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		907,960,000	907,960,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.16.1 4	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan			Kota Palopo	Meningkatnya Cakupan Program Kota Sehat		200,000,000	200,000,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.16.1 6	Pengelolaan penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Wara			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		295,090,000	295,090,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.16.1 7	Pengelolaan penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		183,432,000	183,432,000	Dinskes	APBD Kota Palopo

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Wara Utara									
1.2.1.16.1 8	Pengelolaan penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Bara Permai			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		209,969,600	209,969,600	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.16.1 9	Pengelolaan penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Wara Selatan			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		417,400,000	323,440,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.16.2 0	Pengelolaan penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Maroangin			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		186,476,400	186,476,400	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.16.2 1	Pengelolaan penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Pontap			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		158,200,000	158,200,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.16.2 2	Pengelolaan penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Benteng			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		164,200,000	164,200,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.16.2 3	Pengelolaan penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Wara Barat			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		193,190,000	193,190,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.16.2 4	Pengelolaan penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sendana			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		254,145,200	254,145,200	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.16.2 5	Pengelolaan penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Mungkajang			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		172,680,400	172,680,400	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.16.2 6	Pengelolaan penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Wara Utara Kota			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		160,250,000	160,250,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.16.2 7	Pengelolaan penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Wisata Padang Lambe			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		264,133,600	264,133,592	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Kota Palopo			125,448,000	125,748,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.17.3	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Administrasi LabKesDa		125,448,000	125,748,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.19	Program Promosi Kesehatan	Pengembangan SDM,	Meningkatnya Derajat	Kota			2,340,035,000	2,340,035,000	Dinskes	APBD

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	dan Pemberdayaan Masyarakat	Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Kesehatan Masyarakat (S.2)	Palopo						Kota Palopo
1.2.1.19.1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat			Kota Palopo	menigkatnya masyarakat yang dapat memahami pola hidup sehat		50,900,000	50,900,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat			Kota Palopo	terbayarnya insentif kader posyandu		2,237,235,000	2,237,235,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.19.3	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan			Kota Palopo	meningkatkan pengetahuan dan kapasitas tenaga penyuluh		25,850,000	25,850,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.19.4	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan			Kota Palopo	peningkatnya pemanfaatan sarana kesehatan		26,050,000	26,050,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Kota Palopo			50,000,000	56,000,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin			Kota Palopo	tersedianya bahan makanan tambahan bagi bayi dan balita gizi kurang		50,000,000	56,000,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Kota Palopo			109,710,000	208,212,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.21.1	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat			Kota Palopo	Tercapainya MDGS 4		109,710,000	208,212,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Kota Palopo			315,329,000	315,329,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.22.1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk			Kota Palopo	Penurunan Kasus DBD dan tahun sebelumnya		172,400,000	172,400,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.22.5	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular			Kota Palopo	Menurunkan Jumlah Kasus Penyakit Menular		60,764,000	60,764,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.22.8	Peningkatan imunisasi			Kota Palopo	Meningkatnya Cakupan Imunisasi		40,530,000	40,530,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.22.9	Peningkatan surveillance			Kota	Tercapainya kegiatan		41,635,000	41,635,000	Dinskes	APBD

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Epidemiologi dan penanggulangan wabah			Palopo	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Meningkatkan Surveilance					Kota Palopo
1.2.1.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (5.2)	Kota Palopo			111,000,000	111,000,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.23.1	Penyusunan standar pelayanan kesehatan			Kota Palopo	tersedianya standar pelayanan kesehatan		111,000,000	111,000,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.25	Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (5.2)	Kota Palopo			1,015,000,000	1,649,200,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.25.1	Pembangunan puskesmas			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran		700,000,000	1,339,300,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.25.2	Pembangunan puskesmas pembantu			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran		260,000,000	254,900,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.25.5	Pembangunan Posyandu			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran		55,000,000	55,000,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (5.2)	Kota Palopo			22,082,841,000	22,163,126,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.28.1	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan		41,695,000	26,165,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.28.9	Pelayanan Kesehatan Gratis			Kota Palopo	Pelayanan Kesehatan secara Gratis Kepada masyarakat		22,041,146,000	22,136,961,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (5.2)	Kota Palopo			40,000,000	51,800,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.29.4	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita			Kota Palopo	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan		40,000,000	51,800,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (5.2)	Kota Palopo			9,050,000	9,050,000	Dinskes	APBD Kota Palopo

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Pelayanan Dasar								
1.2.1.30.3	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan			Kota Palopo	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Puskesmas Terhadap Lansia		9,050,000	9,050,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.33	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Kota Palopo			32,723,394,500	31,310,835,552	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.33.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar			Kota Palopo	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan dasara Puskesmas		9,379,665,000	9,358,350,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.33.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Farmasi			Kota Palopo	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Farmasi		20,158,992,500	4,210,769,552	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.33.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Rujukan			Kota Palopo	Tercapainya Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan		3,184,737,000	17,741,716,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.34	Program Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Kota Palopo			6,188,800,000	6,103,850,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.34.2	Pelayanan Kesehatan RSUD Type C			Kota Palopo	Tercapainya Pelayanan Kesehatan RSUD Type C		6,188,800,000	6,103,850,000	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.35	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Kota Palopo			10,941,527,690	11,293,720,806	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.35.1	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Wara			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		2,148,000,000	2,269,710,263	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.35.2	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Wara Utara			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		1,008,000,000	1,084,715,663	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.35.3	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bara Permai			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		902,280,000	945,608,913	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.35.4	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Wara Selatan			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		780,000,000	854,869,328	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.35.5	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Maroangin			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		795,671,000	809,491,738	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.35.6	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pontap			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		1,289,748,000	1,296,387,469	Dinskes	APBD Kota

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
										Palopo
1.2.1.35.7	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Benteng			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		771,457,320	827,369,024	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.35.8	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Wara Barat			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		690,000,000	692,226,043	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.35.9	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sendana			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		538,589,370	509,342,485	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.35.10	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mungkajang			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		653,832,000	671,547,391	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.35.11	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Wara Utara Kota			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		1,171,950,000	1,120,280,883	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.35.12	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Wisata Padang Lambe			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		192,000,000	212,171,606	Dinskes	APBD Kota Palopo
1.2.1.36	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Kota Palopo			8,369,280,000	8,369,280,000	Dinskes	DAK
1.2.1.36.1	Pelayanan Kesehatan BOK			Kota Palopo	Meningkatnya pelayanan Masyarakat		7,639,180,000	7,639,180,000	Dinskes	DAK
1.2.1.36.2	Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil			Kota Palopo	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Kota Palopo		408,000,000	408,000,000	Dinskes	DAK
1.2.1.36.3	Akreditasi Puskesmas			Kota Palopo	Terpenuhinya Akreditasi Puskesmas		322,100,000	322,100,000	Dinskes	DAK
RSUD Sawerigading							155,824,982,400	161,131,107,760		
	Belanja Tidak Langsung						30,854,274,000	30,947,689,000		
	Belanja Langsung						124,970,708,400	130,183,418,760		
1.2.2.33	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)				40,926,588,400	40,926,588,400	RSUD	DAK
1.2.2.33.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Rujukan				Meningkatnya Pelayanan Rujukan DAK Bidang Kesehatan		40,926,588,400	40,926,588,400	RSUD	DAK
1.2.2.34	Program Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)				84,044,120,000	89,256,830,360	RSUD	APBD Kota Palopo
1.2.2.34.1	Pelayanan Kesehatan BLUD				Meningkatnya		84,044,120,000	89,256,830,360	RSUD	APBD

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	RSUD				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan RS					Kota Palopo
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							104,444,095,140	105,781,871,955		
	Belanja Tidak Langsung						6,735,256,000	6,531,098,000		
	Belanja Langsung						97,708,839,140	99,250,773,955		
1.3.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				1,394,042,194	1,431,742,194		
1.3.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Meningkatnya Pelayanan Jasa Surat Menyurat		43,500,000	44,500,000		
1.3.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon Listrik air dan Internet		207,720,000	206,020,000		
1.3.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						20,790,000	20,190,000		
1.3.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terwujudnya Jasa Administrasi Keuangan		113,160,000	113,160,000		
1.3.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor		23,600,000	24,600,000		
1.3.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terwujudnya Kebutuhan Penerangan Bangunan Kantor		2,000,000	3,000,000		
1.3.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Terwujudnya Bahan Bacaan Perundang-Undangan		5,280,000	5,280,000		
1.3.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		448,792,194	488,792,194		
1.3.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Terwujudnya Jasa Administrasi Umum		529,200,000	526,200,000		
1.3.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				1,190,150,000	4,732,665,125		
1.3.1.2.3	Pembangunan gedung kantor				Terciptanya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai		999,550,000	4,562,165,125		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.3.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Terpenuhi Penunjang Kesekretaritan SKPD		25,000,000	25,000,000		
1.3.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Tersedianya Alat-alat yang Memadai		66,400,000	61,100,000		
1.3.1.2.10	Pengadaan mebeleur				Meningkatnya Sarana Pelayanan Umum dan Pendukung Kinerja		4,000,000	5,000,000		
1.3.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Ruang Kantor/Ruang Kerja yang Nyaman		25,000,000	25,000,000		
1.3.1.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Menunjang Kelancaran dalam Melaksanakan Tugas		25,000,000	25,000,000		
1.3.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Menunjang Kelancaran dalam Melaksanakan Tugas		37,000,000	16,000,000		
1.3.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Tersedianya Alat-Alat yang Memadai		2,200,000	3,200,000		
1.3.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Peralatan Kantor dalam Kondisi Baik		6,000,000	10,200,000		
1.3.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				71,790,000	71,790,000		
1.3.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				Jumlah Aparatur yang memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku		71,790,000	71,790,000		
1.3.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				34,500,000	34,500,000		
1.3.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Evaluasi Kinerja OPD		2,700,000	2,700,000		
1.3.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Terwujudnya Laporan Keuangan Semesteran		900,000	900,000		
1.3.1.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Laporan Pertanggungjawaban Keuangan OPD		900,000	900,000		
1.3.1.6.5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan				Terwujudnya Kualitas Kinerja dan Pelaporan Kegiatan Lingkup Dinas PUPR		30,000,000	30,000,000		
1.3.1.15	Program pembangunan	Pemerataan dan	Meningkatnya				41,295,761,706	48,178,974,806		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	jalan dan jembatan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)							
1.3.1.15.3	Pembangunan jalan				Lancarnya Aksesibilitas serta Kenyamanan Pengguna Jalan		30,187,167,706	37,000,213,425		
1.3.1.15.5	Pembangunan jembatan				Lancarnya Aksesibilitas Pengguna Jembatan		3,601,600,000	3,573,827,381		
1.3.1.15.7	Pembangunan Trotoar				Lancarnya Akses Jalan		7,506,994,000	7,604,934,000		
1.3.1.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)				3,994,150,000	5,095,706,590		
1.3.1.16.3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				Terwujudnya saluran drainase yang baik		3,853,400,000	4,956,156,590		
1.3.1.16.5	Rehabilitasi / pemeliharaan drainase / gorong-gorong				Lancarnya Saluran Drainase		140,750,000	139,550,000		
1.3.1.17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)				2,616,700,000	2,787,395,000		
1.3.1.17.3	Pembangunan turap/talud/bronjong				Terbangunnya tanggul/bronjong di sepanjang aliran sungai yang beresiko longsor		2,616,700,000	2,787,395,000		
1.3.1.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)				434,750,000	427,300,000		
1.3.1.18.3	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan				Kelancaran/Kenyamanan Pengguna Jalan		216,500,000	212,900,000		
1.3.1.18.4	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan				Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan		218,250,000	214,400,000		
1.3.1.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur				86,880,000	84,880,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Strategis Daerah (S.5)							
1.3.1.23.5	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat				Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pembangunan		26,200,000	-		
1.3.1.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat				Tersedianya alat alat berat yang layak yang memadai		60,680,000	84,880,000		
1.3.1.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)				100,000,000	100,000,000		
1.3.1.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi						100,000,000	100,000,000		
1.3.1.28	Program Pengendalian Banjir	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)				160,843,020	468,048,020		
1.3.1.28.7	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali				Melancarkan debit air serta mengurangi resiko dampak bencana banjir		160,843,020	468,048,020		
1.3.1.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)				18,368,900,000	8,500,950,000		
1.3.1.29.2	Pembangunan/peningkatan infrastruktur				Terwujudnya Peningkatan Infrastruktur		18,368,900,000	8,500,950,000		
1.3.1.31	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan Jembatan dan Irigasi	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)				16,522,821,500	16,538,821,500		
1.3.1.31.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan				Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan		14,733,670,500	14,749,670,500		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.3.1.31.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Irigasi				Meningkatkan sumber daya air baku serta produktifitas hasil pertanian		1,789,151,000	1,789,151,000		
1.3.1.32	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)				10,028,400,720	10,028,400,720		
1.3.1.32.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Air Minum				Terwujudnya Lingkungan Sehat dan Bersih		5,453,095,860	5,453,095,860		
1.3.1.32.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Sanitasi				Penyedia Jasa Profesional dalam Sektor Jasa Konstruksi		4,575,304,860	4,575,304,860		
1.3.1.34	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)				19,000,000	19,000,000		
1.3.1.34.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah Orang Perseorangan Badan Usaha)				Tertibnya Penyelenggara Jasa Konstruksi		19,000,000	19,000,000		
1.3.1.35	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)				20,000,000	20,000,000		
1.3.1.35.1	Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi				Tertibnya Penyelenggara Jasa Konstruksi		20,000,000	20,000,000		
1.3.1.36	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)				19,000,000	19,000,000		
1.3.1.36.2	Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi				Terpenuhinya Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi		19,000,000	19,000,000		
1.3.1.15	Program Perencanaan Tata	Pemerataan dan	Meningkatnya				534,050,000	107,500,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Ruang	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (5.4)							
1.3.1.15.5	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan						260,450,000	-		
1.3.1.15.8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW				Perda APBD TA. 2019		102,500,000	107,500,000		
1.3.1.15.18	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan						171,100,000	-		
1.3.1.16	Program Pemanfaatan Ruang	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (5.4)				754,000,000	546,000,000		
1.3.1.16.10	Pengendalian Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang						45,000,000	-		
1.3.1.16.13	Penyusunan Kajian Lingkungan Pemanfaatan Ruang						709,000,000	546,000,000		
1.3.1.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (5.4)				63,100,000	58,100,000		
1.3.1.17.5	Pengawasan pemanfaatan ruang				Perda APBD TA. 2018		63,100,000	58,100,000		
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman							9,319,089,200	6,205,600,700		
	Belanja Tidak Langsung						3,232,208,000	2,961,194,000		
	Belanja Langsung						6,086,881,200	3,244,406,700		
1.4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				780,700,000	922,951,100		
1.4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Tersedianya Jasa Surat Menyurat		56,000,000	65,360,000		
1.4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi				Tersedianyan Jasa		119,200,000	110,194,293		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	sumber daya air dan listrik				Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik					
1.4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terselenggaranya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional		4,200,000	4,200,000		
1.4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terlaksananya Administrasi Keuangan Yang Baik		85,600,000	78,000,000		
1.4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terpeliharanya Kebersihan Kantor		15,500,000	15,500,000		
1.4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		2,500,000	2,500,000		
1.4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Tersedianya Bahan Bacaan		5,280,000	4,800,000		
1.4.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terlaksananya rapat - rapat koordinasi luar daerah		406,020,000	560,571,807		
1.4.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Tersedianya Pengelolaan Administrasi Umum		86,400,000	81,825,000		
1.4.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$.8)				981,507,000	983,507,000		
1.4.1.2.2	Pembangunan rumah dinas				Terpenuhinya Rumah Dinas		150,000,000	150,000,000		
1.4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Terwujudnya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		1,000,000	1,000,000		
1.4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				terwujudnya peralatan operasional gedung kantor		21,500,000	21,500,000		
1.4.1.2.10	Pengadaan mebeleur				terwujudnya perlengkapan meja kursi pejabat		25,000,000	25,000,000		
1.4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terciptanya gedung kantor memadai		45,000,000	45,000,000		
1.4.1.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				terpeliharanya mobil jabatan		21,000,000	21,000,000		
1.4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		2,800,000	4,800,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.4.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terpeliharanya peralatan gedung kantor		7,200,000	7,200,000		
1.4.1.2.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan						708,007,000	708,007,000		
1.4.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				35,700,000	14,548,900		
1.4.1.5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan				terciptanya sosialisasi peraturan perundang-undangan		25,000,000	-		
1.4.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				terlaksananya bimbingan teknis ASN-		10,700,000	14,548,900		
1.4.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				3,000,000	3,000,000		
1.4.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD		1,800,000	1,800,000		
1.4.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Tersajinya Laporan Keuangan Semesteran		600,000	600,000		
1.4.1.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tersajinya Laporan Keuangan Akhir Tahun		600,000	600,000		
1.4.1.15	Program Pengembangan Perumahan	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)				1,153,015,000	932,940,500		
1.4.1.15.1	Penetapan kebijakan strategi dan program perumahan				Dokumen Peraturan Walikota Tentang Penghunian Rumah Susun		35,525,000	32,825,000		
1.4.1.15.3	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan				Tersedianya Bantuan PKR - MBR		33,950,000	38,650,000		
1.4.1.15.5	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha				Terbangunnya rumah layak huni bagi ASN/komunitas masyarakat berpenghasilan rendah		24,100,000	23,100,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.4.1.15.7	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat				Tersedianya Tenaga Pengawas Pembangunan Rusun dan Rusus		196,690,000	241,065,500		
1.4.1.15.8	Monitoring evaluasi dan pelaporan				Tersedianya Tenaga Pengelola Rumah Susun dan Rumah Khusus		47,000,000	52,400,000		
1.4.1.15.9	Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Permukiman				Terwujudnya Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Secara Sistematis		148,000,000	148,000,000		
1.4.1.15.11	Pengawasan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Permukiman				Terwujudnya Kawasan Permukiman Yang Tertata Sepanjang Sungai Latuppa - Amassangan		119,100,000	-		
1.4.1.15.13	Pemb. Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman				Terpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Pemukiman		-	-		
1.4.1.15.14	Pendataan Backlog Perumahan				Data backlog perumahan		48,650,000	45,650,000		
1.4.1.15.15	Pemb. Sarana dan Prasarana Utilitas Perumahan				Terpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Perumahan		500,000,000	351,250,000		
1.4.1.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)				148,380,000	148,380,000		
1.4.1.16.1	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan				Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan		90,300,000	90,300,000		
1.4.1.16.5	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang				Terlaksananya Penyerahan PSU Yang Ada di Wilayah Kota Palopo		58,080,000	58,080,000		
1.4.1.17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)				48,650,000	50,650,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Sustainable								
1.4.1.17.8	Pemutakhiran dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni				Data RTLH (rumah tak layak huni)		48,650,000	50,650,000		
1.4.1.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)				2,935,929,200	188,429,200		
1.4.1.21.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman				Terpenuhinya Penyediaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Pemukiman		2,935,929,200	188,429,200		
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							6,762,434,000	6,906,028,000		
	Belanja Tidak Langsung						3,382,184,000	3,525,778,000		
	Belanja Langsung						3,380,250,000	3,380,250,000		
1.6.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				803,357,600	834,795,460		
1.6.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Meningkatnya Pelayanan Surat Menyurat		53,697,600	64,197,600		
1.6.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terselenggaranya Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air		124,980,000	115,921,500		
1.6.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Meningkatnya Kelayakan Kendaraan Dinas		7,600,000	7,600,000		
1.6.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan		54,000,000	54,000,000		
1.6.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah Bangunan yang Kebersihannya Dibiayai		29,100,000	29,100,000		
1.6.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terlaksananya alat listrik dan elektronik		4,500,000	4,500,000		
1.6.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan		50,080,000	50,080,000		
1.6.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan		371,500,000	387,096,360		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					Konsultasi ke Luar Daerah					
1.6.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Terselenggaranya Jasa Administrasi Umum		107,900,000	122,300,000		
1.6.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				359,800,000	343,994,800		
1.6.1.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional				tersedianya kendaraan dinas		69,000,000	66,027,000		
1.6.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Terwujudnya Perlengkapan Gedung Kantor		17,500,000	17,405,000		
1.6.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Terwujudnya Peralatan Gedung Kantor		60,000,000	60,000,000		
1.6.1.2.10	Pengadaan mebeleur				Terwujudnya Meubuler Kantor		-	10,500,000		
1.6.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		11,000,000	11,000,000		
1.6.1.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Terpeliharanya mobil jabatan		25,000,000	25,000,000		
1.6.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		16,500,000	16,500,000		
1.6.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		4,800,000	4,800,000		
1.6.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terpeliharanya peralatan gedung kantor		6,000,000	6,000,000		
1.6.1.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				terwujudnya gedung kantor yang representatif		150,000,000	126,762,800		
1.6.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				357,684,000	357,684,000		
1.6.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				terwujudnya kualitas sumber daya manusia		357,684,000	357,684,000		
1.6.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				8,850,000	8,850,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	dan keuangan	dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi								
1.6.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Dokumen Kinerja SKPD renja Renstra SKPD dan TAPKIN		5,250,000	6,000,000		
1.6.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		1,800,000	1,150,000		
1.6.1.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1,800,000	1,700,000		
1.6.1.15	Program pengembangan data/informasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				53,360,000	26,100,000		
1.6.1.15.6	Pembinaan dan pengembangan informasi daerah berbasis teknologi				Data / Informasi Pembangunan Daerah pada(SIPD) Tahun 2018.		53,360,000	26,100,000		
1.6.1.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (5.4)				113,800,000	59,800,000		
1.6.1.18.3	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh				Arahan Pengembangan RTH & Pengelolaan TWA Nanggala III di Kota Palopo.		113,800,000	59,800,000		
1.6.1.19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (5.4)				438,350,500	492,150,500		
1.6.1.19.1	Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampai perkotaan				Tercapainya Sinergis Program Pusat Daerah dan Swadaya Masyarakat dalam Pelaksanaan Program KOTAKU dan Dokumen Rencana Pencegahan dan		141,750,500	146,150,500		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP).					
1.6.1.19.7	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan				Tercapainya Sinergitas Program Pusat Daerah dan Swadaya Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan & Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)		164,900,000	164,900,000		
1.6.1.19.9	Koordinasi perencanaan air minum drainase dan sanitasi perkotaan				Tercapainya Sinergitas Program Pusat Daerah dan Swadaya Masyarakat dalam Program Percepatan Sanitasi Permukiman dan Hibah Air Limbah.		131,700,000	181,100,000		
1.6.1.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				72,180,000	35,880,000		
1.6.1.20.3	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah				SDM Perencana yang Kompeten Dalam Menyusun Dokumen Perencanaan		72,180,000	35,880,000		
1.6.1.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				769,317,900	818,517,940		
1.6.1.21.7	Penetapan RPJMD				PERDA RPJMD		126,395,000	107,905,170		
1.6.1.21.8	Penyusunan rancangan RKPD				Dokumen RKPD Kota Palopo Tahun 2020		127,294,000	125,776,000		
1.6.1.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD				Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Tahunan		141,630,000	125,310,270		
1.6.1.21.11	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		73,585,000	88,950,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					(LAKIP) Kota Palopo Tahun 2018.					
1.6.1.21.1 2	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)				dok.laporan pertanggungjawaban walikota palopo akhrit tahun angg.2018		72,889,600	57,340,000		
1.6.1.21.1 3	Monitoring evaluasi dan pelaporan				Laporan Monev DAK TP APBN DEKON dan Rekomendasi Terhadap Laporan Hasil TA. 2018.		101,552,000	148,071,000		
1.6.1.21.1 7	Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah				Laporan Hasil evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.		125,972,300	165,165,500		
1.6.1.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				160,750,000	153,512,500		
1.6.1.22.4	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi				Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah Kota Palopo.		160,750,000	153,512,500		
1.6.1.23	Program perencanaan sosial dan budaya	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				242,800,000	248,964,800		
1.6.1.23.6	Koordinasi Penyelenggaraan Program Pengembangan Pelayanan Dasar				Kota Palopo Menjadi Kota Sehat 2017		41,750,000	55,675,000		
1.6.1.23.1 0	Koordinasi Monev Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD				- Konsistensi Dokumen Perencanaan SPKD yang diarahkan sesuai Target Pembangunan Berkelanjutan Daerah. - Proporsi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Daerah Meningkat Melalui APBD Kota Palopo.		76,550,000	73,089,800		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.6.1.23.1 1	Koordinasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Menuju Kota Layak Anak				- Persentase Keterlibatan Perempuan dan Laki-Laki dalam Pembangunan di Kota Palopo. - Kota Palopo Menuju Kota Layak Anak		49,800,000	46,700,000		
1.6.1.23.1 2	Koordinasi Percepatan Pencapaian Target SDGs				Proporsi Anggaran untuk Program / Kegiatan terkait Capaian SDGs melalui APBD Kota Palopo.		74,700,000	73,500,000		
Dinas Perhubungan							8,009,706,000	8,053,723,000		
	Belanja Tidak Langsung						5,466,106,000	5,417,123,000		
	Belanja Langsung						2,543,600,000	2,636,600,000		
1.7.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				540,394,000	621,756,000		
1.7.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Terciptanya Kelancaran Administrasi Perkantoran		25,096,000	32,817,020		
1.7.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		63,540,000	63,540,000		
1.7.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terciptanya Kelancaran Kerja		16,250,000	40,690,980		
1.7.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan		85,628,000	87,828,000		
1.7.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan Kerja		45,700,000	45,700,000		
1.7.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terpenuhinya Penerangan Gedung Kantor		5,000,000	5,000,000		
1.7.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Terpenuhinya Kebutuhan Informasi		5,280,000	5,280,000		
1.7.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terlaksananya Program Kerja		155,700,000	200,700,000		
1.7.1.1.19	Penyediaan Jasa				Meningkatnya		138,200,000	140,200,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Administrasi Umum				Pelayanan Administarsi Perkantoran					
1.7.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				366,450,000	396,575,000		
1.7.1.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional				Tersedianya kendaraan dinas kantor		150,000,000	150,000,000		
1.7.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor		35,500,000	29,750,000		
1.7.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor		37,600,000	52,100,000		
1.7.1.2.10	Pengadaan mebeleur				Tersedianya Kebutuhan Mebeleur Kantor		28,750,000	14,175,000		
1.7.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terciptanya Ruang Kerja Yang Nyaman Dalam Kantor		19,000,000	21,000,000		
1.7.1.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Meningkatnya Kualitas Mobil Jabatan		25,000,000	25,000,000		
1.7.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Meningkatnya Kualitas Mobil Dinas/ Operasional		59,600,000	63,800,000		
1.7.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Terciptanya Kelancaran Tugas di Kantor		1,400,000	2,150,000		
1.7.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Meningkatnya Kualitas Peralatan Gedung kantor		9,600,000	38,600,000		
1.7.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				82,350,000	55,733,000		
1.7.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur		82,350,000	55,733,000		
1.7.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				1,800,000	180,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.7.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersedianya Lakip		600,000	60,000		
1.7.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran		600,000	60,000		
1.7.1.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tesedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun		600,000	60,000		
1.7.1.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)				37,135,000	37,135,000		
1.7.1.16.5	Pemeliharaan Traffic Light				Terciptanya Keselamatan Berlalulintas		19,135,000	19,135,000		
1.7.1.16.6	Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalulintas				Terciptanya Keselamatan Berlalulintas		18,000,000	18,000,000		
1.7.1.17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)				1,465,472,000	1,475,222,000		
1.7.1.17.4	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang				Terciptanya Keselamatan Jasa Transportasi		93,500,000	90,500,000		
1.7.1.17.5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya				Terciptanya Kenyamanan dan Keselamatan Berlalulintas		904,720,000	914,620,000		
1.7.1.17.6	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal				Terciptanya Kenyamanan Penumpang di LingkunganTerminal		327,300,000	320,400,000		
1.7.1.17.9	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal				Terciptanya Keamanan Penumpang Dalam Terminal		15,152,000	15,152,000		
1.7.1.17.1 2	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan				Meningkatnya Keselamatan Berlalulintas		70,800,000	82,400,000		
1.7.1.17.1 9	Pelaksanaan Kelayakan Moda Transportasi Angkutan Laut				Terciptanya Keselamatan Angkutan Laut		54,000,000	52,150,000		
1.7.1.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas	Meningkatnya Konektifitas dan				49,999,000	49,999,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)							
1.7.1.19.1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas				Meningkatnya Keselamatan Berlalulintas		49,999,000	49,999,000		
Dinas Lingkungan Hidup							35,928,822,964	37,192,492,964		
	Belanja Tidak Langsung						6,998,231,000	6,986,901,000		
	Belanja Langsung						28,930,591,964	30,205,591,964		
1.8.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				1,061,975,900	1,034,075,900		
1.8.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah surat yang dikelola		102,364,200	108,564,200		
1.8.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening yang dibayarkan		112,686,700	96,886,700		
1.8.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah STNK kendaraan yang dibayarkan		80,860,000	80,860,000		
1.8.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah tenaga administrasi keuangan		176,400,000	164,880,000		
1.8.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah petugas kebersihan kantor		15,905,000	15,905,000		
1.8.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah alat listrik		9,500,000	9,500,000		
1.8.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah Koran		5,280,000	5,280,000		
1.8.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah perjalanan Dinas		470,000,000	470,000,000		
1.8.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Jumlah tenaga administrasi dan ASN Pengelola		88,980,000	82,200,000		
1.8.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				1,399,400,000	1,386,900,000		
1.8.1.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional				Jumlah kendaraan yang tersedia		1,201,700,000	1,201,700,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.8.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Jumlah Peralatan yang tersedia		14,750,000	14,750,000		
1.8.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Jumlah Peralatan yang tersedia		106,500,000	109,000,000		
1.8.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Jumlah gedung yang terpelihara		30,050,000	15,050,000		
1.8.1.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Jumlah mobil jabatan yang dipelihara		25,000,000	25,000,000		
1.8.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah Kendaraan operasional yang terpelihara		14,000,000	14,000,000		
1.8.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara		2,000,000	2,000,000		
1.8.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Jumlah peralatan yang terpelihara		5,400,000	5,400,000		
1.8.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				19,500,000	33,000,000		
1.8.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis		19,500,000	33,000,000		
1.8.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				36,100,000	36,100,000		
1.8.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah Dokumen		3,300,000	3,300,000		
1.8.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Jumlah Dokumen		1,500,000	1,500,000		
1.8.1.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Jumlah Dokumen		1,500,000	1,500,000		
1.8.1.6.5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan				Jumlah Dokumen		29,800,000	29,800,000		
1.8.1.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)				11,470,644,964	11,603,168,864		
1.8.1.15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan				Jumlah kendaran operasional yang		2,700,858,400	2,716,444,476		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	persampahan				dipelihara					
1.8.1.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan				Jumlah petugas kebersihan		7,421,753,964	7,421,167,888		
1.8.1.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan				Jumlah TP3R yang dikelola		223,000,000	223,000,000		
1.8.1.15.14	Penyediaan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)				Jumlah TPA yang dikelola		1,125,032,600	1,242,556,500		
1.8.1.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (5.6)				407,075,000	404,875,000		
1.8.1.16.1	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura				Predikat Adipura		90,900,000	90,900,000		
1.8.1.16.2	Koordinasi penilaian langit biru				Sekolah adiwiyata		80,400,000	100,050,000		
1.8.1.16.3	Pemantauan Kualitas Lingkungan				baku mutu air dan udara		91,000,000	91,000,000		
1.8.1.16.4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup				Jumlah pengaduan lingkungan yang diselesaikan		39,800,000	40,600,000		
1.8.1.16.13	Koordinasi penyusunan AMDAL				Jumlah dokumen Amdal		73,700,000	51,050,000		
1.8.1.16.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup				Jumlah sosialisasi		31,275,000	31,275,000		
1.8.1.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (5.6)				28,350,000	26,450,000		
1.8.1.19.2	Pengembangan data dan informasi lingkungan				jumlah dokumen lingkungan yang tersedia		28,350,000	26,450,000		
1.8.1.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (5.6)				3,456,302,300	3,366,843,400		
1.8.1.24.5	Penataan RTH				Tersedianya prasarana		2,163,251,100	2,305,736,900		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					dan sarana pengelolaan persampahan					
1.8.1.24.6	Pemeliharaan RTH				Tersediannya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		1,293,051,200	1,061,106,500		
1.8.1.25	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Lingkungan Hidup	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)				704,424,000	704,424,000		
1.8.1.25.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan				Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana persampahan		704,424,000	704,424,000		
1.8.1.19	Program peningkatan sarana dan prasarana bidang penerangan jalan umum	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)				9,478,677,800	856,077,000		
1.8.1.19.1	Penyediaan Jasa Pengelolaan Penerangan Jalan Umum				Jumlah tenaga administrasi dan lapangan		6,235,929,800	856,077,000		
1.8.1.19.2	Pengadaan Listrik Penerangan jalan Umum				Jumlah pengadaan lampu jalan umum		2,087,100,000	10,753,677,800		
1.8.1.19.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum				Jumlah lampu jalan yang terpasang		1,155,648,000	7,171,929,800		
1.8.1.20	Program pengelolaan areal pemakaman	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penanganan Lingkungan Perkotaan yang Berbudaya serta Sustainable	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)				868,142,000	2,087,100,000		
1.8.1.20.7	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman				Meningkatnya Kebersihan Areal Pemakaman		868,142,000	1,494,648,000		
	Dinas Pertanahan						12,566,141,000	12,464,353,000		
	Belanja Tidak Langsung						2,016,316,000	1,864,528,000		
	Belanja Langsung						10,549,825,000	10,599,825,000		
1.9.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				335,905,000	390,347,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi								
1.9.1.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Terpenuhinya kelancaran administrasi surat menyurat		21,000,000	21,000,000		
1.9.1.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				rekening yang dibayarkan		5,400,000	5,400,000		
1.9.1.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional				Terpenuhinya Kendaraan tertib secara administrasi		2,320,000	2,270,000		
1.9.1.1.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				terpenuhinya Proses Administrasi Keuangan Secara baik		48,600,000	48,600,000		
1.9.1.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				Terpeliharanya Kebersihan Gedung Kantor		7,700,000	7,700,000		
1.9.1.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan penerangan kantor		500,000	500,000		
1.9.1.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				Meningkatnya Wawasan dan SDM Aparatur		5,280,000	3,600,000		
1.9.1.1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah		103,905,000	160,077,000		
1.9.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Terwujudnya Jasa Administrasi Umum		141,200,000	141,200,000		
1.9.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				45,600,000	44,948,000		
1.9.1.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				Terpenuhinya Peralatan kantor yang memadai		15,000,000	14,348,000		
1.9.1.2.10	Pengadaan Mebeleur				Tersedianya prasarana kerja		9,000,000	9,000,000		
1.9.1.2.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan				tersedianya kendaraan dinas jabatan yang memadai		18,500,000	18,500,000		
1.9.1.2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai		1,000,000	1,000,000		
1.9.1.2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala				terpeliharanya secara		2,100,000	2,100,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Peralatan Gedung Kantor				berkala peralatan gedung kantor					
1.9.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				11,400,000	7,610,000		
1.9.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				Tersedianya aparat yang memiliki kompetensi		11,400,000	7,610,000		
1.9.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				2,200,000	2,200,000		
1.9.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Terlaksananya Penyusunan LakipRenja & RKA		1,200,000	1,200,000		
1.9.1.6.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran				Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		500,000	500,000		
1.9.1.6.4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		500,000	500,000		
1.9.1.15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				92,400,000	92,400,000		
1.9.1.15.1	Penyusunan sistem pendaftaran tanah				Tercapainya Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah		92,400,000	92,400,000		
1.9.1.16	Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				10,028,100,000	10,028,100,000		
1.9.1.16.1	Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah				Terwujudnya hasil koordinasi		7,200,000	7,200,000		
1.9.1.16.3	Pengadaan Tanah Pemerintah dan Fasilitas				Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan		10,000,000,000	9,850,000,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Umum				dalam Rangka Kepentingan Umum					
1.9.1.16.4	Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum				Tersedianya data dan informasi pengaturan tanah		20,900,000	170,900,000		
1.9.1.17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				34,220,000	34,220,000		
1.9.1.17.2	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan				Tercapainya Penyelesaian konflik-Konflik Pertanahan		34,220,000	34,220,000		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							4,629,845,000	4,597,863,000		
	Belanja Tidak Langsung						2,475,196,000	2,443,214,000		
	Belanja Langsung						2,154,649,000	2,154,649,000		
1.10.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				709,050,000	736,667,033		
1.10.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Tertatanya sistem pelayanan dengan baik		121,902,000	121,902,000		
1.10.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				membantu kelancaran administrasi kantor		82,920,000	83,920,000		
1.10.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Pengurusan surat-surat kendaraan dinas tepat waktu		4,300,000	4,300,000		
1.10.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Pengelola administrasi keuangan berjalan dengan baik		57,700,000	57,700,000		
1.10.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor		15,000,000	9,000,000		
1.10.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				peralatan kantor dapat terawat		3,500,000	5,500,000		
1.10.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Penerimaan dan pemberian informasi berjalan dengan baik		5,160,000	3,900,000		
1.10.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Perjalanan dinas luar daerah dan luar provinsi		381,768,000	405,845,033		
1.10.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Pengelolaan administrasi keuangan		36,800,000	44,600,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					berjalan dengan baik					
1.10.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				204,100,000	176,482,967		
1.10.1.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional				Terlaksanannya Kegiatan Kantor		19,000,000	16,125,000		
1.10.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				TERPENUHINYA SECARA RUTIN GEDUNG KANTOR		10,000,000	10,000,000		
1.10.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor		98,400,000	98,400,000		
1.10.1.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terpenuhinya secara rutin gedung kantor		17,000,000	17,000,000		
1.10.1.2.2 3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Terpenuhinya Pemeliharaan Mobil Jabatan		24,500,000	15,500,000		
1.10.1.2.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas		20,200,000	1,457,967		
1.10.1.2.2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Terpelihara peralatan kantor		5,000,000	8,000,000		
1.10.1.2.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terpeliharanya peralatan kantor		10,000,000	10,000,000		
1.10.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				31,500,000	31,500,000		
1.10.1.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				Tersedianya pakaian dinas kantor		31,500,000	31,500,000		
1.10.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				24,500,000	24,500,000		
1.10.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				Terwujudnya peningkatan wawasan aparatur		24,500,000	24,500,000		
1.10.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				8,400,000	8,400,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	dan keuangan	dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi								
1.10.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersedianya data dan laporan keuangan		4,500,000	4,500,000		
1.10.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Tersedianya laporan keuangan semesteran		2,600,000	2,600,000		
1.10.1.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tersedianya laporan keuangan akhir tahun		1,300,000	1,300,000		
1.10.1.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$.8)				228,700,000	228,700,000		
1.10.1.15.1	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu				Semua Anak Mendapat Kartu Identitas Anak		77,100,000	77,100,000		
1.10.1.15.3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun updating dan pemeliharaan)				Semua masyarakat memiliki dokumen pencatatan sipil		49,300,000	49,300,000		
1.10.1.15.7	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan				Semua Masyarakat Memiliki Dokumen Kependudukan		102,300,000	102,300,000		
1.10.1.16	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$.8)				948,399,000	948,399,000		
1.10.1.16.1	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan				Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan		45,100,000	45,100,000		
1.10.1.16.3	Pelayanan Dokumen Kependudukan						91,450,000	91,450,000		
1.10.1.16.4	Penerbitan Dokumen kependudukan						643,481,500	643,481,500		
1.10.1.16.5	Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan						32,345,500	32,345,500		
1.10.1.16.6	Koordinasi Kebijakan Kependudukan kependudukan						136,022,000	136,022,000		
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							2,899,263,000	2,903,817,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Belanja Tidak Langsung						1,434,263,000	1,438,817,000		
	Belanja Langsung						1,465,000,000	1,465,000,000		
1.11.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				436,755,000	441,196,420		
1.11.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Terwujudnya surat menyurat		12,500,000	12,500,000		
1.11.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		31,575,000	36,375,600		
1.11.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terpeliharanya Kendaraan dinas		1,800,000	1,800,000		
1.11.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Tersedianya tenaga administrasi keuangan		69,600,000	69,600,000		
1.11.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terpeliharanya kebersihan Alat dan Ruang Kantor		14,000,000	14,000,000		
1.11.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terwujudnya komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor		1,000,000	1,000,000		
1.11.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi		5,280,000	3,600,000		
1.11.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi		204,400,000	210,520,820		
1.11.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Terwujudnya tenaga Administrasi umum dan barang		96,600,000	91,800,000		
1.11.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				84,100,000	84,100,000		
1.11.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Meningkatnya pelayanan adm. perkantoran		24,200,000	24,200,000		
1.11.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Meningkatnya pelayanan adm. perkantoran		9,700,000	9,700,000		
1.11.1.2.10	Pengadaan mebeleur				Tersedianya mebeleur kantor		21,000,000	21,000,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.11.1.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		2,000,000	2,000,000		
1.11.1.2.2 3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Terpeliharanya Mobil Jabatan		25,000,000	25,000,000		
1.11.1.2.2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor		400,000	400,000		
1.11.1.2.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terpeliharanya Peralatan Kerja		1,800,000	1,800,000		
1.11.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				4,500,000	4,500,000		
1.11.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja pada SKPD		2,700,000	2,700,000		
1.11.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Tersusunnya laporan keuangan semesteran		900,000	900,000		
1.11.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun		900,000	900,000		
1.11.1.15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (5.3)				30,075,000	27,806,000		
1.11.1.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak				Terwujudnya Pemenuhan Hak anak dalam keluarga		30,075,000	27,806,000		
1.11.1.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (5.3)				274,145,000	272,253,380		
1.11.1.16.3	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak				Terfasilitasinya kegiatan forum anak		46,200,000	45,723,900		
1.11.1.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak				Mewujudkan kota palopo menjadi kota layak anak		83,965,000	70,390,000		
1.11.1.16.8	Pengembangan Sistem				Terkirimnya data		27,850,000	27,678,400		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Informasi Gender dan Anak				aplikasi SIGA					
1.11.1.16.9	Monitoring evaluasi dan pelaporan				Mendapatkan penghargaan APE di bidang PUG dan PA		20,930,000	33,778,880		
1.11.1.16.1 2	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)				Adanya tempat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan		95,200,000	94,682,200		
1.11.1.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)				35,425,000	35,144,200		
1.11.1.17.2	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT				Persentase terlindunginya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak		35,425,000	35,144,200		
1.11.1.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)				600,000,000	600,000,000		
1.11.1.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan				Terwujudnya pembinaan organisasi perempuan		150,000,000	150,000,000		
1.11.1.18.7	Pembinaan peran perempuan dalam membangun keluarga sejahtera				Terwujudnya bimbingan manajemen usaha perempuan		450,000,000	450,000,000		
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							8,779,531,000	8,712,122,000		
	Belanja Tidak Langsung						2,870,455,000	2,803,046,000		
	Belanja Langsung						5,909,076,000	5,909,076,000		
1.12.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				447,511,000	447,747,250		
1.12.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Lancarnya Administrasi Surat Menyurat		20,820,000	20,820,000		
1.12.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terwujudnya komunikasi ketersediaan air dan listrik		33,900,000	33,900,000		
1.12.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terpeliharanya perizinan Kendaraan Dinas		22,400,000	22,400,000		
1.12.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi				Terwujudnya		60,700,000	60,700,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	keuangan				Pengelola Administrasi Keuangan					
1.12.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terpeliharanya Kebersihan Alat dan Ruang Kantor		8,000,000	8,000,000		
1.12.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terwujudnya omponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor		2,000,000	3,000,000		
1.12.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi		5,280,000	2,400,000		
1.12.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terwujudnya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi		192,211,000	195,527,250		
1.12.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Terwujudnya Admnistrasi Pengelola Barang		102,200,000	101,000,000		
1.12.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				82,750,000	82,750,000		
1.12.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor		4,000,000	4,000,000		
1.12.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Terpenuhinya peralatan gedung		12,750,000	12,750,000		
1.12.1.2.2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor		7,500,000	7,500,000		
1.12.1.2.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Terpeliharanya kendaraan dinas		22,000,000	22,000,000		
1.12.1.2.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Terpeliharanya kendaraan dinas		27,000,000	27,000,000		
1.12.1.2.2.6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		2,000,000	2,000,000		
1.12.1.2.2.8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terpeliharanya peralatan kerja		7,500,000	7,500,000		
1.12.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				22,578,000	22,578,000		
1.12.1.5.2	Sosialisasi peraturan				Terwujudnya sosialisasi		7,000,000	7,000,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	perundang-undangan				peraturan perundang-undangan					
1.12.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				Terwujudnya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		15,578,000	15,578,000		
1.12.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				10,600,000	10,363,750		
1.12.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersusunya laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		5,700,000	5,700,000		
1.12.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Tersusunya Laporan keuangan Semesteran		3,000,000	3,000,000		
1.12.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tersusunya laporan keuangan akhir tahun		1,900,000	1,663,750		
1.12.1.15	Program Keluarga Berencana	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)				138,500,000	138,500,000		
1.12.1.15.1	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin				60 KK yang terlayani		8,000,000	8,000,000		
1.12.1.15.2	Pelayanan KIE				Tercapainya kwalitas pelayanan KB		9,200,000	9,200,000		
1.12.1.15.4	Promosi Pelayanan Khiba				Pelayanan Khiba yang menyentuh seluruh sasaran melalui peningkatan PKB/PLKB/PPKBD dan Sub PPKBD		71,300,000	71,300,000		
1.12.1.15.8	Penyusunan Grand Design Program KKBPK Tingkat Kabupaten / Kota				Adanya buku profil dan parameter program KKBPK		50,000,000	50,000,000		
1.12.1.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)				10,200,000	10,200,000		
1.12.1.16.1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)				Tercapainya KIE		10,200,000	10,200,000		
1.12.1.17	Program pelayanan	Pengembangan SDM,	Meningkatnya derajat				23,600,000	23,600,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	kontrasepsi	Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)							
1.12.1.17.2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB				Menghambat Laju Pertumbuhan Penduduk		23,600,000	23,600,000		
1.12.1.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)				1,699,300,000	1,699,300,000		
1.12.1.18.2	Koordinasi pengelolaan program melalui Rakerda				Diperolehnya rumusan program dan kegiatan ditahun berikutnya		10,700,000	10,700,000		
1.12.1.18.3	Pengelolaan data dan informasi program KB				Tersedianya data mikro		10,000,000	10,000,000		
1.12.1.18.4	Pembinaan Institusi Masyarakat (PPKBD dan Sub PPKBD)				Meningkatnya Pengetahuan Institusi Masyarakat (PPKBD & Sub PPKBD)		1,678,600,000	1,678,600,000		
1.12.1.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)				6,800,000	6,800,000		
1.12.1.20.4	Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah				Terlaksananya Pembinaan Kelompok BKR dan Pembinaan PIK saka Kencana dan Pembinaan kelompok UPPKS		6,800,000	6,800,000		
1.12.1.25	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Keluarga Berencana	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)				3,467,237,000	3,467,237,000		
1.12.1.25.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana				Adanya sarana penyuluh KB & Balai penyuluh KB		1,540,200,000	1,540,200,000		
1.12.1.25.2	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi				Kelancaran pelaksanaan program		1,927,037,000	1,927,037,000		
Dinas Sosial							9,802,582,400	9,607,702,400		
	Belanja Tidak Langsung						2,485,224,000	2,260,344,000		
	Belanja Langsung						7,317,358,400	7,347,358,400		
1.13.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				514,288,320	614,739,500		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi								
1.13.1.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Terselurnya Surat - surat Dinas		53,902,100	63,372,100		
1.13.1.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya Listrik Telpn Air & Alat Komunikasi		64,860,000	55,760,000		
1.13.1.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional				Tersedianya Anggaran Surat Tanda Nomor Kendaraan		9,200,000	9,200,000		
1.13.1.1.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				Tertibnya Administrasi Keuangan		64,200,000	64,200,000		
1.13.1.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				Terpeliharanya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		9,692,000	10,200,000		
1.13.1.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik		1,631,000	1,631,000		
1.13.1.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		5,280,000	5,280,000		
1.13.1.1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi		221,023,220	318,096,400		
1.13.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Tertibnya Admiistrasi Umum		84,500,000	87,000,000		
1.13.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				132,700,000	228,300,000		
1.13.1.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor		71,500,000	158,900,000		
1.13.1.2.2 3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan				Terpeliharanya Mobil Jabatan		25,000,000	25,000,000		
1.13.1.2.2 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				Terpeliharanya Mobil Operasional		27,000,000	29,000,000		
1.13.1.2.2 6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor		1,400,000	7,000,000		
1.13.1.2.2 8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor		7,800,000	8,400,000		
1.13.1.5	Program Peningkatan	Tata Kelola	Meningkatnya kualitas				54,835,500	46,994,400		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	pelayanan publik (5.8)							
1.13.1.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal				Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal		39,835,500	28,397,900		
1.13.1.5.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Undangan		15,000,000	18,596,500		
1.13.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				3,000,000	3,600,000		
1.13.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Tersusunnya Renstra Renja dan LAKIP		1,800,000	2,400,000		
1.13.1.6.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran				Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran		600,000	600,000		
1.13.1.6.4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun		600,000	600,000		
1.13.1.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (5.3)				104,500,000	149,156,000		
1.13.1.15.9	Penguatan keserasian sosial berbasis masyarakat						-	44,900,000		
1.13.1.15.12	Pengawasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kepada Fakir Miskin				Tersusunnya Laporan tentang hasil Monev terhadap Pelaksanaan Kegiatan BPNT		104,500,000	104,256,000		
1.13.1.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (5.3)				6,190,260,580	6,055,360,500		
1.13.1.16.2	Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak				Tercapainya pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak		7,600,000	7,600,000		
1.13.1.16.	Pelayanan psikososial bagi				Tercapainya pelayanan		41,000,000	62,000,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5	PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana				tanggap darurat bencana Sosial					
1.13.1.16.8	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial				Tersusunnya Laporan Tentang Hasil Pemutakhiran Terhadap Basis Data Terpadu Per Kelurahan Se- Kota Palopo		166,680,000	161,694,000		
1.13.1.16.9	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan				Terlaksananya perumusan kebijakan penurunan angka kemiskinan		5,627,125,080	5,434,155,000		
1.13.1.16.10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa				Tercapainya Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam		133,950,000	173,850,000		
1.13.1.16.13	Pembinaan/Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan makam Nasional				Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan dan Taman Makam Nasional yang Bersih Rapih dan Indah		69,586,000	71,742,000		
1.13.1.16.15	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis						144,319,500	144,319,500		
1.13.1.17	Program pembinaan anak terlantar	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)				65,051,000	-		
1.13.1.17.7	Pembinaan anak terlantar / bantuan sarana pendukung anak terlantar dalam panti				Tersalurnya Kebutuhan Dasar Anak terlantar dalam panti		65,051,000			
1.13.1.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)				103,170,000	107,155,000		
1.13.1.18.4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma				Tersalurnya Barang atau alat kepada Penerima Manfaat (Penyandang Disabilitas dan Trauma)		103,170,000	107,155,000		
1.13.1.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana PSK)	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)				149,553,000	142,053,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	narkoba dan penyakit sosial lainnya)	dan Peningkatan Pelayanan Dasar								
1.13.1.20.4	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial				Tersalurnya Bantuan Modal Usaha Bagi eks penyandang penyakit sosial		149,553,000	142,053,000		
Dinas Tenaga Kerja							3,488,968,000	3,109,644,000		
	Belanja Tidak Langsung						1,894,468,000	1,538,759,000		
	Belanja Langsung						1,594,500,000	1,570,885,000		
1.14.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				394,000,000	438,900,000		
1.14.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Terlaksananya Adm. Surat Menyurat		25,450,000	40,150,000		
1.14.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terlaksananya Kegiatan administrasi perkantoran		27,900,000	29,100,000		
1.14.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terbayarnya pajak kendaraan dinas / operasional		11,400,000	25,400,000		
1.14.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Tertibnya Administrasi Keuangan		88,800,000	103,800,000		
1.14.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor		8,200,000	8,200,000		
1.14.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Kenyamanan dalam bekerja dapat terwujud		3,000,000	3,000,000		
1.14.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Menambah Wawasan Pegawai		3,960,000	3,960,000		
1.14.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi		155,490,000	155,490,000		
1.14.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Tersedianya Adm.Umum		69,800,000	69,800,000		
1.14.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				91,900,000	97,900,000		
1.14.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung		10,000,000	10,000,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					kantor					
1.14.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor		15,000,000	15,000,000		
1.14.1.2.2 3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Meningkatnya Pelayanan Adm. Perkantoran		21,000,000	25,000,000		
1.14.1.2.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Terlaksananya kegiatan operasional		40,000,000	40,000,000		
1.14.1.2.2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Lancarnya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		1,400,000	3,400,000		
1.14.1.2.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terpeliharanya peralatan gedung kantor		4,500,000	4,500,000		
1.14.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				24,500,000	52,500,000		
1.14.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				Bertambahnya Pengetahuan Peraturan Perundang-undangan		24,500,000	52,500,000		
1.14.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				5,200,000	7,950,000		
1.14.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1,300,000	2,550,000		
1.14.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran		2,600,000	3,350,000		
1.14.1.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tersedianya Laporan Keuangan akhir tahun		1,300,000	2,050,000		
1.14.1.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Peningkatan Perekonomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan, dan Industri Rumah Tangga Masyarakat	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (\$9)				989,050,000	879,535,000		
1.14.1.16.2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja				Tersebar nya informasi bursa tenaga kerja		66,350,000	66,350,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					lewat media cetak dan elektronik					
1.14.1.16.3	Kerjasama pendidikan dan pelatihan				Terciptanya kelembagaan produktivitas & kewirausahaan		662,400,000	444,375,000		
1.14.1.16.4	Penyiapan tenaga kerja siap pakai				Terwujudnya penyiapan tenaga kerja siap pakai		260,300,000	368,810,000		
1.14.1.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Peningkatan Perekenomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan, dan Industri Rumah Tangga Masyarakat	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (\$.9)				89,850,000	94,100,000		
1.14.1.17.1	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja				Perusahaan mematuhi syarat - syarat kerja		21,450,000	21,450,000		
1.14.1.17.5	Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja				Tercapainya pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja		17,350,000	19,350,000		
1.14.1.17.9	Penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial				Tercapainya Fasilitas Penyelesaian prosedur dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial		22,850,000	27,100,000		
1.14.1.17.10	Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan				Terlindungnya Pekerja		28,200,000	26,200,000		
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							3,678,883,400	3,404,677,400		
	Belanja Tidak Langsung						2,684,558,000	2,360,352,000		
	Belanja Langsung						994,325,400	1,044,325,400		
1.15.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$.8)				511,526,900	578,362,200		
1.15.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Terpenuhinya Jasa Penyediaan ATK		51,986,900	52,008,400		
1.15.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air listrik		75,600,000	70,723,078		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.15.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terpenuhinya persuratan tanda nomor kendaraan bermotor		2,500,000	1,900,000		
1.15.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terlaksananya jasa administrasi keuangan		82,800,000	82,800,000		
1.15.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terlaksananya jasa kebersihan kantor		14,300,000	15,300,000		
1.15.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terpenuhinya kebutuhan penerangan bangunan kantor		2,500,000	3,200,000		
1.15.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Terpenuhinya bahan bacaan & pertauran perundang - undangan		5,280,000	5,280,000		
1.15.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Meningkatnya koordinasi & konsultasi		200,000,000	269,090,722		
1.15.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Terlaksananya pelaksanaan administrasi umum		76,560,000	78,060,000		
1.15.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				31,800,000	41,900,000		
1.15.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Lancarnya kegiatan operasional		7,500,000	11,200,000		
1.15.1.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		3,000,000	3,000,000		
1.15.1.2.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		16,500,000	21,500,000		
1.15.1.2.2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		1,800,000	2,600,000		
1.15.1.2.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terpeliharanya peralatan gedung kantor		3,000,000	3,600,000		
1.15.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				44,415,000	43,483,700		
1.15.1.5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan				meningkatkan pemahaman aparatur		7,500,000			
1.15.1.5.3	Bimbingan teknis				meningkatkan sumber		36,915,000	43,483,700		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	implementasi peraturan perundang-undangan				daya aparatur					
1.15.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$.8)				8,800,000	8,800,000		
1.15.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersedianya pelaporan capaian kinerja keuangan		3,600,000	3,600,000		
1.15.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan semesteran		2,600,000	2,600,000		
1.15.1.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Terpenuhinya panyusunan laporan keuangan akhir tahun		2,600,000	2,600,000		
1.15.1.15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Peningkatan Perekonomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan, dan Industri Rumah Tangga Masyarakat	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (\$.9)				159,410,000	159,410,000		
1.15.1.15.6	Perencanaan koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah				Tersedianya data UMKM		20,500,000	20,500,000		
1.15.1.15.13	Pengembangan Usaha Kecil Menengah				tercapainya peningkatan sertifikasi hak atas tanah		138,910,000	138,910,000		
1.15.1.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Peningkatan Perekonomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan, dan Industri Rumah Tangga Masyarakat	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (\$.9)				100,836,000	100,686,000		
1.15.1.16.6	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan				meningkatnya pengetahuan kewirausahaan		31,710,000	31,710,000		
1.15.1.16.7	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD				Tercapainya Pengetahuan Manajemen Pengelolaan Koperasi		6,630,000	6,630,000		
1.15.1.16.13	Peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				meningkatnya kerjasama antara pelaku ukm dengan kemitraan		11,925,000	11,925,000		
1.15.1.16.14	Pengembangan sarana promosi hasil produksi				meningkatnya hasil produksi koperasi		50,571,000	50,421,000		
1.15.1.17	Program Pengembangan	Peningkatan	Meningkatnya				15,080,000	9,030,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Perekenomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan, dan Industri Rumah Tangga Masyarakat	Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (5.9)							
1.15.1.17.9	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah				terciptanya wawasan baru bagi wirausaha dalam mengembangkan usahanya		6,050,000			
1.15.1.17.1	Monitoring evaluasi dan pelaporan				tersedianya laporan monitoring dan evaluasi		9,030,000	9,030,000		
1.15.1.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Perekenomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan, dan Industri Rumah Tangga Masyarakat	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (5.9)				122,457,500	102,653,500		
1.15.1.18.1	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi				Terwujudnya koperasi yang maju & mandiri		15,300,000	10,200,000		
1.15.1.18.2	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian				tersedianya laporan keuangan dengan menggunakan sistem aplikasi		6,330,000	6,330,000		
1.15.1.18.3	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkopersian				Tersedianya data base koperasi		31,040,000	39,108,500		
1.15.1.18.4	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian				Meningkanya skill anggota koperasi dalam mengembangkan usahanya		25,777,500	17,185,000		
1.15.1.18.5	Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi				Meningkatnya kualitas perkoperasian		20,050,000	14,950,000		
1.15.1.18.7	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi				Tercapainya kerjasama usaha koperasi dan penataan PKL koperasi		12,360,000	6,180,000		
1.15.1.18.9	Monitoring evaluasi dan pelaporan				tercapainya pemahaman tentang pengembangan usaha koperasi		11,600,000	8,700,000		
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							8,918,676,000	9,075,406,000		
	Belanja Tidak Langsung						4,496,551,000	4,453,281,000		
	Belanja Langsung						4,422,125,000	4,622,125,000		
1.16.1.1	Program Pelayanan	Tata Kelola	Meningkatnya kualitas				966,711,000	1,268,691,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Administrasi Perkantoran	Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	pelayanan publik (S.8)							
1.16.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Lancarnya Pelayanan Jasa Surat Menyurat		320,831,000	401,831,000		
1.16.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Lancarnya Fasilitas Komunikasi dan Informasi		292,600,000	305,380,000		
1.16.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terurusnya Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal		10,600,000	10,600,000		
1.16.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Tertibnya Administrasi Keuangan		67,800,000	67,800,000		
1.16.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terjaganya Kebersihan Kantor		25,900,000	31,600,000		
1.16.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik		8,000,000	60,000,000		
1.16.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Meningkatnya Sumber Informasi dan Pengetahuan Aparatur		5,280,000	5,280,000		
1.16.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terpenuhinya Kebutuhan Rapat - Rapat Koordinasi / Konsultasi Keluar Daerah		150,000,000	182,000,000		
1.16.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Meningkatnya Pelayanan Jasa Administrasi Umum		85,700,000	204,200,000		
1.16.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				419,499,000	676,819,000		
1.16.1.2.3	Pembangunan gedung kantor						-	100,000,000		
1.16.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Terpenuhinya Pendingin Ruangan dan Lemari Kerja		149,899,000	210,082,000		
1.16.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		28,000,000	78,677,000		
1.16.1.2.10	Pengadaan mebeleur				Terpenuhinya kursi dan meja kerja		111,200,000	144,860,000		
1.16.1.2.2	Pemeliharaan rutin/berkala				Terpenuhinya		10,000,000	10,000,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2	gedung kantor				Pemeliharaan rutin gedung kantor					
1.16.1.2.2 3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Terpeliharanya Mobil jabatan		25,000,000	25,000,000		
1.16.1.2.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional		73,200,000	76,800,000		
1.16.1.2.2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Terpeliharanya Peralatan Kerja Aparatur		18,200,000	24,400,000		
1.16.1.2.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terpeliharanya Peralatan Kerja Aparatur		4,000,000	7,000,000		
1.16.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				8,000,000	150,000,000		
1.16.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Aparatur		8,000,000	150,000,000		
1.16.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				1,200,000	1,200,000		
1.16.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersedianya LAKIP		600,000	600,000		
1.16.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Tersediannya Laporan Keuangan Semesteran		300,000	300,000		
1.16.1.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun		300,000	300,000		
1.16.1.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan Perekonomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan, dan Industri Rumah Tangga Masyarakat	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (5.9)				160,900,000	157,900,000		
1.16.1.15. 8	Peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal				Terbitnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		14,400,000	14,400,000		
1.16.1.15.1 0	Penyelenggaraan pameran investasi				Meningkatnya Minat Investasi		146,500,000	143,500,000		
1.16.1.16	Program Peningkatan Iklim	Peningkatan	Meningkatnya				1,385,615,000	1,075,715,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Investasi dan Realisasi Investasi	Perekenomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan, dan Industri Rumah Tangga Masyarakat	Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (\$.9)							
1.16.1.16.7	Kajian kebijakan penanaman modal				Tersusunnya Peraturan Daerah		62,700,000			
1.16.1.16.13	Penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha tertentu dalam rangka penanaman modal				Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penanaman Modal		1,147,915,000	900,715,000		
1.16.1.16.15	Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik						175,000,000	175,000,000		
1.16.1.18	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	Peningkatan Perekenomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan, dan Industri Rumah Tangga Masyarakat	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (\$.9)				1,480,200,000	1,291,800,000		
1.16.1.18.2	Kemudahan Pelayanan Perizinan				Meningkatnya Pelayanan Perizinan		143,000,000	143,000,000		
1.16.1.18.6	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan				Meningkatkan PAD		1,333,200,000	1,144,800,000		
1.16.1.18.7	Pengolahan Data dan Pengarsipan Perizinan				Tersedianya Data dan Laporan Perizinan		4,000,000	4,000,000		
Dinas Kebudayaan							2,282,510,000	2,642,983,000		
	Belanja Tidak Langsung						1,322,550,000	1,580,067,000		
	Belanja Langsung						959,960,000	1,062,916,000		
1.17.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$.8)				365,845,800	407,495,800		
1.17.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Terlaksananya Jasa Surat Menyurat		24,824,800	25,124,800		
1.17.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Lancarnya Administrasi Perkantoran		31,200,000	43,850,000		
1.17.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Operasional di lapangan		3,000,000	2,700,000		
1.17.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Tertibnya Administrasi Keuangan		67,800,000	67,800,000		
1.17.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terciptanya Keindahan dan Kebersihan Kantor		13,806,000	15,506,000		
1.17.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan				Terpenuhinya Penerangan Bangunan		1,485,000	2,985,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	bangunan kantor				Kantor					
1.17.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Pegawai		3,600,000	3,600,000		
1.17.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Sinkronisasinya Program /kegiatan antara tingkat Pusat Provinsi dan Daerah		130,000,000	156,100,000		
1.17.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Tertibnya Administrasi Umum dan Pengelolaan Barang Milik Daerah		90,130,000	89,830,000		
1.17.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				31,383,000	42,183,000		
1.17.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						-	9,000,000		
1.17.1.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terciptanya Keindahan Kantor		5,883,000	4,883,000		
1.17.1.2.2 3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Terpeliharanya Kendaraan Dinas		21,000,000	21,000,000		
1.17.1.2.2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Terciptanya Pemeliharaan Rutin / berkala perlengkapan Gedung Kantor		1,800,000	3,300,000		
1.17.1.2.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terciptanya Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor		2,700,000	4,000,000		
1.17.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				-	13,556,000		
1.17.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan						-	13,556,000		
1.17.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				3,700,000	3,700,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Informasi								
1.17.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah (Lakip dan Renja)		1,700,000	1,700,000		
1.17.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Tersedianya Pelaporan Keuangan Semesteran		1,000,000	1,000,000		
1.17.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1,000,000	1,000,000		
1.17.1.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan Perekonomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan, dan Industri Rumah Tangga Masyarakat	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)				103,000,000	100,000,000		
1.17.1.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah				Tercapainya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah		103,000,000	100,000,000		
1.17.1.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Peningkatan Perekonomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan, dan Industri Rumah Tangga Masyarakat	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)				393,621,200	384,621,200		
1.17.1.16.5	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala museum dan peninggalan bawah air				Tercapainya pengelolaan dan pengembangan pelestarian sejarah budaya		44,121,200	39,121,200		
1.17.1.16.1	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah				Meningkatnya Pengetahuan Tentang Kebudayaan		349,500,000	345,500,000		
1.17.1.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Peningkatan Perekonomian Daerah dari Sektor Jasa, Perdagangan, dan Industri Rumah Tangga Masyarakat	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)				62,410,000	111,360,000		
1.17.1.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah				Terwujudnya Kegiatan Festival Audisi Pentas dan Event-event Seni Budaya Lainnya		62,410,000	111,360,000		
Dinas Pemuda dan Olahraga							5,125,328,000	5,178,068,000		
	Belanja Tidak Langsung						2,673,588,000	2,726,328,000		
	Belanja Langsung						2,451,740,000	2,451,740,000		
1.18.1.1	Program Pelayanan	Tata Kelola	Meningkatnya kualitas				523,720,000	502,510,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Administrasi Perkantoran	Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	pelayanan publik (5.8)							
1.18.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat		42,140,000	39,150,000		
1.18.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				TerpenuhinyaJasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik		15,300,000	15,140,000		
1.18.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		3,200,000	3,200,000		
1.18.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terpenuhinya jasa admn keuangan		64,200,000	64,200,000		
1.18.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor		82,000,000	81,000,000		
1.18.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor		8,000,000	3,170,000		
1.18.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Terpenuhinya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan		5,280,000	2,400,000		
1.18.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah		190,500,000	189,450,000		
1.18.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Terpenuhinya Jasa Administrasi Umum		113,100,000	104,800,000		
1.18.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				67,400,000	96,600,000		
1.18.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor						-	14,000,000		
1.18.1.2.10	Pengadaan mebeleur				Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran		5,500,000	11,500,000		
1.18.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terpeliharanya Gedung Kantor		15,500,000	15,500,000		
1.18.1.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		24,650,000	24,650,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.18.1.2.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		17,650,000	25,000,000		
1.18.1.2.2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran		1,400,000	3,250,000		
1.18.1.2.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Meningkatnya Pelayanan adminstrasi perkantoran		2,700,000	2,700,000		
1.18.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				3,000,000	3,000,000		
1.18.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersedianya Laporan LAKIP APBD 2020 APBD-P 2019		1,800,000	1,800,000		
1.18.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semester I 2019		600,000	600,000		
1.18.1.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Tahun 2018		600,000	600,000		
1.18.1.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (5.3)				713,770,000	713,770,000		
1.18.1.16.1	Pembinaan organisasi kepemudaan				Terlaksananya Seleksi Peserta Paskibraka		682,770,000	682,770,000		
1.18.1.16.1 0	Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota Propinsi & Nasional				terseleksinya pemuda pelopor tingkat kota palopo propinsi dan nasional		31,000,000	31,000,000		
1.18.1.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (5.2)				568,850,000	560,860,000		
1.18.1.20. 3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat				Terciptanya Olahragawan Berbakat di Kota Palopo		134,500,000	134,500,000		
1.18.1.20. 4	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah				Meningkatnya Prestasi Olahraga Kota Palopo		62,500,000			
1.18.1.20. 5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi				Meningkatnya Kebugaran dan Kesehatan Masyarakat		116,750,000	127,525,000		
1.18.1.20.	Penyelenggaraan kompetisi				Munculnya bibit bibit		83,250,000	146,135,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
6	olahraga				olahragawan palopo					
1.18.1.20.7	Permasalahan olah raga bagi pelajar mahasiswa dan masyarakat				Meningkatnya kebugaran dan Kesehatan Masyarakat		124,600,000	107,800,000		
1.18.1.20.11	Pengembangan olahraga rekreasi				terjaganya budaya olahraga tradisional dan rekreasi		47,250,000	44,900,000		
1.18.1.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (5.2)				575,000,000	575,000,000		
1.18.1.21.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga				tersedianya sarana dan prasarana olahraga		530,000,000	530,000,000		
1.18.1.21.7	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga				terciptanya sarana dan prasarana olahraga yang memadai		45,000,000	45,000,000		
Satuan Polisi Pamong Praja							8,633,614,000	8,664,085,000		
	Belanja Tidak Langsung						4,159,460,000	4,119,931,000		
	Belanja Langsung						4,474,154,000	4,544,154,000		
1.19.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				339,644,000	513,994,000		
1.19.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Kegiatan Surat menyurat dapat terlaksana dengan baik		26,000,000	44,220,000		
1.19.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Kegiatan Komunikasi sumber daya air dan listrik dapat terlaksana		19,800,000	13,200,000		
1.19.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Kegiatan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional terlaksana dengan baik		8,250,000	8,250,000		
1.19.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan terlaksana dengan baik		47,400,000	46,750,000		
1.19.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor terlaksana dengan baik		1,500,000	2,500,000		
1.19.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dapat		5,280,000	3,960,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					terlaksana dengan baik					
1.19.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dapat terlaksana		171,014,000	337,714,000		
1.19.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Kegiatan Jasa administrasi umum terlaksana dengan baik		60,400,000	57,400,000		
1.19.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				78,900,000	105,100,000		
1.19.1.2.2 3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan terlaksana dengan baik		25,000,000	25,000,000		
1.19.1.2.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional terlaksana dengan baik		51,600,000	75,300,000		
1.19.1.2.2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor terlaksana dengan baik		200,000	200,000		
1.19.1.2.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor berjalan dengan baik		2,100,000	4,600,000		
1.19.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				14,000,000	7,500,000		
1.19.1.3.1	Pengadaan mesin/kartu absensi						-	7,500,000		
1.19.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dapat terlaksana		14,000,000			
1.19.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				25,000,000	25,000,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi								
1.19.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal berjalan dengan baik		25,000,000	25,000,000		
1.19.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				3,000,000	3,000,000		
1.19.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD terlaksana dengan baik		1,000,000	1,000,000		
1.19.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dapat terlaksana		1,000,000	1,000,000		
1.19.1.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dapat terlaksana		1,000,000	1,000,000		
1.19.1.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah & Kesuksesan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)				2,142,200,000	2,130,600,000		
1.19.1.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan				Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dapat terlaksana dengan baik		13,200,000	13,200,000		
1.19.1.15.7	Pengamanan / Penjagaan Aset pemerintah				Kegiatan pengamanan/penjagaan aset pemerintah terlaksana dengan baik		1,881,800,000	1,862,000,000		
1.19.1.15.8	Penindakan dan Penyidikan Pelanggaran Perda				Kegiatan Penindakan dan penyidikan pelanggaran Perda berjalan dengan baik		247,200,000	255,400,000		
1.19.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah & Kesuksesan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)				1,556,150,000	1,443,700,000		
1.19.1.16.	Pengendalian				Kegiatan Pengendalian		1,285,200,000	1,186,000,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
6	Kamtramtibmas dan Tindak Kriminal				Kamtramtibmas dan tindak kriminal terlaksana dengan baik					
1.19.1.16.8	Penyusunan Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban				Kegiatan penyusunan kebijakan ketentraman dan ketertiban terlaksana dengan baik		270,950,000	257,700,000		
1.19.1.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah & Kesuksesan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (5.7)				315,260,000	315,260,000		
1.19.1.19.1	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat				Kegiatan pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat terlaksana dengan baik		315,260,000	315,260,000		
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan							5,930,922,100	5,763,697,100		
	Belanja Tidak Langsung						3,057,742,000	2,870,517,000		
	Belanja Langsung						2,873,180,100	2,893,180,100		
1.19.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				646,200,000	52,800,000		
1.19.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Tercapainya pelayanan prima		17,050,000	16,100,000		
1.19.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terlayannya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik		126,160,000	4,000,000		
1.19.2.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas		13,780,000	7,830,000		
1.19.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan dengan baik		52,800,000	5,100,000		
1.19.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terjaganya kebersihan kantor		14,600,000	155,000,000		
1.19.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		4,000,000	271,830,000		
1.19.2.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				Jumlah pengisian tabung gas		7,830,000	271,600,000		
1.19.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-				Terpenuhinya kebutuhan bahan		5,100,000	198,600,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	undangan				bacaan					
1.19.2.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terselenggaranya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		120,000,000	3,500,000		
1.19.2.1.1 9	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Tercapainya pengelolaan administrasi Umum		284,880,000	15,000,000		
1.19.2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				280,600,000	13,000,000		
1.19.2.2.3	Pembangunan gedung kantor				Terpeliharanya pembangunan gedung kantor		198,600,000	25,500,000		
1.19.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor		3,500,000	9,000,000		
1.19.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Terpenuhinya Peralatan kantor		15,000,000	7,000,000		
1.19.2.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terselenggaranya Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Aparatur		20,000,000	78,750,000		
1.19.2.2.2 3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan		20,500,000	78,750,000		
1.19.2.2.2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Pemeliharaan perlengkapan gedung perkantoran		12,000,000	19,150,000		
1.19.2.2.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terselenggaranya Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Aparatur		11,000,000	19,150,000		
1.19.2.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				78,750,000	5,850,000		
1.19.2.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan				Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja lapangan		78,750,000	2,925,000		
1.19.2.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				-	1,075,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi								
1.19.2.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan						-	1,850,000		
1.19.2.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				5,850,000	1,824,980,100		
1.19.2.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tercapainya Pelaporan capaian kinerja dan keuangan		2,925,000	64,863,000		
1.19.2.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Tercapainya Pelaporan Keuangan Semesteran		1,075,000	165,000,000		
1.19.2.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tercapainya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1,850,000	1,595,117,100		
1.19.2.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah & Kesuksesan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)				1,861,780,100	692,850,000		
1.19.2.19.7	Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran				Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya kebakaran		64,863,000	17,050,000		
1.19.2.19.9	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran				Pemeliharaan kendaraan kendaraan dinas operasional		200,000,000	149,360,000		
1.19.2.19.12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran				Tercapainya peningkatan kesiagaan & pencegahan bahaya kebakaran		1,596,917,100	13,780,000		
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat							3,808,838,000	3,971,751,000		
	Belanja Tidak Langsung						2,292,928,000	2,455,841,000		
	Belanja Langsung						1,515,910,000	1,515,910,000		
1.19.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				400,157,500	436,237,500		
1.19.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Meningkatnya pelaksanaan administrasi perkantoran		25,364,150	28,184,150		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.19.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		48,300,000	55,130,000		
1.19.3.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		3,820,000	3,820,000		
1.19.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		56,400,000	56,400,000		
1.19.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		13,000,000	13,000,000		
1.19.3.1.1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		1,000,000	1,000,000		
1.19.3.1.1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		5,280,000	5,280,000		
1.19.3.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		164,793,350	193,923,350		
1.19.3.1.1 9	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		82,200,000	79,500,000		
1.19.3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				52,100,000	68,100,000		
1.19.3.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Meningkatnya kapasitas aparatur		10,400,000	10,400,000		
1.19.3.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Meningkatnya kapasitas aparatur		24,000,000	39,000,000		
1.19.3.2.1 0	Pengadaan mebeleur				Meningkatnya kapasitas aparatur		9,000,000	10,000,000		
1.19.3.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Meningkatnya kapasitas aparatur		1,500,000	1,500,000		
1.19.3.2.2 3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Meningkatnya kapasitas aparatur		4,500,000	4,500,000		
1.19.3.2.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Meningkatnya pelayanan aparatur		2,700,000	2,700,000		
1.19.3.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				4,500,000	4,500,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.19.3.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				Meningkatnya SDM pegawai		4,500,000	4,500,000		
1.19.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				14,100,000	20,700,000		
1.19.3.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersedianya biaya pengembangan sistem penyusunan dan pelaporan dokumen		11,000,000	17,600,000		
1.19.3.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel		1,550,000	1,550,000		
1.19.3.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel		1,550,000	1,550,000		
1.19.3.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah & Kesuksesan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)				416,240,000	416,240,000		
1.19.3.15.9	Pemantauan dan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Perkembangan Aspirasi dan Pendataan Kegiatan Warga Keturunan (Orang Asing)				Terkendalnya Penyebaran Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Terdeteksinya Perkembangan Aspirasi dan Tersedianya Data Keg. Warga Keturunan (Orang Asing)		44,300,000	44,300,000		
1.19.3.15.10	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah				Terciptanya Kondisi Kota Palopo yang aman dan kondusif		371,940,000	371,940,000		
1.19.3.16	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah & Kesuksesan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)				103,520,000	103,520,000		
1.19.3.16.2	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan				Terwujudnya kanrantibmas		103,520,000	103,520,000		
1.19.3.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah & Kesuksesan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)				97,320,000	97,320,000		
1.19.3.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan				Terwujudnya Toleransi Kerukunan dalam		51,760,000	51,760,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	beragama				Kehidupan Beragama					
1.19.3.17.2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat				Terwujudnya Pembauran Kebangsaan dikalangan Masyarakat Kota Palopo		45,560,000	45,560,000		
1.19.3.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah & Kesuksesan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)				60,460,000	56,780,000		
1.19.3.18.2	Seminar talk show diskusi peningkatan wawasan kebangsaan				Dipahami 4 pilar kebangsaan		28,875,000	23,195,000		
1.19.3.18.4	Forum Organisasi Kemasyarakatan				Terdaftarnya Ormas		31,585,000	33,585,000		
1.19.3.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah & Kesuksesan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)				94,340,000	39,340,000		
1.19.3.19.2	Peningkatan Kerjasama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat				Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat		74,600,000	19,600,000		
1.19.3.19.3	Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan				Terciptanya kondisi sosial hukum dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional		19,740,000	19,740,000		
1.19.3.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah & Kesuksesan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)				7,880,000	7,880,000		
1.19.3.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba				Mencegah alur peredaran Narkoba di Kota Palopo		7,880,000	7,880,000		
1.19.3.21	Program pendidikan politik masyarakat	Stabilitas Ketertiban dan Kenyamanan Daerah & Kesuksesan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)				265,292,500	265,292,500		
1.19.3.21.1	Penyuluhan kepada masyarakat				Seluruh Stekholder dapat memahami tentang pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2019 yang Demokratis Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil serta dapat meningkatkan		29,245,000	29,245,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					partisipasi politik secara luas.					
1.19.3.21.6	Evaluasi dan Penelitian Bantuan Keuangan Partai Politik Peserta PEMILU				Seluruh Partai Politik Dapat mempergunakan Dana Bantuan Yang diberikan oleh Pemerintah Daerah		38,580,000	38,580,000		
1.19.3.21.8	Posko Pengendalian dan Monitoring / Evaluasi Stabilitas Polkam Pemilu Legislatif DPD dan Pilpres				Adanya data politik dalam negeri yang dapat digunakan sebagai bahan		197,467,500	197,467,500		
Badan Penanggulangan Bencana Daerah							3,102,044,000	3,027,838,000		
	Belanja Tidak Langsung						1,836,279,000	1,762,073,000		
	Belanja Langsung						1,265,765,000	1,265,765,000		
1.19.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				366,025,000	366,025,000		
1.19.4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat		14,381,000	14,381,000		
1.19.4.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terpenuhinya kebutuhan Air Listrik dan Internet		32,052,000	32,052,000		
1.19.4.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Tersedianya Biaya Perizinan Kendaraan Dinas		6,400,000	6,400,000		
1.19.4.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terbayarnya jasa pelayanan administrasi keuangan		62,400,000	62,400,000		
1.19.4.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terpeliharanya kebersihan kantor		14,500,000	14,500,000		
1.19.4.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terpenuhinya kebutuhan listrik dan elektronik kantor		2,500,000	2,500,000		
1.19.4.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Terpenuhinya kebutuhan akan informasi dan peraturan yang aktual		5,280,000	5,280,000		
1.19.4.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dalam penanganan bencana		160,000,000	160,000,000		
1.19.4.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				meningkatnya pelayanan administrasi		68,512,000	68,512,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					umum					
1.19.4.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				60,100,000	60,100,000		
1.19.4.2.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Fungsionalnya mobil jabatan secara memadai		25,000,000	25,000,000		
1.19.4.2.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Fungsionalnya kendaraan dinas operasional secara memadai		30,000,000	30,000,000		
1.19.4.2.2.6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Berfungsinya sarana dan prasarana kantor		1,200,000	1,200,000		
1.19.4.2.2.8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Berfungsinya sarana dan prasarana peralatan kantor		3,900,000	3,900,000		
1.19.4.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				8,750,000	8,750,000		
1.19.4.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersedianya dokumen perencanaan sesuai aturan Perundang-Undangan		4,800,000	4,800,000		
1.19.4.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Tersedianya laporan keuangan semesteran BPBD Kota Palopo		1,700,000	1,700,000		
1.19.4.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yaang akuntabel		2,250,000	2,250,000		
1.19.4.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				830,890,000	830,890,000		
1.19.4.22.6	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam				Kesiapan dan tanggap penanggulangan terhadap bencana		3,950,000	3,950,000		
1.19.4.22.8	Penyusunan dan Analisis Data / Informasi Perencanaan Pembangunan				Tersediannya Data Informasi Bencana Yang Dapat Dijadikan		13,700,000	13,700,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Kawasan Rawan Bencana				Sebagai Acuan Data Kebencanaan					
1.19.4.22.9	Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Bencana Alam				Terlaksananya pengamanan yang cepat ketika terjadi bencana		755,740,000	755,740,000		
1.19.4.22.11	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Untuk Penanganan Bencana		10,400,000	10,400,000		
1.19.4.22.12	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Bencana				terpenuhinya Bahan Baku Bangunan untuk korban bencana alam		28,200,000	28,200,000		
1.19.4.22.13	Penyiapan dan Penyaluran Kebutuhan Dasar Terhadap Korban Bencana				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Bagi Korban yang terkena Bencana		18,900,000	18,900,000		
Sekretariat Daerah							52,917,161,700	56,036,396,700		
	Belanja Tidak Langsung						14,455,419,000	13,881,378,000		
	Belanja Langsung						38,461,742,700	42,155,018,700		
1.20.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				8,975,235,720	10,073,158,795		
1.20.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				tersedianya jasa surat menyurat kantor		210,000,000	219,543,575		
1.20.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		1,526,235,620	1,871,522,620		
1.20.1.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		687,000,000	752,000,000		
1.20.1.1.5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah				Terpenuhinya pembayaran Pajak dan Retribusi pada rujab/rudis		22,470,600	22,470,600		
1.20.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional		69,450,000	69,450,000		
1.20.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Tersedianya dokumen pertanggungjawaban bendahara yang lengkap dan valid.		698,379,500	875,272,000		
1.20.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor		305,000,000	305,000,000		
1.20.1.1.1	Penyediaan komponen				tersedianya komponen		50,000,000	50,000,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2	instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				instalasi listrik / penerangan bangunan kantor					
1.20.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terselenggaranya rapat Rapat Koordinasi		1,560,000,000	2,090,000,000		
1.20.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Tersedianya jasa administrasi umum		3,489,200,000	3,460,400,000		
1.20.1.1.20	Penyediaan Pelayanan Kegiatan Pemerintahan Daerah				Terpenuhinya fasilitas penunjang bagi kegiatan pemerintah kota palopo		50,500,000	50,500,000		
1.20.1.1.21	Penyediaan Jasa Tamu Pemerintah Daerah				Terpenuhinya fasilitas penunjang bagi kegiatan pemerintah kota palopo		175,000,000	175,000,000		
1.20.1.1.23	Penyediaan Jasa Keprotokoleran dan Urusan Dalam				Terpenuhinya fasilitas penunjang bagi kegiatan pemerintah kota palopo		132,000,000	132,000,000		
1.20.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				4,217,967,480	4,325,936,905		
1.20.1.2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas				tersedianya perlengkapan rumah jabatan / dinas		776,000,000	765,856,425		
1.20.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				tersedianya perlengkapan gedung Kantor		266,400,000	269,900,000		
1.20.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				tersedianya peralatan gedung kantor		567,091,500	567,091,500		
1.20.1.2.10	Pengadaan mebeleur				Terpenuhinya Mebeleur Kantor		444,100,000	391,375,000		
1.20.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan				Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah Jabatan		523,076,000	497,789,000		
1.20.1.2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas				terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		185,000,000	215,000,000		
1.20.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		580,000,000	730,000,000		
1.20.1.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				tersedianya mobil jabatan yang siap pakai		310,000,000	310,000,000		
1.20.1.2.2	Pemeliharaan rutin/berkala				tersedianya kendaraan		430,999,980	430,999,980		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4	kendaraan dinas/operasional				operasional yang siap pakai					
1.20.1.2.2 5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas				tersedianya perlengkapan rumah jabatan dinas yang siap pakai		40,000,000	40,000,000		
1.20.1.2.2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		54,000,000	66,625,000		
1.20.1.2.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				tersedianya peralatan gedung kantor		41,300,000	41,300,000		
1.20.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				305,000,000	470,000,000		
1.20.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Pakaian dinas beserta kelengkapannya		305,000,000	470,000,000		
1.20.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				362,500,000	362,150,000		
1.20.1.5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan				Jumlah Laporan Sosialisasi		59,500,000	59,150,000		
1.20.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				terpenuhinya apatarur yang mengikuti bimtek		303,000,000	303,000,000		
1.20.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				159,381,500	146,724,000		
1.20.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Dokumen Laporan		4,867,000	3,847,000		
1.20.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Dokumen Laporan Semesteran		18,025,600	14,625,600		
1.20.1.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Laporan Keuangan Akhir Tahun 2018 Sekretariat Daerah		31,385,900	23,148,400		
1.20.1.6.5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan				Dokumen MONEV		105,103,000	105,103,000		
1.20.1.16	Program peningkatan	Tata Kelola	Meningkatnya kualitas				4,603,200,000	4,603,200,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	pelayanan publik (5.8)							
1.20.1.16.1	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan				terwujudnya dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat		129,000,000	129,000,000		
1.20.1.16.2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri				terwujudnya kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara		1,474,200,000	1,474,200,000		
1.20.1.16.6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya				Terpenuhinya Koordinasi KDH/WKDH dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya		2,300,000,000	2,300,000,000		
1.20.1.16.8	Kunjungan Kerja Keluar Negeri Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah				Terpenuhinya Kunjungan Kerja Keluar Negeri Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		700,000,000	700,000,000		
1.20.1.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				1,224,480,700	1,244,225,700		
1.20.1.20.4	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya				Tertanganinya 2 Perkara Hukum Pemerintah Kota		799,684,000	825,684,000		
1.20.1.20.6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan				Meningkatnya Disiplin ASN		4,450,000	4,450,000		
1.20.1.20.9	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP - TGR) Pemerintah Daerah				Terlaksananya pengembalian kerugian Keuangan dan Barang Daerah		420,346,700	414,091,700		
1.20.1.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				360,664,000	360,664,000		
1.20.1.25.	Pembentukan kerjasama						-			

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5	antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik									
1.20.1.25.9	Penguatan Kerjasama Antar Daerah				Terwujudnya Kerjasama antar Daerah		360,664,000	360,664,000		
1.20.1.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				496,079,000	618,404,050		
1.20.1.26.1	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan				Teralaksannaya Program RANHAM di Kota Palopo		7,200,000	7,200,000		
1.20.1.26.3	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan				Tercapainya penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Palopo		253,550,000	382,350,000		
1.20.1.26.5	Publikasi peraturan perundang-undangan				Terselesaikannya Pengundangan Perda		58,260,000	58,260,000		
1.20.1.26.6	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah				Meningkatnya Pemahaman ASN dalam Penyusunan Produk Hukum		15,060,000	15,060,000		
1.20.1.26.7	Penataan Kelembagaan				Perda Kelembagaan		28,300,000	53,000,000		
1.20.1.26.8	Penyusunan Tupoksi serta Uraian Tugas				Dokumen Uraian Tugas		16,940,000	11,744,050		
1.20.1.26.9	Sosialisasi Tata Naskah Dinas				Dokumen Tata Naskah Dinas		20,095,000	17,316,000		
1.20.1.26.10	Pengelola Administrasi Kepegawaian				Peningkatan Disiplin ASN Pemrintah Kota Palopo		81,874,000	73,474,000		
1.20.1.26.11	Pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan				Terselesekannya Pengundangan PERDA		14,800,000			
1.20.1.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				119,664,000	72,908,000		
1.20.1.27.7	Pelaksanaan penyelesaian tapal batas wilayah				Terwujudnya dukungan pelayanan		119,664,000	72,908,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	administrasi antar daerah				administrasi pemerintahan berbasis data informasi					
1.20.1.28	Program Perencanaan Pengadaan Barang dan jasa	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				625,397,000	645,797,000		
1.20.1.28.1	Sosialisasi / Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				Meningkatnya Pemahaman ASN Pemerintah Kota Palopo Tentang Proses Pengadaan Barang Dan Jasa		50,657,000	43,757,000		
1.20.1.28.2	Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa				Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Palopo		264,390,000	270,590,000		
1.20.1.28.3	Evaluasi Monitoring dan Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa				Terlaksananya Pengendalian PengendalianPengadaa n Barang dan Jasa Pembangunan		23,050,000	23,050,000		
1.20.1.28.4	Peningkatan Sistem Informasi E - Procurment				Tersedianya Layananan Pengadaan Barang dan Jsa Pemerintah secara elektronik		287,300,000	308,400,000		
1.20.1.30	Program Pengendalian / Pengawasan dan Pendataan Potensi Perekonomian	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				200,089,000	200,619,000		
1.20.1.30.2	Pemetaan Potensi ekonomi untuk Mendorong Pengembangan Perekonomian				Terkendalinya Lonjakan harga Kebutuhan Masyarakat dan Terkendalinya Inflasi di daerah		112,928,800	113,758,800		
1.20.1.30.9	Inventarisir dan Pengawasan LKM				Tersedianya data LKM dan pengawasan LKM yang berkesinambungan		87,160,200	86,860,200		
1.20.1.31	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi,	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				6,969,827,500	7,096,783,500		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Teknologi dan Informasi								
1.20.1.31.1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Efektif dan Efisien		129,505,000	118,005,000		
1.20.1.31.6	Bimbingan Teknis kepada Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan				Meningkatnya pengetahuan Aparat Kecamatan dan Kelurahan		18,090,000	23,090,000		
1.20.1.31.7	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan				Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membendung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah		47,128,000	124,261,500		
1.20.1.31.10	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				Terwujudnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai Ketentuan		166,815,000	137,937,500		
1.20.1.31.59	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah				Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kerjasama Daerah		260,400,000	260,400,000		
1.20.1.31.60	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat		6,235,391,000	6,320,391,000		
1.20.1.31.62	Evaluasi Perkembangan dan Pembinaan Inovasi Kelurahan				Terwujudnya Peningkatan peran serta masyarakat		112,498,500	112,698,500		
1.20.1.34	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				74,970,000	108,014,950		
1.20.1.34.6	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS				Tersedianya Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional		74,970,000	108,014,950		
1.20.1.36	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				75,270,000	75,970,000		
1.20.1.36.2	Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi				Tersedianya Akses informasi Pembinaan Jasa Konstruksi		75,270,000	75,970,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.20.1.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				5,881,130,000	6,771,730,000		
1.20.1.21.3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat				Terlaksananya Kegiatan Pelatihan penyelenggaraan Jenazah Workshop Pembinaan dan Pengembangan UKS Palopo berzikir dan Tablik Akbar safarai jumat dan safarai ramadahn		296,565,000	286,385,000		
1.20.1.21.4	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial				Terlaksananya Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial seperti Lembaga Keagamaan		5,138,855,000	6,039,635,000		
1.20.1.21.6	Kerjasama Penyelenggaraan Ibadah Haji						445,710,000	445,710,000		
1.20.1.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				64,680,000	64,680,000		
1.20.1.15.6	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha				Peningkatan Koordinasi dalam Bidang Kerjasama Daerah		64,680,000	64,680,000		
1.20.1.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				27,334,000	27,134,000		
1.20.1.17.2	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa				Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Pembangunan Kelurahan		27,334,000	27,134,000		
1.20.1.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Tata Kelola Pemerintahan dan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				3,522,250,000	4,670,826,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi								
1.20.1.18.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah				Tercapainya kerjasama Pemkot dan Media Massa		3,138,000,000	4,199,076,000		
1.20.1.18.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah				Tersedianya Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Pemkot		35,550,000	115,550,000		
1.20.1.18.3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat				Tersedianya Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Palopo		348,700,000	356,200,000		
1.20.1.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				196,622,800	216,092,800		
1.20.1.15.5	Sosialisasi Pembinaan Lingkungan Sosial dan Perlindungan Konsumen				Diharapkan Pemahaman masyarakat terhadap cukai ilegal meningkat dan meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap cukai legal		196,622,800	216,092,800		
Sekretariat DPRD							26,975,239,000	27,387,909,000		
	Belanja Tidak Langsung						13,322,019,000	13,559,689,000		
	Belanja Langsung						13,653,220,000	13,828,220,000		
1.20.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				2,319,380,000	2,621,130,000		
1.20.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				tersedianya surat dinas yang keluar dan penyediaan alat tulis kantor kantor cetakan dan penggandaanTerkirimnya Surat - Surat Dinas		55,000,000	55,000,000		
1.20.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi				Terpenuhinya Layanan		272,850,000	272,850,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	sumber daya air dan listrik				Telepon Air Listrik dan TV cable					
1.20.2.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan dinas		15,000,000	15,000,000		
1.20.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terbitnya Dokumen Administrasi Keuangan		320,000,000	380,000,000		
1.20.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terpeliharanya kebersihan dan Kenyamanan Kantor		54,400,000	54,400,000		
1.20.2.1.1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				terpenuhinya penerangan lampu kantor		5,000,000	5,000,000		
1.20.2.1.1 4	Penyediaan peralatan rumah tangga				Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga		4,080,000	4,080,000		
1.20.2.1.1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan		200,000,000	228,000,000		
1.20.2.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		500,000,000	800,000,000		
1.20.2.1.1 9	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				terpenuhinya pelaksanaan Administrasi Umum		723,050,000	636,800,000		
1.20.2.1.2 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Tugas & Fungsi Pejabat Daerah & Mobilitas Kantor				terlaksananya pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD beserta tamu dan pegawai sekretariat DPRD		120,000,000	120,000,000		
1.20.2.1.2 6	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD				Terpenuhinya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD		50,000,000	50,000,000		
1.20.2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				347,390,000	353,290,000		
1.20.2.2. 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				tersedianya kebutuhan perlengkapan gedung kantor		106,990,000	110,890,000		
1.20.2.2. 9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Tersedianya kebutuhan perlengkapan gedung yang dapat mendukung aktifitas		39,900,000	39,900,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					perkantoran					
1.20.2.2.10	Pengadaan mebeleur				terpenuhinya kebutuhan meubeler kantor		20,500,000	20,500,000		
1.20.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				tersedianya gedung kantor yang representatif		20,000,000	20,000,000		
1.20.2.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				tersedianya mobil jabatan yang layak fungsi		80,000,000	82,000,000		
1.20.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi		55,000,000	55,000,000		
1.20.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				tersedianya perlengkapan kantor yang layak fungsi		10,000,000	10,000,000		
1.20.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				tersedianya peralatan kantor yang layak fungsi		11,000,000	11,000,000		
1.20.2.2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur				tersedianya meubeler kantor yang layak fungsi		4,000,000	4,000,000		
1.20.2.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				457,500,000	457,500,000		
1.20.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Meningkatnya Kinerja PNS dan Anggota DPRD		420,000,000	420,000,000		
1.20.2.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				Tersedianyan Pakaian Dinas Anggota DPRD dan Sekretariat		37,500,000	37,500,000		
1.20.2.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				344,500,000	629,000,000		
1.20.2.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS		344,500,000	629,000,000		
1.20.2.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi,	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				9,944,250,000	9,527,100,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Teknologi dan Informasi								
1.20.2.15.1	Pembahasan rancangan peraturan daerah				tersedianya produk hukum daerah		1,633,650,000	1,385,432,500		
1.20.2.15.2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama				terlaksananya rapat hearing/dialog		40,000,000	40,000,000		
1.20.2.15.3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan				terlaksananya rapat rapat alat kelengkapan dewan		40,000,000	40,000,000		
1.20.2.15.4	Rapat-rapat paripurna				terlaksananya rapat - rapat paripurna		94,000,000	174,000,000		
1.20.2.15.5	Kegiatan Reses				terakomodirnya aspirasi masyarakat		1,227,000,000	1,227,000,000		
1.20.2.15.6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah				terlaksananya fungsi pengawasan DPRD		20,000,000	10,000,000		
1.20.2.15.7	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD				terlaksananya peningkatan wawasan anggota DPRD		6,889,600,000	6,650,667,500		
1.20.2.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				240,200,000	240,200,000		
1.20.2.26.3	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan				terlaksananya peningkatan wawasan anggota DPRD		206,200,000	206,200,000		
1.20.2.26.6	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah				Penjelasan Keterangan atau Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD		34,000,000	34,000,000		
Inspektorat							10,797,408,000	10,918,816,000		
	Belanja Tidak Langsung						6,775,033,000	6,676,441,000		
	Belanja Langsung						4,022,375,000	4,242,375,000		
1.20.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				702,160,000	757,280,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.20.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Distribusi Surat dan Laporan		63,000,000	63,000,000		
1.20.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terciptanya Kelancaran Kerja		122,857,300	125,357,300		
1.20.3.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terpenuhinya Perizinan Kendaraan		6,000,000	6,000,000		
1.20.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				tercapainya Pengelolaan Adminitrasi Keuangan dengan Baik		85,300,000	85,300,000		
1.20.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terjaminnya Kebersihan Kantor		24,100,000	25,100,000		
1.20.3.1.1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terciptanya kelancaran Kerja		4,000,000	4,000,000		
1.20.3.1.1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Peningkatan Kualitas SDM dan Kelancaran Kerja.		8,400,000	7,200,000		
1.20.3.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terwujudnya Kelancaran dan keterpaduan Kerja		298,702,700	299,522,700		
1.20.3.1.1 9	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Meningkatkan kelancaran dan keterpaduan kerja		89,800,000	141,800,000		
1.20.3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				335,455,000	429,555,000		
1.20.3.2. 3	Pembangunan gedung kantor				Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor		200,000,000	101,100,000		
1.20.3.2. 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Terciptanya Kelancaran Kerja		6,500,000	32,500,000		
1.20.3.2. 9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Terciptanya Kelancaran Kerja		38,000,000	203,000,000		
1.20.3.2. 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terciptanya Kelancaran Kerja		15,405,000	17,405,000		
1.20.3.2. 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Terciptanya Kelancaran Kerja		25,000,000	25,000,000		
1.20.3.2. 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Tercapainya Kelancaran Kerja		37,000,000	37,000,000		
1.20.3.2. 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Tercapainya Kelancaran Kerja		3,550,000	3,550,000		
1.20.3.2. 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terciptanya Kelancaran Kerja		10,000,000	10,000,000		
1.20.3.5	Program Peningkatan	Tata Kelola	Meningkatnya kualitas				64,000,000	13,153,100		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	pelayanan publik (5.8)							
1.20.3.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				Meningkatnya kualitas SDM		15,000,000	-		
1.20.3.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				Meningkatnya Kualitas Aparatur		49,000,000	13,153,100		
1.20.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				2,500,000	1,500,000		
1.20.3.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Terbitnya Laporan LAKIP RKA dan DPA		900,000	400,000		
1.20.3.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Terbitnya Laporan Keuangan		800,000	800,000		
1.20.3.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Terbitnya Laporan Keuangan		800,000	300,000		
1.20.3.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				2,616,720,000	2,564,230,000		
1.20.3.20.1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala				Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Pemeriksaan Reguler/ Kinerja dan Laporan Hasil Evaluasi		979,790,000	1,009,500,000		
1.20.3.20.2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah				Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus		324,880,000	282,800,000		
1.20.3.20.3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH				Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan Reviu dan Pemantauan		400,230,000	386,660,000		
1.20.3.20.5	Inverisasi temuan pengawasan				Terbitnya Laporan Inventarisasi temuan LHP		38,300,000	28,300,000		
1.20.3.20.6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan				Terbitnya Rekapitulasi temuan LHP pengawasan APIP		265,000,000	318,450,000		
1.20.3.20	Koordinasi pengawasan				Terbitnya Laporan		166,320,000	166,320,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
.7	yang lebih komprehensif				Hasil Evaluasi					
1.20.3.20.8	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan				Terciptanya kualitas SDM		40,000,000	60,000,000		
1.20.3.20.10	Pemeriksaan Khusus				Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus		402,200,000	312,200,000		
1.20.3.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				301,540,000	476,656,900		
1.20.3.21.1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan				Terciptanya Kualitas SDM yang Profesional		301,540,000	476,656,900		
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							7,226,565,000	9,542,092,500		
	Belanja Tidak Langsung						3,807,777,000	3,543,052,000		
	Belanja Langsung						3,418,788,000	5,999,040,500		
1.20.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				474,360,000	713,710,000		
1.20.4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Surat menyurat dan Terkirimnya surat-surat dinas		67,000,000	88,000,000		
1.20.4.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Jumlah Rekening Telponluran Internet tv Kabel dan Listrik Yang telah dibayarkan		91,680,000	108,530,000		
1.20.4.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Perizinan kendaraan dinas BKPSDM tahun 2019 tepat waktu		5,200,000	5,200,000		
1.20.4.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terlaksananya Proses Administrasi Keuangan BKPSDM secara Rutin dan Berkala		61,200,000	61,200,000		
1.20.4.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terjaminnya kebersihan kerapian pada ruangan BKPSDM		13,000,000	13,000,000		
1.20.4.1.1.2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen Instalasi Listrik/Elektronik yang		1,000,000	2,500,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					di adakan(dibeli) selama tahun 2019					
1.20.4.1.1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Terpenuhinya Kebutuhan Informasi dan Menambah Wawasan staf		5,280,000	5,280,000		
1.20.4.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				PNS yang telah selesaimelakukan Perjalanan Dinas Keluar daerah		155,000,000	355,000,000		
1.20.4.1.1 9	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Tertibnya Laporan Pengadaan Barang & Jasa serta Pengelolaan Administrasi Umum lainnya		75,000,000	75,000,000		
1.20.4.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				76,600,000	533,000,000		
1.20.4.2. 9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Jumlah Inventaris atau asset BKPSDM bertambah		34,700,000	390,800,000		
1.20.4.2.1 0	Pengadaan mebeleur						-	10,000,000		
1.20.4.2. 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						-	80,000,000		
1.20.4.2. 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				jumlahpemeliharaan rutin gedung kantor yang telah dilakukan		21,000,000	25,000,000		
1.20.4.2. 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Jumlah Layananjasa yang digunakan untuk pemeliharaan mobil dinas/jabatan		10,000,000	10,000,000		
1.20.4.2. 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Pelayanan jasa service perlengkapan gedung (AC) kantor BKPSDM tahun 2019		3,400,000	6,200,000		
1.20.4.2. 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Pelayanan Jasa Service peralatan kerja BKPSDM yang dibayarkan selama Tahun 2019		7,500,000	11,000,000		
1.20.4.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi,	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				-	17,000,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Teknologi dan Informasi								
1.20.4.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						-	17,000,000		
1.20.4.4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				41,100,000	57,800,000		
1.20.4.4.4	Penataan Sistem Administrasi Pensiun dan Evaluasi Pemberhentian Pegawai				Jumlah SK Pensiun yang terbit		41,100,000	57,800,000		
1.20.4.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				195,000,000	345,000,000		
1.20.4.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				Bertambahnya wawasan dan pengetahuan PNS BKPSDM yang telah mengikuti kegiatan tersebut		30,000,000	180,000,000		
1.20.4.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan						165,000,000	165,000,000		
1.20.4.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				6,500,000	6,500,000		
1.20.4.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				jumlah dokumen Lakip BKPSDM yang tersedia dan Renja BKPSDM		4,600,000	4,600,000		
1.20.4.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun (LRA Neraca dan CALK)		1,900,000	1,900,000		
1.20.4.32	Program Pendidikan Kedinasan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi,	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				1,209,733,000	1,209,733,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Teknologi dan Informasi								
1.20.4.32.2	Pendidikan penjenjangan struktural				Jumlah Pejabat Eselon II dan Eselon III yang telah selesai mengikuti DIKLATPIM		1,209,733,000	1,209,733,000		
1.20.4.33	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				12,000,000	1,105,197,500		
1.20.4.33.1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah						-	1,093,197,500		
1.20.4.33.4	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah				Jumlah PNS yang telah selesai mengikuti DIKLAT FUNGSIONAL di tahun 2019		12,000,000	12,000,000		
1.20.4.34	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				1,403,495,000	2,011,100,000		
1.20.4.34.1	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS				Terlaksananya proses Penyusunan DUK dan proses tahapan asesment/job fit		532,900,000	732,900,000		
1.20.4.34.2	Seleksi penerimaan calon PNS				Jumlah penetapan NIP CPNS Formasi Umum K II serta jumlah tenaga ASN lainnya		159,800,000	418,500,000		
1.20.4.34.3	Penempatan PNS				Terbitnya SK Penempatan PNS & rekomendasi Pindah Wilayah kerja.		60,200,000	100,900,000		
1.20.4.34.4	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS				Terbitnya SK KP dan KGB PNS		116,800,000	159,800,000		
1.20.4.34.5	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah				terlaksananya Pengembangan data base SIMPEG melalui pengumpulan data entry data updating validasi data elektronik PNS Kota Palopo		75,600,000	85,600,000		
1.20.4.34	Pemberian penghargaan				Tersalurnya		30,100,000	59,100,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
.8	bagi PNS yang berprestasi				Penghargaan Bagi PNS					
1.20.4.34.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas				jmlah PNS yang telah menerima beasiswa tugas belajar		106,250,000	106,250,000		
1.20.4.34.15	Monitoring evaluasi dan pelaporan				Jumlah Monitoring Kinerja PNS yang Terlaksana		110,595,000	176,800,000		
1.20.4.34.17	Seleksi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah				terbitnya sk ujian dinas dan penyesuaian ijazah		38,600,000			
1.20.4.34.21	Pengelolaan Arsip Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian				Tersedianya Informasi Kepegawaian yang mudah ditemukan melalui sistem digital		21,800,000	13,400,000		
1.20.4.34.22	Peningkatan Kapasitas Korps Pegawai Republik Indonesia				Terbitnya surat Persemayaman Jenazah ASN Terlaksananya Peningkatan Korps ASN dan tersedianya Kartu ASN (KARSU/KARSI)		90,550,000	86,150,000		
1.20.4.34.23	Pelaporan Dokumen Kepegawaian				tersedianya penyusunan Dokumen laporan Kepegawaian berupa Buku Induk Profil PNS dan Bezetting		9,600,000			
1.20.4.34.25	Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS						50,700,000	71,700,000		
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							32,217,890,000	34,855,191,000		
	Belanja Tidak Langsung						22,994,365,000	25,156,797,000		
	Belanja Langsung						9,223,525,000	9,698,394,000		
1.20.5.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				1,549,533,000	1,888,758,000		
1.20.5.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Terpenuhinya Kelancaran Administrasi Surat Menyurat		30,700,000	40,500,000		
1.20.5.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terpenuhinya Peningkatan Kinerja Aparatur		414,540,000	370,289,000		
1.20.5.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terpenuhinya Kendaraan Tertib Secara Administrasi		20,625,000	8,875,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.20.5.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terpenuhinya Proses Administrasi Keuangan Secara baik		322,625,600	400,633,500		
1.20.5.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terpeliharanya Kebersihan Gedung Kantor		42,800,000	48,800,000		
1.20.5.1.1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Listrik dan Penerangan Kantor		13,551,900	18,500,000		
1.20.5.1.1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Meningkatnya Wawasan dan SDM Aparatur		20,000,000	13,200,000		
1.20.5.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		500,000,000	750,000,000		
1.20.5.1.1 9	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Terwujudnya Jasa Administrasi Umum Secara Baik		184,690,500	237,960,500		
1.20.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				459,295,500	500,339,000		
1.20.5.2. 3	Pembangunan gedung kantor				Tersedianya Gedung Kantor yang representif		100,000,000			
1.20.5.2. 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional				Terpenuhinya Kebutuhan Mobilitas Operasional		38,500,000	38,500,000		
1.20.5.2. 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Terpenuhinya Peralatan Kantor Yang Memadai		21,800,000	21,800,000		
1.20.5.2. 9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Terpenuhinya Peralatan Kantor Yang Memadai		112,015,500	249,605,500		
1.20.5.2.1 0	Pengadaan mebeleur				Tersedianya Prasarana Kerja		41,500,000	37,823,500		
1.20.5.2. 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terpelihara Gedung Kantor		20,000,000	20,000,000		
1.20.5.2. 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan Yang Memadai		25,000,000	25,000,000		
1.20.5.2. 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Memadai		31,950,000	36,000,000		
1.20.5.2.	Pemeliharaan rutin/berkala				Tersedianya		50,800,000	53,800,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
26	perlengkapan gedung kantor				Perlengkapan Gedung Kantor Yang Memadai					
1.20.5.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terpeliharanya Secara Berkala Peralatan Gedung Kantor		17,730,000	17,810,000		
1.20.5.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				32,500,000	32,500,000		
1.20.5.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				Tersedianya pakaian olahraga		32,500,000	32,500,000		
1.20.5.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				39,500,000	37,500,000		
1.20.5.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				Tersedianya Aparat Yang memiliki Kompetensi		35,000,000	35,000,000		
1.20.5.5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan				Meningkatnya Pemahaman Aparatur		4,500,000	2,500,000		
1.20.5.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				1,800,000	2,400,000		
1.20.5.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Terlaksananya pekerjaan penyusunan Renstra Lakip Renja dan RKA 2019		1,200,000	1,800,000		
1.20.5.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Terlaksananya Penyusunan Keuangan Semesteran		300,000	300,000		
1.20.5.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		300,000	300,000		
1.20.5.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				5,934,796,500	6,011,416,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.20.5.17.1	Penyusunan analisa standar belanja				Perwal Analisa Standar Belanja		137,200,000	90,175,000		
1.20.5.17.2	Penyusunan standar satuan harga				Tersedianya Standar Harga		106,328,000	96,128,000		
1.20.5.17.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD				Perda APBD TA.2018		141,900,000	141,900,000		
1.20.5.17.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD				Perwal APBD TA.2018		39,500,000	39,500,000		
1.20.5.17.8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD				Perda Perubahan APBD		141,900,000	141,900,000		
1.20.5.17.9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD				Perwal Perubahan APBD TA. 2019		39,500,000	39,500,000		
1.20.5.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				Tersedianya Dokumen Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2018		183,766,000	183,766,000		
1.20.5.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				Tersedianya Dokumen Peraturan Walikota Palopo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2018		30,886,400	30,886,400		
1.20.5.17.13	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah				Terpenuhinya kebutuhan penyediaan laporan bagi unit - unit terkait		412,278,000	355,278,000		
1.20.5.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah				Meningkatnya kualitas SDM penyelenggaraan keuangan		120,500,000	71,175,000		
1.20.5.17.15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah				Meningkatnya kualitas laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan SKPD		99,129,600	74,929,600		
1.20.5.17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah				Tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah		1,185,559,000	1,721,006,000		
1.20.5.17.20	Penyelenggaraan Penyusunan Laporan Akuntansi				Terlaksananya sistem akuntansi pemerintah kota palopo untuk menghasilkan LKPD yang akuntabel		575,165,000	621,365,000		
1.20.5.17.21	Penyelenggaraan Administrasi				Peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan		809,440,000	723,002,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Perbendaharaan Daerah									
1.20.5.17.22	Penyelenggaraan Pengendalian APBD				Peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan		468,685,000	566,667,000		
1.20.5.17.25	Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah				Terpenuhinya pengamanan dan penatausahaan BMD		290,697,000			
1.20.5.17.26	Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah				Tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah		137,831,000	138,081,000		
1.20.5.17.27	Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah				Tercapainya administrasi pengelolaan belanja PPKD sesuai ketentuan		585,619,500	545,720,000		
1.20.5.17.30	Penyusunan Laporan Aset Daerah				Terpenuhinya laporan aset daerah		328,912,000	334,112,000		
1.20.5.17.40	Penyusunan KUA dan PPAS				KUA dan PPAS		100,000,000	96,325,000		
1.20.5.18	Program pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				1,206,100,000	1,225,481,000		
1.20.5.18.5	Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota				Penyusunan APBD		1,206,100,000	1,225,481,000		
Badan Pendapatan Daerah							15,645,849,500	14,814,465,000		
	Belanja Tidak Langsung						7,693,704,500	6,842,320,000		
	Belanja Langsung						7,952,145,000	7,972,145,000		
1.20.6.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				1,758,881,000	1,856,235,000		
1.20.6.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				peningkatan layanan administrasi surat menyurat		35,000,000	40,000,000		
1.20.6.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terpenuhinya kebutuhan komunikasi air dan listrik		230,900,000	212,416,536		
1.20.6.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				pembayaran jasa perizinan kendaraan dinas dilaksanakan tepat waktu		7,450,000	6,467,464		
1.20.6.1.7	Penyediaan jasa administrasi				Peningkatan pelayanan		390,320,000	371,580,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	keuangan				administrasi keuangan					
1.20.6.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Meningkatnya pelayanan kebersihan dan keindahan kantor		29,400,000	29,400,000		
1.20.6.1.1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Kebutuhan penerangan kantor terpenuhi dengan baik		12,000,000	10,000,000		
1.20.6.1.1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Meningkatnya wawasan dan pengetahuan Aparatur		6,720,000	4,020,000		
1.20.6.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dengan daerah lain		410,000,000	480,000,000		
1.20.6.1.1 9	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Peningkatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian		637,091,000	702,351,000		
1.20.6.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				821,300,000	854,400,000		
1.20.6.2. 3	Pembangunan gedung kantor				Terbangunnya ruang kantor yang baru		106,900,000			
1.20.6.2. 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Menunjang kelancaran pekerjaan kantor		60,400,000	78,400,000		
1.20.6.2. 9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Menunjang kelancaran pekerjaan kantor		390,900,000	482,900,000		
1.20.6.2.1 0	Pengadaan mebeleur				Menunjang pelaksanaan kegiatan kantor		69,900,000	84,900,000		
1.20.6.2. 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Pemeliharaan sarana gedung sesuai kebutuhan		70,000,000	100,000,000		
1.20.6.2. 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Terwujudnya pemeliharaan mobil jabatan		25,000,000	30,000,000		
1.20.6.2. 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Terwujudnya pemeliharaan kendaraan operasional		37,000,000	27,000,000		
1.20.6.2. 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Terpelihara perlengkapan gedung kantor		20,000,000	10,000,000		
1.20.6.2. 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terpeliharanya peralatan gedung kantor		41,200,000	41,200,000		
1.20.6.3	Program peningkatan	Tata Kelola	Meningkatnya kualitas				52,500,000	95,000,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	disiplin aparatur	Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	pelayanan publik (5.8)							
1.20.6.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				Meningkatnya kedisiplinan aparatur		52,500,000	95,000,000		
1.20.6.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				230,831,000	131,331,000		
1.20.6.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				Meningkatnya kualitas SDM aparatur		230,831,000	131,331,000		
1.20.6.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				4,100,000	4,100,000		
1.20.6.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja OPD		3,000,000	3,000,000		
1.20.6.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun		1,100,000	1,100,000		
1.20.6.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				4,708,423,000	4,412,289,000		
1.20.6.17.5	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan redistribusi				Dasar hukum dalam pelaksanaan penerimaan pajak dan retribusi daerah		15,650,000			
1.20.6.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah				Peningkatan penerimaan pajak daerah		561,899,000	512,959,000		
1.20.6.17.23	Pendataan dan Pemeliharaan Data Objek Pajak				Adanya data peta blok		1,032,480,000	930,880,000		
1.20.6.17.28	Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan Daerah				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak		419,816,000	372,996,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.20.6.17.29	Pelayanan Pengaduan Wajib Pajak				Menurunnya angka pengaduan wajib pajak		240,368,000	220,808,000		
1.20.6.17.31	Pelayanan Jemput Antar Pajak Daerah				Meningkatnya jumlah STTS yang disetor		1,034,800,000	1,122,800,000		
1.20.6.17.33	Pengelolaan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah				Pembuatan dan penyampaian SPPT PBB tepat waktu		590,736,000	503,280,000		
1.20.6.17.35	Monitoring Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah				Terantau dan terkendalinya penerimaan daerah		336,512,000	325,940,000		
1.20.6.17.37	Penyusunan Regulasi Pengelolaan Pendapatan Daerah				Terbitnya perwal baru dalam pengelolaan pendapatan daerah		21,400,000	19,000,000		
1.20.6.17.38	Penyusunan Sistem Informasi Pendapatan Daerah				Terwujudnya sistem informasi pendapatan yang akurat		340,712,000	289,576,000		
1.20.6.17.39	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pendapatan				Meningkatnya pemahaman aparatur tentang Sistem Informasi pendapatan		114,050,000	114,050,000		
1.20.6.18	Program pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				376,110,000	618,790,000		
1.20.6.18.8	Pembinaan dan Pengawasan Sumber-Sumber Penerimaan Daerah				Terantau dan terkendalinya penerimaan daerah		321,360,000	575,040,000		
1.20.6.18.9	Sosialisasi Implementasi Regulasi Pendapatan Daerah				Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pajak dan retribusi daerah		54,750,000	43,750,000		
Badan Penelitian dan Pengembangan							2,799,847,500	2,776,494,500		
	Belanja Tidak Langsung						1,914,062,000	1,890,709,000		
	Belanja Langsung						885,785,500	885,785,500		
1.20.7.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				433,160,500	445,794,300		
1.20.7.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah Surat yang sampai ke tujuan		24,730,500	27,814,300		
1.20.7.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terpenuhinya Pelayanan Perkantoran		9,600,000	7,600,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.20.7.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Lancarnya Pelayanan Perkantoran		3,800,000	5,000,000		
1.20.7.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Lancarnya Administrasi Keuangan		59,400,000	54,600,000		
1.20.7.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Kantor selalu dalam keadaan bersih		9,200,000	8,700,000		
1.20.7.1.1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Instalasi listrik terpenuhi		2,000,000	2,000,000		
1.20.7.1.1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Meningkatnya wawasan		5,280,000	5,280,000		
1.20.7.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Memperlancar tugas kedinasan		250,000,000	260,000,000		
1.20.7.1.1 9	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Lancarnya pelayanan administrasi umum		69,150,000	74,800,000		
1.20.7.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				111,150,000	99,016,200		
1.20.7.2. 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Perlengkapan Gedung Kantor		3,500,000	4,000,000		
1.20.7.2. 9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Kelancaran tugas perkantoran		20,850,000	30,816,200		
1.20.7.2.1 0	Pengadaan mebeleur						17,700,000	11,700,000		
1.20.7.2. 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terpeliharanya Gedung Kantor		16,500,000	5,000,000		
1.20.7.2. 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Mobil Jabatan Siap Pakai		25,000,000	23,000,000		
1.20.7.2. 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Kendaraan Siap Pakai		25,000,000	20,000,000		
1.20.7.2. 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Peralatan Kantor selalu dalam kondisi baik		800,000	2,000,000		
1.20.7.2. 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Peralatan Kerja Siap Pakai		1,800,000	2,500,000		
1.20.7.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				14,500,000	14,000,000		
1.20.7.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				Menambah wawasan aparat		14,500,000	14,000,000		
1.20.7.6	Program peningkatan	Tata Kelola	Meningkatnya kualitas				6,500,000	6,500,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	pelayanan publik (5.8)							
1.20.7.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersedianya Laporan Kinerja SKPD		3,300,000	3,300,000		
1.20.7.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Peningkatan Sistem Pelaporan		1,600,000	1,600,000		
1.20.7.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Peningkatan Sistem Pelaporan		1,600,000	1,600,000		
1.20.7.35	Program Penelitian dan Pengembangan Pemanfaatan SDM dan IPTEK Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				129,350,000	129,350,000		
1.20.7.35.1	Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah Pokitik Pemerintahan Umum dan Peraturan				Terintegrasinya RIK dengan RPJMD Kota Palopo		48,400,000	48,400,000		
1.20.7.35.2	Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Sumber Daya Masyarakat				Pengembangan Varietas Pisang dan Ubi Ungu		45,650,000	45,650,000		
1.20.7.35.3	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Ekonomi				Peningkatan Kualitas Kebijakan Siapa Mau Kerja Apa		35,300,000	35,300,000		
1.20.7.36	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				191,125,000	191,125,000		
1.20.7.36.1	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)				Terlaksananya Sistem Inovasi Daerah Kota Palopo		142,125,000	142,125,000		
1.20.7.36.2	Pengembangan Tekno-park dan Pusat Inovasi				Meningkatnya kualitas kelitbangan Kota Palopo		49,000,000	49,000,000		
Kecamatan Wara							7,687,881,000	8,008,176,000		
	Belanja Tidak Langsung						4,518,235,000	4,795,930,000		
	Belanja Langsung						3,169,646,000	3,212,246,000		
1.20.8.1	Program Pelayanan	Tata Kelola	Meningkatnya kualitas				485,432,000	452,932,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Administrasi Perkantoran	Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	pelayanan publik (5.8)							
1.20.8.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		10,400,000	14,400,000		
1.20.8.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		86,032,000	69,932,000		
1.20.8.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terlaksananya pembayaran jasa perizinan kendaraan dinas		4,300,000	4,300,000		
1.20.8.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terlaksananya Administrasi Keuangan		65,600,000	71,500,000		
1.20.8.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terlaksananya Kebersihan Kantor		19,400,000	19,400,000		
1.20.8.1.1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terwujudnya keamanan kerja lingkungan Kantor		3,000,000	1,700,000		
1.20.8.1.1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Meningkatnya Wawasan Aparatur		18,000,000	16,800,000		
1.20.8.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terjalinnya jaringan kerjasama antar instansi dan daerah		127,000,000	98,500,000		
1.20.8.1.1 9	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Terpenuhinya pelayanan umum dan kepegawaian yang optimal		151,700,000	156,400,000		
1.20.8.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				48,500,000	70,500,000		
1.20.8.2. 9	Pengadaan peralatan gedung kantor						-	23,000,000		
1.20.8.2.1 0	Pengadaan mebeleur						-	16,000,000		
1.20.8.2. 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terciptanya Kenyamanan dalam Bekerja		20,000,000	10,000,000		
1.20.8.2. 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang		24,500,000	19,000,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					memadai					
1.20.8.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai		1,500,000	1,500,000		
1.20.8.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terpeliharanya Secara Berkala Peralatan Gedung Kantor		2,500,000	1,000,000		
1.20.8.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				6,500,000	10,500,000		
1.20.8.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai		6,500,000	4,500,000		
1.20.8.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						-	6,000,000		
1.20.8.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				-	13,500,000		
1.20.8.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan						-	13,500,000		
1.20.8.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				8,600,000	7,100,000		
1.20.8.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersusunnya Lakip dan Renstra SKPD		5,000,000	3,500,000		
1.20.8.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Tersusunnya Laporan keuangan semesteran		1,800,000	1,800,000		
1.20.8.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				tercapainya laporan akhir tahun		1,800,000	1,800,000		
1.20.8.31	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				2,620,614,000	2,657,714,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.20.8.31.5	Koordinasi Pelaksanaan Kantramtibmas				Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum		38,200,000	37,700,000		
1.20.8.31.7	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan				Terciptanya sinkronisasi program dan kegiatan pemerintahan		4,600,000	4,100,000		
1.20.8.31.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan				Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat		8,600,000	5,100,000		
1.20.8.31.9	Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian & Pembangunan Masyarakat				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah		4,600,000	4,100,000		
1.20.8.31.11	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Tompotikka				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program Pemerintah		426,609,000	433,709,000		
1.20.8.31.12	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Boting				terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah		426,341,000	433,441,000		
1.20.8.31.13	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Amassangan				Terciptanya Sinergitas Pelaksanaan Program Pemerintah		427,241,000	434,341,000		
1.20.8.31.14	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Dangerakko				Terciptanya Sinergitas Pelaksanaan Program Pemerintah		424,741,000	431,841,000		
1.20.8.31.15	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Lagaligo				Terciptanya Sinergitas Pelaksanaan Program Pemerintah		427,541,000	434,641,000		
1.20.8.31.16	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Pajalesang				Terciptanya Sinergitas Pelaksanaan Program Pemerintah		427,541,000	434,641,000		
1.20.8.31.64	Koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan				Tercapainya Administrasi Kependudukan yang berintegrasitas dengan program pemerintah		4,600,000	4,100,000		
Kecamatan Wara Utara							6,883,733,000	7,379,365,000		
	Belanja Tidak Langsung						3,787,787,000	4,240,819,000		
	Belanja Langsung						3,095,946,000	3,138,546,000		
1.20.9.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				309,360,000	311,960,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi								
1.20.9.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat		53,300,000	72,300,000		
1.20.9.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik		14,600,000	14,200,000		
1.20.9.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terlaksananya pembayaran perizinan kendaraan dinas		1,500,000	1,500,000		
1.20.9.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel		56,800,000	57,800,000		
1.20.9.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terciptanya kebersihan dilingkungan kantor		13,000,000	13,500,000		
1.20.9.1.1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terciptanya kenyamanan kerja lingkungan kantor		300,000	800,000		
1.20.9.1.1 4	Penyediaan peralatan rumah tangga				Terwujudnya peralatan rumah tangga		660,000	660,000		
1.20.9.1.1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Bertambahnya wawasan aparat sipil negara		2,400,000	2,400,000		
1.20.9.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terwujudnya koordinasi pelaksanaan tugas tugas kecamatan		101,500,000	78,500,000		
1.20.9.1.1 9	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Terpenuhinya pelayanan umum yang optimal		65,300,000	70,300,000		
1.20.9.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				104,540,000	106,440,000		
1.20.9.2. 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Terpenuhinya perlengkapan kantor yang memadai		5,000,000	5,000,000		
1.20.9.2. 9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai		9,000,000	9,000,000		
1.20.9.2.1 0	Pengadaan mebeleur				Tersedianya prasarana kerja		79,000,000	79,000,000		
1.20.9.2. 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terciptanya kenyamanan dalam bekerja		1,000,000	1,500,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.20.9.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan		6,500,000	7,400,000		
1.20.9.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas		2,740,000	2,740,000		
1.20.9.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Terpeliharanya secara berkala perlengkapan gedung kantor		400,000	900,000		
1.20.9.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terpeliharanya secara berkala peralatan gedung kantor		900,000	900,000		
1.20.9.31	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				2,682,046,000	2,720,146,000		
1.20.9.31.5	Koordinasi Pelaksanaan Kantramtibmas				Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum		43,200,000	43,200,000		
1.20.9.31.7	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan				Terciptanya sinkronisasi program dan kegiatan pemerintahan		9,600,000	9,600,000		
1.20.9.31.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan				Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat		14,400,000	14,400,000		
1.20.9.31.9	Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian & Pembangunan Masyarakat				Terciptanya kelancaran perekonomian dan pembangunan kemasyarakatan		14,600,000	14,600,000		
1.20.9.31.17	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Batupasi				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah		422,941,000	429,541,000		
1.20.9.31.18	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Penggoli				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah		423,741,000	429,841,000		
1.20.9.31.19	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Sabbamparu				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah		433,941,000	440,041,000		
1.20.9.31.20	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Luminda				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah		438,441,000	444,541,000		
1.20.9.31.	Penyelenggaraan				Terciptanya sinergitas		437,441,000	443,541,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
21	Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Salobulo				pelaksanaan program pemerintah					
1.20.9.31.22	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Patte' ne				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah		438,941,000	446,041,000		
1.20.9.31.64	Koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan				Terwujudnya Koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan		4,800,000	4,800,000		
Kecamatan Wara Selatan							5,915,784,000	5,925,369,000		
	Belanja Tidak Langsung						3,699,805,000	3,680,990,000		
	Belanja Langsung						2,215,979,000	2,244,379,000		
1.20.10.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				308,415,000	314,262,000		
1.20.10.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Terseainya pelayanan administrasi perkantoran		7,500,000	7,500,000		
1.20.10.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terpenuhnya kebutuhan jasa komunikasi Sumber daya air dan Listrik		18,600,000	16,100,000		
1.20.10.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terlaksananya pembayaran jasa perizinan kendaraan Dinas		2,800,000	3,300,000		
1.20.10.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terlaksananya Administrasi Keuangan		65,480,000	66,480,000		
1.20.10.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terlaksananya Kebersihan Kantor		19,200,000	19,200,000		
1.20.10.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terwujudnya keamanan kerja lingkungan Kantor		5,700,000	5,700,000		
1.20.10.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan		3,960,000	3,960,000		
1.20.10.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terwujudnya Koordinasi pelaksanaan tugas - tugas Kedinasan		75,500,000	83,847,000		
1.20.10.1.	Penyediaan Jasa				Terpenuhinya		109,675,000	108,175,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
19	Administrasi Umum				pelayanan mum dan kepgawaian yang optimal					
1.20.10.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				47,000,000	44,200,000		
1.20.10.2.10	Pengadaan mebeleur				Tersedianya prasaranan Kerja		8,700,000	8,700,000		
1.20.10.2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas				Terciptanya kenyamanan dalam Bekerja		5,500,000	5,500,000		
1.20.10.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terciptanya kenyamanan dalam bekerja		4,000,000	5,200,000		
1.20.10.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional yang memadai		25,500,000	21,500,000		
1.20.10.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		600,000	600,000		
1.20.10.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terpeliharanya secara Berkala peralatan Gedung Kantor		2,700,000	2,700,000		
1.20.10.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				8,500,000	7,500,000		
1.20.10.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Peningkatan Disiplin Aparatur		8,500,000	7,500,000		
1.20.10.3.1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				1,852,064,000	1,878,417,000		
1.20.10.3.1.5	Koordinasi Pelaksanaan Kantramtibmas				Terciptanya ketentrman dan ketertiban umum		40,275,000	37,875,000		
1.20.10.3.1.7	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan				Terlaksananya Tugas Umum Pemerintahan		9,075,000	9,075,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					dan Kegiatan Kelembagaan					
1.20.10.3 1.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan				Terciptanya senegitas Pelaksanaan Program pemerintahan		9,075,000	9,075,000		
1.20.10.3 1.9	Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian & Pembangunan Masyarakat				Terciptanya peran serta dan partisipasi Masyarakat		13,875,000	13,875,000		
1.20.10.3 1.23	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Takkalala				Sinergitas Pelaksanaan Program Pemerintahan Kelurahan Takkalala		447,941,000	455,394,000		
1.20.10.3 1.24	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Songka				Sinergitas Pelaksanaan program Pemerintahan Kelurahan Songka		443,941,000	451,041,000		
1.20.10.3 1.25	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Sampoddo				Sinergitas Pelaksanaan Program Pemerintahan Kelurahan Sampoddo		440,941,000	448,041,000		
1.20.10.3 1.26	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Binturu				Sinergitas pelaksanaan program Pemerinta Kelurahan Binturu		440,941,000	448,041,000		
1.20.10.3 1.64	Koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan				Terlaksananya koordinasi pelayanan umum dan administrasi kependudukan		6,000,000	6,000,000		
Kecamatan Telluwanua							8,394,428,000	8,823,512,000		
	Belanja Tidak Langsung						4,743,961,000	5,123,345,000		
	Belanja Langsung						3,650,467,000	3,700,167,000		
1.20.11.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				297,080,000	297,080,000		
1.20.11.1. 1	Penyediaan jasa surat menyurat				Terciptanya ketentraman dan ketertiban		9,937,000	9,937,000		
1.20.11.1. 2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		39,531,000	39,531,000		
1.20.11.1. 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terlaksananya pembayaran jasa perizinan kendaraan		1,650,000	1,650,000		
1.20.11.1.	Penyediaan jasa administrasi				Terlaksananya		47,300,000	47,300,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
7	keuangan				Administrasi Keuangan					
1.20.11.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terwujudnya Keamanan kerja lingkungan kantor		700,000	700,000		
1.20.11.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				Terciptanya kenyamanan bekerja		833,000	833,000		
1.20.11.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Meningkatnya Wawasan Aparatur		5,280,000	5,280,000		
1.20.11.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas tugas Kedinasan		114,500,000	114,500,000		
1.20.11.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Terpenuhinya pelayanan umum dan kepegawaian yang optimal		77,349,000	77,349,000		
1.20.11.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$\$.8)				110,650,000	110,650,000		
1.20.11.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Terpenuhinya peralatan Kantor yang memadai		2,000,000	2,000,000		
1.20.11.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai		5,000,000	5,000,000		
1.20.11.2.10	Pengadaan mebeleur				Terpenuhinya Peralatan kantor yang memadai		10,050,000	10,050,000		
1.20.11.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai		69,600,000	69,600,000		
1.20.11.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Tersedianya Kendaraan Dinas yang Memadai		23,000,000	23,000,000		
1.20.11.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Tersedianya secara berkala peralatan gedung kantor		1,000,000	1,000,000		
1.20.11.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$\$.8)				1,200,000	1,200,000		
1.20.11.3.	Pengadaan pakaian dinas				Terciptanya pegawai		1,200,000	1,200,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2	beserta perlengkapannya				yang rapi dan disiplin					
1.20.11.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				1,200,000	1,200,000		
1.20.11.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Terciptanya Sinergitas pelaksana program pemerintah		1,200,000	1,200,000		
1.20.11.31	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				3,240,337,000	3,290,037,000		
1.20.11.31.5	Koordinasi Pelaksanaan Kantramtibmas				Terciptanya sinergitas pelaksana program pemerintah		48,200,000	48,200,000		
1.20.11.31.7	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan				Terciptanya sinergitas pelaksana program pemerintah		20,600,000	20,600,000		
1.20.11.31.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah		12,800,000	12,800,000		
1.20.11.31.9	Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian & Pembangunan Masyarakat				Terciptanya sinergitas pelaksana program pemerintah		4,500,000	4,500,000		
1.20.11.31.27	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Mancani				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah		438,641,000	445,741,000		
1.20.11.31.28	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Batu Walenrang				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah		453,241,000	460,341,000		
1.20.11.31.29	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Maroangin				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah		452,941,000	460,041,000		
1.20.11.31.30	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Pentoangan				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah		453,941,000	461,041,000		
1.20.11.31.31	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Jaya				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah		452,941,000	460,041,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.20.11.31.32	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Salubattang				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah		447,941,000	455,041,000		
1.20.11.31.33	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Sumarambu				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah		454,091,000	461,191,000		
1.20.11.31.64	Koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan				Tercipta Pelayanan umum dan administrasi kependudukan Kec. Wara Barat		500,000	500,000		
Kecamatan Wara Barat							6,149,486,000	6,180,079,000		
	Belanja Tidak Langsung						3,494,081,000	3,449,174,000		
	Belanja Langsung						2,655,405,000	2,730,905,000		
1.20.12.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				291,088,000	268,598,000		
1.20.12.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Surat Menyurat		23,658,000	23,064,400		
1.20.12.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Tercapainya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik		17,400,000	19,382,740		
1.20.12.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Tercapainya Kegiatan Peny.jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/operasional		1,500,000	2,034,860		
1.20.12.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Peny.Jasa Administrasi Keuangan		53,950,000	50,990,000		
1.20.12.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor		7,400,000	8,446,000		
1.20.12.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terselenggaranya Kegiatan Peny.Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2,400,000	3,094,000		
1.20.12.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Terselenggaranya Kegiatan Peny.bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		2,400,000	2,400,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.20.12.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terselenggaranya Kegiatan Rapat- rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		88,500,000	70,000,000		
1.20.12.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Peny.Jasa Administrasi Umum		93,880,000	89,186,000		
1.20.12.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				71,700,000	117,890,000		
1.20.12.2.3	Pembangunan gedung kantor						-	40,000,000		
1.20.12.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		14,000,000	14,000,000		
1.20.12.2.10	Pengadaan mebeleur				Tersedianya Mebeleur		39,000,000	39,000,000		
1.20.12.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						2,400,000	7,400,000		
1.20.12.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Terpeliharanya Aset Pemerintah Kota Palopo berupa mobil dinas Kantor Kecamatan		13,000,000	14,800,000		
1.20.12.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Terpeliharanya Aset Pemerintah Kota Palopo berupa AC Pada Kantor Kecamatan		600,000	600,000		
1.20.12.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terpeliharanya aset Pemerintah Kota Palopo berupa Peralatan Kantor kec. Wara Barat		2,700,000	2,090,000		
1.20.12.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				2,200,000	4,500,000		
1.20.12.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersedianya Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kec. Wara Barat yang tertib		1,000,000	1,600,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.20.12.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Tersedianya Pelaporan keuangan Semester Kec. Wara Barat yang tertib		600,000	1,500,000		
1.20.12.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kec. Wara Barat yang tertib		600,000	1,400,000		
1.20.12.3.1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				2,290,417,000	2,339,917,000		
1.20.12.3.1.5	Koordinasi Pelaksanaan Kantramtibmas				Tercipta Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kec. Wara Barat		40,800,000	40,800,000		
1.20.12.3.1.7	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan				Terkoordinirnya para penyelenggara pemerintahan mulai dari tingkat kecamatan kelurahan RW dan RT se Kec. Wara Barat		12,000,000	12,000,000		
1.20.12.3.1.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan				Terkoordinirnya Para Pihak Penyelenggara Pembinaan Kemasyarakatan		12,000,000	12,000,000		
1.20.12.3.1.9	Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian & Pembangunan Masyarakat				Terkoordinirnya Para Pihak Penyelenggara Pembinaan Kemasyarakatan		12,000,000	12,000,000		
1.20.12.3.1.41	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Tomarundung				Tercapainya Operasional Kel.Tamarundung		437,941,000	448,041,000		
1.20.12.3.1.42	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Battang				Terselenggaranya Operasional Kelembagaan pemerintahan Kelurahan Battang		437,441,000	447,541,000		
1.20.12.3.1.43	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Lebang				Terselenggaranya operasional kelembagaan pemerintahan Kelurahan Lebang		437,941,000	448,041,000		
1.20.12.3.1.44	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan				Tercapainya operasional Kelurahan Battang Barat		445,353,000	455,453,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Batang Barat									
1.20.12.3 1.45	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Padang Lambe				Tercapainya operasional Kelurahan Padang Lambe		442,941,000	452,041,000		
1.20.12.3 1.64	Koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan				Tercipta Pelayanan umum dan administrasi kependudukan Kec. Wara Barat		12,000,000	12,000,000		
Kecamatan Wara Timur							8,782,464,000	8,785,861,000		
	Belanja Tidak Langsung						5,145,055,000	5,088,752,000		
	Belanja Langsung						3,637,409,000	3,697,109,000		
1.20.13.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				364,480,000	367,930,000		
1.20.13.1. 1	Penyediaan jasa surat menyurat				Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran		20,432,000	20,822,000		
1.20.13.1. 2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik		33,960,000	33,960,000		
1.20.13.1. 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terlaksananya Pembayaran Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas		1,120,000	5,980,000		
1.20.13.1. 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terlaksananya Administrasi Pengelola Keuangan		57,000,000	52,200,000		
1.20.13.1. 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terlaksananya Kebersihan Dan Keindahan Kantor		6,710,000	6,710,000		
1.20.13.1. 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terlaksananya Penerangan Kantor		2,500,000	2,500,000		
1.20.13.1. 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Meningkatnya Wawasan Aparatur		3,600,000	3,600,000		
1.20.13.1. 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terwujudnya Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas kedinasan		114,500,000	107,500,000		
1.20.13.1. 19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Terwujudnya Pelayanan Umum Dan Kepegawaian Yang		124,658,000	134,658,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					Optimal					
1.20.13.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				57,800,000	68,800,000		
1.20.13.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						4,000,000	4,000,000		
1.20.13.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Terwujudnya Peralatan Kantor Yang Memadai		7,000,000	7,000,000		
1.20.13.2.10	Pengadaan mebeleur						16,000,000	16,000,000		
1.20.13.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terwujudnya Kenyamanan Dalam Bekerja		10,000,000	21,000,000		
1.20.13.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Terwujudnya Kenyamanan Dalam Bekerja		18,500,000	18,500,000		
1.20.13.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Yang Memadai		800,000	800,000		
1.20.13.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terwujudnya Pemeliharaan secara Berkala Peralatan Gedung Kantor		1,500,000	1,500,000		
1.20.13.3.1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				3,215,129,000	3,260,379,000		
1.20.13.3.1.5	Koordinasi Pelaksanaan Kantramtibmas				Terciptanya Ketertiban Dan Keamanan Di Wil.Kec.Wara Timur		60,600,000	60,600,000		
1.20.13.3.1.7	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan				Terciptanya Sinkronisasi progaram Dan Kegiatan Pemerintahan		21,000,000	16,800,000		
1.20.13.3.1.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan				Terciptanya Sinkronisasi progaram Pembinaan Kemasyarakatan		21,000,000	16,800,000		
1.20.13.3.1.9	Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian & Pembangunan Masyarakat				Terciptanya Sinkronisasi progaram Ekonomi & Pembangunan Masyarakat		21,000,000	16,800,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.20.13.3 1.34	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Benteng				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah Kelurahan Benteng		435,851,000	442,951,000		
1.20.13.3 1.35	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Surutanga				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah Kelurahan Surutanga		436,891,000	443,991,000		
1.20.13.3 1.36	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Pontap				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah Kelurahan Pontap		446,921,000	454,021,000		
1.20.13.3 1.37	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Malatunrung				Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Malatunrung		441,951,000	449,051,000		
1.20.13.3 1.38	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Salekoe				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah Kelurahan Salekoe		440,473,000	447,573,000		
1.20.13.3 1.39	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Salotellue				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah Kelurahan Salotellue		439,341,000	446,441,000		
1.20.13.3 1.40	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Ponjalae				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah Kelurahan Ponjalae		449,501,000	456,601,000		
1.20.13.3 1.64	Koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan				Terciptanya Pelayanan Umum & Administrasi Kependudukan		600,000	8,750,000		
Kecamatan Mungkajang							5,915,752,000	5,848,659,000		
	Belanja Tidak Langsung						3,750,988,000	3,655,495,000		
	Belanja Langsung						2,164,764,000	2,193,164,000		
1.20.14.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				274,800,000	281,300,000		
1.20.14.1. 1	Penyediaan jasa surat menyurat				Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		20,599,000	20,599,000		
1.20.14.1. 2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terpenuhinya Jasa Komunikasi Air dan Listrik untuk Kelancaran Kerja		14,801,000	14,101,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.20.14.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terpenuhinya pembayaran Jasa Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional		3,400,000	6,200,000		
1.20.14.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan		47,400,000	47,400,000		
1.20.14.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor		10,000,000	10,800,000		
1.20.14.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terpenuhinya Penerangan dan Kenyamanan Kerja di Lingkungan Kantor		3,000,000	4,000,000		
1.20.14.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Peningkatan Wawasan Aparatur		3,600,000	2,400,000		
1.20.14.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terwujudnya Pelaksanaan dan Konsultasi Tugas-Tugas Kedinasan		75,500,000	75,500,000		
1.20.14.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran		96,500,000	100,300,000		
1.20.14.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				40,000,000	41,500,000		
1.20.14.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terpeliharanya Kondisi Gedung / Kantor Yang Baik		17,000,000	18,400,000		
1.20.14.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Terpeliharanya Kondisi Kendaraan Dinas Operasional Yang Baik		20,000,000	20,000,000		
1.20.14.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Terpeliharanya Kondisi Peralatan Kantor Yang Baik		600,000	300,000		
1.20.14.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terpeliharanya Kondisi Peralatan Kantor Yang Baik		2,400,000	2,800,000		
1.20.14.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				15,000,000	6,500,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.20.14.3.1	Pengadaan mesin/kartu absensi						-			
1.20.14.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Terciptanya keseragaman aparatur		15,000,000	6,500,000		
1.20.14.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				-	500,000		
1.20.14.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						-	500,000		
1.20.14.3.1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				1,834,964,000	1,863,364,000		
1.20.14.3.1.5	Koordinasi Pelaksanaan Kantramtibmas				Lancarnya Koordinasi Pelaksanaan Kantramtibmas		19,800,000	19,800,000		
1.20.14.3.1.7	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan						600,000	600,000		
1.20.14.3.1.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan						600,000	600,000		
1.20.14.3.1.9	Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian & Pembangunan Masyarakat						600,000	600,000		
1.20.14.3.1.50	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Mungkajang				Tercapainya Koordinasi Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan/ Kelurahan		450,941,000	458,041,000		
1.20.14.3.1.51	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Murante				Tercapainya Koordinasi Pelayanan dan Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan/ Kelurahan		452,941,000	460,041,000		
1.20.14.3.1.52	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Latuppa				Tercapainya Koordinasi Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan		453,941,000	461,041,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					Kecamatan/ Kelurahan					
1.20.14.3 1.53	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Kambo				Tercapainya Koordinasi Pelayanan dan Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Kambo		454,941,000	462,041,000		
1.20.14.3 1.64	Koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan						600,000	600,000		
Kecamatan Bara							7,444,819,000	7,397,061,000		
	Belanja Tidak Langsung						4,574,814,000	4,486,556,000		
	Belanja Langsung						2,870,005,000	2,910,505,000		
1.20.15.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				346,650,000	354,620,000		
1.20.15.1. 1	Penyediaan jasa surat menyurat				terpenuhinya kebutuhan surat menyurat		19,700,000	19,650,000		
1.20.15.1. 2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terpenuhinya kebutuhan Jasa komunikasi Sumber daya air & listrik		28,000,000	25,360,000		
1.20.15.1. 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terlaksananya pembayaran jasa perizinan Kendaraan dinas/operasional		3,500,000	4,000,000		
1.20.15.1. 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				terlaksananya administrasi keuangan		41,800,000	47,800,000		
1.20.15.1. 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terciptanya keindahan dan kebersihan kantor		15,550,000	17,150,000		
1.20.15.1. 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				terciptanya penerangan gedung kantor & rumah Dinas		11,300,000	5,260,000		
1.20.15.1. 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Terpenuhinya Pengetahuan serta wawasan aparatur		14,400,000	14,400,000		
1.20.15.1. 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas-tugas kedinasan		70,000,000	75,000,000		
1.20.15.1. 19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				terpenuhinya administrasi Umum kepegawaian Yang		142,400,000	146,000,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					optimal					
1.20.15.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				134,350,000	138,660,000		
1.20.15.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Tersedianya Peralatan kantor yang memadai		44,000,000	44,000,000		
1.20.15.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Tersedianya tempat kerja yang memadai		60,000,000	60,000,000		
1.20.15.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Tersedianya Mobil Dinas Yang memadai		28,350,000	32,660,000		
1.20.15.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai		500,000	500,000		
1.20.15.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala		1,500,000	1,500,000		
1.20.15.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				2,950,000	2,750,000		
1.20.15.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				tersedianya laporan capaian kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah		1,500,000	1,600,000		
1.20.15.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				tersedianya laporan keuangan semesteran		650,000	350,000		
1.20.15.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang berbasis akrual		800,000	800,000		
1.20.15.3.1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				2,386,055,000	2,414,475,000		
1.20.15.3.1.5	Koordinasi Pelaksanaan Kantramtibmas				Terciptanya keamanan dan ketertiban		33,800,000	30,600,000		
1.20.15.3.1.7	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan				Tercapainya sinergitas Pelaksanaan Program pemerintahan		22,900,000	23,400,000		
1.20.15.3	Koordinasi Penyelenggaraan				tercapainya		42,250,000	38,125,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.8	Pembinaan Kemasyarakatan				pemahaman Masyarakat					
1.20.15.3 1.9	Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian & Pembangunan Masyarakat				terwujudnya pembangunan yang merata dalam segala hal		29,300,000	29,945,000		
1.20.15.3 1.54	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Temmalebba				Terciptanya sinergitas Program Pemerintahan antar pemerintah kelurahan & kecamatan		449,541,000	456,641,000		
1.20.15.3 1.55	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Balandai				Tercapainya sinergitas Program Pemerintahan antar Pemerintah Kelurahan & kecamatan		440,541,000	447,641,000		
1.20.15.3 1.56	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Rampoang				Terciptanya sinergitas program Pemerintahan antar pemerintah Kelurahan & kecamatan		445,541,000	452,641,000		
1.20.15.3 1.57	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan To' Bulung				Terciptanya sinergitas program pemerintahan antar pemerintah Kecamatan & kelurahan		445,541,000	452,641,000		
1.20.15.3 1.58	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Buntu Datu				Terciptanya sinergitas Program Pemerintahan antar Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan		445,541,000	452,641,000		
1.20.15.3 1.64	Koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan				terselenggaranya Pelayanan Prima		31,100,000	30,200,000		
Kecamatan Sendana							5,388,761,000	5,423,858,000		
	Belanja Tidak Langsung						3,284,597,000	3,281,294,000		
	Belanja Langsung						2,104,164,000	2,142,564,000		
1.20.16.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				284,940,000	293,990,000		
1.20.16.1. 1	Penyediaan jasa surat menyurat				Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		25,100,000	24,550,000		
1.20.16.1. 2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terpenuhinya kebutuhan jasa		4,200,000	8,600,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					komunikasi sumber daya air dan listrik					
1.20.16.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terlaksananya pembayaran jasa perizinan kendaraan dinas		1,600,000	1,600,000		
1.20.16.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terlaksananya administrasi keuangan		50,500,000	50,500,000		
1.20.16.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor		1,500,000	2,050,000		
1.20.16.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terwujudnya keamanan kerja di lingkungan kantor		1,000,000	1,000,000		
1.20.16.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Meningkatnya wawasan aparatur		3,960,000	3,960,000		
1.20.16.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah		75,500,000	73,500,000		
1.20.16.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang optimal		121,580,000	128,230,000		
1.20.16.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				28,200,000	29,750,000		
1.20.16.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terciptanya kenyamanan kerja		5,000,000	6,550,000		
1.20.16.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas operasional		18,500,000	18,500,000		
1.20.16.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai		800,000	800,000		
1.20.16.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terpeliharanya peralatan gedung kantor		3,900,000	3,900,000		
1.20.16.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				900,000	300,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.20.16.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		450,000			
1.20.16.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		300,000	300,000		
1.20.16.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		150,000			
1.20.16.3.1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				1,790,124,000	1,818,524,000		
1.20.16.3.1.5	Koordinasi Pelaksanaan Kantramtibmas				Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat		19,200,000	19,200,000		
1.20.16.3.1.46	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Peta				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah di kelurahan peta		438,581,000	445,681,000		
1.20.16.3.1.47	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Mawa				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah di kelurahan mawa		439,681,000	446,781,000		
1.20.16.3.1.48	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Purangi				Terciptanya sinergitas pelaksanaan program pemerintah di kelurahan purangi		439,581,000	446,681,000		
1.20.16.3.1.49	Penyelenggaraan Operasional Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Sendana				Terciptanya Sinergitas Pelaksanaan program pemerintah di kelurahan Sendana		444,081,000	451,181,000		
1.20.16.3.1.64	Koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan				Terlaksananya koordinasi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan		9,000,000	9,000,000		
Dinas Ketahanan Pangan							3,086,949,000	2,711,978,000		
	Belanja Tidak Langsung						2,359,156,000	1,984,185,000		
	Belanja Langsung						727,793,000	727,793,000		
1.21.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				407,244,500	413,957,500		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi								
1.21.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Terdistribusikannya surat ke tempat tujuan		25,535,500	35,835,500		
1.21.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi air listrik tv kabel dan internet kantor		40,692,000	35,192,000		
1.21.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Tertibnya administrasi pembayaran pajak STNK Mobil dan Motor Kantor DKP		4,380,000	3,440,000		
1.21.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Tertibnya administrasi keuangan		49,100,000	49,100,000		
1.21.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terwujudnya keindahan kebersihan dan kenyamanan di lingkungan kantor		5,800,000	6,300,000		
1.21.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Lancarnya aktifitas kantor dengan sarana listrik yang memadai		665,000	1,365,000		
1.21.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Meningkatnya wawasan ilmu dan pengetahuan pegawai		3,960,000	2,400,000		
1.21.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terlaksana perjalanan dinas luar daerah pegawai		212,312,000	218,545,000		
1.21.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Terselenggaranya aktivitas kantor dengan baik		64,800,000	61,780,000		
1.21.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				95,540,000	98,835,000		
1.21.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Tersedianya perlengkapan kantor		3,340,000	3,340,000		
1.21.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Tercukupinya peralatan gedung kantor		20,900,000	22,930,000		
1.21.1.2.10	Pengadaan mebeleur				Terpenuhinya Mebeleur Kantor		20,000,000	17,790,000		
1.21.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terpeliharanya Gedung Kantor		3,000,000	4,000,000		
1.21.1.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Terpeliharanya secara rutin/berkala mobil		24,000,000	25,000,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					jabatan					
1.21.1.2.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan operasional		18,000,000	18,500,000		
1.21.1.2.2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				peralatan kerja kantor terpelihara dengan baik		1,800,000	1,800,000		
1.21.1.2.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				peralatan kerja kantor terpelihara dengan baik		4,500,000	5,475,000		
1.21.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				22,500,000	14,617,000		
1.21.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				Meningkatnya kinerja seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya		13,000,000	7,571,000		
1.21.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				Meningkatnya kompetensi pegawai terkait dengan tugas pokok dan fungsi		9,500,000	7,046,000		
1.21.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				2,300,000	2,225,000		
1.21.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				1. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Tersedianya Rencana Kerja Tahun 2020		1,200,000	1,125,000		
1.21.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Tersusunnya Laporan keuangan Semesteran Tahun 2019		550,000	550,000		
1.21.1.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tersusunnya Laporan keuangan akhir tahun 2018		550,000	550,000		
1.21.1.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)				195,208,500	192,558,500		
1.21.1.16. 3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan				Tersedianya Laporan Informasi Pola Konsumsi Pangan		44,300,000	39,300,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					Masyarakat Kota Palopo					
1.21.1.16.4	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan				Tersedianya buku data Neraca Bahan Makanan untuk penyusunan kebijakan ketahanan pangan di Kota Palopo		48,800,000	44,000,000		
1.21.1.16.10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat				Tersedianya data SKPG dan Peta FSVA		31,452,500	29,952,500		
1.21.1.16.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan				teridentifikasinya pangan segar yang mengandung pestisida dan bahan berbahaya lainnya		16,381,000	25,081,000		
1.21.1.16.30	Penyuluhan sumber pangan alternatif				1. meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan non beras dan non terigu berbasis B2SA. 2. meningkatnya kemampuan mengolah pangan alternatif yang beragam bergizi dan seimbang		42,050,000	41,450,000		
1.21.1.16.32	Penyusunan kebijakan pembangunan ketahanan pangan				Tersedianya Rumusan Solusi Penanganan Daerah Rawan Pangan Di Kota Palopo		12,225,000	12,775,000		
1.21.1.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (\$ 10)				5,000,000	5,600,000		
1.21.1.17.7	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah				Terwujudnya promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan		5,000,000	5,600,000		
Dinas Persandian dan Statistik							2,269,657,000	2,267,995,000		
	Belanja Tidak Langsung						1,669,657,000	1,622,995,000		
	Belanja Langsung						600,000,000	645,000,000		
1.23.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)				354,366,250	395,800,000		
1.23.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah unit surat		37,916,250	37,916,250		
1.23.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Pembayaran jasa		33,220,000	34,240,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.23.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				jumlah unit kendaraan		1,650,000	1,650,000		
1.23.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pengelola administrasi keuangan		43,800,000	43,800,000		
1.23.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				jumlah jasa		7,900,000	7,900,000		
1.23.1.1.1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah komponen listrik		500,000	1,000,000		
1.23.1.1.1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				jumlah unit bahan bacaan		5,280,000	5,280,000		
1.23.1.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah unit perjalanan konsultasi dan koordinasi		151,900,000	191,813,750		
1.23.1.1.1 9	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				jumlah jasa orang		72,200,000	72,200,000		
1.23.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				104,400,000	101,300,000		
1.23.1.2.5	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional				pengadaan unit kendaraan bermotor		36,000,000	32,900,000		
1.23.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Pengadaan unit perlengkapan		30,000,000	30,000,000		
1.23.1.2.1 0	Pengadaan mebeleur				Pengadaan unit mobiler		2,000,000	2,000,000		
1.23.1.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Jumlah Gedung yang dipelihara		11,000,000	11,000,000		
1.23.1.2.2 3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Jumlah unit Mobil yang dipelihara		20,000,000	20,000,000		
1.23.1.2.2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Jumlah AC yang dipelihara		1,400,000	1,400,000		
1.23.1.2.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Jumlah unit alat kantor yang dipelihara		4,000,000	4,000,000		
1.23.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				30,000,000	45,000,000		
1.23.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan						30,000,000	45,000,000		
1.23.1.6	Program Peningkatan	Tata Kelola	Meningkatnya kualitas				2,800,000	2,800,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	pelayanan publik (5.8)							
1.23.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Pelaporan capaian kinerja dan keuangan		2,000,000	2,000,000		
1.23.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Jumlah laporan Keuangan Semesteran		400,000	400,000		
1.23.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Penyusunan Laporan Akhir Tahun		400,000	400,000		
1.23.1.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				75,433,750	71,100,000		
1.23.1.15.1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah				Jumlah unit buku statistik sektoral		23,600,000	23,600,000		
1.23.1.15.2	Pengolahan updating dan analisis data dan statistik daerah				Jumlah Menu data dan Unit Aplikasi berbasis web		17,520,000	16,520,000		
1.23.1.15.4	Pengolahan updating dan analisis data PDRB				Jumlah unit buku PDRB		21,800,000	21,800,000		
1.23.1.15.6	Sosialisasi Data Statistik				Terlaksananya kegiatan sosialisasi data statistik sektoral		12,513,750	9,180,000		
1.23.1.37	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				33,000,000	29,000,000		
1.23.1.37.1	Penyelenggaraan Operasional Dukungan Persandian Untuk Pengaman Informasi di Pemerintah Daerah				Informasi /Berita Masuk dan Keluar		10,500,000	7,700,000		
1.23.1.37.2	Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Milik Pemerintah Daerah				Jumlah laporan		6,000,000	5,250,000		
1.23.1.37.3	Sosialisasi Penyelenggaraan Persandian				Jumlah peserta		13,900,000	13,850,000		
1.23.1.37.4	Pengawasan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan				Jumlah laporan		2,600,000	2,200,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	dan Pengaman Persandian									
Dinas Kearsipan							1,831,332,000	2,002,569,000		
	Belanja Tidak Langsung						1,286,832,000	1,458,069,000		
	Belanja Langsung						544,500,000	544,500,000		
1.24.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				286,360,000	342,500,000		
1.24.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		18,780,000	18,780,000		
1.24.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terlaksananya Jasa Komunikasi Air dan Listrik		47,700,000	52,800,000		
1.24.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas		1,400,000	1,600,000		
1.24.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terlaksananya Administrasi Keuangan		67,800,000	67,800,000		
1.24.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terwujudnya Kenyamanan dan Ketenangan Kantor		7,000,000	7,000,000		
1.24.1.1.1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terciptanya Kelancaran Kerja		750,000	750,000		
1.24.1.1.1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Tercapainya Minat Baca Staf dan Masyarakat		5,280,000	5,280,000		
1.24.1.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		100,000,000	149,660,000		
1.24.1.1.1 9	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Tercapainya Kelancaran Kerja		37,650,000	38,830,000		
1.24.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				125,340,000	90,200,000		
1.24.1.2.5	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional				Terciptanya kelancaran kerja		17,935,000	16,800,000		
1.24.1.2.1 0	Pengadaan mebeleur						56,000,000	29,500,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.24.1.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Terciptanya Kenyamanan Kerja		17,000,000	4,000,000		
1.24.1.2.2 3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Tercapainya Pemeliharaan Kendaraan Yang Rusak		24,655,000	24,655,000		
1.24.1.2.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						7,250,000	12,745,000		
1.24.1.2.2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Tercapainya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor		1,000,000	1,000,000		
1.24.1.2.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Tercapainya pemeliharaan peralatan kantor		1,500,000	1,500,000		
1.24.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				24,500,000	29,000,000		
1.24.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				Terciptanya Sumber Daya Aparatur yang Cerdas		24,500,000	29,000,000		
1.24.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				5,000,000	8,000,000		
1.24.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tercapainya Kegiatan Penyusunan Laporan SKPD		3,000,000	3,000,000		
1.24.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Terlaksananya pelaporan keuangan semesteran		1,000,000	2,500,000		
1.24.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		1,000,000	2,500,000		
1.24.1.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				12,300,000	12,300,000		
1.24.1.15. 6	Kajian sistem administrasi kearsipan						12,300,000	12,300,000		
1.24.1.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip	Tata Kelola Pemerintahan dan	Meningkatnya Kualitas Kinerja				13,300,000	16,900,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	daerah	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Penyelenggaraan Pemerintahan (5.7)							
1.24.1.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah				Tercapainya pembinaan kearsipan		13,300,000	16,900,000		
1.24.1.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (5.7)				2,500,000	2,500,000		
1.24.1.17.2	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah				Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin Arsip Daerah		2,500,000	2,500,000		
1.24.1.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (5.7)				75,200,000	43,100,000		
1.24.1.18.3	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta						48,800,000	43,100,000		
1.24.1.18.4	Penyusunan Perda Pengelolaan Kearsipan						26,400,000	-		
Dinas Komunikasi dan Informasi							2,913,819,800	3,096,075,800		
	Belanja Tidak Langsung						1,713,069,000	1,707,825,000		
	Belanja Langsung						1,200,750,800	1,388,250,800		
1.25.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				350,770,800	405,823,550		
1.25.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Terkirimnya Surat		17,210,800	24,670,800		
1.25.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terpenuhinya Jasa Komunikasi dan Sumber Listrik/Air Dengan Baik		20,400,000	23,160,000		
1.25.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terbitnya Perpanjangan Surat Izin Kendaraan Dinas Jabatan / Operasional		1,600,000	1,900,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.25.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terbitnya Dokumen Administrasi Keuangan		61,800,000	61,800,000		
1.25.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terpeliharanya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor		6,900,000	7,900,000		
1.25.1.1.1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Tersedianya Alat Listrik Kantor		1,000,000	2,000,000		
1.25.1.1.1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Tersedianya Bahan Bacaan		3,960,000	2,400,000		
1.25.1.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terwujudnya Persamaan Persepsi		108,700,000	151,792,750		
1.25.1.1.1 9	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Terlaksananya Administrasi umum		129,200,000	130,200,000		
1.25.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				63,700,000	70,025,000		
1.25.1.2.5	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional		17,000,000	16,125,000		
1.25.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		14,900,000	19,800,000		
1.25.1.2.1 0	Pengadaan mebeleur				Tersedianya Mebeleur Kantor		14,800,000	7,500,000		
1.25.1.2.2 3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Terpeliharanya Mobil Jabatan		7,500,000	12,000,000		
1.25.1.2.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional		8,000,000	12,500,000		
1.25.1.2.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor		1,500,000	2,100,000		
1.25.1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				1,500,000	1,500,000		
1.25.1.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan				Terlaksananya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		1,500,000	1,500,000		
1.25.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				29,000,000	39,500,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
		Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi								
1.25.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				Terlaksananya Bimbingan Teknis		29,000,000	39,500,000		
1.25.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				6,250,000	6,250,000		
1.25.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Terbitnya Laporan capaian Kinerja		3,750,000	3,750,000		
1.25.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Tersedianya Dokumen		1,250,000	1,250,000		
1.25.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tersedianya Dokumen		1,250,000	1,250,000		
1.25.1.15	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (5.7)				687,780,000	800,902,250		
1.25.1.15.2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi				Terlaksananya Pelayanan E-Government dan Aplikasi SMART-CITY		584,280,000	708,702,250		
1.25.1.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Telekomunikasi		6,000,000	7,000,000		
1.25.1.15.4	Pengadaan alat studio dan komunikasi				terlaksananya alat studio		77,000,000	67,600,000		
1.25.1.15.6	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi				tercapainya perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi		20,500,000	17,600,000		
1.25.1.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (5.7)				61,750,000	64,250,000		
1.25.1.18.	Penyebarluasan informasi				terlaksananya		49,000,000	51,500,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	pembangunan daerah				pengelolaan data dan Inforamsi website pemda					
1.25.1.18.3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat				Tercapainya Masyarakat yang Sejahtera dan Mandiri		12,750,000	12,750,000		
Dinas Perpustakaan							3,512,722,000	3,381,334,000		
	Belanja Tidak Langsung						1,901,022,000	1,769,634,000		
	Belanja Langsung						1,611,700,000	1,611,700,000		
1.26.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				364,430,000	375,468,647		
1.26.1.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tercapainya Jasa Surat Menyurat		56,984,000	49,059,900		
1.26.1.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				Terlaksananya Belanja Jasa Kantor		47,280,000	35,615,205		
1.26.1.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				Terlaksananya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		14,000,000	7,834,925		
1.26.1.1.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				Terlaksananya Honorarium PNS		57,000,000	59,100,000		
1.26.1.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				Terlaksananya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		8,000,000	8,500,000		
1.26.1.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Terlaksananya Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar Batery Kering)		750,000	750,000		
1.26.1.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				Terlaksananya Belanja Jasa Kantor		5,280,000	4,080,000		
1.26.1.1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		84,836,000	156,828,617		
1.26.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Terlaksananya Jasa Pelayanan Administrasi Umum		90,300,000	53,700,000		
1.26.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				60,582,000	54,797,753		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.26.1.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				Terlaksananya Pengadaan Komputer PC dan Printer		5,000,000	5,000,000		
1.26.1.2.10	Pengadaan Mebeleur				Terlaksananya Mebeleur Kantor		9,500,000	9,500,000		
1.26.1.2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		10,000,000	7,000,000		
1.26.1.2.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan				Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Mobil Dinas		14,600,000	13,015,753		
1.26.1.2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Mobil Operasional		16,282,000	14,482,000		
1.26.1.2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		2,200,000	2,800,000		
1.26.1.2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		3,000,000	3,000,000		
1.26.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				40,500,000	54,500,000		
1.26.1.5.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		15,000,000	15,000,000		
1.26.1.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		25,500,000	39,500,000		
1.26.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (\$8)				4,250,000	3,903,600		
1.26.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Terlaksananya Penyusunan Laporan LAKIP RENJA dan RENSTRA		2,550,000	2,376,600		
1.26.1.6.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran				Terlaksananya Penyusunan Laporan Semesteran		850,000	700,000		
1.26.1.6.4	Penyusunan Pelaporan				Terlaksananya		850,000	827,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Keuangan Akhir Tahun				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun					
1.26.1.15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Perpustakaan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Teknologi dan Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)				877,650,000	901,298,000		
1.26.1.15.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan				Presentase Gedung Layanan Perpustakaan yang Terbangun		877,650,000	901,298,000		
1.26.1.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pengembangan SDM, Penanganan Kemiskinan Terpadu dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (5.1)				264,288,000	221,732,000		
1.26.1.21.2	Pengembangan minat dan budaya baca				Terlaksananya Pengembangan Minat Baca dalam Keluarga serta Terpublikasikannya Potensi Perpustakaan Daerah Kota Palopo		38,200,000	24,450,000		
1.26.1.21.3	Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum perpustakaan khusus perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat				Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah		40,000,000	37,650,000		
1.26.1.21.9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah				Terlaksananya Pengelolaan dan Pengadaan Bahan Pustaka Pelestarian dan Penjilidan Bahan Pustaka Lembur Layanan Perpustakaan Fumigasi Pengembangan Layanan Perpustakaan Instansi		186,088,000	159,632,000		
Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan							24,544,586,100	23,935,849,100		
	Belanja Tidak Langsung						14,758,223,000	14,134,486,000		
	Belanja Langsung						9,786,363,100	9,801,363,100		
2.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						2,216,776,500	2,232,966,000		
2.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		149,979,000	159,415,000		
2.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi				Terpenuhinya		312,717,500	325,271,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	sumber daya air dan listrik				Kebutuhan Telepon Internet Air dan Listrik					
2.1.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Beroperasinya Kendaraan Dinas/Operasional		30,700,000	29,500,000		
2.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terselenggaranya Proses Penatausahaan & Pengelolaan Administrasi Keuangan		49,800,000	49,800,000		
2.1.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terpeliharanya Kebersihan Kantor		26,000,000	26,000,000		
2.1.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Tersedianya Alat-Alat Listrik.		12,500,000	12,500,000		
2.1.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Tersedianya Surat Kabar / Majalah dan Buku Referensi		5,280,000	5,280,000		
2.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Keikutsertaan Dalam Pertemuan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		576,000,000	576,000,000		
2.1.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Optimalisasi Kinerja Staf		1,053,800,000	1,049,200,000		
2.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						390,760,000	398,258,168		
2.1.1.2.3	Pembangunan gedung kantor				Meningkatnya kinerja aparatur		26,150,000	26,150,000		
2.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Meningkatnya kinerja aparatur		44,660,000	48,660,000		
2.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Meningkatnya Kinerja Aparatur		134,000,000	123,098,168		
2.1.1.2.10	Pengadaan mebeleur				meningkatnya kinerja aparatur		111,250,000	113,750,000		
2.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				terpeliharanya gedung kantor		15,000,000	40,000,000		
2.1.1.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Terciptanya Kendaraan Mobil Jabatan Yang Baik		19,500,000	19,500,000		
2.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Terciptanya Kendaraan Mobil Operasional yang baik		32,500,000	18,500,000		
2.1.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Optimalnya Perlengkapan Kantor		1,800,000	1,800,000		
2.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Optimalnya Peralatan Kantor		5,900,000	6,800,000		
2.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						13,000,000	32,500,000		
2.1.1.3.1	Pengadaan mesin/kartu absensi				meningkatnya kedisiplinan aparatur		13,000,000	32,500,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						14,500,000	11,500,000		
2.1.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				.Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur		14,500,000	11,500,000		
2.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						6,400,000	6,400,000		
2.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersedianya Dokumen Perencanaan Kinerja & Capaian Kinerja		4,500,000	4,500,000		
2.1.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran		950,000	950,000		
2.1.1.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tersedianya Laporan Akhir Tahun		950,000	950,000		
2.1.1.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani						327,577,500	292,255,000		
2.1.1.15.1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis				Meningkatnya kemampuan petani dalam pengoperasian alsintan teknologi pertanian		10,280,000	10,280,000		
2.1.1.15.3	Peningkatan kemampuan lembaga petani				terwujudnya kelembagaan kelompok tani		309,767,500	274,445,000		
2.1.1.15.6	Penyusunan Kebijakan Kebutuhan Kelompok Tani				tersedianya dokumen rencana kebutuhan definitif kelompok Tani		7,530,000	7,530,000		
2.1.1.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)						193,690,000	193,690,000		
2.1.1.16.9	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan				Termanfaatkannya Pekarangan untuk Tanaman Hortikultura		126,470,000	126,470,000		
2.1.1.16.20	Pengembangan perbenihan/perbibitan				tersedianya benih unggul bersertifikat di Kota palopo		22,000,000	22,000,000		
2.1.1.16.29	Peningkatan produksi produktivitas dab mutu produk perkebunan produk pertanian				meningkatnya pengetahuan petani tentang gap budidaya sagu dan pala		45,220,000	45,220,000		
2.1.1.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan						175,000,000	175,000,000		
2.1.1.17.7	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah				Terpromosinya Hasil Pertanian dan Perkebunan		175,000,000	175,000,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2.1.1.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan						324,420,000	324,420,000		
2.1.1.18.2	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna				menigkatnya sarana prasrana pertanian		324,420,000	324,420,000		
2.1.1.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan						669,650,000	668,020,400		
2.1.1.19.2	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan						43,000,000	43,000,000		
2.1.1.19.3	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan				tersedianya benih unggul bersertifikat diKota Palopo		571,150,000	569,520,400		
2.1.1.19.5	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian				Teridentifikasinya lahan pangan pertanian berkelanjutan Tersedianya dokumen action plan kawasan pertanian		55,500,000	55,500,000		
2.1.1.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan						182,460,000	182,460,000		
2.1.1.20.2	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan				Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian		142,000,000	142,000,000		
2.1.1.20.4	Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan				Tersusunnya Programa 2020 sebagai pedoman kerja Penyuluh		40,460,000	40,460,000		
2.1.1.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak						282,200,000	281,497,386		
2.1.1.21.2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak				menurunnya jumlah kasus dan luas penyebaran penyakit ternak		282,200,000	281,497,386		
2.1.1.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan						2,158,001,100	2,185,468,146		
2.1.1.22.2	Pembibitan dan perawatan ternak				tersedianya bibit ternak ayam kampung super		1,935,451,100	1,962,918,146		
2.1.1.22.3	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat				Meningkatnya Produksi & Produktifitas Perkebunan Kelopok Tani		211,050,000	211,050,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2.1.1.22.8	Pengembangan agribisnis peternakan				Meningkatnya angka kebuntingan dan kelahiran Sapi		11,500,000	11,500,000		
2.1.1.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan						58,500,000	58,500,000		
2.1.1.23.5	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah				terpromosinya hasil peternakan		58,500,000	58,500,000		
2.1.1.24	Program peningkatan produksi peternakan						41,220,000	56,220,000		
2.1.1.24.2	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna				Tersedianya sarana kegiatan penertiban ternak		41,220,000	56,220,000		
2.1.1.25	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pertanian						2,732,208,000	2,702,208,000		
2.1.1.25.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian				Tersedianya kegiatan sarana prasarana pertanian		2,732,208.000	2,702,208.000		
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							6,358,006,500	6,506,647,500		
	Belanja Tidak Langsung						2,826,437,000	2,739,078,000		
	Belanja Langsung						3,531,569,500	3,767,569,500		
2.4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						525,011,500	601,871,500		
2.4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Tersedianya Jasa Surat Menyurat		28,183,500	28,183,500		
2.4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Lancarnya Administrasi Kantor		73,600,000	84,600,000		
2.4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Operasional di Lapangan		1,400,000	1,400,000		
2.4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				tertibnya administrasi keuangan		54,600,000	54,600,000		
2.4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terlaksananya Kebersihan Kantor		30,300,000	31,300,000		
2.4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terciptanya Instalasi Listrik Kantor		2,000,000	2,000,000		
2.4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Terciptanya Bahan Bacaan / Surat		5,280,000	5,280,000		
2.4.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terwujudnya Rapat Koordinasi		180,548,000	243,408,000		
2.4.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Terlaksanannya Administrasi Umum dengan Baik		149,100,000	151,100,000		
2.4.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						51,000,000	73,300,000		
2.4.1.2.9	Pengadaan peralatan				terciptanya aktifitas		7,000,000	14,000,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	gedung kantor				kantor					
2.4.1.2.10	Pengadaan mebeleur						-	22,900,000		
2.4.1.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				terwujudnya pemeliharaan gedung kantor		17,600,000	10,000,000		
2.4.1.2.2 3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				terpeliharanya secara rutin/ berkala mobil jabatan		22,200,000	22,200,000		
2.4.1.2.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				terpeliharanya pemeliharaan rutin gedung kantor		4,200,000	4,200,000		
2.4.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						-	13,240,000		
2.4.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan						-	13,240,000		
2.4.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						5,000,000	5,000,000		
2.4.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				RENJA SKPD LAKIP		3,000,000	3,000,000		
2.4.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Laporan semesteran		1,000,000	1,000,000		
2.4.1.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Terwujudnya pelaporan keuangan akhir tahun		1,000,000	1,000,000		
2.4.1.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata						195,200,000	198,700,000		
2.4.1.15.5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri				Pariwisata kota palopo dapat dikenal di dalam dan luar negeri		145,350,000	148,850,000		
2.4.1.15.7	Pengembangan statistik wisata terpadu				Tersedianya data jumlah wisatwan di Kota Palopo		49,850,000	49,850,000		
2.4.1.16	Program pengembangan destinasi pariwisata						187,600,000	311,700,000		
2.4.1.16.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata				Terwujudnya obyek pariwisata yang memadai		178,500,000	302,600,000		
2.4.1.16.5	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata				Tersedianya data dan informasi potensi objek daya tarik wisata		9,100,000	9,100,000		
2.4.1.18	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif						197,180,000	193,180,000		
2.4.1.18.1	Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreaif				Termotivasinya pelaku ekonomi kreatif		197,180,000	193,180,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					tumbuhnya beberapa sub sektor ekonomi kreatif					
2.4.1.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pariwisata						2,370,578,000	2,370,578,000		
2.4.1.19.1	Penyediaan Pelayanan Kepariwisataan				Optimalnya pelayanan kepariwisataan		621,736,000	621,736,000		
2.4.1.19.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata				Tercapainya penyediaan sarana dan prasarana pariwisata		1,748,842,000	1,748,842,000		
Dinas Perikanan							7,420,622,550	7,160,320,550		
	Belanja Tidak Langsung						3,929,293,750	3,799,041,750		
	Belanja Langsung						3,491,328,800	3,361,278,800		
2.5.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						721,387,800	754,255,850		
2.5.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Tertib dan lancarnya administrasi surat menyurat		38,535,300	38,535,300		
2.5.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		49,092,000	50,772,000		
2.5.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Tersedianya STNK kendaraan dinas roda 4 dan roda 2		9,900,000	11,090,000		
2.5.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Lancarnya jasa dan honor pengelola admnistrasi keuangan		80,400,000	80,400,000		
2.5.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Lancarnya jasa petugas kebersihan kantor		12,600,000	12,600,000		
2.5.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik		2,240,000	2,240,000		
2.5.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Tersedianya bahan bacaan surat kabar / majalah		5,280,000	5,280,000		
2.5.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Lancarnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah		442,440,500	472,438,550		
2.5.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Tertibnya jasa administrasi umum		80,900,000	80,900,000		
2.5.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						168,745,000	167,068,600		
2.5.1.2.3	Pembangunan gedung kantor				Tersedianya kanopi tempat parkir kendaraan		59,095,000	59,095,000		
2.5.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Tersedianya peralatan gedung kantor		32,250,000	30,573,600		
2.5.1.2.2	Pemeliharaan rutin/berkala				Kendaraan dinas /		25,000,000	25,000,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3	mobil jabatan				mobil jabatan berfungsi dengan baik					
2.5.1.2.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Kendaraan dinas / operasional berfungsi dengan baik		45,000,000	45,000,000		
2.5.1.2.2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Berfungsinya perlengkapan gedung kantor dengan baik		2,000,000	2,000,000		
2.5.1.2.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Peralatan kantor berfungsi dengan baik		5,400,000	5,400,000		
2.5.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						33,000,000	39,000,000		
2.5.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				Terbinanya aparatur yang handal		33,000,000	39,000,000		
2.5.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						5,100,000	4,494,400		
2.5.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersedianya LAKIP 2018		1,000,000	669,200		
2.5.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Tersedianya laporan keuangan semesteran		1,000,000	1,000,000		
2.5.1.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tersedianya laporan keuangan akhir tahun		1,000,000	725,200		
2.5.1.6.5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan				Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi		2,100,000	2,100,000		
2.5.1.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir						24,100,000	24,100,000		
2.5.1.15.1	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir				Terbinanya kelompok ekonomi masyarakat pesisir		24,100,000	24,100,000		
2.5.1.20	Program pengembangan budidaya perikanan						353,165,000	185,115,000		
2.5.1.20.1	Pengembangan bibit ikan unggul				Tersedianya bibit ikan air tawar yang unggul		41,945,000	41,945,000		
2.5.1.20. 2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan				Tertibnya kelembagaan kelompok pembudidaya ikan		14,160,000	14,160,000		
2.5.1.20. 3	Pembinaan dan pengembangan perikanan				Berkembangnya budidaya perikanan		297,060,000	129,010,000		
2.5.1.21	Program pengembangan perikanan tangkap						470,809,500	454,509,000		
2.5.1.21.1	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap				Terciptanya pendampingan pada kelompok nelayan		400,934,500	384,634,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					dengan baik					
2.5.1.21.3	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan				Terpeliharanya TPI dengan baik		69,875,000	69,875,000		
2.5.1.23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan						105,952,500	123,666,950		
2.5.1.23.4	Promosi atas Hasil Produksi Perikanan / Kelautan Unggulan Daerah				Tersedianya pangsa pasar baru bagi produk perikanan unggulan daerah		79,052,500	103,766,950		
2.5.1.23.5	Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				Meningkatnya SDM kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan		26,900,000	19,900,000		
2.5.1.24	Program pengembangan Data Base dan Informasi						21,750,000	21,750,000		
2.5.1.24.2	Updating data statistik Kelautan dan Perikanan				Tersedianya database statistik kelautan dan perikanan		21,750,000	21,750,000		
2.5.1.25	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut Air Payau Air Tawar						29,300,000	29,300,000		
2.5.1.25.1	Pengembangan Budidaya Rumput Laut				Meningkatnya produksi rumput laut		29,300,000	29,300,000		
2.5.1.26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan						1,558,019,000	1,558,019,000		
2.5.1.26.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelautan				Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelautan		997,519,000	997,519,000		
2.5.1.26.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan				Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan		560,500,000	560,500,000		
Dinas Perdagangan							8,108,339,500	7,905,258,057		
	Belanja Tidak Langsung						4,957,012,000	4,893,430,557		
	Belanja Langsung						3,151,327,500	3,011,827,500		
2.6.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						581,131,500	717,589,000		
2.6.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Terpenuhinya Jasa Penyediaan Alat Tulis Kantor Paket PengirimanBelanja CetakBelanja PenggandaanBelanja Penjilidan		52,167,500	65,238,050		
2.6.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Terpenuhinya Kebutuhan Rekening TeleponAirListrik Internet (WIFI) Media Penyiaran Publikasi		109,840,000	118,550,950		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					(Infotorial)					
2.6.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terpenuhinya Persuratan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor		5,000,000	4,800,000		
2.6.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan		115,620,000	123,600,000		
2.6.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Tersedianya Kantor Yang Bersih dan Rapi		11,000,000	15,000,000		
2.6.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Bangunan Kantor		3,000,000	3,000,000		
2.6.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		5,280,000	4,800,000		
2.6.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Hubungan Kerjasama Dengan Pihak Terkait Dapat Terjalin		196,574,000	300,450,000		
2.6.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa		82,650,000	82,150,000		
2.6.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						516,256,000	333,406,000		
2.6.1.2.5	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional				Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional		53,000,000	53,000,000		
2.6.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		15,200,000	40,450,000		
2.6.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Tersedianya Peralatan Gedung kantor		350,000,000	132,500,000		
2.6.1.2.10	Pengadaan mebeleur				Tersedianya Meubeleur Kantor		51,000,000	51,000,000		
2.6.1.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Jumlah Gedung Yang Dipelihara		19,856,000	27,356,000		
2.6.1.2.2 3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Tersedianya Kendaraan Mobil Jabatan		25,000,000	25,000,000		
2.6.1.2.2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Terpeliharanya Gedung Kantor		1,000,000	1,400,000		
2.6.1.2.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor		1,200,000	2,700,000		
2.6.1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						4,500,000	4,500,000		
2.6.1.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan				Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan		4,500,000	4,500,000		
2.6.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						38,500,000	36,332,950		
2.6.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan				Meningkatnya Sumber		10,000,000	10,000,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	formal				Daya Aparatur					
2.6.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				Meningkatnya Pemahaman Aparatur Terhadap Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		28,500,000	26,332,950		
2.6.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						7,400,000	7,395,000		
2.6.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersedianya Dokumen Lapran Capaian Kinerja (LAKIP RENJA RKA)		4,200,000	4,200,000		
2.6.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran		1,400,000	1,400,000		
2.6.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun		1,800,000	1,795,000		
2.6.1.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan						248,570,000	254,540,000		
2.6.1.15.3	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa				Barang Yang Beredar Aman Bagi Konsumen dan Penyaluran Barang Bersubsidi Tepat Sasaran		108,165,000	130,465,000		
2.6.1.15.4	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah				Tersedianya Alat UTTP yang ditera/di cap sah		103,150,000	103,150,000		
2.6.1.15.5	Sosialisasi Pembinaan Lingkungan Sosial dan Perlindungan Konsumen				Barang Bersubsidi Tepat Sasaran		27,925,000	20,925,000		
2.6.1.15.6	Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen				Pelaku Usaha Mengetahui Fungsi BPSK		9,330,000			
2.6.1.17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor						9,900,000	9,900,000		
2.6.1.17.4	Pengembangan data base informasi potensi unggulan				Tersedianya Data Base Informasi Komoditas Unggulan		9,900,000	9,900,000		
2.6.1.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri						1,745,070,000	1,648,164,550		
2.6.1.18.3	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk				Jumlah PAD dan Tersebar nya Informasi Harga ke Masyarakat		1,053,300,000	980,512,500		
2.6.1.18.5	Pengembangan pasar lelang daerah				Barang Kebutuhan Sembako Menjelang Hari ID Tersedia Dengan Harga		590,870,000	570,286,300		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
					Terjangkau (Stabilisasi Harga)					
2.6.1.18.6	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan				Tersebar nya Informasi Komoditi Perdagangan		100,900,000	97,365,750		
Dinas Perindustrian							2,293,808,600	2,453,353,600		
	Belanja Tidak Langsung						1,503,251,000	1,582,796,000		
	Belanja Langsung						790,557,600	870,557,600		
2.7.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						308,907,600	378,477,600		
2.7.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Terpenuhinya jasa Surat menyurat		16,977,600	17,547,600		
2.7.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Tidak adanya tunggakan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		17,400,000	36,400,000		
2.7.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Tidak ada kendaraan dinas yang tertunggak pembayaran pajak		1,800,000	1,800,000		
2.7.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Tercapainya Jasa Administrasi Keuangan		63,000,000	63,000,000		
2.7.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terpenuhinya Peralatan Kantor dan tercapainya kebersihan dalam dan luar kantor		9,200,000	9,200,000		
2.7.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Tercapainya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor		2,500,000	2,500,000		
2.7.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Meningkatnya pengetahuan pegawai terkait dengan peraturan perundang undangan		5,280,000	5,280,000		
2.7.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terpenuhinya informasi informasi yang dibutuhkan sehingga kordinasi berjalan baik		144,250,000	194,250,000		
2.7.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Tercapainya jasa administrasi umum terkait kegiatan/kebutuhan rutin perkantoran		48,500,000	48,500,000		
2.7.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						53,400,000	53,902,500		
2.7.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						10,000,000	10,000,000		
2.7.1.2.9	Pengadaan peralatan				Terpenuhinya fasilitas		13,900,000	13,900,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	gedung kantor				Penunjang kantor					
2.7.1.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Ruang kerja kantor yang nyaman		2,500,000	2,500,000		
2.7.1.2.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Terpeliharanya Kendaraan dinas Operasional		24,000,000	24,000,000		
2.7.1.2.2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Tersedianya alat-alat yang memadai		1,200,000	1,200,000		
2.7.1.2.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Ruang Kerja kantor yang nyaman		1,800,000	2,302,500		
2.7.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						-	18,000,000		
2.7.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan						-	18,000,000		
2.7.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						2,500,000	2,500,000		
2.7.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Perda APBD TA 2019		900,000	900,000		
2.7.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Perda APBD TA.2019		800,000	800,000		
2.7.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Perda APBD 2019		800,000	800,000		
2.7.1.15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi						6,100,000	6,100,000		
2.7.1.15.5	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri				Tercipta Kualitas dan Kuantitas Produksi		6,100,000	6,100,000		
2.7.1.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah						48,800,000	48,800,000		
2.7.1.16.4	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah				Tersedianya Database Industri yang Lebih Baik dan Terbitnya Sertifikat Halal IKM serta lagalitas izin usaha		48,800,000	48,800,000		
2.7.1.17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri						257,300,000	257,777,500		
2.7.1.17.1	Pembinaan kemampuan teknologi industri				meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi IKM		48,000,000	42,500,000		
2.7.1.17.2	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri				Meningkatnya Kualitas SDMProduk IKM dan Pelayanan Sentra IKM		209,300,000	215,277,500		
2.7.1.18	Program penataan struktur						8,550,000			

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	industri									
2.7.1.18.3	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir				Meningkatnya pemahaman IKM terhadap produksi industri hulu hilir		8,550,000			
2.7.1.19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial						105,000,000	105,000,000		
2.7.1.19.2	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat				Terciptanya sarana informasi industri yang dapat diakses masyarakat		105,000,000	105,000,000		
Dinas Transmigrasi							2,354,268,800	2,479,555,800		
	Belanja Tidak Langsung						1,531,809,000	1,632,096,000		
	Belanja Langsung						822,459,800	847,459,800		
2.8.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						383,229,800	413,525,800		
2.8.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				Terlaksananya administrasi surat menyurat		11,057,800	23,651,800		
2.8.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				Listrik Telpn Air dan Internet dapat digunakan sesuai kebutuhan		17,388,000	37,628,000		
2.8.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Terbayarnya Pajak mobil jabatan dan kendaraan dinas		1,800,000	1,800,000		
2.8.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Tertibnya Administrasi Keuangan		67,800,000	67,800,000		
2.8.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terpeliharanya Kebersihan Kantor		6,324,000	6,786,000		
2.8.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Terangnya Bangunan Kantor		560,000	560,000		
2.8.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Menambah wawasan pegawai Dinas Transmigrasi		4,800,000	2,400,000		
2.8.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi		200,000,000	200,000,000		
2.8.1.1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Umum				Tertibnya administrasi umum		73,500,000	72,900,000		
2.8.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						40,830,000	52,869,000		
2.8.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				Tersedianya sarana pendukung kantor		8,700,000	10,000,000		
2.8.1.2.10	Pengadaan mebeleur				Tersedianya sarana pendukung kantor		17,730,000	23,869,000		
2.8.1.2.2	Pemeliharaan rutin/berkala				Lancarnya Perksanaan		12,500,000	15,600,000		

Kode	Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3	mobil jabatan				Kegiatan					
2.8.1.2.2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Lancarnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		400,000	400,000		
2.8.1.2.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Lancarnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		1,500,000	3,000,000		
2.8.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						28,000,000	19,315,000		
2.8.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				Meningkatnya Pengetahuan aparatur pemerintah		28,000,000	19,315,000		
2.8.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						9,300,000	9,300,000		
2.8.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Tersedianya RKA RENJA dan LAKIP SKPD		2,750,000	2,750,000		
2.8.1.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Tersedianya Pelaporan Keuangan semesteran		3,275,000	3,275,000		
2.8.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun		3,275,000	3,275,000		
2.8.1.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi						18,700,000	23,250,000		
2.8.1.15.7	Pendataan Sarana dan Prasarana Lokasi Rencana Kawasan Transmigrasi				Tersedianya Data Sarana dan Prasarana Calon area Wilayah Transmigrasi		18,700,000	23,250,000		
2.8.1.16	Program Transmigrasi lokal						300,000,000	300,000,000		
2.8.1.16.4	Perencanaan Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP)				Terbukanya satuan kawasan pengembangan (rskp)		300,000,000	300,000,000		
2.8.1.18	Program Pembangunan Daerah Terpencil						42,400,000	29,200,000		
2.8.1.18.1	Penyediaan Lahan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi				Terbukanya Daerah Terpencil/Terisolasi		42,400,000	29,200,000		
	Jumlah						1,011,204,683,790	1,018,468,087,046		

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Palopo tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019.

Perubahan RKPD disusun dengan memperhatikan:

- RPJMN 2015-2019, dan Renstra Kementrian/Lembaga;
- RPJMD Kota Palopo 2018-2023 ;
- RPJPD Propinsi, Renstra SKPD Propinsi;
- RPJPD Kota Palopo tahun 2005 – 2025;
- Dokumen Prioritas Pembangunan Nasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan, dan pencapaian SDG's;
- Prioritas Nasional dan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Dokumen usulan masyarakat yang dihasilkan melalui Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Forum Gabungan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Setiap Unit Kerja (Perangkat Daerah) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, merata, berkualitas dan berkelanjutan

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangkainvestasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu unit kerja dan antar unit kerja, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses forum gabungan Perangkat Daerah dan musyawarah antar pelaku

pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang.

Untuk itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini menjadi satu hal yang penting dan strategis sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya.

Palopo, 17 Juli 2019

WALIKOTA PALOPO,



M. JUDAS AMIR